



**PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN**

LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PERDA

NO. : 5

TANGGAL : 3 Agustus 2021



**PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN VII



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	11
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	11
Landasan Hukum Penyusunan Laporan	12
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD	15
1. Ekonomi Makro	15
2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2020.....	22
3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	44
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	45
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan.	45
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	48
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	51
1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	51
2. Kebijakan Akuntansi.....	52
BAB V REALOKASI DAN REFOKUSING ANGGARAN	73
1. Perubahan Penjabaran I	73
2. Perubahan Penjabaran II	75
3. Perubahan Penjabaran III.....	77
4. Perubahan Penjabaran IV.....	78
5. Perubahan Penjabaran V	80
6. Perubahan Penjabaran VI.....	82
7. Perubahan Penjabaran VII	84
BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	90
1. Laporan Realisasi Anggaran	90
2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih	144
3. Neraca	145
4. Laporan Operasional.....	210
5. Laporan Arus Kas	225
6. Laporan Perubahan Ekuitas	239
BAB VII PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN.....	243
1. Keadaan Umum	243
2. Kerjasama Dengan Pihak Lain	250
3. Pembinaan Batas Wilayah	258
4. Penanggulangan Bencana	258
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	262
BAB VIII PENUTUP	270



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2016-2020.....	17
Tabel 2. 2	Garis Kemiskinan & Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan	19
Tabel 2. 3	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020	21
Tabel 2. 4	Kebijakan Belanja Berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah	39
Tabel 3. 1	Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	45
Tabel 3. 2	Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2019 dengan TA. 2020.....	46
Tabel 3. 3	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 per SKPD dan Realisasi Tahun 2019	46
Tabel 3. 4	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2020 per SKPD dan Realisasi Tahun 2019	47
Tabel 4. 1	Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020	51
Tabel 4. 2	Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang tidak tertagih	56
Tabel 4. 3	Piutang Retribusi Beserta Penyisihan Piutang tidak tertagih	56
Tabel 5. 1	Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dari Belanja Langsung.....	86
Tabel 5. 2	Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dari Belanja Tidak Terduga.....	86
Tabel 5. 3	Penanggulangan Pandemi Covid-19 dari Belanja Tidak Terduga (DID Tambahan Periode Pertama).....	87
Tabel 5. 4	Penanggulangan Pandemi Covid-19 dari Belanja Tidak Terduga (DID Tambahan Periode Kedua)	88
Tabel 6. 1	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	90
Tabel 6. 2	Perubahan Anggaran Tahun 2020	90
Tabel 6. 3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020	91
Tabel 6. 4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019	92
Tabel 6. 5	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019	93
Tabel 6. 6	Realisasi Pajak Hotel Tahun 2020 dan 2019	93
Tabel 6. 7	Realisasi Pajak Restoran tahun 2020 dan 2019	94
Tabel 6. 8	Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2020 dan 2019.....	95
Tabel 6. 9	Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020 dan 2019.....	96
Tabel 6. 10	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019.....	98
Tabel 6. 11	Realisasi Retribusi Umum Tahun 2020 dan 2019	98
Tabel 6. 12	Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2020 dan 2019	99
Tabel 6. 13	Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2020 dan 2019	100
Tabel 6. 14	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2020 dan 2019	101
Tabel 6. 15	Rincian lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019.....	102
Tabel 6. 16	Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2020 dan 2019.....	104
Tabel 6. 17	Realisasi Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain Tahun 2020 dan 2019	105
Tabel 6. 18	Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2020 dan 2019	105
Tabel 6. 19	Realisasi Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2020 dan 2019	106



Tabel 6. 20	Realisasi Pendapatan transfer Tahun 2020 dan 2019	107
Tabel 6. 21	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	108
Tabel 6. 22	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019	108
Tabel 6. 23	Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2020 dan 2019	110
Tabel 6. 24	Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 dan 2019	113
Tabel 6. 25	Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2020 dan 2019	114
Tabel 6. 26	Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 dan 2019	116
Tabel 6. 27	Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2020 dan 2019	116
Tabel 6. 28	Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan 2019	117
Tabel 6. 29	Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2020 dan 2019	118
Tabel 6. 30	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019	119
Tabel 6. 31	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019	120
Tabel 6. 32	Realisasi Belanja Honorarium PNS Tahun 2020 dan 2019	123
Tabel 6. 33	Realisasi Belanja Pegawai Dana BLUD Tahun 2020	124
Tabel 6. 34	Realisasi Belanja barang Tahun 2020 dan 2019	125
Tabel 6. 35	Realisasi Belanja barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2020	126
Tabel 6. 36	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2020	127
Tabel 6. 37	Realisasi Belanja Barang Hibah Tahun 2020 dan 2019	128
Tabel 6. 38	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan 2019	129
Tabel 6. 39	Realisasi Belanja Barang Bantuan Sosial Tahun 2020	130
Tabel 6. 40	Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019	131
Tabel 6. 41	Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2020	131
Tabel 6. 42	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019	132
Tabel 6. 43	Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2020 dan 2019	133
Tabel 6. 44	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2020	134
Tabel 6. 45	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020	135
Tabel 6. 46	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020	136
Tabel 6. 47	Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun 2020 dan 2019	136
Tabel 6. 48	Realisasi Pembiayaan daerah Tahun 2020 dan 2019	138
Tabel 6. 49	Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah Tahun 2020 dan 2019	139
Tabel 6. 50	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah Tahun 2020 dan 2019	140
Tabel 6. 51	Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2020 dan 2019	141
Tabel 6. 52	Uraian Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2020 dan 2019	142
Tabel 6. 53	Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 dan 2019	145
Tabel 6. 54	Aset Tahun 2020 dan 2019	146
Tabel 6. 55	Aset Lancar Tahun 2020 dan 2019	146
Tabel 6. 56	Saldo per tanggal 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019	147
Tabel 6. 57	Saldo Kas Lainnya – Saldo Dana BOS per 31 Desember 2020	150
Tabel 6. 58	Piutang Daerah Tahun 2020 dan 2019	153
Tabel 6. 59	Umur Piutang Pajak beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	154
Tabel 6. 60	Umur Piutang Retribusi beserta Piutang Tidak Tertagih	154
Tabel 6. 61	Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020	155
Tabel 6. 62	Penghapusan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020	155
Tabel 6. 63	Piutang Pajak berdasarkan Umur Piutang	155
Tabel 6. 64	Penyisihan Piutang Pajak berdasarkan Umur Piutang	156



Tabel 6. 65	Saldo piutang pajak setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih...	156
Tabel 6. 66	Saldo Piutang Pajak Bersih per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019	156
Tabel 6. 67	Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2020.....	157
Tabel 6. 68	Rincian Penghapusan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020.....	158
Tabel 6. 69	Piutang Retribusi berdasarkan Umur Piutang	158
Tabel 6. 70	Saldo Piutang Retribusi dan Penyisihan piutang Retribusi Tidak tertagih..	159
Tabel 6. 71	Saldo Piutang Retribusi Bersih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	159
Tabel 6. 72	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	160
Tabel 6. 73	Rincian Piutang Lainnya	161
Tabel 6. 74	Saldo Persediaan per 31 Desember 2020.....	162
Tabel 6. 75	Persediaan Berdasarkan OPD per 31 Desember 2020.....	162
Tabel 6. 76	Penerimaan Persediaan Berdasarkan OPD per 31 Desember 2020	164
Tabel 6. 77	Persediaan Bahan per 31 Desember 2020.....	164
Tabel 6. 78	Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2020	165
Tabel 6. 79	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2020 ..	165
Tabel 6. 80	Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2020	165
Tabel 6. 81	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2020.....	166
Tabel 6. 82	Persediaan Natura Dan Pakan per 31 Desember 2020	166
Tabel 6. 83	Persediaan Penelitian dan Pipa per 31 Desember 2020.....	166
Tabel 6. 84	Persediaan Pipa per 31 Desember 2020.....	166
Tabel 6. 85	Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019	167
Tabel 6. 86	Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019	167
Tabel 6. 87	Dana Bergulir – KKP (Ketahanan Pangan dan Perikanan) per 31 Desember 2020	168
Tabel 6. 88	Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	168
Tabel 6. 89	Dana Bergulir – Trading House	169
Tabel 6. 90	Dana Bergulir – Simpan Pinjam Koperasi	169
Tabel 6. 91	Investasi Permanen Pemerintah Kota Pekalongan	170
Tabel 6. 92	Perhitungan Investasi Permanen Pemerintah Kota Pekalongan	171
Tabel 6. 93	Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan	172
Tabel 6. 94	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap	173
Tabel 6. 95	Penghapusan Aset Tetap Tanah.....	174
Tabel 6. 96	Bidang Tanah yang Dicatat pada Aset Lainnya sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	175
Tabel 6. 97	Bidang Tanah yang Dialihkan	176
Tabel 6. 98	Aset yang diserahkan dari Kabupaten Pekalongan.....	176
Tabel 6. 99	Tanah yang Masih Sengketa dengan pihak Ketiga.....	177
Tabel 6. 100	Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin.....	178
Tabel 6. 101	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa.....	179
Tabel 6. 102	Reklasifikasi Tambah Peralatan Mesin 2020.....	180
Tabel 6. 103	Reklasifikasi Kurang Peralatan Mesin Tahun 2019.....	182
Tabel 6. 104	Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	182



Tabel 6. 105 Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020	184
Tabel 6. 106 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	185
Tabel 6. 107 Inventarisasi Gedung dan Bangunan.....	185
Tabel 6. 108 Transfer Masuk Gedung dan Bangunan.....	186
Tabel 6. 109 Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	187
Tabel 6. 110 Reklasifikasi Kurang Gedung Dan Bangunan	187
Tabel 6. 111 Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi	188
Tabel 6. 112 Transfer Keluar Gedung dan Bangunan.....	188
Tabel 6. 113 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	189
Tabel 6. 114 Koreksi Tambah Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	190
Tabel 6. 115 Koreksi Tambah Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	190
Tabel 6. 116 Reklasifikasi Tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi	191
Tabel 6. 117 Inventarisasi Jalan, Jaringan dan Irigasi	192
Tabel 6. 118 Koreksi kurang saldo awal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	193
Tabel 6. 119 Reklasifikasi Rekening Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	193
Tabel 6. 120 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2019.....	194
Tabel 6. 121 Belanja Barang Jasa Aset Tetap Lainnya.....	195
Tabel 6. 122 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Lainnya	195
Tabel 6. 123 Penghapusan Barang Aset Tetap Lainnya	196
Tabel 6. 124 Reklasifikasi Kurang Aset Tetap lainnya.....	196
Tabel 6. 125 Penambahan Kontruksi dalam Pengerjaan.....	197
Tabel 6. 126 Daftar Kontruksi dalam Pengerjaan.....	198
Tabel 6. 127 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020.....	199
Tabel 6. 128 Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020	201
Tabel 6. 129 Pengadaan Aset Tak Berwujud Dari Belanja Barang Jasa.....	202
Tabel 6. 130 Pengadaan Aset Tak Berwujud Dari Belanja Barang Jasa.....	203
Tabel 6. 131 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjam Pakaiakan kepada Pihak Ketiga	204
Tabel 6. 132 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020	205
Tabel 6. 133 Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2020.....	206
Tabel 6. 134 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2020	206
Tabel 6. 135 Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2020	208
Tabel 6. 136 Saldo Utang Berdasar Jenis Belanja Per 31 Desember 2020	208
Tabel 6. 137 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2020	209
Tabel 6. 138 Saldo Utang Uang Jaminan Per 31 Desember 2020	209
Tabel 6. 139 Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2020.....	210
Tabel 6. 140 Penjelasan Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019	210
Tabel 6. 141 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019.....	211
Tabel 6. 142 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020 dan 2019.....	211
Tabel 6. 143 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2020 dan 2019	212
Tabel 6. 144 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO Tahun 2020 dan 2019.....	212
Tabel 6. 145 Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2020 dan 2019.....	213
Tabel 6. 146 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2020 dan 2019.....	213



Tabel 6. 147 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2020 dan 2019	214
Tabel 6. 148 Realisasi Penerimaan bagi Hasil pajak-LO Tahun 2020 dan 2019.....	214
Tabel 6. 149 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA – LO Tahun 2020 dan 2019	215
Tabel 6. 150 Realisasi Penerimaan DAK– LO Tahun 2020 dan 2019	215
Tabel 6. 151 Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik – LO Tahun 2020 dan 2019.....	216
Tabel 6. 152 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2020 dan 2019	216
Tabel 6. 153 Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2020 dan 2019	217
Tabel 6. 154 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2020 dan 2019	217
Tabel 6. 155 Beban – LO Tahun 2020 dan 2019	217
Tabel 6. 156 Beban Operasi – LO Tahun 2020 dan 2019.....	218
Tabel 6. 157 Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2020 dan 2019	218
Tabel 6. 158 Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO Tahun 2020 dan 2019.....	219
Tabel 6. 159 Realisasi Persediaan Tahun 2020 dan 2019.....	219
Tabel 6. 160 Rincian Beban Persediaan Tahun 2020	219
Tabel 6. 161 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019	221
Tabel 6. 162 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019.....	221
Tabel 6. 163 Realisasi Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019	222
Tabel 6. 164 Realisasi Beban Hibah – LO Tahun 2020 dan 2019.....	222
Tabel 6. 165 Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019	223
Tabel 6. 166 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019.....	223
Tabel 6. 167 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2020 dan 2019.....	225
Tabel 6. 168 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019	225
Tabel 6. 169 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019.....	226
Tabel 6. 170 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019.....	230
Tabel 6. 171 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019.....	233
Tabel 6. 172 Arus Kas dari Aktivitas Investasi berasal Penjualan Aset Tetap	233
Tabel 6. 173 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.....	234
Tabel 6. 174 Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 dan 2019.....	236
Tabel 6. 175 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan.....	237
Tabel 6. 176 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	237
Tabel 6. 177 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris.....	237
Tabel 6. 178 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris.....	238
Tabel 6. 179 Saldo Akhir Kas Tahun 2020.....	239
Tabel 6. 180 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	239
Tabel 6. 181 Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	240
Tabel 7. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2020.....	244
Tabel 7. 2 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan.....	244
Tabel 7. 3 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	245
Tabel 7. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	245
Tabel 7. 5 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	246



Tabel 7.6	Daftar Anggota DPRD Kota Pekalongan Periode 2020 - 2024.....	247
Tabel 7.7	Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan	248
Tabel 7.8	Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Tingkat Pendidikan	249
Tabel 7.9	Rekapitulasi PNS/CPNS Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi.....	249
Tabel 7.10	Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2019 s/d 2020.....	250
Tabel 7.11	Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD).....	250
Tabel 7.12	Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	251
Tabel 7.13	Sinergi Pusat dengan Daerah.....	257
Tabel 7.14	Kejadian Bencana Tahun 2020.....	258
Tabel 7.15	Realisasi Kolaborasi Penanganan Kumuh Kota Pekalongan Tahun 2020 .	266
Tabel 7.16	Kegiatan Pelatihan UPTD BLK Tahun 2020	268



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%).....	18
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 (000 Jiwa)	19
Gambar 2.3	Nilai IPM 2016 - 2020	21
Gambar 2.4	Nilai Gini Ratio 2011 - 2015	22
Gambar 6 1	Proporsi Jenis Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah TA. 2020	91
Gambar 6. 2	Proporsi Masing-Masing Pos Belanja dan Transfer terhadap Total Belanja dan Transfer	118
Gambar 7. 1	Peta Administratif Kota Pekalongan.....	243
Gambar 7. 2	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Berdasarkan Kecamatan (Jiwa)	245
Gambar 7. 3	Tahapan Kegiatan Kotaku Tingkat Kota/Kabupaten	265
Gambar 7. 4	Tahapan Kegiatan Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa	266



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2020	Realisasi s/d 31 Des 2020	%	Realisasi 2019
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.1.1.1	172.993.386.000,00	229.867.935.360,95	132,88	212.777.435.293,61
Pendapatan Pajak Daerah	6.1.1.1.1	65.190.000.000,00	76.255.221.742,00	116,97	87.578.474.262,00
Pendapatan Retribusi Daerah	6.1.1.1.2	13.070.643.000,00	14.870.124.919,00	113,77	16.667.656.492,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.1.1.1.3	5.358.000.000,00	5.821.083.050,00	108,64	6.101.173.105,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.1.1.1.4	89.374.743.000,00	132.921.505.649,95	148,72	102.430.131.434,61
PENDAPATAN TRANSFER	6.1.1.2	714.117.924.000,00	700.838.013.854,00	98,14	715.761.199.193,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	6.1.1.2.1	571.848.011.000,00	567.310.188.409,00	99,21	610.332.820.948,00
Dana Bagi Hasil Pajak	6.1.1.2.1.1	29.147.373.000,00	27.182.869.066,00	93,26	17.751.480.700,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.1.1.2.1.2	2.701.611.000,00	1.780.895.008,00	65,92	1.275.750.200,00
Dana Alokasi Umum	6.1.1.2.1.3	436.146.579.000,00	433.354.907.000,00	99,36	475.842.089.000,00
Dana Alokasi Khusus	6.1.1.2.1.4	103.852.448.000,00	104.991.517.335,00	101,10	115.463.501.048,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.1.1.2.2	58.355.913.000,00	58.355.913.000,00	100,00	33.260.942.000,00
Dana Penyesuaian		58.355.913.000,00	58.355.913.000,00	100,00	33.260.942.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	6.1.1.2.3	83.914.000.000,00	75.171.912.445,00	89,58	72.167.436.245,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.1.1.2.3.1	72.000.000.000,00	63.377.912.445,00	88,02	72.167.436.245,00
Bantuan Keuangan Provinsi	6.1.1.2.3.2	11.914.000.000,00	11.794.000.000,00	98,99	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.1.1.3	22.496.400.000,00	22.449.445.400,00	99,79	43.085.829.634,00
Pendapatan Hibah	6.1.1.3.1	22.496.400.000,00	22.449.445.400,00	99,79	23.949.677.589,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	19.136.152.045,00
JUMLAH PENDAPATAN		909.607.710.000,00	953.155.394.614,95	104,79	971.624.464.120,61
BELANJA					
BELANJA OPERASI	6.1.2.1	809.711.074.000,00	760.543.104.727,56	93,93	771.512.589.320,00
Belanja Pegawai	6.1.2.1.1	424.636.365.000,00	394.421.563.850,00	92,88	390.898.339.975,00
Belanja Barang	6.1.2.1.2	340.770.147.000,00	327.664.407.877,56	96,15	338.655.157.845,00
Bunga		0,00	0,00	0,00	6.803.500,00
Hibah	6.1.2.1.3	40.956.062.000,00	36.250.151.000,00	88,51	29.310.400.000,00
Bantuan Sosial	6.1.2.1.4	3.348.500.000,00	2.206.982.000,00	65,91	11.920.375.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	721.513.000,00
BELANJA MODAL	6.1.2.2	139.410.651.000,00	126.926.093.953,00	91,04	182.153.984.579,00
Belanja Tanah	6.1.2.2.1	14.074.216.000,00	13.144.232.065,00	93,39	3.912.172.520,00
Belanja Peralatan dan Mesin	6.1.2.2.2	31.959.798.000,00	29.045.998.699,00	90,88	35.522.056.921,00
Belanja Gedung dan Bangunan	6.1.2.2.3	35.721.198.000,00	33.911.226.174,00	94,93	70.163.070.715,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.1.2.2.4	56.887.973.000,00	50.106.236.575,00	88,08	68.876.027.946,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.1.2.2.5	692.066.000,00	644.610.440,00	93,14	3.299.127.177,00
Belanja Aset Lainnya	6.1.2.2.6	75.400.000,00	73.790.000,00	97,86	381.529.300,00
BELANJA TAK TERDUGA	6.1.2.3	63.616.165.000,00	57.371.261.995,00	90,18	730.438.928,00
Belanja Tak Terduga		63.616.165.000,00	57.371.261.995,00	90,18	730.438.928,00
JUMLAH BELANJA		1.012.737.890.000,00	944.840.460.675,56	93,30	954.397.012.827,00
TRANSFER					
JUMLAH TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.012.737.890.000,00	944.840.460.675,56	93,30	954.397.012.827,00
SURPLUS / (DEFISIT)		-103.130.180.000,00	8.314.933.939,39	-8,06	17.227.451.293,61
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.1.3.1	107.651.710.000,00	108.747.997.650,61	101,02	92.028.388.994,00
Penggunaan SiLPA	6.1.3.1.1	95.101.710.000,00	95.101.710.311,61	100,00	87.928.207.176,00
Pencairan Dana Cadangan	6.1.3.1.2	12.550.000.000,00	12.704.351.488,00	101,23	300.000.000,00
Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	6.1.3.1.3	0,00	941.935.851,00	0,00	2.000.181.818,00
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah		0,00	941.935.851,00	0,00	2.000.181.818,00

Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2020	Realisasi s/d 31 Des 2020	%	Realisasi 2019
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.1.3.2	4.521.530.000,00	4.520.630.000,00	99,98	14.154.129.976,00
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	4.607.388.226,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.1.3.2.1	4.518.000.000,00	4.518.000.000,00	100,00	7.742.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	6.1.3.2.2	3.530.000,00	2.630.000,00	74,50	1.804.741.750,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		3.530.000,00	2.630.000,00	74,50	4.741.750,00
PEMBIAYAAN NETTO		103.130.180.000,00	104.227.367.650,61	101,06	77.874.259.018,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	6.1.4	0,00	112.542.301.590,00	0,00	95.101.710.311,61

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.


WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL		95.101.710.311,61	87.928.207.176,00
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	6.2.1	-95.101.710.311,61	-87.928.207.176,00
JUMLAH SUB TOTAL (1+2)		0,00	0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	6.2.2	112.542.301.590,00	95.101.710.311,61
JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3)		112.542.301.590,00	95.101.710.311,61
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA		0	0
LAIN-LAIN		0	0
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (1+2+3+4+5)	6.2.3	112.542.301.590,00	95.101.710.311,61

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	Jumlah	%
ASET	6.3.1				
ASET LANCAR	6.3.1.1				
Kas dan Setara Kas	6.3.1.1.1	112.542.862.590,00	95.101.710.311,61	17.441.152.278,39	18,34
Kas di Kas Daerah	6.3.1.1.1.1	83.881.778.889,00	26.884.779.309,00	56.996.999.580,00	212,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.3.1.1.1.2	299.838,00	0,00	299.838,00	100,00
Kas di Bendahara Penerimaan	6.3.1.1.1.3	701.500,00	10.805.000,00	-10.103.500,00	-93,51
Kas di BLUD	6.3.1.1.1.4	27.132.720.550,00	10.899.968.384,61	16.232.752.165,39	148,92
Kas Lainnya	6.3.1.1.1.5	1.527.361.813,00	2.306.157.618,00	-778.795.805,00	-33,77
Setara Kas		0,00	55.000.000.000,00	-55.000.000.000,00	-100,00
Investasi Jangka Pendek	6.3.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang	6.3.1.1.3	38.826.307.094,86	43.378.338.498,57	-4.552.031.403,71	-10,49
Piutang Pendapatan		52.026.205.268,50	45.002.682.491,50	7.023.522.777,00	15,61
Piutang Pajak Daerah	6.3.1.1.3.1	36.373.126.790,00	31.912.580.850,00	4.460.545.940,00	13,98
Piutang Retribusi	6.3.1.1.3.2	5.961.272.467,50	5.981.129.734,50	-19.857.267,00	-0,33
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	6.3.1.1.3.3	2.115.427.950,00	5.357.622.501,00	-3.242.194.551,00	-60,52
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	6.3.1.1.3.4	7.576.378.061,00	1.751.349.406,00	5.825.028.655,00	332,60
Piutang Lainnya	6.3.1.1.3.5	18.469.099.136,54	27.348.911.387,05	-8.879.812.250,51	-32,47
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		18.469.099.136,54	27.348.911.387,05	-8.879.812.250,51	-32,47
Penyisihan Piutang	6.3.1.1.3.6	-31.668.997.310,18	-28.973.255.379,98	-2.695.741.930,20	9,30
Penyisihan Piutang Pendapatan		-22.477.909.627,76	-20.687.062.313,35	-1.790.847.314,41	8,66
Penyisihan Piutang Lainnya		-9.191.087.682,42	-8.286.193.066,63	-904.894.615,79	10,92
Belanja Dibayar Dimuka	6.3.1.1.4	43.753.050,00	135.573.791,67	-91.820.741,67	-67,73
Belanja Dibayar Dimuka		43.753.050,00	135.573.791,67	-91.820.741,67	-67,73
Persediaan	6.3.1.1.5	36.747.736.420,75	15.594.536.097,85	21.153.200.322,90	135,64
Persediaan		36.747.736.420,75	15.594.536.097,85	21.153.200.322,90	135,64
JUMLAH ASET LANCAR		188.160.659.155,61	154.210.158.699,70	33.950.500.455,91	22,02
INVESTASI JANGKA PANJANG	6.3.1.2				
Investasi Nonpermanen	6.3.1.2.1	277.066.500,00	1.197.696.251,00	-920.629.751,00	-76,87
Investasi dalam Proyek Pembangunan	6.3.1.2.1.1	296.274.000,00	1.000.000.000,00	-703.726.000,00	-70,37
Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir	6.3.1.2.1.2	264.765.850,00	482.586.701,00	-217.820.851,00	-45,14
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	6.3.1.2.1.3	-283.973.350,00	-284.890.450,00	917.100,00	-0,32
Investasi Permanen	6.3.1.2.2	95.398.133.574,49	90.950.180.931,26	4.447.952.643,23	4,89
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.3.1.2.2.1	95.092.933.574,49	90.644.980.931,26	4.447.952.643,23	4,91
Investasi Permanen Lainnya	6.3.1.2.2.2	305.200.000,00	305.200.000,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		95.675.200.074,49	92.147.877.182,26	3.527.322.892,23	3,83
ASET TETAP	6.3.1.3				
Tanah	6.3.1.3.1	1.333.444.418.599,37	1.311.204.062.019,37	22.240.356.580,00	1,70
Tanah		1.333.444.418.599,37	1.311.204.062.019,37	22.240.356.580,00	1,70
Peralatan dan Mesin	6.3.1.3.2	540.269.348.622,99	455.160.610.773,76	85.108.737.849,23	18,70
Peralatan dan Mesin		540.269.348.622,99	455.160.610.773,76	85.108.737.849,23	18,70
Gedung dan Bangunan	6.3.1.3.3	805.605.680.198,47	763.793.036.482,84	41.812.643.715,63	5,47
Gedung dan Bangunan		805.605.680.198,47	763.793.036.482,84	41.812.643.715,63	5,47
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.3.1.3.4	883.795.568.762,69	829.609.216.352,69	54.186.352.410,00	6,53
Jalan, Irigasi dan Jaringan		883.795.568.762,69	829.609.216.352,69	54.186.352.410,00	6,53
Aset Tetap Lainnya	6.3.1.3.5	33.939.771.109,00	35.865.985.752,78	-1.926.214.643,78	-5,37
Aset Tetap Lainnya		33.939.771.109,00	35.865.985.752,78	-1.926.214.643,78	-5,37
Konstruksi dalam Pengerjaan	6.3.1.3.6	1.169.230.299,00	16.583.297.199,00	-15.414.066.900,00	-92,95
Konstruksi dalam Pengerjaan		1.169.230.299,00	16.583.297.199,00	-15.414.066.900,00	-92,95
Akumulasi Penyusutan	6.3.1.3.7	-1.105.098.841.304,69	-959.644.184.898,21	-145.454.656.406,48	15,16
Akumulasi Penyusutan		-1.105.098.841.304,69	-959.644.184.898,21	-145.454.656.406,48	15,16
JUMLAH ASET TETAP		2.493.125.176.286,83	2.452.572.023.682,23	40.553.152.604,60	1,65
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan		0,00	12.704.351.488,00	-12.704.351.488,00	-100,00
Dana Cadangan		0,00	12.704.351.488,00	-12.704.351.488,00	-100,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	12.704.351.488,00	-12.704.351.488,00	-100,00
ASET LAINNYA	6.3.1.4				
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.3.1.4.1	12.328.020.000,00	12.582.540.000,00	-254.520.000,00	-2,02
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		12.328.020.000,00	12.582.540.000,00	-254.520.000,00	-2,02

Uraian	Reff CaLK	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	Jumlah	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	6.3.1.4.2.2	-3.659.262.963,85	-3.108.056.137,25	-551.206.826,60	17,73
Aset Lain-lain	6.3.1.4.3	131.373.354.901,00	130.956.964.761,31	416.390.139,69	0,32
Aset Lain-lain	6.3.1.4.3.1	155.961.866.471,00	154.442.440.256,00	1.519.426.215,00	0,98
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	6.3.1.4.3.2	-24.588.511.570,00	-23.485.475.494,69	-1.103.036.075,31	4,70
Uang Jaminan	6.3.1.4.4	227.003.662,00	217.276.062,00	9.727.600,00	4,48
Uang Jaminan		227.003.662,00	217.276.062,00	9.727.600,00	4,48
JUMLAH ASET LAINNYA		144.956.415.871,20	145.039.811.623,11	-83.395.751,91	-0,06
JUMLAH ASET		2.921.917.451.388,13	2.856.674.222.675,30	65.243.228.712,83	2,28
KEWAJIBAN	6.3.2.1				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		561.000,00	0,00	561.000,00	100,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		561.000,00	0,00	561.000,00	100,00
Utang Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	6.3.2.1.1	3.224.591.670,00	1.373.121.791,34	1.851.469.878,66	134,84
Pendapatan Diterima Dimuka		3.224.591.670,00	1.373.121.791,34	1.851.469.878,66	134,84
Utang Belanja	6.3.2.1.2	14.154.825.778,11	24.211.993.061,98	-10.057.167.283,87	-41,54
Utang Belanja		14.154.825.778,11	24.211.993.061,98	-10.057.167.283,87	-41,54
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.3.2.1.3	298.095.582,00	256.423.590,00	41.671.992,00	16,25
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.3.2.1.3.1	71.091.920,00	39.147.528,00	31.944.392,00	81,60
Utang Jaminan	6.3.2.1.3.2	227.003.662,00	217.276.062,00	9.727.600,00	4,48
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		17.678.074.030,11	25.841.538.443,32	-8.163.464.413,21	-31,59
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		17.678.074.030,11	25.841.538.443,32	-8.163.464.413,21	-31,59
EKUITAS					
Ekuitas	6.3.2.2	2.904.239.377.358,02	2.830.832.684.231,98	73.406.693.126,04	2,59
Ekuitas		2.904.239.377.358,02	2.830.832.684.231,98	73.406.693.126,04	2,59
JUMLAH EKUITAS		2.904.239.377.358,02	2.830.832.684.231,98	73.406.693.126,04	2,59
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.921.917.451.388,13	2.856.674.222.675,30	65.243.228.712,83	2,28

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.


WALIKOTA PEKALONGAN,
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	6.4.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	6.4.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	6.4.1.1.1.1	81.244.763.202,00	91.299.275.643,00	-10.054.512.441,00	-11,01
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	6.4.1.1.1.2	15.671.187.835,67	17.554.406.636,00	-1.883.218.800,33	-10,73
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	6.4.1.1.1.3	5.751.035.693,23	5.856.763.925,89	-105.728.232,66	-1,81
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	6.4.1.1.1.4	174.583.433.329,51	111.166.751.640,49	63.416.681.689,02	57,05
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		277.250.420.060,41	225.877.197.845,38	51.373.222.215,03	22,74
PENDAPATAN TRANSFER - LO	6.4.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	6.4.1.1.2.1				
Bagi Hasil Pajak	6.4.1.1.2.1.1	24.160.712.490,00	22.557.670.368,00	1.603.042.122,00	7,11
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	6.4.1.1.2.1.2	1.562.760.639,00	1.827.183.033,00	-264.422.394,00	-14,47
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	6.4.1.1.2.1.3	433.354.907.000,00	475.842.089.000,00	-42.487.182.000,00	-8,93
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	6.4.1.1.2.1.4	29.388.599.718,00	49.033.606.513,00	-19.645.006.795,00	-40,06
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	6.4.1.1.2.1.5	75.602.917.617,00	66.429.894.535,00	9.173.023.082,00	13,81
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		564.069.897.464,00	615.690.443.449,00	-51.620.545.985,00	-8,38
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	6.4.1.1.2.2	58.355.913.000,00	33.260.942.000,00	25.094.971.000,00	75,45
Dana Penyesuaian - LO		58.355.913.000,00	33.260.942.000,00	25.094.971.000,00	75,45
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		58.355.913.000,00	33.260.942.000,00	25.094.971.000,00	75,45
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	6.4.1.1.2.3	69.202.941.100,00	70.585.760.651,00	-1.382.819.551,00	-1,96
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		69.202.941.100,00	70.585.760.651,00	-1.382.819.551,00	-1,96
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		69.202.941.100,00	70.585.760.651,00	-1.382.819.551,00	-1,96
Bantuan Keuangan - LO	6.4.1.1.2.4	11.794.000.000,00	19.136.152.045,00	-7.342.152.045,00	-38,37
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO		11.794.000.000,00	19.136.152.045,00	-7.342.152.045,00	-38,37
Jumlah Bantuan Keuangan - LO		11.794.000.000,00	19.136.152.045,00	-7.342.152.045,00	-38,37
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO		703.422.751.564,00	738.673.298.145,00	-35.250.546.581,00	-4,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	6.4.1.1.3				
Pendapatan Hibah - LO		57.278.677.903,30	33.087.278.899,40	24.191.399.003,90	73,11
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		57.278.677.903,30	33.087.278.899,40	24.191.399.003,90	73,11
JUMLAH PENDAPATAN - LO		1.037.951.849.527,71	997.637.774.889,78	40.314.074.637,93	4,04
BEBAN	6.4.1.2				
BEBAN OPERASI - LO	6.4.1.2.1				
Beban Pegawai - LO	6.4.1.2.1.1	371.113.554.600,92	372.550.705.965,00	-1.437.151.364,08	-0,39
Beban Barang dan Jasa					
Beban Persediaan	6.4.1.2.1.2	72.858.403.038,92	72.892.414.571,93	-34.011.533,01	-0,05
Beban Pemeliharaan	6.4.1.2.1.3	8.999.217.987,00	12.494.978.093,00	-3.495.760.106,00	-27,98
Beban Perjalanan Dinas	6.4.1.2.1.4	23.701.265.071,00	28.731.743.848,00	-5.030.478.777,00	-17,51
Beban Jasa	6.4.1.2.1.5	243.852.545.261,27	250.552.896.845,04	-6.700.351.583,77	-2,67
Jumlah Beban Barang dan Jasa		349.411.431.358,19	364.672.033.357,97	-15.260.601.999,78	-4,18
Beban Bunga		0,00	6.803.500,00	-6.803.500,00	-100,00
Beban Hibah	6.4.1.2.1.6	41.505.852.550,00	29.310.400.000,00	12.195.452.550,00	41,61
Beban Bantuan Sosial	6.4.1.2.1.7	36.916.624.370,00	11.920.375.000,00	24.996.249.370,00	209,69
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.4.1.2.1.8	158.986.195.582,97	103.276.506.692,86	55.709.688.890,11	53,94
Beban Penyisihan Piutang	6.4.1.2.1.9	4.396.325.028,96	1.498.760.305,90	2.897.564.723,06	193,33
Beban Lain-lain	6.4.1.2.1.10	7.358.949,38	187,19	7.358.762,19	3.931.172,71
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO		962.337.342.440,42	883.235.585.008,92	79.101.757.431,50	8,96

Uraian	Reff CaLK	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
BEBAN TRANSFER	6.4.1.2.2				
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	721.513.000,00	-721.513.000,00	-100,00
JUMLAH BEBAN TRANSFER		0,00	721.513.000,00	-721.513.000,00	-100,00
JUMLAH BEBAN		962.337.342.440,42	883.957.098.008,92	78.380.244.431,50	8,87
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	6.4.1.3	75.614.507.087,29	113.680.676.880,86	-38.066.169.793,57	-33,49
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO					
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	6.4.1.4				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	6.4.1.4.1	3.938.025.498,48	3.717.878.692,61	220.146.805,87	5,92
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	6.4.1.4.2	698.440.838,32	2.970.603.524,47	-2.272.162.686,15	-76,49
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL		4.636.466.336,80	6.688.482.217,08	-2.052.015.880,28	-30,68
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	6.4.2	-4.636.466.336,80	-6.688.482.217,08	2.052.015.880,28	-30,68
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		70.978.040.750,49	106.992.194.663,78	-36.014.153.913,29	-33,66
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO					
JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	6.4.3				
Beban Luar Biasa		131.916.951,59	730.438.928,00	-598.521.976,41	-81,94
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		131.916.951,59	730.438.928,00	-598.521.976,41	-81,94
SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA		-131.916.951,59	-730.438.928,00	598.521.976,41	-81,94
SURPLUS / DEFISIT LO		70.846.123.798,90	106.261.755.735,78	-35.415.631.936,88	-33,33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.


WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAI



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	6.5.1		
Arus Masuk Kas	6.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	6.5.1.1.1	76.255.221.742,00	87.578.474.262,00
Penerimaan Retribusi Daerah	6.5.1.1.2	14.880.228.419,00	16.657.441.492,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.5.1.1.3	5.821.083.050,00	6.101.173.105,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	6.5.1.1.4	132.641.849.637,95	102.151.706.347,61
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	6.5.1.1.5	27.182.869.066,00	17.751.480.700,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.5.1.1.6	1.780.895.008,00	1.275.750.200,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	6.5.1.1.7	433.354.907.000,00	475.842.089.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	6.5.1.1.8	104.991.517.335,00	115.463.501.048,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	6.5.1.1.9	58.355.913.000,00	33.260.942.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.5.1.1.10	63.377.912.445,00	72.167.436.245,00
Penerimaan Hibah	6.5.1.1.11	22.449.445.400,00	23.949.677.589,00
Penerimaan Lainnya	6.5.1.1.12	11.794.000.000,00	19.136.152.045,00
Jumlah Arus Masuk Kas		952.885.842.102,95	971.335.824.033,61
Arus Keluar Kas	6.5.1.2	0,00	0,00
Pembayaran Pegawai	6.5.1.2.1	394.421.563.850,00	390.898.339.975,00
Pembayaran Barang	6.5.1.2.2	327.664.407.877,56	338.655.157.845,00
Pembayaran Bunga	6.5.1.2.3	0,00	6.803.500,00
Pembayaran Hibah	6.5.1.2.4	36.250.151.000,00	29.310.400.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	6.5.1.2.5	2.206.982.000,00	11.920.375.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	6.5.1.2.6	0,00	721.513.000,00
Pembayaran Tak Terduga	6.5.1.2.7	57.371.261.995,00	730.438.928,00
Jumlah Arus Keluar Kas		817.914.366.722,56	772.243.028.248,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		134.971.475.380,39	199.092.795.785,61
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	6.5.2		
Arus Masuk Kas	6.5.2.1		
Penjualan Aset Tetap	6.5.2.1.1	279.356.174,00	279.230.774,00
Pencairan Dana Cadangan	6.5.2.1.2	12.704.351.488,00	300.000.000,00
Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah	6.5.2.1.3	941.935.851,00	2.000.181.818,00
Jumlah Arus Masuk Kas		13.925.643.513,00	2.579.412.592,00
Arus Keluar Kas	6.5.2.2		
Perolehan Tanah	6.5.2.2.1	13.144.232.065,00	3.912.172.520,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	6.5.2.2.2	26.584.477.482,00	35.449.652.521,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	6.5.2.2.3	36.371.747.391,00	70.221.428.115,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.5.2.2.4	50.106.236.575,00	68.876.027.946,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.5.2.2.5	645.610.440,00	3.299.732.177,00
Perolehan Aset Lainnya	6.5.2.2.6	73.790.000,00	394.971.300,00
Pembentukan Dana Cadangan	6.5.2.2.7	0,00	4.607.388.226,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.5.2.2.8	4.518.000.000,00	7.742.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		131.444.093.953,00	194.503.372.805,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		-117.518.450.440,00	-191.923.960.213,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	6.5.3		
Arus Masuk Kas	6.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	1.800.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	1.800.000.000,00

Uraian	Reff CaLK	2020	2019
Arus Keluar Kas	6.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga	6.5.3.2.1	0,00	1.800.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	6.5.3.2.2	2.630.000,00	4.741.750,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.630.000,00	1.804.741.750,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		-2.630.000,00	-4.741.750,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	6.5.4		
Arus Masuk Kas	6.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		61.026.210.308,11	57.835.705.918,00
Jumlah Arus Masuk Kas		61.026.210.308,11	57.835.705.918,00
Arus Keluar Kas	6.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		61.025.649.308,11	57.837.216.373,00
Jumlah Arus Keluar Kas		61.025.649.308,11	57.837.216.373,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		561.000,00	-1.510.455,00
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE		17.450.955.940,39	7.162.583.367,61
SALDO AWAL KAS		95.090.905.311,61	87.928.321.944,00
SALDO AKHIR KAS		112.541.861.252,00	95.090.905.311,61
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		701.500,00	10.805.000,00
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		299.838,00	0,00
SALDO AKHIR KAS DI BUD		83.881.778.889,00	81.884.779.309,00
SALDO AKHIR KAS DI BLUD		27.132.720.550,00	10.899.968.384,61
SALDO AKHIR KAS DANA LAINNYA		1.527.361.813,00	2.306.157.618,00
SALDO AKHIR KAS	6.5.5	112.542.862.590,00	95.101.710.311,61

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
EKUITAS AWAL	6.6.1	2.830.832.684.231,98	2.447.507.384.152,31
SURPLUS DEFISIT -LO	6.6.2	70.846.123.798,90	106.261.755.735,78
RK PPKD		0,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	6.6.3	2.560.569.327,14	277.063.544.343,89
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
LAIN-LAIN		2.560.569.327,14	277.063.544.343,89
EKUITAS AKHIR		2.904.239.377.358,02	2.830.832.684.231,98

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kepentingan antara lain :

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan tingkat ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan antar generasi
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020, terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

Melalui LKPD Pemerintah Kota Pekalongan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Pemerintah Kota Pekalongan menyajikan informasi-informasi sebagai berikut :

- a. informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
 - j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
 - k. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
 - l. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan;



3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan

Bab ini berisi penjelasan mengenai keadaan umum Kota Pekalongan, Pembinaan Batas Wilayah, penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Corona Virus Disease atau COVID-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama COVID-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara, dampak COVID-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen (sumber RKP Tahun 2021).

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di



pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil.

Pandemi COVID-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, meskipun sudah ada jaring pengaman sosial.

Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran meningkat demikian pula tingkat pengangguran terbuka (TPT). Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (*World Bank*, 2020).

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2020. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan COVID-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan PDRB series Tahun 2010 atas dasar harga konstan, nilai PDRB mencapai 7,338 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 7,477 triliun rupiah pada Tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 terjadi



pertumbuhan ekonomi sebesar -1,87 persen, mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 5,50 persen.

Empat kategori mengalami pertumbuhan positif lebih dari lima persen antara lain: Informasi dan Komunikasi sebesar 17,20 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,35 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,91 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,36 persen. Satu kategori masih tumbuh walaupun sangat kecil, yaitu Jasa keuangan dan Asuransi.

Sedangkan sebelas kategori mengalami pertumbuhan negatif adalah kategori Industri Pengolahan/Manufacturing sebesar -0,48 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -0,26, Konstruksi sebesar -1,09 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -4,68 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar -24,56 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -3,78 persen, Real Estat sebesar -0,08 persen, Jasa Perusahaan sebesar -4,32 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -1,00 persen, Jasa Pendidikan sebesar -0,56 persen, Jasa lainnya sebesar -1,19 persen.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2019, sebagian besar kategori mengalami pertumbuhan negatif dan diantara sebelas kategori yang mengalami pertumbuhan negatif, kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi paling dalam sebesar -24,56 persen. Meskipun demikian ternyata masih ada empat kategori yang masih tercatat mengalami pertumbuhan positif dan pertumbuhan positif tertinggi pada kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 17,20 persen.

Data Pertumbuhan Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,98	-4,8	3,03	4,63	6,36
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,16	4,35	4,46	4,84	-0,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	4,93	5,29	3,72	-0,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,16	5,86	5,16	4,21	6,91
F	Konstruksi	4,52	5,51	5,59	4,71	-1,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,86	5,71	5,53	5,47	-4,68
H	Transportasi dan Pergudangan	5,16	5,84	7,07	7,53	-24,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,94	5,92	5,88	6,76	-3,78
J	Informasi dan Komunikasi	8,47	11,94	10,43	10,57	17,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,03	7,35	5,12	3,76	0,93
L	Real Estat	6,54	5,84	5,97	5,62	-0,08



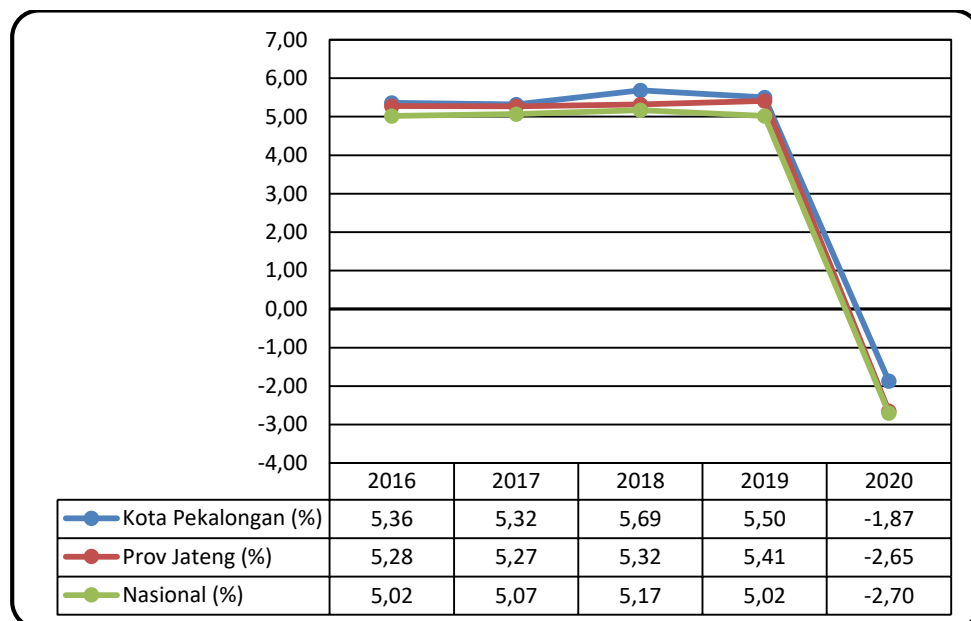
Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
M,N	Jasa Perusahaan	10,28	7,85	7,95	8,31	-4,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,58	3,75	3,99	3,82	-1,00
P	Jasa Pendidikan	7,49	6,82	7,59	2,63	-0,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,65	7,74	7,93	7,84	8,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,23	8,09	9,02	8,47	-1,19
Produk Domestik Regional Bruto		5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara



Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Selama empat tahun sebelum tahun terakhir (2016-2019) perekonomian Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik yaitu tumbuh pada kisaran 5 (lima) persen, namun dengan adanya pandemi Covid-19 mengalami kontraksi yang cukup dalam menjadi -1,87. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah, kontraksi yang dialami Kota Pekalongan masih sedikit lebih baik, dimana untuk nasional tumbuh -2,70 dan provinsi Jawa Tengah tumbuh -2,65.

b. Penduduk Miskin dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.



Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Di Kota Pekalongan, pada Tahun 2019, garis kemiskinan sebesar Rp425.026,00 per kapita per bulan dan Tahun 2020 meningkat menjadi Rp460.789,00 per kapita per bulan atau naik sebesar 8,41 persen.

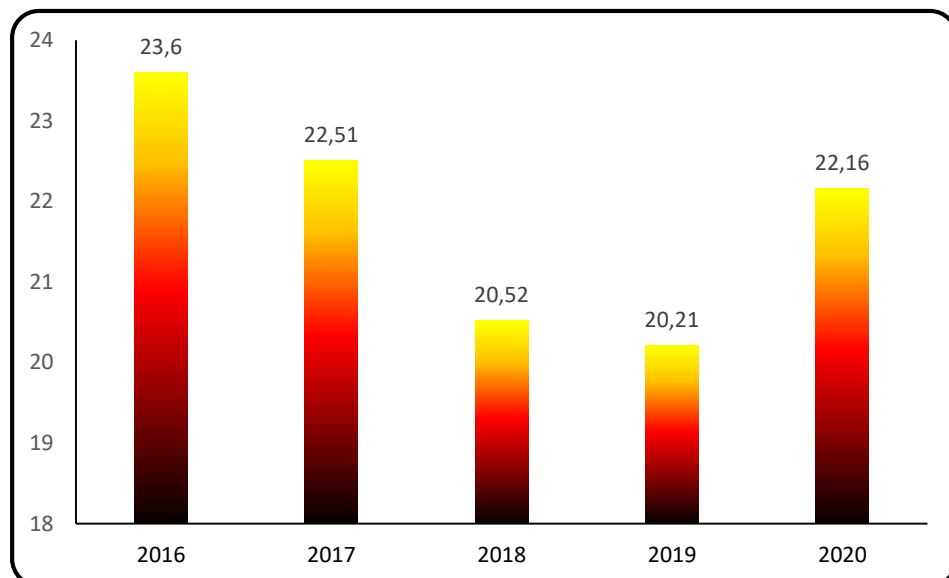
Persentase penduduk miskin Tahun 2019 sebesar 6,60 persen bertambah pada Tahun 2020 menjadi 7,17 persen. Demikian juga secara absolut, pada Tahun 2019 jumlah penduduk miskin mencapai 20,210 ribu jiwa dan pada Tahun 2020 bertambah menjadi 22,160 ribu jiwa. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat adanya pembatasan sosial untuk menahan penyebaran virus Covid-19.

Nilai kedalaman kemiskinan (P1) yang menggambarkan seberapa jauh pengeluaran orang miskin terhadap garis kemiskinan sebanding dengan peningkatan persentase penduduk miskin. Begitu juga dengan nilai keparahan kemiskinan (P2) yang menggambarkan disparitas antar orang miskin juga mengalami peningkatan. Nilai P1 dan P2 yang semakin melebar mengindikasikan ada disparitas yang ekstrim pada penduduk miskin. Penduduk miskin ini sangat perlu dibantu karena kemiskinannya yang akut.

**Tabel 2. 2 Garis Kemiskinan & Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan
Tahun 2019 – 2020**

Uraian	2019	2020	Perubahan (%)
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	425.026	460.789	8,41
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	20,210	22,160	9,65
Persentase Penduduk Miskin / Po (%)	6,60	7,17	8,64
Persentase Kedalaman Kemiskinan /P1 (%)	0,92	1,28	39,13
Persentase Keparahannya Kemiskinan /P2 (%)	0,18	0,30	66,67

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020



Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 (000 Jiwa)
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020



Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan melalui jaring pengaman sosial serta peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan program pemulihan ekonomi seperti padat karya dan pelatihan keterampilan produktif. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan juga telah dilakukan secara sistematis, terencana dan tersinergi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan dunia usaha.

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas di Kota Pekalongan Tahun 2020 tercatat sekitar 236.675 orang. Persentase angkatan kerja menurun dari 72,32 persen menjadi 66,45 persen atau turun 5,87 poin pada Tahun 2020, hal ini menunjukkan rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) menurun. Sisanya, yaitu 33,55 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 92,98 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,02 persen, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur. Nilai TPT mengalami peningkatan yang disebabkan banyaknya usaha yang tutup atau mengurangi usaha sebagai akibat pandemi Covid-19, selain itu jumlah kelulusan anak sekolah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi cenderung meningkat. Beberapa musibah seperti bencana banjir dan banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan juga mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Upaya yang telah dilakukan antara lain: menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyebarluasan informasi pasar kerja, serta pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Pekalongan periode Februari 2019 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

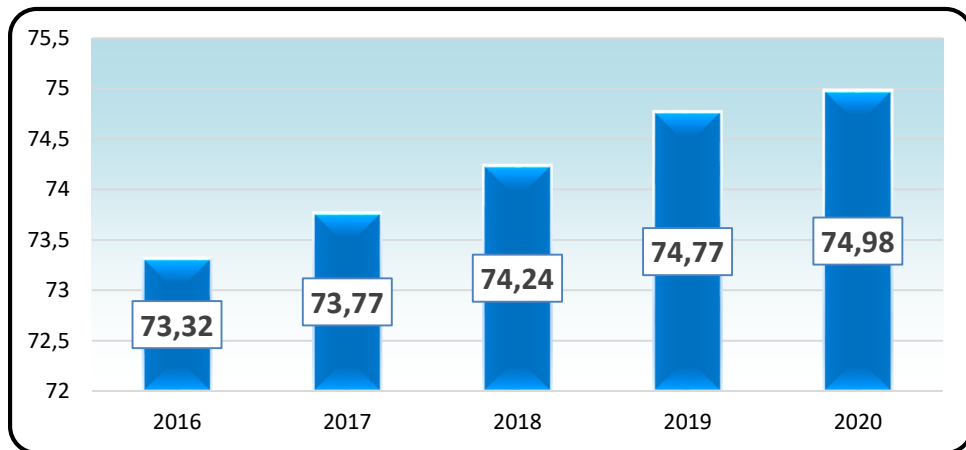
Tabel 2.3 Rasio TPAK, TKK, TPT Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020

URAIAN	2019	2020
TPAK	72,32	66,45
Bukan Angkatan Kerja	27,68	33,55
TKK	94,23	92,98
TPT	5,77	7,02

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Percepatan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang secara umum dinilai sebagai capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi



Gambar 2.3 Nilai IPM 2016 - 2020

Sumber : Statistik Daerah Kota Pekalongan 2020, IPM Jawa Tengah 2020, 2020

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Kota Pekalongan Tahun 2020 sebesar 74,98. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pembangunan manusia di Kota Pekalongan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari Tahun ke Tahun. Perkembangan IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Pekalongan. Dalam lima Tahun (2016 – 2020), terjadi kenaikan IPM hingga 1,66 poin.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Pada periode 2019 - 2020, pembangunan manusia di Kota Pekalongan berhasil tumbuh sebesar 0,21 poin atau 0,28 persen.

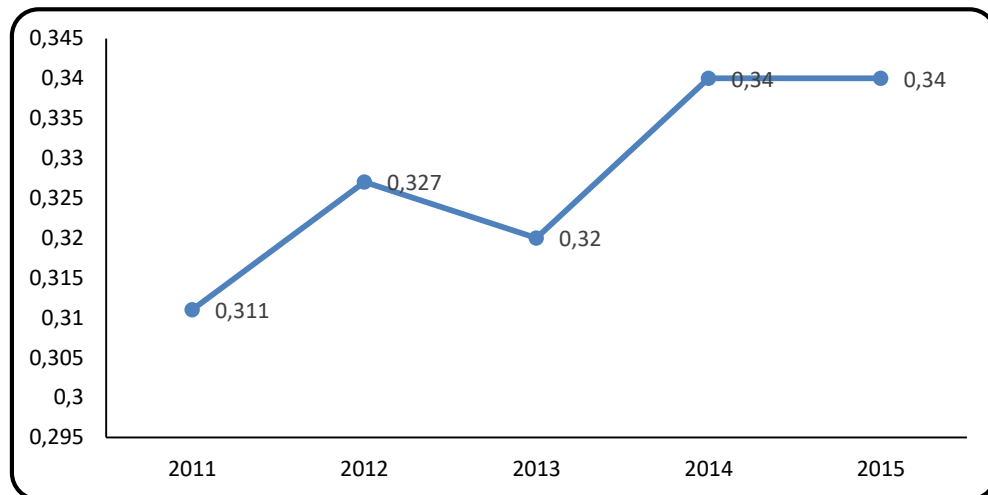
Tabel 2. 3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020

Uraian	2019	2020	Perubahan (poin)
• Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,28	74,38	0,10
• Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,83	12,84	0,01
• Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	8,71	8,96	0,25
• Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp) disesuaikan	12.680	12.467	213
• IPM Kota Pekalongan	74,77	74,98	0,21

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

d. Gini Ratio

Mulai tahun 2016 BPS tidak merelease Indeks Gini Kab/Kota, sehingga data terakhir Gini ratio Kota Pekalongan adalah tahun 2015. Gini Ratio Kota Pekalongan pada tahun 2015 sebesar 0,34 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.



Gambar 2. 4 Nilai Gini Ratio 2011 - 2015
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2016

2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2020

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2020, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2020 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.



a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2020 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
- (1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - (2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan



Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatanyang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- (6) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (7) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (10) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung



dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (11) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (12) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- c) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari pendapatan bunga atau jasa giro dan pendapatan BLUD

2) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



- a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari :
- (1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- (2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya



pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

- (3) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH- SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBHPengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- (4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan



Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang



Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi sementara diasumsikan sama dengan tahun anggaran 2019 menunggu terbitnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya;

b) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,



untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

- c) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi sementara diasumsikan sama dengan tahun anggaran 2019 menunggu terbitnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Dana Insentif Daerah
Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

- f) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi diasumsikan sama dengan pagu Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun 2019. Namun demikian didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

- a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;
- b) Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- c) Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
- d) Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- e) Meningkatkan koordinasi antar PD dalam bidang Pendapatan Daerah;
- f) Memberikan reward and punishment, dan kebijakan stimulus fiskal kepada Wajib Pajak Daerah;
- g) Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung sistem, prosedur dan pelayanan;
- h) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada;
- i) Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;
- j) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- k) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- l) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
- m) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
- n) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;

b. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional dan regulasi yang terbit di tengah pandemi COVID-19 serta memperhatikan realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019, terutama dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Pekalongan diarahkan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2020.
- 2) Penyesuaian Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berdasarkan :
 - a) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
 - b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020.

- c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.
- 3) Penyesuaian Dana Insentif Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- 4) Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terutama penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020, dianggarkan sesuai dengan alokasi dalam surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010374 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2020, pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 8,76%. Penurunan tersebut terdapat pada hampir semua komponen pendapatan kecuali DID, Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Hibah BOS. Selanjutnya, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan mengalami penurunan sebesar 21,71% dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Pos Pajak Daerah diasumsikan mengalami penurunan sebesar 26,23% karena penyesuaian target pendapatan sebagai akibat pandemi COVID-19.
 - b) Pos Retribusi Daerah secara agregat diasumsikan mengalami penurunan sebesar 28,54% karena penyesuaian target pendapatan sebagai akibat pandemi COVID-19.
 - c) Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 15,79% karena penyesuaian target pendapatan sebagai akibat pandemi COVID-19.
 - d) Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diasumsikan mengalami penurunan sebesar 17,33% berdasarkan penyesuaian target pendapatan sebagai akibat pandemi COVID-19.
- 2) Pos Dana Perimbangan secara agregat diasumsikan mengalami penurunan sebesar 9,16% berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.



- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, secara agregat naik sebesar 14,75% dengan perincian sebagai berikut:
- a) Tambahan DID dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagai *reward* atas keberhasilan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b) Bantuan Keuangan Provinsi yang pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 belum dianggarkan, pada Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2020 dianggarkan sesuai pagu definitif APBD Provinsi Jawa Tengah.

c. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Sementara urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, dan (e) perindustrian.

Disamping urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, sesuai dalam konteks Kota Pekalongan, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, program



dan kegiatan akan disertai dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur dan memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan.

1) Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Pada dasarnya Anggaran Tahun 2020 sudah merupakan tahun kelima periodisasi RPJM-D Tahun 2016-2021. Hal ini sejalan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Total perkiraan belanja pada tahun 2020 sebesar Rp1.052.892.744.000,- dengan estimasi 37,24% (Rp392.065.045.000,-) untuk belanja tidak langsung dan 62,76% (Rp660.827.699.000,-) untuk belanja langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan bidang pemerintahan dan diukur dengan capaian kerja.

2) Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020 dengan memperhitungkan jumlah ASN yang memasuki masa purna tugas/pensiun.
- (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya antara 0,9% sampai dengan 1% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.



- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan..
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- (7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan



Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir nomor 6 sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 7.
- (11) Tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN
- (12) Peningkatan gaji bagi tenaga kontrak minimal sebesar Upah Minimum Kota serta penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan



Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

(1) Belanja Hibah

- (a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (c) Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (e) Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

(2) Belanja Bantuan Sosial

- (a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi :

- (1) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau



- (3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi :

- (1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- (4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

3) Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah mengatur secara rinci tentang pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan, khususnya terkait dengan Urusan Konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam ayat (2), disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah merinci Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Selanjutnya Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 4 Kebijakan Belanja Berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA	PLAFON 2020
11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	390.095.709.000
11.01	PENDIDIKAN	79.692.595.000
11.01.110101	DINAS PENDIDIKAN	79.692.595.000
11.02	KESEHATAN	153.166.871.000
11.02.110201	DINAS KESEHATAN	63.652.304.000
11.02.110202	RSUD BENDAN	89.514.567.000
11.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84.563.660.000
11.03.110301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84.563.660.000
11.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	54.376.892.000
11.04.110401	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	54.376.892.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



KODE	URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA	PLAFON 2020
11.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.812.454.000
11.05.110501	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.948.447.000
11.05.110502	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.836.923.000
11.05.110503	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.027.084.000
11.06	SOSIAL	5.483.237.000
11.06.110601	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.483.237.000
12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	83.979.932.000
12.01	TENAGA KERJA	5.971.121.000
12.01.120101	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	5.971.121.000
12.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.869.704.000
12.02.120201	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.869.704.000
12.03	PANGAN	1.387.478.000
12.03.120301	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.387.478.000
12.04	PERTANAHAN	7.747.000.000
12.04.110301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.747.000.000
12.05	LINGKUNGAN HIDUP	16.172.899.000
12.05.120501	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.172.899.000
12.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.125.853.000
12.06.120601	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.125.853.000
12.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.777.462.000
12.07.120201	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.777.462.000
12.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.611.807.000
12.08.110601	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.611.807.000
12.09	PERHUBUNGAN	7.427.048.000
12.09.120901	DINAS PERHUBUNGAN	7.427.048.000
12.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.169.374.000
12.10.121001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.169.374.000
12.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.166.675.000
12.11.121101	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.166.675.000
12.12	PENANAMAN MODAL	3.420.340.000
12.12.121201	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.420.340.000
12.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	13.026.417.000
12.13.121301	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.026.417.000
12.14	STATISTIK	220.500.000
12.14.121001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	220.500.000
12.15	PERSANDIAN	124.000.000
12.15.121001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	124.000.000
12.16	KEBUDAYAAN	3.154.654.000
12.16.121301	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.154.654.000
12.17	PERPUSTAKAAN	1.953.100.000
12.17.121701	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.953.100.000
12.18	KEARSIPAN	654.500.000
12.18.121701	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	654.500.000
20	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	50.211.153.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



KODE	URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA	PLAFON 2020
20.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.432.083.000
20.01.200101	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.432.083.000
20.02	PARIWISATA	3.052.018.000
20.02.121301	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.052.018.000
20.03	PERTANIAN	1.696.852.000
20.03.120301	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.696.852.000
20.06	PERDAGANGAN	38.552.200.000
20.06.121101	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	38.552.200.000
20.07	PERINDUSTRIAN	1.478.000.000
20.07.120101	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.478.000.000
30	URUSAN PENUNJANG	136.540.905.000
30.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	4.938.760.000
30.01.300101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.938.760.000
30.02	KEUANGAN	11.915.030.000
30.02.300201	BADAN KEUANGAN DAERAH	11.915.030.000
30.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.969.594.000
30.03.300301	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	4.969.594.000
30.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.655.000.000
30.04.300101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.655.000.000
30.05	FUNGSI LAINNYA	113.062.521.000
30.05.30050301	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	2.259.420.000
30.05.30050302	BAGIAN HUKUM	1.788.800.000
30.05.30050303	BAGIAN ORGANISASI	1.229.800.000
30.05.30050304	BAGIAN PEREKONOMIAN	1.733.134.000
30.05.30050305	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	1.077.150.000
30.05.30050306	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.145.280.000
30.05.30050307	BAGIAN UMUM	5.162.930.000
30.05.30050308	BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	13.302.902.000
30.05.30050309	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	2.358.500.000
30.05.300504	SEKRETARIAT DPRD	27.409.000.000
30.05.300505	INSPEKTORAT	2.397.403.000
30.05.300506	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	1.757.678.000
30.05.30050601	KELURAHAN KANDANG PANJANG	935.129.000
30.05.30050602	KELURAHAN PANJANG WETAN	991.685.000
30.05.30050603	KELURAHAN DEGAYU	960.690.000
30.05.30050604	KELURAHAN BANDENGAN	878.816.000
30.05.30050606	KELURAHAN KRAPYAK	1.104.357.000
30.05.30050607	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	1.061.149.000
30.05.3130050605	KELURAHAN PANJANG BARU	961.490.000
30.05.300507	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	3.401.999.000
30.05.30050701	KELURAHAN JENGGOT	930.743.000
30.05.30050702	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	978.433.000
30.05.30050703	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	952.410.000
30.05.30050704	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	1.024.980.000
30.05.30050705	KELURAHAN SOKO DUWET	974.770.000
30.05.30050706	KELURAHAN BANYURIP	992.497.000
30.05.300508	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	1.089.050.000
30.05.30050801	KELURAHAN MEDONO	993.043.000
30.05.30050802	KELURAHAN PODO SUGIH	941.186.000



KODE	URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA	PLAFON 2020
30.05.30050803	KELURAHAN TIRTO	971.500.000
30.05.30050804	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	990.372.000
30.05.30050805	KELURAHAN BENDAN KERGON	1.109.047.000
30.05.30050806	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT	1.163.103.000
30.05.30050807	KELURAHAN PRINGREJO	1.186.349.000
30.05.300509	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	8.631.730.000
30.05.30050901	KELURAHAN KAUMAN	1.142.003.000
30.05.30050902	KELURAHAN PONCOL	1.031.774.000
30.05.30050903	KELURAHAN KLEGO	948.249.000
30.05.30050904	KELURAHAN GAMER	933.758.000
30.05.30050905	KELURAHAN NOYONTAANSARI	1.038.996.000
30.05.30050906	KELURAHAN SETONO	1.069.829.000
30.05.30050907	KELURAHAN KALI BAROS	1.051.387.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	660.827.699.000

d. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2020 diarahkan pada:

1) Kebijakan Belanja Tidak langsung.

- Penyesuaian belanja hibah antara lain karena adanya Tambahan Hibah KPU dan penganggaran kembali SILPA DAK Non fisik tahun 2019.
- Penyesuaian belanja bantuan sosial karena adanya penyesuaian belanja bantuan sosial santunan kematian.
- Belanja Tidak Terduga bertambah dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Kebijakan Belanja Langsung.

- Kebijakan Refocusing Belanja Langsung dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi.
- Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi
- Penyesuaian anggaran yang mengalami perubahan pendapatan, terutama Belanja BLUD, Belanja Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Keuangan Provinsi sesuai peraturan perundangan.
- Pergeseran anggaran antar PD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
- Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin PD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran



maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik penerangan jalan.

- f) Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.
- g) Upaya penanganan rob secara berkelanjutan dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- h) Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- i) Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan kebutuhan dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2020.
- j) Penganggaran pentahapan pemilu kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2020 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (over-target). SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2019 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan.

Selain SiLPA, dianggarkan pula komponen pencairan dana cadangan untuk pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 adalah pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Penyertaan modal dilakukan bagi perusahaan daerah Kota Pekalongan dan Bank Jateng, serta penyertaan modal dari penerusan hibah APBN Murni kepada PDAM. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan kajian analisis keuangan Perusahaan Daerah.



f. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Perubahan penerimaan pembiayaan dilakukan dengan menyesuaikan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 yang telah di audit oleh BPK. SiLPA Tahun Anggaran 2019 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp52.196.000.000,00, berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Perda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 adalah Rp95.101.710.000,00. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah sisa DAK s/d 2019, Sisa Dana TPG, Sisa Dana Tamsil Guru, Sisa Dana DBHCHT, Sisa Dana BOS, Sisa Kas di BLUD RSUD, Sisa Kas di BLUD Puskesmas, dan Sisa Kas di BLUD PSPJ yang akan dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing. Penerimaan pembiayaan juga berasal dari pencairan dana cadangan sebesar Rp12.550.000.000,00 yang akan digunakan dalam pentahapan Pemilu Kepala Daerah dimana prosesnya sudah dimulai sejak Bulan September 2019.

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp268.000.000,00 untuk Bank Jateng dan pembayaran pokok utang berupa pembayaran kegiatan yang belum dibayarkan pada tahun 2019 sebesar Rp3.530.000,00.

3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga tersaji sebagai entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode laporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan.

a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Penerimaan / Sisa Pengeluaran
Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	909.607.710.000,00	953.155.394.614,95	43.547.684.614,95
Belanja dan Transfer	1.012.737.890.000,00	944.840.460.675,56	(67.897.429.324,44)
Surplus / (Defisit)	(103.130.180.000,00)	8.314.933.939,39	111.445.113.939,39
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	107.651.710.000,00	108.747.997.650,61	1.096.287.650,61
Pengeluaran Pembiayaan	4.521.530.000,00	4.520.630.000,00	(900.000,00)
Pembiayaan Netto	103.130.180.000,00	104.227.367.650,61	1.097.187.650,61
Sisa Lebih Pembiayaan			
Anggaran	0,00	112.542.301.590,00	112.542.301.590,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp953.155.394.614,95 atau sebesar 104,79% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp909.607.710.000,00.
- 2) Realisasi belanja dan transfer daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp944.840.460.675,56 atau sebesar 93,30% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.012.737.890.000,00.
- 3) Pada tahun 2020, Kota Pekalongan mengalami surplus anggaran sebesar Rp8.314.933.939,39.

b. Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun Anggaran 2019.

Perbandingan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dengan tahun anggaran 2019 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2019 dengan TA. 2020

Uraian	Ralisasi		Selisih	%
	TA. 2020	TA. 2019		
Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	953.155.394.614,95	971.624.464.120,61	-18.469.069.505,66	-1,90
Belanja dan Transfer	944.840.460.675,56	954.397.012.827,00	-9.556.552.151,44	-1,00
Surplus / (Defisit)	8.314.933.939,39	17.227.451.293,61	-8.912.517.354,22	-51,73
Pembiayaan			0,00	
Penerimaan Pembiayaan	108.747.997.650,61	92.028.388.994,00	16.719.608.656,61	18,17
Pengeluaran Pembiayaan	4.520.630.000,00	14.154.129.976,00	-9.633.499.976,00	-68,06
Pembiayaan Netto	104.227.367.650,61	77.874.259.018,00	26.353.108.632,61	33,84
Sisa Lebih Pembiayaan	112.542.301.590,00	95.101.710.311,61	17.440.591.278,39	18,34

- 1) Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp18.469.069.505,66 atau turun sebesar 1,90% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp971.624.464.120,61.
- 2) Realisasi belanja dan transfer Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp9.556.552.151,44 atau turun sebesar 1,00% jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp954.397.012.827,00.
- 3) Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp104.227.367.650,61 atau naik sebesar 33,84 % jika dibandingkan dengan pembiayaan netto tahun 2019 sebesar Rp77.874.259.018,00.

c. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Pendapatan per SKPD

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp953.155.394.614,95 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 per SKPD dan Realisasi Tahun 2019

No	OPD	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	DINKES	16.833.200.000,00	16.793.581.094,00	99,76	17.907.362.366,00
2	RSUD BENDAN	63.575.243.000,00	104.357.576.384,95	164,15	70.469.240.049,61
3	DPUPR	1.130.000.000,00	1.744.096.350,00	154,34	1.999.518.600,00
4	DINPERKIM	982.000.000,00	1.034.687.642,00	105,37	1.255.904.866,00
5	DINPERINAKER	45.000.000,00	52.560.000,00	116,80	45.896.000,00
6	DINPERPA	88.500.000,00	77.589.000,00	87,67	100.667.500,00
7	DLH	760.000.000,00	743.623.000,00	97,85	726.765.000,00
8	DISHUB	1.317.250.000,00	1.454.773.200,00	110,44	1.738.908.800,00
9	DISKOMINFO	250.000.000,00	251.759.243,00	100,70	319.751.613,00
10	DINDAGKOP	2.066.000.000,00	2.506.594.703,00	121,33	2.979.849.100,00
11	DINPARBUDPORA	173.193.000,00	169.681.500,00	97,97	647.670.250,00
12	DKP	5.096.500.000,00	5.402.662.710,00	106,01	5.362.751.300,00
13	BKD	1.283.000.000,00	1.540.074.314,00	120,04	1.637.703.076,00
14	SKPKD	816.007.824.000,00	817.026.135.474,00	100,12	866.432.475.600,00
	Jumlah	909.607.710.000,00	953.155.394.614,95	104,79	971.624.464.120,61

Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp944.840.460.675,56 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2020 per SKPD dan Realisasi Tahun 2019

No.	SKPD	TA. 2020		%	Realisasi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA. 2019 (Rp)
1	DINDIK	230.167.380.000,00	212.330.661.750,00	92,25	218.741.777.077,00
2	DINKES	102.332.548.000,00	97.917.444.113,00	95,69	86.539.521.603,00
3	RSUD BENDAN	109.432.192.000,00	122.532.781.651,56	111,97	71.166.824.985,00
4	DPUPR	71.902.937.000,00	64.884.656.626,00	90,24	94.353.761.353,00
5	DINPERKIM	48.599.472.000,00	44.431.699.402,00	91,42	36.438.378.619,00
6	SATPOL PP	12.560.304.000,00	12.045.666.159,00	95,90	10.535.460.019,00
7	BPBD	3.296.683.000,00	2.671.129.497,00	81,02	3.141.368.692,00
8	KESBANGPOL	2.825.831.000,00	2.270.956.459,00	80,36	3.049.887.384,00
9	DINSOSP2KB	9.507.134.000,00	8.386.905.346,00	88,22	11.656.931.944,00
10	DINPERINAKER	7.790.050.000,00	6.654.652.224,00	85,43	14.079.594.112,00
11	DPMP2A	5.048.544.000,00	4.467.242.353,00	88,49	7.197.217.886,00
12	DINPERPA	5.994.086.000,00	5.460.349.679,00	91,10	6.327.445.166,00
13	DLH	22.903.567.000,00	21.205.127.757,00	92,58	27.214.398.653,00
14	DINDUKCAPIL	5.299.665.000,00	4.570.949.784,00	86,25	5.347.991.782,00
15	DISHUB	10.144.500.000,00	9.571.305.427,00	94,35	11.979.590.612,00
16	DISKOMINFO	11.405.018.000,00	10.388.945.947,00	91,09	10.379.757.236,00
17	DINDAGKOP	15.251.209.000,00	13.928.956.539,00	91,33	18.929.861.156,00
18	DPMP2TSP	7.456.473.000,00	6.667.820.950,00	89,42	4.940.783.147,00
19	DINPARBUDPORA	15.183.946.000,00	13.640.576.274,00	89,84	14.502.444.561,00
20	DINARPUK	4.522.789.000,00	3.747.588.760,00	82,86	4.795.524.460,00
21	DKP	7.930.923.000,00	7.418.954.985,00	93,54	6.730.408.217,00
22	BAPPEDA	8.503.429.000,00	7.230.864.347,00	85,03	9.305.474.448,00
23	BKD	24.284.685.000,00	21.290.253.175,00	87,67	21.805.027.928,00
24	SKPKD	107.920.727.000,00	95.828.394.995,00	88,80	37.032.719.800,00
25	BKPPD	6.281.741.000,00	5.442.218.266,00	86,64	9.534.121.613,00
26	DPRD	17.641.203.000,00	16.852.859.942,00	95,53	12.914.485.174,00
27	WALIKOTA & WAKIL	784.517.000,00	708.424.940,00	90,30	456.583.924,00
28	SETDA	46.028.178.000,00	40.249.945.672,00	87,45	42.552.745.397,00
	BAGIAN TAPEM	2.427.752.000,00	2.098.739.750,00	86,45	1.726.616.600,00
	BAGIAN HUKUM	1.603.070.000,00	1.193.380.838,00	74,44	1.688.906.484,00
	BAGIAN ORGANISASI	845.152.000,00	826.957.054,00	97,85	1.063.076.256,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN	578.924.000,00	510.601.386,00	88,20	1.291.386.883,00
	BAGIAN PBJ DAN DALBANG	721.750.000,00	702.896.966,00	97,39	1.103.821.360,00
	BAGIAN KESRA	12.430.225.000,00	11.118.068.646,00	89,44	9.756.537.914,00
	BAGIAN UMUM	25.656.405.000,00	22.102.446.732,00	86,15	14.322.878.369,00
	BAGIAN PROKOMPIN	1.764.900.000,00	1.696.854.300,00	96,14	9.518.556.076,00
29	SETWAN	34.673.335.000,00	32.714.543.063,00	94,35	2.080.965.455,00
30	INSPEKTORAT	5.411.213.000,00	4.803.516.757,00	88,77	32.027.873.779,00
	Jumlah Sementara	961.084.279.000,00	900.315.392.839,56	93,68	835.758.926.182,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No.	SKPD	TA. 2020		%	Realisasi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA. 2019 (Rp)
	Saldo Pindahan	961.084.279.000,00	900.315.392.839,56	93,68	835.758.926.182,00
30	KEC. PEKALONGAN UTARA	13.213.571.000,00	11.258.501.271,00	85,20	10.045.227.508,00
	KEL. KANDANG PANJANG	544.732.000,00	481.146.330,00	88,33	288.668.139,00
	KEL. PANJANG WETAN	548.440.000,00	511.133.674,00	93,20	328.669.952,00
	KEL. DEGAYU	542.180.000,00	517.961.222,00	95,53	240.245.546,00
	KEL. BANDENGAN	575.284.000,00	542.571.645,00	94,31	237.924.638,00
	KEL. KRAPYAK	652.931.000,00	631.682.586,00	96,75	460.879.126,00
	KEL. PADUKUHAN KRATON	604.894.000,00	573.208.812,00	94,76	338.585.819,00
	KEL. PANJANG BARU	553.807.000,00	486.979.324,00	87,93	281.596.426,00
31	KEC. PEKALONGAN SELATAN	11.343.185.000,00	9.646.342.005,00	85,04	13.145.633.492,00
	KEL. JENGGOT	577.051.000,00	566.911.626,00	98,24	275.362.000,00
	KEL. BUARAN KRADENAN	594.851.000,00	574.229.108,00	96,53	301.123.077,00
	KEL. KURIPAN KERTO HARJO	616.851.000,00	589.685.239,00	95,60	245.284.211,00
	KEL. KURIPAN YOSOREJO	609.071.000,00	593.807.216,00	97,49	318.051.280,00
	KEL. SOKODUWET	579.851.000,00	526.516.062,00	90,80	271.622.203,00
	KEL. BANYURIP	573.151.000,00	557.274.316,00	97,23	313.738.018,00
33	KEC. PEKALONGAN BARAT	13.486.715.000,00	11.669.434.234,00	86,53	9.760.962.252,00
	KEL. MEDONO	868.574.000,00	834.952.963,00	96,13	396.626.927,00
	KEL. PODO SUGIH	560.842.000,00	527.190.624,00	94,00	232.386.412,00
	KEL. TIRTO	647.431.000,00	613.334.736,00	94,73	264.107.421,00
	KEL. SAPURO KEBULEN	651.976.000,00	643.063.918,00	98,63	337.420.667,00
	KEL. BENDAN KERGON	684.299.000,00	666.593.011,00	97,41	407.879.049,00
	KEL. PASIRKRATON KRAMAT	650.104.000,00	640.368.162,00	98,50	416.931.540,00
	KEL. PRINGREJO	745.784.000,00	687.162.291,00	92,14	408.507.265,00
34	KEC. PEKALONGAN TIMUR	13.610.140.000,00	11.950.790.326,00	87,81	11.887.709.398,00
	KEL. KAUMAN	742.942.000,00	719.419.515,00	96,83	466.512.791,00
	KEL. PONCOL	618.528.000,00	560.142.068,00	90,56	303.974.793,00
	KEL. KLEGO	604.419.000,00	583.301.148,00	96,51	273.612.666,00
	KEL. GAMER	551.991.000,00	534.656.565,00	96,86	247.320.982,00
	KEL. NOYONTAANSARI	585.157.000,00	540.068.382,00	92,29	330.109.509,00
	KEL. SETONO	710.247.000,00	668.057.114,00	94,06	368.746.785,00
	KEL. KALIBAROS	571.451.000,00	518.975.382,00	90,82	260.564.514,00
	Jumlah	1.012.737.890.000,00	944.840.460.675,56	93,30	889.214.910.588,00

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 antara lain :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2020 tercapai 104,79%, beberapa pos tidak mencapai target karena beberapa hal antara lain :



- 1) Bagi Hasil Pajak/bukan pajak
Realisasi bagi hasil pajak/bukan pajak (SDA) hanya mencapai 90,94% atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena pendapatan pajak secara nasional tidak tercapai.
 - 2) Dana Alokasi Umum
Realisasi Dana Alokasi Umum hanya mencapai 99,36% atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian penggunaan/refocusing dana transfer ke daerah untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - 3) Pendapatan Hibah
Realisasi Pendapatan Hibah hanya mencapai 99,79%. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 anggaran Pendapatan Hibah Dana BOS telah dilakukan penyesuaian anggaran setelah perubahan sehingga capaian menjadi 100%.
 - 4) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya hanya mencapai 88,02% atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya penundaan pencairan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Realisasi hanya mencapai 98,99% atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena pengadaan fisik Pengadaan fisik Alat TIK Bankeu Propinsi tidak dilaksanakan karena ketersediaan barang di e-katalog tidak mencukupi.
- b. Belanja Daerah
- Penyerapan belanja daerah tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 93,30%. Penyerapan yang belum optimal antara lain disebabkan karena :
- 1) Belum semua SKPD mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - 2) Belum matangnya perencanaan yang disusun oleh SKPD.
 - 3) Pada tahun 2020, terdapat 4 paket pekerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2020 tidak selesai, yaitu :
 - a) Belanja Jasa Konsultan penyusunan dokumen AMDAL Pasar Banjarsari oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pelaksana pekerjaan adalah PT. Environesia Global Saraya, dengan nilai sebesar Rp400.422.000,00 dan jadwal selesai pekerjaan dalam buku kontrak adalah tanggal 21 Desember 2020.
 - b) Pembangunan Saluran Jl. WR. Supratman (Lanjutan) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelaksana pekerjaan adalah CV. BIMA KARYA TAMA, dengan nilai sebesar Rp318.180.000,00 dan jadwal selesai pekerjaan dalam buku kontrak adalah tanggal 30 Desember 2020.
 - c) Pek. Peningkatan Jalan Jawa Gg. II RT 03 RW 17 Kel. Bendan Kergon oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelaksana pekerjaan adalah CV. BIMA KARYA TAMA, dengan nilai sebesar



Rp54.300.000,00 dan jadwal selesai pekerjaan dalam buku kontrak adalah tanggal 11 Desember 2020.

- d) Pek. Gapuro Gg.1 RW.07 Kelurahan Panjang Wetan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelaksana pekerjaan adalah CV. CEMERLANG KARYA7, dengan nilai sebesar Rp44.230.000,00 dan jadwal selesai pekerjaan dalam buku kontrak adalah tanggal 12 Januari 2021.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi, seperti yang disajikan pada Tabel 4.1.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. SKPD di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor dan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Tabel 4. 1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode	Nama Entitas Akuntansi
110101	DINAS PENDIDIKAN
110201	DINAS KESEHATAN
110202	RSUD BENDAN
110301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
110401	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
110501	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
110502	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
110503	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
110601	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
120101	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
120201	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
120301	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
120501	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
120601	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
120901	DINAS PERHUBUNGAN
121001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
121101	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
121201	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
121301	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
121701	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
200101	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
300101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
300201	BADAN KEUANGAN DAERAH
300202	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
300301	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
300501	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
300502	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
300503	SEKRETARIAT DAERAH
300504	SEKRETARIAT DPRD
300505	INSPEKTORAT
300506	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
300507	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
300508	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
300509	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR



Selain entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kota Pekalongan juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) :

- a. BLUD RSUD Bendan
- b. BLUD Puskesmas Bendan
- c. BLUD Puskesmas Kramatsari
- d. BLUD Puskesmas Tirto
- e. BLUD Puskesmas Medono
- f. BLUD Puskesmas Noyontaan
- g. BLUD Puskesmas Tondano
- h. BLUD Puskesmas Klego
- i. BLUD Puskesmas Sokorejo
- j. BLUD Puskesmas Dukuh
- k. BLUD Puskesmas Krapyk Kidul
- l. BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa
- m. BLUD Puskesmas Jenggut
- n. BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan
- o. BLUD Puskesmas Buaran
- p. BLUD Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu (PSPJ).

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

b. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.



1) Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

a) Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

(1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

(2) Investasi Jangka Pendek

- (a) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- (b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (c) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- (d) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat



sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(3) Piutang

- (a) Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- (b) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
 - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan
- (c) Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- (d) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- (e) Pengukuran Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:
 - Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengakuan Piutang

- (a) Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang.
- (b) Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.



- (c) Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria :
 - Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan/atau
 - Telah diterbitkannya surat penagihan.
- (d) Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah.
- (e) Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - Jumlah piutang dapat diukur;
 - Telah diterbitkan surat penagihan; dan
 - Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
- (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman

(4) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan

- (a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (b) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
- (c) Pencatatan persediaan menggunakan metode perpektual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.
- (d) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan

(5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (outstanding).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.



Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang tidak tertagih

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Piutang Retribusi Beserta Penyisihan Piutang tidak tertagih

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

(6) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran investasi jangka panjang adalah sebagai berikut :

- (a) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif



dapat dipergunakan nilai nominal, tercatat, atau nilai wajar lainnya.

- (b) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran investasi jangka panjang pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

(a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- (d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen

(a) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut :



- Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengukuran investasi permanen adalah sebagai berikut :

- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama

b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari :

- (1) Tanah;
- (2) Peralatan dan Mesin;
- (3) Gedung dan Bangunan;
- (4) Jalan, Irigasi dan Instalasi;
- (5) Aset Tetap Lainnya;
- (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- (7) Akumulasi Penyusutan.



Pengukuran Aset Tetap :

- (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap :

- (1) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (e) Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
- (2) Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (3) Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Awal Aset Tetap

- (1) *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*
- (2) *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*
- (3) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Kapitalisasi Aset Tetap

- (1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- (2) Pengeluaran yang Dikapitalisasi
 - (a) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
 - (b) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut :
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
 - Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran



- bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 - Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya :
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - (c) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - (d) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan /diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - (e) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.
- (2) Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemerliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - (b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - (c) Bertambah volume, dan/atau;
 - (d) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - (e) Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan



Pertukaran Aset

- (1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- (2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap

- (1) Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.
- (2) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional



Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Akuntansi Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.



c) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- (1) Tagihan piutang penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- (4) Aset Tak Berwujud
Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan
- (5) Aset Lain-lain
Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

2) Pengukuran Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran kewajiban :

- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.



- b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- c) Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- d) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- e) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan.
- f) Untuk Utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

- a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- c) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.



- d) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- a) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- b) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- c) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- a) Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- a) Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- b) Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.



Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat :
- (1) Timbulnya kewajiban.
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan.
 - (2) Terjadinya pengeluaran kas
Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan
 - (3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.
- b) Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal

- a) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- (1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - (2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - (3) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b) Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakukan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
- (1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (3) Bertambah volume, dan/atau
 - (4) Bertambah kapasitas produksi
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



- c) Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa.

Belanja Hibah

- a) Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- b) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- c) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- b) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- c) Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- d) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.



Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut :

- a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b) Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- a) Beban diakui pada saat :
 - (1) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 - (2) Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah
 - (3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- b) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c) Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
- d) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

1. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

a. Pengakuan Pendapatan LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LRA, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Dalam PSAP Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "*Pendapatan kas*



yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD”.

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan :

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pada entitas.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.*
- 4) *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.*
- 5) *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut*

b. Pengakuan Pendapatan LO

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional, paragraph 19 menyatakan bahwa *Pendapatan-LO diakui pada saat :*

- (a) Timbulnya hak atas pendapatan;*
- (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.*

Dalam laporan operasional Pemerintah Kota Pekalongan, Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kota Pekalongan memiliki hak atas pendapatan.
- b. Pemerintah Kota Pekalongan menerima kas yang berasal dari pendapatan.
 - 1) ***Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.***
 - 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
 - 3) Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kota Pekalongan di rekening kas umum daerah.
 - 4) Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
 - 5) *Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.*



- 6) *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*
- 7) *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.*
- 8) *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*
- 9) *Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.*

c. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut :

31. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
32. *Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraph 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP.
- 2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran TU.

d. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraph 36 dan 37 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yaitu :

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



Sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 36 dan 37 tersebut, pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 untuk penilaian investasi Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- 1) Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PDAM Kota Pekalongan, PD BPR Bank Pekalongan dan PD BPR BKK Kota Pekalongan menggunakan metode ekuitas.
- 2) Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng, PT. PRPP Jateng dan PT. BKK Jateng menggunakan metode biaya.



BAB V

REALOKASI DAN REFOKUSING ANGGARAN

Pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Dalam rangka penanganan Covid-19 ini Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah agar segera melakukan langkah-langkah yang cepat melalui pelaksanaan APBD. Kebijakan tersebut antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disese 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Peraturan-peraturan tersebut di atas memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian APBD dalam rangka penanggulangan covid-19. Penyesuaian dilakukan dengan memprioritaskan penggunaan APBD untuk penanganan dampak penularan covid-19 dengan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang pergeseran anggaran dan terakhir ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Pelaksanaan APBD untuk percepatan penanganan covid-19 juga diamanatkan untuk dipercepat, oleh sebab itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan surat edaran tentang penjelasan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan covid-19.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana ditungan dalam peraturan-peraturan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan Perubahan Penjabaran atau Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 sebanyak 7 (tujuh) kali selama Tahun Anggaran 2020 yang kemudian diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan penjelasan per tahapan Perubahan Penjabaran Peraturan Walikota sebagai berikut :

1. Perubahan Penjabaran I

Ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 07 April 2020

Perubahan penjabaran I ini dilatarbelakangi terbitnya beberapa aturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah



- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Perubahan Penjabaran I merupakan penyesuaian penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) yang digunakan untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pagu kegiatan-kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan *refocussing* yaitu menunda atau membatalkan atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas untuk direalokasi dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan covid-19. Adapun peruntukan *refocussing* yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penanganan covid-19 dianggarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengembangan standar pelayanan kesehatan Rp7.096.089.400,00
- b. Kegiatan Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Rp366.600.000,00
- c. Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Rp197.670.000,00
- d. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp1.176.118.600,00
- e. Kegiatan Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Rp810.200.000,00
- f. Kegiatan Pelayanan BLUD Rp1.970.000.000,00
- g. Kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19 Rp5.894.915.000,00
- h. TPP RSUD 3 bulan 100% Rp766.142.000,00
- i. Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp321.800.000,00
- j. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan Rp20.800.000,00
- k. Kegiatan Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Rp535.980.000,00
- l. Kegiatan Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota Rp51.180.000,00
- m. Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Rp43.250.000,00
- n. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan Rp600.000.000,00
- o. Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan Rp89.996.000,00
- p. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan) Rp444.088.000,00
- q. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan) Rp354.174.000,00
- r. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) Rp376.395.000,00
- s. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan) Rp409.168.500,00
- t. Belanja Tidak Terduga Rp550.000.000,00

Penyesuaian penggunaan alokasi anggaran pada Perubahan Penjabaran I menyebabkan adanya penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan:
 - 1. Pendapatan Asli Daerah Rp 218.020.320.000,00
 - 2. Dana Perimbangan Rp 632.390.293.000,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	130.950.869.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	981.361.482.000,00
b. Belanja:		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	357.703.147.000,00
b) Belanja Hibah	Rp	40.488.500.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.648.500.000,00
d) Belanja Tidak Terduga	Rp	6.500.000.000,00
	Rp	407.340.147.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	73.484.656.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	380.922.064.000,00
c) Belanja modal	Rp	194.110.615.000,00
	Rp	648.517.335.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.055.857.482.000,00
Surplus / (Defisit)	Rp	74.496.000.000,00
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan	Rp	78.746.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp	4.250.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	74.496.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Yang terpengaruh dengan perubahan 82 SKPD (seluruh SKPD)

Data pergerakan perubahan penjabaran APBD (Perubahan sebelum APBD-P ke-1) sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 1**.

2. Perubahan Penjabaran II

Ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020

Perubahan penjabaran II ini dilatarbelakangi terbitnya beberapa aturan sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-121/PK/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait penanganan COVID-19.

Perubahan Penjabaran II berkenaan dengan penyesuaian pagu pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi yaitu Bantuan TMMD yang bertambah Rp612.000.000,00 dan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



perubahan pergeseran/relokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dari belanja langsung ke Belanja Tidak Terduga sebesar Rp19.500.000.000 yang digunakan sebagai tambahan penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.

Penyesuaian penggunaan alokasi anggaran pada Perubahan Penjabaran II menyebabkan adanya penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	218.020.320.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp	632.390.293.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	<u>131.562.869.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	981.973.482.000,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	357.703.147.000,00
b) Belanja Hibah	Rp	40.488.500.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.648.500.000,00
d) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>26.000.000.000,00</u>
	Rp	426.840.147.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	73.245.998.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	380.124.626.000,00
c) Belanja modal	<u>Rp</u>	<u>176.258.711.000,00</u>
	Rp	629.629.335.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>1.056.469.482.000,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp	74.496.000.000,00

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	78.746.000.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>4.250.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>74.496.000.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Yang terpengaruh dengan perubahan 11 SKPD :

1. DPUPR
2. Dinperkim
3. DPMPPA
4. Dinperpa
5. Dinas Perhubungan
6. Dindagkop UKM
7. BKD
8. SKPKD
9. Bagian Perekonomian
10. Bagian Umum
11. Kec Pekalongan Timur



Data pergerakan perubahan penjabaran APBD (Perubahan sebelum APBD-P ke-2) sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 2**.

3. Perubahan Penjabaran III

Ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020

Perubahan penjabaran III ini dilatarbelakangi terbitnya beberapa aturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- d. Surat Menteri Keuangan Nomor S-121/PK/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait penanganan COVID-19.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- f. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial.

Perubahan Penjabaran III berkenaan dengan penyesuaian pagu *refocussing* dari pusat berdasarkan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan menindaklanjuti amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020, terdapat beberapa penyesuaian pendapatan dan belanja daerah yang meliputi :

- a. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah
- c. Rasionalisasi belanja pegawai
- d. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%
- e. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%

Adapun Rincian penyesuaian pendapatan dan belanja daerah Kota Pekalongan :

- a. Pendapatan Asli Daerah berkurang Rp70.045.697.000,00
- b. Dana Perimbangan berkurang Rp67.619.410.000, terdiri dari :
 - 1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak bertambah Rp6.665.511.000,00
 - 2) Dana Alokasi Umum berkurang Rp44.083.852.000,00
 - 3) Dana Alokasi Khusus berkurang Rp30.201.069.000,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berkurang Rp17.663.513.000,00 terdiri dari :



- 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berkurang Rp15.000.000.000,00
- 2) Dana Insentif Daerah berkurang Rp2.663.513.000,00
- d. Rasionalisasi belanja pegawai sebesar 4%
- e. Rasionalisasi belanja barang/jasa sebesar 15%
- f. Rasionalisasi belanja modal sebesar 46%

Penyesuaian penggunaan alokasi anggaran pada Perubahan Penjabaran III menyebabkan adanya penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	147.974.623.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp	564.770.883.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	<u>113.899.356.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	826.644.862.000,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	350.662.570.000,00
b) Belanja Hibah	Rp	37.883.100.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.648.500.000,00
d) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>34.086.788.000,00</u>
	Rp	425.280.958.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	61.530.440.500,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	315.596.922.000,00
c) Belanja modal	<u>Rp</u>	<u>111.147.444.500,00</u>
	Rp	488.274.807.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>913.555.765.000,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp	86.910.903.000,00

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	91.160.903.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>4.250.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>86.910.903.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Yang terpengaruh dengan perubahan 82 SKPD (seluruh SKPD)

Data pergerakan perubahan penjabaran APBD (Perubahan sebelum APBD-P ke-3) sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 3**.

4. Perubahan Penjabaran IV

Ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020

Perubahan penjabaran IV ini dilatarbelakangi terbitnya beberapa aturan sebagai berikut:



- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- d. Surat Menteri Keuangan Nomor S-121/PK/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait penanganan COVID-19.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- f. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial.

Perubahan Penjabaran IV berkenaan dengan hasil *refocussing* pada Perubahan Penjabaran III setelah dikirim ke Kementerian Keuangan, dilakukan evaluasi dan dinyatakan rasionalisasi Belanja Modal belum mencapai 50 % sehingga diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian kembali agar *refocussing* yang dilakukan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 selain adanya penyesuaian atas pendapatan BLUD RSUD dan pendapatan hibah dana BOS. Adapun penyesuaian yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah berkurang Rp2.414.520.000
- b. Pendapatan Hibah Dana BOS berkurang Rp6.403.542.000
- c. Rasionalisasi belanja barang/jasa sebesar 24%
- d. Rasionalisasi belanja modal sebesar 55%

Penyesuaian penggunaan alokasi anggaran pada Perubahan Penjabaran IV menyebabkan adanya penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	145.560.103.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp	564.770.883.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	107.495.814.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	817.826.800.000,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	350.662.570.000,00
b) Belanja Hibah	Rp	37.883.100.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.648.500.000,00
d) Belanja Tidak Terduga	Rp	75.090.761.000,00
	Rp	466.284.931.000,00



2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	61.618.971.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	282.676.190.000,00
c) Belanja modal	<u>Rp</u>	<u>94.157.611.000,00</u>
	Rp	438.452.772.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>904.737.703.000,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp	86.910.903.000,00
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan	Rp	91.160.903.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>4.250.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>86.910.903.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Yang terpengaruh dengan perubahan 82 SKPD (seluruh SKPD)

Data pergerakan perubahan penjabaran APBD (Perubahan sebelum APBD-P ke-4) sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 4**.

5. Perubahan Penjabaran V

Ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020

Perubahan penjabaran V ini dilatarbelakangi terbitnya beberapa aturan sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-121/PK/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait penanganan COVID-19.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disesase 2019* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial.



- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Penjabaran V berkenaan dengan adanya kebijakan Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh tambahan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp6.503.980.000, terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Khusus bidang Perumahan bertambah Rp2.480.625.000,00
- b. Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata bertambah Rp2.209.041.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (Penugasan) bertambah Rp1.610.000.000,00

Selain mendapat tambahan Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Kota Pekalongan juga memperoleh Alokasi Dana BOK Tambahan sebesar Rp204.314.000,00 yang dipergunakan untuk insentif tenaga medis yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Penyesuaian atas tambahan pendapatan dan penganggaran belanjanya dilakukan pergeseran pada Perubahan Penjabaran V sehingga menyebabkan adanya penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan:		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	145.560.103.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp	571.274.863.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	<u>107.495.814.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	824.330.780.000,00
b. Belanja:		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	350.662.570.000,00
b) Belanja Hibah	Rp	37.883.100.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.648.500.000,00
d) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>75.090.761.000,00</u>
	Rp	466.284.931.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	61.581.221.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	285.398.879.000,00
c) Belanja modal	<u>Rp</u>	<u>97.976.652.000,00</u>
	Rp	444.956.752.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>911.241.683.000,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp	(86.910.903.000,00)
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan	Rp	91.160.903.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>4.250.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>86.910.903.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00



Yang terpengaruh dengan perubahan 1 SKPD : Dinas Kesehatan

Data pergerakan perubahan penjabaran APBD (Perubahan sebelum APBD-P ke-5) sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 5**.

6. Perubahan Penjabaran VI

Ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020

Perubahan penjabaran VI ini dilatarbelakangi terbitnya beberapa aturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- e. Surat Menteri Keuangan Nomor S-121/PK/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait penanganan COVID-19.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- g. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disese 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Penjabaran VI berkenaan dengan adanya kebijakan PMK No. 87/PMK.07/2020 dan KMK No. 15/KM.7/2020 bahwa Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah Tambahan dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III, dengan besaran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III sebesar Rp 3.202.500.000,00



- b. Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp14.940.590.000 atas dasar keberhasilan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu daerah yang mampu mempertahankan zona hijau dengan status tidak ada kasus atau daerah yang semula dalam zona non hijau menjadi risiko tidak ada kasus berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu dan telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan PMK mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dan laporan bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Penyesuaian atas diperolehnya BOK Tambahan dan DID Tambahan dan penganggaran belanjanya dilakukan pergeseran pada Perubahan Penjabaran VI sehingga menyebabkan adanya penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	145.560.103.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp	574.477.363.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	<u>122.436.404.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	842.473.870.000,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	350.662.570.000,00
b) Belanja Hibah	Rp	39.283.100.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.648.500.000,00
d) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>88.631.351.000,00</u>
	Rp	481.225.521.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	61.581.214.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	288.602.669.000,00
c) Belanja modal	<u>Rp</u>	<u>98.048.152.000,00</u>
	Rp	448.232.035.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>929.457.556.000,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp	(86.983.686.000,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	91.233.686.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>4.250.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>86.983.686.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Yang terpengaruh dengan perubahan 5 SKPD :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinperpa
3. BKD



4. SKPKD
5. Inspektorat

Data pergerakan perubahan penjabaran APBD (Perubahan sebelum APBD-P ke-6) sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 6**.

7. Perubahan Penjabaran VII

Ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020

Perubahan penjabaran VII ini dilatarbelakangi terbitnya beberapa aturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- e. Surat Menteri Keuangan Nomor S-121/PK/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait penanganan COVID-19.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- g. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.
- k. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/0010374 tentang Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota.

Perubahan Penjabaran VI berkenaan dengan penyesuaian Alokasi Belanja Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 untuk Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/0010374 yang menyebabkan



Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya bertambah Rp11.302.000.000,00 terdiri dari :

- a. Bantuan Sarpras Daerah bertambah Rp9.000.000.000,00
- b. Bantuan Pendidikan bertambah Rp2.302.000.000,00

Penyesuaian atas alokasi Belanja Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk penambahan pendapatan dan penganggaran belanjanya diakomodir dalam pergeseran pada Perubahan Penjabaran VII sehingga menyebabkan adanya penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	145.560.103.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp	574.477.363.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	<u>133.738.404.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	853.775.870.000,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	350.662.570.000,00
b) Belanja Hibah	Rp	39.283.100.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.648.500.000,00
d) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>88.611.351.000,00</u>
	Rp	481.205.521.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	61.589.739.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	288.631.144.000,00
c) Belanja modal	<u>Rp</u>	<u>109.333.152.000,00</u>
	Rp	459.554.035.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>940.759.556.000,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp	(86.983.686.000,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	91.233.686.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>4.250.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>86.983.686.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Yang terpengaruh dengan perubahan 4 SKPD :

1. Dinas Pendidikan
2. DPUPR
3. Dinarpus
4. SKPKD

Data pergerakan perubahan penjabaran APBD (Perubahan sebelum APBD-P ke-7) sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 7**.

Rekapitulasi Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan tentang penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 sebagai tindak lanjut refokusing sebagaimana dalam **Lampiran 8**.



8. Realisasi Kegiatan Penanggulangan Pandemi Covid-19

Hasil dari refocusing dan realokasi dari kegiatan lain selanjutnya dialokasikan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dari Belanja Langsung

No.	Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	SKPD
BIDANG KESEHATAN				
1	Kegiatan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	359.940.000	338.118.407	DINAS KESEHATAN
2	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	366.600.000	364.250.000	DINAS KESEHATAN
3	Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	197.670.000	187.327.000	DINAS KESEHATAN
4	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.926.118.600	1.920.467.000	DINAS KESEHATAN
5	Kegiatan Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK)	810.200.000	810.200.000	DINAS KESEHATAN
6	Kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan	600.000.000	600.000.000	BAG PEMERINTAHAN
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan	20.800.000	20.800.000	BPBD
8	Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	43.250.000	43.250.000	DKP
9	Kegiatan Fasilitas Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan Bagi Keluarga Miskin (JAMKESDA)	7.600.000.000	7.600.000.000	DINAS KESEHATAN
10	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pasar-Pasar Se-kota	51.180.000	51.180.000	DINDAGKOP & UMKM
11	Kegiatan Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru	535.980.000	535.380.000	DINAS PERHUBUNGAN
12	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan)	376.395.000	371.907.504	KEC. PEKALONGAN BARAT
13	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Wilayah Pekalongan Selatan (Dana Kelurahan)	354.174.000	352.383.380	KEC. PEKALONGAN SELATAN
14	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Wilayah Pekalongan Timur (Dana Kelurahan)	409.168.500	404.116.316	KEC. PEKALONGAN TIMUR
15	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Wilayah Pekalongan Utara (Dana Kelurahan)	444.088.000	441.935.256	KEC. PEKALONGAN UTARA
16	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	89.996.000	89.996.000	KECAMATAN SE KOTA
21	Kegiatan Pelayanan BLUD	6.665.057.263	6.665.057.263	RSUD BENDAN
22	Kegiatan Percepatan Penanganan COVID -19	6.775.635.000	6.775.235.000	RSUD BENDAN
23	TPP RSUD 3 Bulan 100%	766.142.000	766.142.000	RSUD BENDAN
24	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	582.800.000	582.800.000	SATPOL PP
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI				
1	Reses Anggota DPRD	1.164.320.000	1.164.320.000	SEKRETARIAT DPRD
	Jumlah	30.139.514.363	30.084.865.126	

Tabel 5. 2 Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dari Belanja Tidak Terduga

No.	Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	SKPD
BIDANG KESEHATAN				
1	Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Covid-19	550.000.000,00	516.643.873,00	DINAS KESEHATAN
2	Percepatan Penanganan Covid-19	640.570.000,00	574.783.820,00	DINAS KESEHATAN
3	Percepatan Penanganan Covid-19	580.292.000,00	578.220.000,00	RSUD BENDAN
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI				
1	Pemberian Bantuan kepada Santri, Madrasah Diniyah dan TPQ terdampak Covid-19	1.048.500.000	930.500.000	BAG KESRA
BANTUAN SOSIAL				
1	Kegiatan Fasilitas Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	23.505.260.000	23.197.361.800	DINSOS P2KB
2	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19	778.310.000,00	688.651.852,00	DINAS KESEHATAN
3	Penggantian dan Peremajaan Datacenter Kota Pekalongan untuk Efektifitas Pelaporan Refocusing	332.398.000,00	331.900.000,00	DISKOMINFO
	Jumlah	27.435.330.000	26.818.061.345	



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



Tabel 5. 3 Penanggulangan Pandemi Covid-19 dari Belanja Tidak Terduga (DID Tambahan Periode Pertama)

No	Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	SKPD
	PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH			
1	Pembangunan Kawasan Ekonomi Rakyat Tirta	215.000.000	213.326.000	DPU
2	Sertifikasi pertukangan	150.000.000	148.443.200	DPU
3	Peningkatan jalan Merak	180.000.000	173.689.000	DPU
4	Peningkatan jalan (Jl Ahmad Dahlan)	200.000.000	192.455.000	DPU
5	Peningkatan jalan (Jl Banyurip Ageng) MAN IC	200.000.000	188.513.000	DPU
6	Pemeliharaan jalan se kota	750.000.000	721.966.440	DPU
7	Pengadaan Pompa Pengendali banjir	125.500.000	122.547.500	DPU
8	Kajian struktur batik plaza dan Ruko Eks Grogolan Lama	150.000.000	76.630.000	DPU
9	Pengadaan Viar	60.000.000	54.000.450	DPU
10	Penataan paving lapangan sisi selatan Setda	200.000.000	196.042.000	DPU
11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Primer Saluran Jl. Patiunus	150.000.000	147.587.000	DPU
12	Pengurangan Pasar Darurat Sorogenen	200.000.000	179.070.000	DPU
13	Pengadaan MCK Komunal	400.000.000	389.028.950	DINPERKIM
14	Tim Gabungan Pengendalian Pengawasan Penegakan Hukum	225.000.000	221.550.750	SATPOL PP
15	Sound system dan instalasi Lap Mataram, Gapura	25.000.000	24.900.000	SATPOL PP
16	Padat karya pembersihan sungai dan saluran se Kota	385.000.000	279.721.035	DINPERINAKER
17	Pelatihan BLK bagi pencari kerja	100.000.000	99.553.766	DINPERINAKER
18	Pembangunan kios las di LIK dan Gedung Pengelola	1.175.000.000	952.886.854	DINPERINAKER
19	Sosialisasi HKI dan pendaftaran Indikasi Geografis Pekalongan ke Kemkumham (Kerjasama dengan FHUI)	40.000.000	39.000.000	DINPERINAKER
20	Fasilitasi Sertifikasi Produk makanan	40.000.000	39.985.000	DINPERINAKER
21	Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga dan perempuan korban kekerasan	72.657.000	69.799.000	DPMPPA
22	Pengendalian Pemakaian Pupuk dan Pestisida	147.500.000	146.877.500	DINPERPA
23	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	15.000.000	15.000.000	DINPERPA
24	Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan	45.000.000	44.392.000	DINPERPA
25	Rehab IPAL Lindi TPA	200.000.000	196.471.000	DLH
26	Bantuan pemeliharaan becak	66.240.000	66.240.000	DINAS PERHUBUNGAN
27	Peralatan Batik TV	200.000.000	199.686.800	DINKOMINFO
28	Pembuatan media Pembelajaran televisi di LPPL Batik TV	95.595.000	95.495.000	DINKOMINFO
29	Pembuatan media Pembelajaran Radio LPPL Radio Kota Batik	55.730.000	55.722.000	DINKOMINFO
30	Pelatihan Digital Marketing	50.000.000	50.000.000	DINDAGKOP & UMKM
31	Pemeliharaan Pasar Grogolan (perbaikan atap dan saluran)	200.000.000	197.162.000	DINDAGKOP & UMKM
32	Pemeliharaan Pasar Kuripan (perbaikan pintu gerbang, instalasi air khusus ayam, perbaikan cctv)	200.000.000	197.212.000	DINDAGKOP & UMKM
33	Pemeliharaan Pasar Banyurip (perbaikan iwf dan atap, perbaikan pintu pagar, perbaikan instalasi)	100.000.000	98.015.000	DINDAGKOP & UMKM
34	Pemeliharaan Pasar Podosugih (Keramik aula, perbaikan saluran)	100.000.000	98.168.000	DINDAGKOP & UMKM
35	Pemeliharaan Pasar Patiunus (pemasangan lampu, perbaikan talang air)	150.000.000	146.780.000	DINDAGKOP & UMKM
36	Pemeliharaan saluran pasar darurat sorogenen	200.000.000	194.747.000	DINDAGKOP & UMKM
37	Padat karya kampung wisata dan Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman)	150.000.000	150.000.000	DINPARBUDPORA
38	Pelatihan sertifikasi profesi dan uji kompetensi tenaga usaha dan pemandu wisata	50.000.000	50.000.000	DINPARBUDPORA
39	Jasa pembuatan konten komunitas seni pendukung pariwisata	35.000.000	35.000.000	DINPARBUDPORA
40	Fasilitasi PHRI Kota Pekalongan	40.000.000	40.000.000	DINPARBUDPORA
41	Pengurangan Obyek Wisata Pantai Slambaran	200.000.000	198.443.700	DINPARBUDPORA
42	Pengembangan bibit ikan unggul	35.000.000	35.000.000	DKP
43	Bantuan sarana tangkap	138.000.000	132.471.000	DKP
44	Bantuan saprodi budidaya perikanan	150.000.000	149.374.375	DKP
45	Premi asuransi nelayan	17.500.000	16.000.000	DKP
46	Lomba rancang busana dan peringatan hari batik	200.000.000	177.301.250	BAG. PEREKONOMIAN
47	Pengadaan Air Purifier	40.000.000	37.620.000	BAG. UMUM
48	Pelatihan pembuatan media pembelajaran daring	61.380.000	61.380.000	DINAS PENDIDIKAN
	BIDANG KESEHATAN			
1	Pengadaan Thermogun untuk Sekolah PAUD, SD, SMP	155.277.000	141.137.945	DINAS PENDIDIKAN
2	Pemeriksaan SWAB	1.508.400.000	1.508.352.700	DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	SKPD
3	Pengadaan Hand sanitizer untuk TPS (Pilkada)	35.580.000	35.580.000	DINAS KESEHATAN
4	Pengadaan APD untuk pelayanan publik	61.536.000	61.475.000	DINAS KESEHATAN
5	Pengadaan Rapid Tes	42.500.000	40.950.000	DINAS KESEHATAN
6	Desinfektan untuk Dinkes, TNI, Polri	33.650.000	33.650.000	DINAS KESEHATAN
7	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	567.438.000	562.968.410	DINAS KESEHATAN
8	Insentif nakes dan non nakes	286.975.000	282.445.000	DINAS KESEHATAN
9	Entry dan Pemutakhiran Data Kepesertaan BPJS Kesehatan,	51.204.000	50.704.000	DINAS KESEHATAN
10	Rehab Pustu Pabean	100.000.000	99.154.026	DINAS KESEHATAN
11	Pengurangan Puskesmas Jenggut	130.000.000	128.839.000	DINAS KESEHATAN
12	Pengadaan 130 Thermogun	39.000.000	38.775.000	DINAS KESEHATAN
13	Supporting Jogo Tonggo Tingkat kelurahan, RW, RT	178.350.000	178.340.000	DINAS KESEHATAN
14	Penyelenggaraan Rumah Isolasi Covid	488.375.000	482.294.141	DINAS KESEHATAN
15	Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dan Pemberian Biaya Hidup Penderita Covid-19	100.000.000	100.000.000	DINAS KESEHATAN
16	Pengadaan Alat Laboratorium PCR	1.736.097.400	1.734.645.542	RSUD BENDAN
17	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi	455.020.700	454.503.655	RSUD BENDAN
18	Belanja Jasa Laborat (Analisis Lab)	60.000.000	59.144.000	RSUD BENDAN
19	Insentif Petugas Penanganan COVID-19	127.800.000	127.800.000	RSUD BENDAN
20	Pengadaan mesin cuci	318.881.900	318.881.818	RSUD BENDAN
21	Belanja Perlengkapan Lab dan Kesehatan	347.200.000	346.829.395	RSUD BENDAN
22	Pengadaan APD (Percepatan Penanganan Covid-19)	120.000.000	119.970.000	RSUD BENDAN
23	Cadangan untuk Penanganan COVID-19	12.203.000		
Jumlah		14.940.590.000	14.321.693.202	

Tabel 5. 4 Penanggulangan Pandemi Covid-19 dari Belanja Tidak Terduga (DID Tambahan Periode Kedua)

No	Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	SKPD
PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH				
1	Normalisasi Saluran Aseminatur III (Depan Stadion Hoegoeng - Hilir Bandengan)	200.000.000	196.664.200	DPU
2	Rehab Saluran Kandang Ayam - Panjang Wetan	100.000.000	99.255.200	DPU
3	Normalisasi Saluran Jalan Surabaya dan Jl. Semarang	90.000.000	86.129.000	DPU
4	Rehab Saluran Gang Umbul	160.000.000	153.652.000	DPU
5	Normalisasi saluran Jl. Patriot Utara	100.000.000	97.208.750	DPU
6	Normalisasi saluran Pematius Jalan Jl. Sulawesi	200.000.000	192.493.000	DPU
7	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran Pematius Jalan se-Kota	100.000.000	96.799.600	DPU
8	Rehab Pintu Air Stasiun Pompa Sepucung	80.000.000	77.925.000	DPU
9	Normalisasi Saluran se-Kota	70.000.000	56.893.800	DPU
10	Normalisasi saluran Jl. Kurinci dan Pembuatan Pintu Pengendali	200.000.000	196.455.000	DPU
11	Normalisasi saluran Jl. Asem Binatur I	200.000.000	191.261.000	DPU
12	Normalisasi saluran Pematius Jalan A. Yani	200.000.000	185.877.000	DPU
13	Pengadaan Pompa Mobile & selangnya 2 unit @ Rp. 100.000.000	200.000.000	198.325.000	DPU
14	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	390.000.000	382.450.000	DINPERKIM
15	Pengadaan Truk Sedot Limbah	550.000.000	541.953.640	DLH
16	Sosialisasi Penyedotan Limbah kepada UMKM	15.000.000	15.000.000	DLH
17	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	15.000.000	15.000.000	DLH
18	Pembuatan Pagar Pasar Darurat Sorogon	50.000.000	49.259.000	DINDAGKOP & UMKM
19	Pemberdayaan UMKM Penghasil Masker	50.000.000	50.000.000	DINDAGKOP & UMKM
20	Pembuatan Tanggul Darurat	48.000.000	48.000.000	BPBD
21	Pendampingan Pengisian Aplikasi Jogo Tonggo	89.500.000	89.500.000	DPMPPA
22	Pembuatan Pagar Obyek Wisata Pekalongan Mangrove Park	200.000.000	198.195.000	DINPARBUDPORA
23	Padat Karya Tanggul Tirta	35.000.000	35.000.000	KEC. PEKALONGAN BARAT
24	Pengadaan Sarpras TIK (BLC)	400.000.000	268.250.000	DINKOMINFO
BIDANG KESEHATAN				
1	Pengadaan Spanduk Disiplin Protokol Kesehatan dan Hand Sanitizer	25.000.000	25.000.000	DINAS KESEHATAN
2	Peninggian halaman dan pagar Pustu Pasirsari	65.000.000	64.683.375	DINAS KESEHATAN
3	Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dan Pemberian Biaya Hidup Penderita Covid-19	110.000.000	108.000.000	DINAS KESEHATAN
4	Penataan halaman belakang Puskesmas Klego	60.000.000	59.475.618	DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	SKPD
5	Pengadaan Sarung Tangan untuk Petugas Pilkada	30.000.000	29.865.000	DINAS KESEHATAN
6	Pengadaan Masker	25.000.000	17.664.200	DINAS KESEHATAN
7	Peninggian eks BKPM	55.000.000	54.480.000	DINAS KESEHATAN
8	Pengadaan Alat Kesehatan	450.000.000	447.608.618	RSUD BENDAN
9	Talialis tenaga kesehatan terdampak Covid (50 omg x 1,4 jt)	70.000.000	70.000.000	RSUD BENDAN
10	Penyemprotan Desinfektan	27.000.000	26.900.000	BPBD
11	penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19	50.000.000	50.000.000	BAG. PROKOMPIM
12	Cadangan untuk Penanganan COVID-19	27.107.000	-	
	BIDANG BANTUAN SOSIAL			
1	Jaring Pengaman Sosial	7.770.000.000	7.599.287.000	DINSOS P2KB
	Jumlah	12.506.607.000	12.074.510.001	
TOTAL KEGIATAN PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020		85.022.041.363	83.299.129.674	



BAB VI
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Penerimaan / Sisa Pengeluaran
Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	909.607.710.000,00	953.155.394.614,95	43.547.684.614,95
Belanja dan Transfer	1.012.737.890.000,00	944.840.460.675,56	(67.897.429.324,44)
Surplus / (Defisit)	(103.130.180.000,00)	8.314.933.939,39	111.445.113.939,39
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	107.651.710.000,00	108.747.997.650,61	1.096.287.650,61
Pengeluaran Pembiayaan	4.521.530.000,00	4.520.630.000,00	(900.000,00)
Pembiayaan Netto	103.130.180.000,00	104.227.367.650,61	1.097.187.650,61
Sisa Lebih Pembiayaan			
Anggaran	0,00	112.542.301.590,00	112.542.301.590,00

Pada tahun 2020, dalam upaya mengatasi penyebaran covid-10 Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai upaya yang dituangkan dalam refokusing anggaran yang telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan ringkasan sebagai berikut :

Tabel 6. 2 Perubahan Anggaran Tahun 2020

Uraian	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Refokusing (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5)
Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	981.361.482.000,00	853.775.870.000,00	(127.585.612.000,00)	909.607.710.000,00
Belanja dan Transfer	1.055.857.482.000,00	940.759.556.000,00	(115.097.926.000,00)	1.012.737.890.000,00
Surplus / (Defisit)	(74.496.000.000,00)	(86.983.686.000,00)	(12.487.686.000,00)	(103.130.180.000,00)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	78.746.000.000,00	91.233.686.000,00	12.487.686.000,00	107.651.710.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.521.530.000,00
Pembiayaan Netto	74.496.000.000,00	86.983.686.000,00	12.487.686.000,00	103.130.180.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan				
Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00



a. Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 953.155.394.614,95 atau 104,79% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp909.607.710.000,00. Realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 1,82% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp971.624.464.120,61.

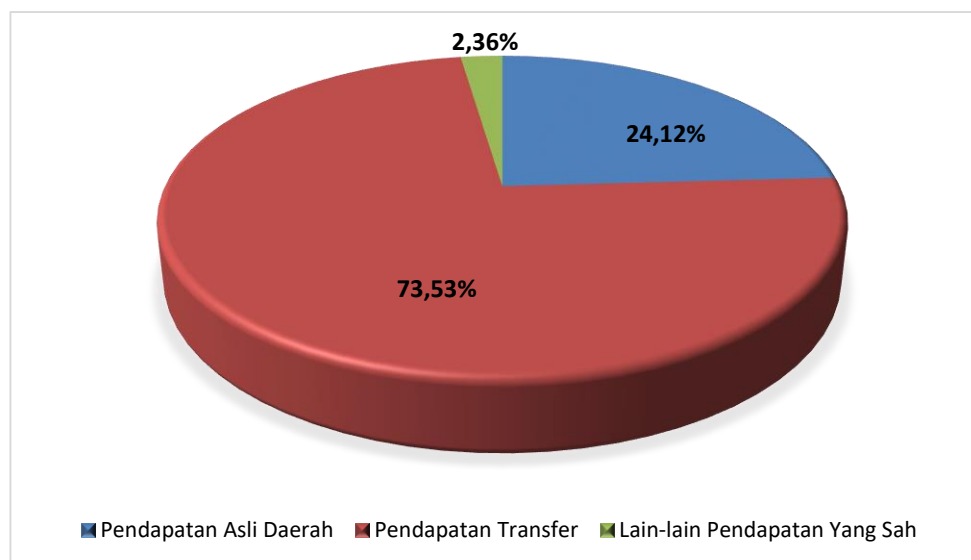
Saat dilakukan refocusing, anggaran pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp127.585.612.000,00 dari anggaran penetapan sebesar Rp981.361.482.000,00 menjadi anggaran setelah refocusing sebesar Rp853.775.870.000,00. Pada perubahan anggaran pendapatan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp909.607.710.000,00.

Rincian pendapatan daerah sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. 3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

Pendapatan Daerah :	TA. 2020		%	TA. 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	172.993.386.000,00	229.867.935.360,95	132,88	212.777.435.293,61
Pendapatan Transfer	714.117.924.000,00	700.838.013.854,00	98,14	715.761.199.193,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	22.496.400.000,00	22.449.445.400,00	99,79	43.085.829.634,00
Jumlah	909.607.710.000,00	953.155.394.614,95	104,79	971.624.464.120,61

Proporsi masing-masing jenis pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 6 1 Proporsi Jenis Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah TA. 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pos Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 24,12% terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 73,53% dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar 2,36%.



6.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp218.020.320.000,00, dengan adanya pandemi covid-19 target mengalami refocusing turun menjadi sebesar Rp145.560.103.000,00, namun setelah melihat perkembangan yang ada, target pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp172.993.386.000,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebesar Rp229.867.935.360,95 atau sebesar 132,88% dari target setelah perubahan sebesar Rp172.993.386.000,00. Realisasi pendapatan asli daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	65.190.000.000,00	76.255.221.742,00	116,97	87.578.474.262,00
Retribusi Daerah	13.070.643.000,00	14.870.124.919,00	113,77	16.667.656.492,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.358.000.000,00	5.821.083.050,00	108,64	6.101.173.105,00
Lain-lain PAD Yang Sah	89.374.743.000,00	132.921.505.649,95	148,72	102.430.131.434,61
Jumlah	172.993.386.000,00	229.867.935.360,95	132,88	212.777.435.293,61

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 8,03% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp212.777.435.293,61. Realisasi masing-masing jenis pendapatan asli daerah tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan suatu bentuk iuran wajib yang dibebankan kepada perorangan dan atau badan tanpa imbalan langsung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 9 jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan selaku SKPKD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa *“apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD”*. Pemungutan pajak daerah di Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat (*official assessment*) dan mekanisme penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*). Jenis pajak yang menggunakan mekanisme *official assessment* seperti PBB P2, pajak reklame dan pajak air tanah, sedangkan yang menggunakan *self assessment* seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan



jalan, BPHTB, dan pajak parkir. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp76.255.221.742,00 atau sebesar 116,97% dari target setelah perubahan sebesar Rp65.190.000.000,00. Penerimaan pajak daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 12,93% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp87.578.474.262,00.

Dengan adanya pandemi covid-19 salah satu sumber pendapatan yang sangat terpengaruh adalah pajak daerah, pada anggaran penetapan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp85.250.000.000,00 dengan refokusing diturunkan menjadi sebesar Rp53.423.000.000,00, namun pada perubahan anggaran dinaikkan menjadi sebesar Rp65.190.000.000,00. Hampir semua jenis pajak daerah mengalami penyesuaian target dan penurunan terbesar terjadi pada pajak hiburan, karena mulai bulan April sampai akhir tahun sebagian besar usaha hiburan seperti arena ketangkasan, bioskop, billiar dan lain-lain mengalami penutupan.

Adapun rincian pendapatan pajak daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 5 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019

Pajak Daerah :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hotel	4.500.000.000,00	4.964.375.637,00	110,32	7.437.962.444,00
Restoran	9.000.000.000,00	9.978.634.015,00	110,87	13.470.213.677,00
Hiburan	2.000.000.000,00	2.005.995.328,00	100,30	5.549.734.728,00
Reklame	1.500.000.000,00	1.718.062.911,00	114,54	2.263.405.846,00
Penerangan Jalan	20.710.000.000,00	21.101.750.935,00	101,89	21.840.421.391,00
Parkir	980.000.000,00	893.030.186,00	91,13	1.874.020.896,00
Air Tanah	2.500.000.000,00	2.999.527.177,00	119,98	1.436.884.068,00
PBB	10.000.000.000,00	13.942.245.025,00	139,42	14.212.332.279,00
BPHTB	14.000.000.000,00	18.651.600.528,00	133,23	19.493.498.933,00
Jumlah	65.190.000.000,00	76.255.221.742,00	116,97	87.578.474.262,00

Masing – masing jenis pajak dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Penerimaan pajak hotel berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dengan tarif sebesar 10% dari pendapatan hotel setiap bulan. Target pajak hotel pada penetapan APBD sebesar Rp7.500.000.000,00, dengan refokusing mengalami penurunan sebesar Rp3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.500.000.000,00.

Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2020 adalah sebesar Rp4.964.375.637,00 atau sebesar 110,32% dari target setelah perubahan sebesar Rp4.500.000.000,00. Pendapatan pajak hotel dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 6 Realisasi Pajak Hotel Tahun 2020 dan 2019

Pajak Hotel :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hotel Bintang	4.380.000.000,00	4.843.136.058,00	110,57	7.340.690.444,00
Losmen/Rumah Kos	120.000.000,00	121.239.579,00	101,03	97.272.000,00
Jumlah	4.500.000.000,00	4.964.375.637,00	110,32	7.437.962.444,00



Penerimaan pajak hotel tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33,26% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun 2019 sebesar Rp7.437.962.444,00. Penurunan penerimaan pajak hotel dikarenakan adanya penurunan tingkat hunian hotel sebagai akibat adanya pandemi Covid-19.

b. Pajak Restoran

Penerimaan pajak restoran berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013. Besaran tarif pajak restoran sebesar 10% dari omset. Target pendapatan pajak restoran ditetapkan sebesar Rp12.850.000.000,00 pada refocusing mengalami penyesuaian berupa pengurangan separuh, sehingga menjadi sebesar Rp6.425.000.000,00.

Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020 adalah sebesar Rp9.978.634.015,00 atau sebesar 110,87% dari target setelah perubahan sebesar Rp9.000.000.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. 7 Realisasi Pajak Restoran tahun 2020 dan 2019

Pajak Restoran	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Restoran	7.250.000.000,00	7.980.971.565,00	110,08	11.031.970.455,00
Katering	1.750.000.000,00	1.997.662.450,00	114,15	2.438.243.222,00
Jumlah	9.000.000.000,00	9.978.634.015,00	110,87	13.470.213.677,00

Penerimaan pajak restoran tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 25,92% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp13.470.213.677,00. Penurunan penerimaan pajak restoran dikarenakan adanya penurunan omset restoran sebagai akibat adanya pandemi Covid-19.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, jenis pajak hiburan terdiri : dari pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop besar 20%, bioskop mini sebesar 10% dan bioskop keliling sebesar 5%. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15%. Kontes kecantikan, binaraga, pameran dan sejenisnya sebesar 15%. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30%. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15%. Permainan bilyar, golf dan boling sebesar 25%. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25%. Panti Pijat, refleksi, mandi uap/spa dan sejenisnya sebesar 45%. Pusat Kebugaran dan sejenisnya sebesar 10%. Pertandingan olahraga dan sejenisnya sebesar 10%. Kesenian pertunjukan rakyat/ tradisional sebesar 5%. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2020 adalah sebesar Rp2.005.995.328,00 atau sebesar 100,30% dari target setelah perubahan sebesar Rp2.000.000.000,00. Pada penetapan APBD, pajak hiburan ditargetkan sebesar Rp6.200.000.000,00, pada refocusing target diturunkan menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 dan pada perubahan anggaran kembali



diturunkan menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00. Penerimaan pajak hiburan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. 8 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2020 dan 2019

Pajak Hiburan :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tontonan Film/Bioskop	1.110.000.000,00	1.000.725.908,00	90,16	3.538.591.817,00
Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	12.500.000,00	1.500.000,00	12,00	14.395.000,00
Karaoke	225.000.000,00	57.374.533,00	25,50	155.924.287,00
Permainan Biliar	2.500.000,00	3.900.000,00	156,00	1.650.000,00
Permainan Ketangkasan	600.000.000,00	891.760.962,00	148,63	1.754.353.466,00
Mandi Uap/Spa	25.000.000,00	15.220.289,00	60,88	34.524.156,00
Pusat Kebugaran	25.000.000,00	35.513.636,00	142,05	50.296.000,00
Jumlah	2.000.000.000,00	2.005.995.328,00	100,30	5.549.734.726,00

Penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan sebesar 63,85% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019 sebesar Rp5.549.734.726,00. Hal ini dikarenakan adanya penutupan semua tempat hiburan mulai April 2020, dalam rangka menahan laju penyebaran Virus Covid-19.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dengan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Pada penetapan APBD 2020, pajak reklame ditargetkan sebesar Rp2.400.000.000,00, ada refokusing anggaran diturunkan menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 dan pada perubahan anggaran dinaikkan menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00. Dengan adanya pandemi covid-19 banyak perusahaan yang mengalami kesulitan sehingga mengurangi anggaran untuk promosi, dengan berkurangnya anggaran promosi dari perusahaan ini tentu saja akan mengurangi pula penerimaan pajak reklame.

Realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2020 adalah sebesar Rp1.718.062.911,00 atau sebesar 114,54% dari target yang telah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp1.500.000.000,00. Penerimaan pajak ini mengalami penurunan sebesar 24,09% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak reklame tahun 2019 sebesar Rp2.263.405.846,00.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif sebesar 9% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sedangkan 3% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dan 1,5% untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Penerimaan pajak penerangan jalan ditargetkan sebesar Rp21.600.000.000,00 pada refokusing anggaran diturunkan menjadi sebesar Rp17.663.000.000,00 dan pada perubahan anggaran dinaikkan menjadi sebesar



Rp20.710.000.000,00. Pada awal pandemi, pajak penerangan jalan dari sektor industri diperkirakan turun, namun setelah diperhitungkan kembali ternyata penurunannya tidak sebesar yang diperkirakan sehingga pada perubahan anggaran target dapat dinaikkan walaupun belum bisa sebesar pada anggaran penetapan.

Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2020 adalah sebesar Rp21.101.750.935,00 atau sebesar 101,89% dari target setelah perubahan sebesar Rp20.710.000.000,00. Rincian pajak penerangan jalan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 9 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020 dan 2019

Pajak Penerangan Jalan :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerangan Jalan PLN	20.695.000.000,00	21.065.740.403,00	101,79	21.813.828.431,00
Penerangan Jalan Non PLN	15.000.000,00	36.010.532,00	240,07	26.592.960,00
Jumlah	20.710.000.000,00	21.101.750.935,00	101,89	21.840.421.391,00

Penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,38% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2019 sebesar Rp21.840.421.391,00. Penurunan pajak penerangan jalan ini karena adanya insentif berupa penggratisan pembayaran listrik bagi pelanggan yang menggunakan daya 450 VA karena terdampak pandemi Covid-19.

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Target penerimaan Pajak parkir ditetapkan sebesar Rp1.800.000.000,00 dengan refocusing disesuaikan menjadi sebesar Rp980.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2020 adalah sebesar Rp893.030.186,00 atau sebesar 91,13% dari target setelah perubahan sebesar Rp980.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 52,35% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2019 sebesar Rp1.874.020.896,00. Penurunan penerimaan pajak parkir dikarenakan adanya pembatasan sosial masyarakat dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat, sehingga lahan parkir menjadi relatif lebih sepi.

g. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah diatur dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air tanah yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Pada penetapan APBD, target pajak air tanah ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00 dan pada refocusing anggaran tidak mengalami perubahan, bahkan pada perubahan APBD target penerimaan bertambah menjadi Rp2.500.000.000,00 hal ini karena dengan adanya penerapan tarif pemakaian air tanah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jateng Nomor 19 Tahun 2017



tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp2.999.527.177,00 atau sebesar 119,98% dari target setelah perubahan sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah mengalami kenaikan sebesar 108,75% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019 sebesar Rp1.436.884.068,00.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Pada penetapan APBD 2020 target pendapatan PBB P2 sebesar Rp15.200.000.000,00, pada refokusing anggaran diturunkan menjadi sebesar Rp6.080.000.000,00, namun setelah melihat perkembangan penerimaan pendapatan di semester satu, maka pada anggaran perubahan target pendapatan dinaikkan menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 adalah sebesar Rp13.942.245.025,00 atau sebesar 139,42% dari target setelah perubahan sebesar Rp10.000.000.000,00. Penerimaan PBB P2 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,9% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019 sebesar Rp14.212.332.279,00. Penurunan tetap terjadi walaupun ada kenaikan nilai perolehan obyek pajak sebagai dasar pengenaan PBB P2, karena perekonomian masyarakat dalam kondisi menurun sebagai akibat Pandemi Covid-19.

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak.

Target pendapatan dari BPHTB ditetapkan sebesar Rp16.500.000.000,00, pada refokusing diturunkan menjadi sebesar Rp12.375.000.000,00 dan pada perubahan anggaran dinaikkan menjadi sebesar Rp14.000.000.000,00.

Realisasi penerimaan pajak BPHTB adalah sebesar Rp18.651.600.528,00 atau sebesar 133,23% dari target setelah perubahan sebesar Rp14.000.000.000,00. Penerimaan pajak BPHTB tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,32% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB Tahun 2019 sebesar Rp19.493.498.933,00. Penurunan tetap terjadi walaupun ada kenaikan nilai perolehan obyek pajak sebagai dasar pengenaan BPHTB, karena perekonomian masyarakat dalam kondisi menurun sebagai akibat Pandemi Covid-19.

6.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan



Asli Daerah Kota Pekalongan meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu.

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, dan terkait langsung dengan pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD Penghasil Pendapatan.

Pendapatan retribusi daerah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp18.290.820.000,00, dilakukan refocusing sehingga turun menjadi sebesar Rp11.763.223.000,00, namun pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp13.070.643.000,00. Penurunan target dengan prosentase terbesar pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 88,36% dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 84,26%.

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp14.870.124.919,00 atau sebesar 113,77% dari target setelah perubahan sebesar Rp13.070.643.000,00. Penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 10,78% jika dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp16.667.656.492,00. Rincian pendapatan retribusi daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 10 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019

Retribusi Daerah :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Ret. Jasa Umum	9.038.200.000,00	9.978.171.838,00	110,40	10.591.350.400,00
Ret. Jasa Usaha	3.085.193.000,00	3.458.543.331,00	112,10	4.418.826.092,00
Ret. Perijinan Tertentu	947.250.000,00	1.433.409.750,00	151,32	1.657.480.000,00
Jumlah	13.070.643.000,00	14.870.124.919,00	113,77	16.667.656.492,00

Rincian lebih lanjut pendapatan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

Penerimaan retribusi jasa umum ditetapkan sebesar Rp12.120.600.000,00, pada refocusing disesuaikan turun menjadi sebesar Rp8.618.680.000,00 dan pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp9.038.200.000,00.

Realisasi penerimaan retribusi jasa umum tahun 2020 adalah sebesar Rp9.978.171.838,00 atau sebesar 88,09% dari target setelah perubahan sebesar Rp9.038.200.000,00. Penerimaan retribusi jasa umum tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,79% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp10.591.350.400,00. Penerimaan retribusi jasa umum dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 11 Realisasi Retribusi Umum Tahun 2020 dan 2019

Retribusi Jasa Umum	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelayanan Kesehatan	133.200.000,00	149.922.500,00	112,55	183.282.000,00
Pelayanan Persampahan /Kebersihan	700.000.000,00	683.180.000,00	97,60	692.966.000,00
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan	40.000.000,00	39.870.000,00	99,68	34.689.000,00
Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	1.000.000.000,00	1.061.652.000,00	106,17	1.240.036.000,00
Pelayanan Pasar	1.800.000.000,00	2.298.607.328,00	127,70	2.554.491.700,00
Pengujian Kendaraan Bermotor	315.000.000,00	390.602.800,00	124,00	494.418.400,00
Pelayanan TPI	5.000.000.000,00	5.305.162.710,00	106,10	5.326.851.300,00
Tera dan Tera Ulang	50.000.000,00	49.174.500,00	98,35	64.616.000,00
Jumlah	9.038.200.000,00	9.978.171.838,00	110,40	10.591.350.400,00



Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 jenis retribusi daerah yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu :

1. Retribusi Persampahan/Kebersihan tidak tercapai karena dengan adanya pandemi, beberapa usaha seperti hotel dan mall relatif menurun aktifitasnya, sehingga volume sampah yang terangkut juga berkurang yang mempengaruhi retribusi yang dibayarkan.
2. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Jenazah tidak memenuhi target karena dengan adanya pandemi Covid-19 wajib retribusi tidak bisa melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo.
3. Retribusi Tera dan Tera Ulang tidak mencapai target karena dengan adanya pandemi Covid-19 animo dan partisipasi wajib tera/pedagang di pasar rakyat untuk melakukan uji tera mengalami penurunan. Selain itu untuk rumah sakit saat ini tidak dikenakan tera.

b. Retribusi Jasa Usaha

Penerimaan retribusi jasa usaha ditetapkan sebesar Rp4.576.220.000,00, pada refokusing disesuaikan turun menjadi sebesar Rp2.324.543.000,00 dan pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp3.085.193.000,00.

Penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2020 adalah sebesar Rp3.458.543.331,00 atau sebesar 112,10% dari target setelah perubahan sebesar Rp3.085.193.000,00. Penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 21,73% jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2019 sebesar Rp4.418.826.092,00. Penerimaan retribusi jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. 12 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2020 dan 2019

Retribusi Jasa Usaha:	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pemakaian Kekayaan Daerah	216.000.000,00	158.812.875,00	73,52	360.741.400,00
Tempat Penginapan /Villa	30.000.000,00	23.700.000,00	79,00	8.400.000,00
Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	36.345.000,00	103,84	21.635.000,00
Rumah Potong Hewan	85.500.000,00	74.589.000,00	87,24	90.007.500,00
Tempat Rekreasi dan Olahraga	173.193.000,00	169.681.500,00	97,97	647.670.250,00
Pemakaian Kekayaan Daerah :				
- Sewa Rumah Dinas	65.000.000,00	101.801.988,00	156,62	79.972.578,00
- Sewa Ruangan/Bagunan/ Gedung Pertemuan	3.000.000,00	5.250.000,00	175,00	20.700.000,00
- Sewa Alat Berat	75.000.000,00	128.225.000,00	170,97	210.850.000,00
- Sewa Lahan Titik Strategis	150.000.000,00	226.428.001,00	150,95	263.177.800,00
- Sewa Tanah	180.000.000,00	293.779.325,00	163,21	251.995.498,00
- Sewa Garapan Eks Bengkok	860.000.000,00	907.815.000,00	105,56	983.357.200,00
- Sewa Alat Laboratorium	87.500.000,00	186.700.000,00	213,37	182.150.000,00
- Sewa Hunian Rusunawa	952.000.000,00	1.010.987.642,00	106,20	1.247.504.866,00
- Sewa Alat-alat Berat	96.500.000,00	96.500.000,00	100,00	
- Sarana Prasarana Reklame	25.000.000,00	5.000.000,00	20,00	38.500.000,00
- Pengujian Laboratorium Lingkungan	25.000.000,00	24.098.000,00	96,39	12.164.000,00
- Sewa MCK	26.500.000,00	8.830.000,00	33,32	
Jumlah	3.085.193.000,00	3.458.543.331,00	112,10	4.418.826.092,00



Berdasarkan tabel diatas, terdapat retribusi jasa usaha yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, antara lain :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak tercapai karena dengan adanya pembatasan sosial dan jam malam, sehingga banyak pedagang yang tidak berjualan.
2. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa tidak tercapai karena kalah bersaing dengan rumah kos/penginapan baru yang fasilitasnya lebih lengkap di sekitar Kelurahan Medono dan banyak penghuni (sales) yang pindah tugas.
3. Retribusi rumah pemotongan hewan tidak tercapai karena turunnya jumlah sapi yang dipotong di RPH yang disebabkan oleh turunnya omset penjualan daging dan adanya pasokan daging impor ke pasar tradisional.
4. Retribusi Tempat rekreasi dan olah raga tidak tercapai karena :
 - seringnya terjadi rob di jalan akses menuju obyek wisata PIM
 - adanya pembatasan sosial/kerumunan menyebabkan berkurangnya pengunjung museum batik dan penyewa stadion hoegeng
5. Retribusi PKD sewa prasarana reklame karena kurangnya minat pihak ketiga untuk menyewa sarpras reklame milik Pemkot Pekalongan.
6. Retribusi PKD Pengujian Laboratorium Lingkungan tidak tercapai karena dalam rangka mencegah penularan Covid-19, permintaan pengambilan sampel air limbah di IPAL rumah sakit tidak dilaksanakan.
7. Retribusi PKD sewa MCK tidak memenuhi target karena selama pandemi Covid-19 layanan toilet di gapura alun-alun ditutup untuk menghindari kerumunan.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Penerimaan retribusi perijinan tertentu ditetapkan sebesar Rp1.594.000.000,00, pada refocusing disesuaikan turun menjadi sebesar Rp820.000.000,00 dan pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp947.250.000,00.

Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun 2020 adalah sebesar Rp1.433.409.750,00 atau sebesar 151,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp947.250.000,00. Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 13,52% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi tahun 2019 sebesar Rp1.657.480.000,00. Penerimaan retribusi perijinan tertentu dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 13 Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2020 dan 2019

Retribusi Perijinan Tertentu :	TA. 2020			2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Izin Mendirikan Bangunan	900.000.000,00	1.378.331.350,00	153,15	1.607.129.600,00
Izin Trayek	2.250.000,00	2.518.400,00	116,80	4.454.400,00
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	45.000.000,00	52.560.000,00	151,32	45.896.000,00
Jumlah	947.250.000,00	1.433.409.750,00	151,32	1.657.480.000,00

Berdasarkan tabel diatas, semua retribusi memenuhi target.



6.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan – Bank, Lembaga Keuangan – Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 adalah sebesar Rp5.821.083.050,00 atau sebesar 108,64% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp5.358.000.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 4,59% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp6.101.173.105,00. Rincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 14 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2020 dan 2019

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2020			2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda				
PD.BPR Bank Pekalongan	561.000.000,00	561.120.276,00	100,02	575.000.000,00
PT Bank Jateng	4.138.000.000,00	4.597.516.188,00	111,10	4.138.095.336,00
PD.BPR BKK Kota Pekalongan	160.000.000,00	160.595.604,00	100,37	122.505.501,00
PDAM Kota Pekalongan	499.000.000,00	499.247.703,00	100,05	1.265.572.268,00
PT. PRPP Jawa Tengah	0,00	2.603.279,00	100,00	-
Jumlah	5.358.000.000,00	5.821.083.050,00	108,64	6.101.173.105,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan sudah memenuhi target.

6.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp108.116.500.000,00 pada refokusing anggaran turun sebesar Rp33.100.620.000,00 menjadi sebesar Rp75.015.880.000,00. Pada perubahan anggaran naik sehingga menjadi sebesar Rp89.374.743.000,00.

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2020 adalah sebesar Rp132.921.505.649,95 atau sebesar 149,58% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp89.374.743.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 30,51% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp102.430.131.434,61.



Tabel 6. 15 Rincian lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019

Lain-lain PAD Yang Sah :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	276.000.000,00	279.356.174,00	101,22	279.230.774,00
Penerimaan Jasa Giro	1.510.000.000,00	1.817.374.066,00	120,36	1.895.336.165,00
Penerimaan bunga deposito	5.000.000.000,00	6.643.840.654,00	132,88	8.241.036.971,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15.000.000,00	3.435.000,00	22,90	7.100.000,00
Pendapatan Denda Keterlambatan	5.000.000,00	295.977.462,00	5.919,55	200.079.367,00
Pendapatan denda pajak	120.000.000,00	354.312.137,00	295,26	549.415.125,00
Pendapatan denda retribusi	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Pendapatan dari pengembalian	1.020.000.000,00	395.461.213,00	38,77	1.527.506.719,00
Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain	1.041.500.000,00	2.036.123.119,00	195,50	824.348.471,00
Pendapatan BLUD	80.275.243.000,00	121.001.366.096,95	150,73	88.193.320.415,61
Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir	12.000.000,00	6.439.819,00	53,67	105.369.201,00
Pendapatan bunga dana cadangan	100.000.000,00	86.819.909,00	86,82	607.388.226,00
Jumlah	89.374.743.000,00	132.921.505.649,95	148,72	102.430.131.434,61

Realisasi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

Penerimaan atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan ditetapkan sebesar Rp276.000.000,00 tidak dilakukan refokusing maupun perubahan anggaran.

Realisasi penerimaan atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tahun 2020 adalah sebesar Rp279.356.174,00 atau sebesar 101,22% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp276.000.000,00. Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada tahun 2020 berupa penjualan peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan drum bekas dan penjualan hasil pennebangan pohon.

Realisasi penerimaan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,04% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp279.230.774,00.

b. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan jasa giro ditetapkan sebesar Rp1.510.000.000,00 tidak dilakukan refokusing maupun perubahan anggaran.

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro atas rekening giro kas umum daerah dan bunga atas rekening bendahara pengeluaran se Kota Pekalongan yang dikelola oleh PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan. Realisasi penerimaan jasa giro tahun 2020 adalah sebesar Rp1.817.374.066,00 atau sebesar 120,37% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.510.000.000,00. Penerimaan jasa giro tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 4,10% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp1.895.336.165,00.

c. Penerimaan Bunga Deposito

Penerimaan bunga deposito ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000,00 pada refokusing turun menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00. Penurunan ini karena menyesuaikan BI rate yang turun sejak bulan april 2020.

Penerimaan bunga deposito merupakan hasil penempatan kas daerah yang belum dimanfaatkan untuk belanja daerah (*idle cash*) pada bank umum yang sehat. Realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2020 adalah sebesar Rp6.643.840.654,00 atau sebesar 132,88% dari target yang telah ditetapkan



sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 19,38% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2019 sebesar Rp8.241.036.971,00. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan BI rate sebagai acuan pemberian bunga deposito bagi Bank di seluruh Indonesia.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Realisasi TGR merupakan akumulasi dari TGR kerugian uang daerah dan TGR kerugian barang daerah. Penerimaan TGR ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 tidak dilakukan refokusing maupun perubahan anggaran.

Realisasi penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.435.000,00 atau sebesar 22,90% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Realisasi tahun 2020 ini menurun sebesar 51,62% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp7.100.000,00.

e. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa/barang karena melewati batas akhir kontrak. Penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00 pada refokusing turun menjadi sebesar Rp187.500.000,00 dan pada perubahan anggaran diturunkan lagi menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00.

Realisasi penerimaan tahun 2020 sebesar Rp295.977.462,00 atau 5.919,55% dari target setelah perubahan yaitu sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 47,93% dibanding dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp200.079.367,00.

f. Pendapatan Denda Pajak

Penerimaan denda pajak ditetapkan sebesar Rp580.000.000,00 pada refokusing turun menjadi sebesar Rp20.000.000,00 dan pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp120.000.000,00

Realisasi dari penerimaan denda pajak merupakan pendapatan denda yang bersumber dari denda pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan. Realisasi penerimaan tahun 2020 adalah sebesar Rp354.312.137,00 atau sebesar 295,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00. Realisasi penerimaan denda pajak PBB merupakan realisasi denda atas keterlambatan pembayaran pokok pajak PBB, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp549.415.125,00, maka realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 35,51%.

g. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 pada refokusing diturunkan menjadi sebesar Rp900.000,00 dan pada perubahan anggaran kembali diturunkan menjadi sebesar Rp0.

Realisasi pendapatan denda retribusi merupakan penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi sewa *cool storage* di Dinas Kelautan dan Perikanan. Realisasi penerimaan denda retribusi sebesar Rp1.000.000,00 dari target sebesar 0,00.



h. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari pengembalian ditetapkan sebesar Rp1.020.000.000,00 tidak dilakukan refokusing maupun perubahan anggaran.

Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp395.461.213,00 atau sebesar 38,77% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.020.000.000,00.

Rincian pendapatan dari pengembalian terdiri dari :

Tabel 6. 16 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020			2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian :				
Pajak Penghasilan Pasal 21	475.000.000,00	65.120.622,00	13,71	943.133.287,00
Pengembalian Bendahara	0,00	160.230,00	100,00	132.680,00
Iuran PT. Taspen	0,00	1.903.434,00	100,00	0,00
Kelebihan Belanja Tahun Sebelumnya	545.000.000,00	328.276.927,00	60,23	584.240.752,00
Jumlah	1.020.000.000,00	395.461.213,00	38,77	1.527.506.719,00

Pendapatan dari pengembalian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 terealisasi sebesar Rp65.120.622,00, yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 karena adanya kelebihan setor.
2. Pengembalian Bendahara sebesar Rp160.230,00, merupakan pengembalian atas catatan penerimaan karena temuan pemeriksa.
3. Pengembalian Iuran PT. Taspen sebesar Rp1.903.434,00, merupakan pengembalian atas kelebihan penyetoran JKK dan JKM yang disebabkan oleh keterlambatan pelaporan PNS yang meninggal dunia. Selain itu terdapat kesalahan transfer dari Taspen sebesar Rp606.908,00 yang diminta untuk dikembalikan.
4. Pengembalian Kelebihan Belanja Tahun Sebelumnya sebesar Rp328.276.927,00 merupakan setor kembali belanja SKPD tahun-tahun sebelumnya atas temuan-temuan pemeriksa.

i. Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain

Pendapatan hasil sewa, penyiaran, sumbangan dan lain-lain ditetapkan sebesar Rp1.401.000.000,00 pada refokusing diturunkan menjadi sebesar Rp1.041.500.000,00.

Realisasi pendapatan hasil sewa, penyiaran, sumbangan dan lain-lain adalah sebesar Rp2.036.123.119,00 atau sebesar 195,50% dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp1.041.500.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 6. 17 Realisasi Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020			TA 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan sewa handtractor	0,00	0,00	#DIV/0!	8.160.000,00
Penerimaan Kebon Bibit	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	2.500.000,00
Penerimaan RSPD	100.000.000,00	101.201.038,00	101,20	185.542.678,00
Penerimaan TV Batik	150.000.000,00	150.558.205,00	100,37	134.208.935,00
Penerimaan Aset Kemitraan	100.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00
Penerimaan Sewa Ruko	585.000.000,00	1.564.500.000,00	267,44	0,00
Penerimaan Sewa Tempat ATM, Kantor K	102.500.000,00	107.500.000,00	104,88	0,00
Penerimaan lainnya	1.000.000,00	109.363.876,00	10.936,39	233.936.858,00
Jumlah	1.041.500.000,00	2.036.123.119,00	195,50	824.348.471,00

j. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD ditetapkan sebesar Rp95.000.000.000,00 pada refocusing diturunkan menjadi sebesar Rp65.945.480.000,00 dan pada perubahan anggaran dinaikkan menjadi sebesar Rp80.275.243.000,00.

Realisasi pendapatan BLUD tahun 2020 adalah sebesar Rp121.001.366.096,95 atau sebesar 150,73% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp80.275.243.000,00. Penerimaan dari BLUD mengalami peningkatan sebesar 37,20% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp88.193.320.425,61.

Rincian penerimaan BLUD dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 18 Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2020 dan 2019

Pendapatan BLUD :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BLUD RSUD Bendan	63.575.243.000,00	104.357.576.384,95	164,15	70.469.240.049,61
BLUD Puskesmas	-	-	-	16.904.880.594,00
BLUD BKPM	-	-	-	627.230.377,00
BLUD Puskesmas Sokorejo	1.186.000.000,00	1.227.937.222,00	103,54	-
BLUD Puskesmas Noyontaan	886.000.000,00	821.277.899,00	92,70	-
BLUD Puskesmas Kramatsari	786.000.000,00	850.058.497,00	108,15	-
BLUD Puskesmas Dukuh	936.000.000,00	948.786.941,00	101,37	-
BLUD Puskesmas Buaran	586.000.000,00	739.158.677,00	126,14	-
BLUD Puskesmas Klego	836.000.000,00	808.118.403,00	96,66	-
BLUD Puskesmas Medono	586.000.000,00	650.309.794,00	110,97	-
BLUD Puskesmas Krapyak Kidul	1.086.000.000,00	1.125.325.679,00	103,62	-
BLUD Puskesmas Jenggot	1.386.000.000,00	1.249.746.360,00	90,17	-
BLUD Puskesmas Pusesmas Tirta	986.000.000,00	1.022.999.381,00	103,75	-
BLUD Puskesmas Bendan	2.632.000.000,00	2.480.968.763,00	94,26	-
BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	1.786.000.000,00	1.741.331.143,00	97,50	-
BLUD Puskesmas Tondano	836.000.000,00	847.539.935,00	101,38	-
BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	1.986.000.000,00	1.936.878.117,00	97,53	-
BLUD PSPJ	200.000.000,00	193.352.901,00	96,68	191.969.395,00
Jumlah	80.275.243.000,00	121.001.366.096,95	150,73	88.193.320.425,61

Penerimaan RSUD Bendan melebihi target karena adanya pembayaran klaim BPJS atas klaim pembayaran reguler dan klaim tahun sebelumnya. Untuk



klaim pembayaran reguler meningkat dari sebelumnya 11 kali menjadi 17 kali pada tahun 2020.

Penerimaan BLUD Puskesmas tidak tercapai karena adanya penurunan kunjungan pasien rawat jalan karena khawatir tertular Covid-19.

Penerimaan PSPJ tidak tercapai target karena pada awal tahun PSPJ mengalami banjir, beberapa peralatan terendam dan butuh waktu untuk perbaikan sehingga mengganggu proses produksi. Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya kunjungan masyarakat ke workshop PSPJ.

k. Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir

Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir ditetapkan sebesar Rp63.000.000,00 pada refocusing diturunkan menjadi Rp0,00 dan pada perubahan anggaran dinaikkan menjadi Rp12.000.000,00.

Realisasi penerimaan bunga pinjaman dana bergulir tahun 2020 adalah sebesar Rp6.439.819,00 atau sebesar 53,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00. Rincian penerimaan bunga pinjaman dana bergulir:

Tabel 6. 19 Realisasi Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020			TA 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana bergulir Koperasi	1.000.000,00	667.129,00	66,71	7.982.343,00
Dana Bergulir UMKM Trading House	1.000.000,00	1.970,00	0,00	0,00
Dana Bergulir KKP Perikanan	10.000.000,00	5.770.720,00	57,71	97.386.858,00
Jumlah	12.000.000,00	6.439.819,00	53,67	105.369.201,00

Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir mengalami penurunan sebesar 93,89% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp105.369.201,00.

l. Pendapatan Bunga Dana Cadangan

Penerimaan bunga dana cadangan ditetapkan sebesar Rp0,00 tidak dilakukan perubahan pada refocusing, namun pada perubahan anggaran ditetapkan menjadi sebesar Rp100.000.000,00

Realisasi penerimaan bunga dana cadangan sebesar Rp86.819.909,00 atau 86,82% dari target perubahan yaitu sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi penerimaan bunga dana cadangan tidak memenuhi target karena pada tahun 2020 dilakukan pencairan dana cadangan yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota Pekalongan pada tanggal 9 Desember 2020.

6.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan transfer ditetapkan dalam APBD sebesar Rp774.534.751.000,00 pada refocusing turun menjadi sebesar Rp692.240.669.000,00 dan pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp714.117.924.000,00. Penetapan anggaran pendapatan transfer



mengikuti alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Realisasi pendapatan transfer tahun 2020 adalah sebesar Rp700.838.013.854,00 atau sebesar 98,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp714.117.924.000,00. Realisasi penerimaan pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 2,08% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp715.761.199.193,00. Realisasi pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 20 Realisasi Pendapatan transfer Tahun 2020 dan 2019

Pendapatan Transfer :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	571.848.011.000,00	567.310.188.409,00	99,21	610.332.820.948,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	58.355.913.000,00	58.355.913.000,00	100,00	33.260.942.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	72.000.000.000,00	63.377.912.445,00	88,02	72.167.436.245,00
Bantuan Keuangan	11.914.000.000,00	11.794.000.000,00	98,99	
Jumlah	714.117.924.000,00	700.838.013.854,00	98,14	715.761.199.193,00

Berdasarkan rincian pendapatan daerah tersebut diatas, terlihat bahwa pendapatan transfer tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut :

6.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan ditetapkan pada APBD sebesar Rp665.962.522.000,00 dengan berpedoman pada alokasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dan peraturan terkait dana transfer lainnya dilakukan refocusing untuk menyesuaikan alokasi data transfer sehingga menjadi sebesar Rp574.477.363.000,00. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan perubahan anggaran sehingga Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan menjadi sebesar Rp571.848.011.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 6. 21 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak	29.147.373.000,00	27.182.869.066,00	93,26	17.751.480.700,00
Dana Bagi Hasil SDA	2.701.611.000,00	1.780.895.008,00	65,92	1.275.750.200,00
Dana Alokasi Umum	436.146.579.000,00	433.354.907.000,00	99,36	475.842.089.000,00
Dana Alokasi Khusus	103.852.448.000,00	104.991.517.335,00	101,10	115.463.501.048,00
Jumlah	571.848.011.000,00	567.310.188.409,00	99,21	610.332.820.948,00

Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan tahun 2020 adalah sebesar Rp567.310.188.409,00. Rincian pendapatan transfer – dana perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil pajak ditetapkan dalam APBD sebesar Rp24.112.584.000,00 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020, pada refokusing dana bagi hasil pajak naik menjadi sebesar Rp29.147.373.000,00.

Realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2020 adalah sebesar Rp27.182.869.066,00 atau sebesar 93,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp29.147.373.000,00. Realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak mengalami peningkatan sebesar 53,13% jika dibandingkan dengan penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2019 sebesar Rp17.751.480.700,00. Penerimaan dana bagi hasil pajak dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 22 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019

Bagi Hasil Pajak - Pusat	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagi Hasil dari PBB	3.446.521.000,00	3.334.666.350,00	96,75	3.725.854.500,00
Bagi Hasil dari PPh	18.787.894.000,00	17.293.842.578,00	92,05	7.293.406.200,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.912.958.000,00	6.554.360.138,00	94,81	6.732.220.000,00
Jumlah	29.147.373.000,00	27.182.869.066,00	93,26	17.751.480.700,00

Rincian penerimaan bagi hasil pajak – pusat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp3.446.521.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan tahun 2020 adalah sebesar Rp3.334.666.350,00 atau 96,75%. Penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target sehingga mempengaruhi realisasi bagi hasil. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan sebesar 10,50% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan



tahun 2019 sebesar Rp3.725.854.500,00. Sedangkan ketentuan penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB adalah sebagai berikut :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

b. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WP orang pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Penerimaan bagi hasil dari PPh Pasal 25, Pasal 29 dan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pajak penghasilan sebesar Rp18.787.894.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 adalah sebesar Rp17.293.842.578,00 atau sebesar 92,05%. Realisasi ini tidak tercapai karena penerimaan PPh pasal 25, 29 dan 21 tidak mencapai target sehingga mempengaruhi realisasi bagi hasil.

Realisasi penerimaan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 137,12% jika dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp7.293.406.200,00. Sedangkan ketentuan penyaluran DBH PPh adalah sebagai berikut :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

c. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

Penganggaran penerimaan bagi hasil cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2020 tentang rincian bagi hasil cukai hasil tembakau. Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp6.912.958.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2020 adalah sebesar Rp6.554.360.138,00 atau sebesar 94,81% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi ini tidak tercapai karena penerimaan hasil cukai tembakau tidak mencapai target sehingga mempengaruhi realisasi bagi hasil. Realisasi penerimaan bagi hasil dari cukai hasil tembakau tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,64% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp6.732.220.000,00. Sedangkan ketentuan penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau adalah sebagai berikut :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

6.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.780.895.008,00 atau sebesar 65,92% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.701.611.000,00. Penerimaan bagi hasil bukan pajak/SDA



mengalami peningkatan sebesar 39,60% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.275.750.200,00. Rincian penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 23 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2020 dan 2019

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sumber Daya Hutan	296.459.000,00	186.534.350,00	62,92	140.696.400,00
Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	29.637.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengutan Pengusahaan Perikanan	0,00	0,00	#DIV/0!	295.077.900,00
Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	295.077.900,00
Pertambangan Minyak Bumi	26.658.000,00	56.090.685,00	210,41	95.052.100,00
Pertambangan Gas Bumi	128.276.000,00	11.661.706,00	9,09	419.934.900,00
Pertambangan Panas Bumi	41.543.000,00	38.123.288,00	91,77	29.773.800,00
SDA Pertambangan Mineral & Batubara	690.000,00	511.153,00	74,08	137.200,00
SDA Pertambahan Migas	759.987.000,00	699.697.537,00	92,07	0,00
Jumlah	2.701.611.000,00	1.780.895.008,00	65,92	1.275.750.200,00

Rincian penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut :

a. Bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan

Penerimaan bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp296.459.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan tahun 2020 adalah sebesar Rp186.534.350,00 atau sebesar 62,92%. Realisasi provisi sumber daya hutan tidak mencapai target sehingga mempengaruhi realisasi bagi hasil.

Realisasi penerimaan bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 32,58% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp140.696.400,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I, II, dan III masing-masing 15% dari pagu alokasi;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III.

b. Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan

Penerimaan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan dianggarkan sebesar Rp1.418.361.000,00 Realisasi penerimaan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan adalah sebesar Rp788.276.289,00 atau sebesar 55,58%.

Realisasi penerimaan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 167,14% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp295.077.900,00. Ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I, II, dan III masing-masing 15% dari pagu alokasi;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III.



c. Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar Rp26.658.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi adalah sebesar Rp56.090.685,00 atau sebesar 210,41%. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 40,99% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019 sebesar Rp95.052.100,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah:

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

d. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan bagi hasil pertambangan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pertambangan gas bumi sebesar Rp95.052.100,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari pertambangan gas bumi tahun 2020 adalah sebesar Rp11.661.706,00 atau sebesar 9,09%. Realisasi tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar 97,22% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp419.934.900,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

e. Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi

Penerimaan bagi hasil pertambangan panas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pertambangan panas bumi sebesar Rp41.543.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan panas bumi tahun 2020 adalah sebesar Rp38.123.288,00 atau sebesar 91,77%. Realisasi tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 28,04% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp29.773.800,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

f. Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara

Penerimaan bagi hasil pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pertambangan mineral dan



batubara sebesar Rp690.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan mineral dan batubara tahun 2020 adalah sebesar Rp511.153,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III

g. Bagi Hasil SDA Pertambahan Migas

Penerimaan bagi hasil SDA Pertambahan Migas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil SDA Pertambahan Migas sebesar Rp759.987.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil SDA Pertambahan Migas tahun 2020 adalah sebesar Rp699.697.537,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III

6.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp480.230.431.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional alokasi Dana Alokasi Umum mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp436.146.579.000,00, yang terdiri dari DAU reguler sebesar Rp423.046.794.000,00 dan DAU tambahan dana kelurahan sebesar Rp10.309.113.000,00.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 alokasi Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan.

Realisasi DAU tahun 2020 sebesar Rp433.354.907.000,00 atau 99,36% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp436.146.579.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 8,93% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp476.842.089.000,00.

6.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp126.976.389.000,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun



Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka Dana Alokasi Khusus mengalami beberapa kali refocusing terakhir sebesar Rp 106.481.800.000,00. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dilakukan perubahan anggaran sehingga DAK dialokasikan sebesar Rp103.852.448.000,00, terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp30.184.005.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp73.668.443.000,00.

Realisasi penerimaan DAK tahun 2020 adalah sebesar Rp104.991.517.335,00 atau sebesar 101,10%, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp29.388.599.718,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp75.602.917.617,00. Penjelasan lebih lanjut tentang DAK adalah sebagai berikut :

a. DAK Fisik

Rincian DAK Fisik dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 24 Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
DAK Fisik :				
DAK bidang perumahan	2.480.625.000,00	2.455.125.000,00	98,97	3.220.394.000,00
DAK bidang pertanian	0,00	0,00	0,00	1.513.879.312,00
DAK bidang pariwisata	2.209.041.000,00	1.929.923.007,00	87,36	1.375.285.000,00
DAK bidang infrastruktur air minum	0,00	0,00	0,00	2.178.261.000,00
DAK bidang infrastruktur sanitasi	0,00	0,00	0,00	1.369.400.000,00
DAK bidang pasar	0,00	0,00	0,00	1.473.436.791,00
DAK bidang pendidikan SD/SLB	4.905.350.000,00	4.905.350.000,00	100,00	5.924.221.700,00
DAK bidang pendidikan SMP	1.493.158.000,00	1.493.158.000,00	100,00	1.224.608.000,00
DAK bidang pendidikan SKB	0,00	0,00	0,00	239.966.300,00
DAK Bidang Pendidikan PAUD	138.101.000,00	138.101.000,00	100,00	0,00
DAK bidang kesehatan	18.957.730.000,00	18.466.942.711,00	97,41	16.987.036.010,00
DAK bidang jalan konektivitas	0,00	0,00	0,00	12.694.618.400,00
DAK bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	832.500.000,00
Jumlah	30.184.005.000,00	29.388.599.718,00	97,36	49.033.606.513,00

DAK fisik ditetapkan dalam APBD sebesar Rp52.686.797.000,00, selanjutnya mengalami beberapa kali refocusing mulai dari semua DAK fisik selain bidang pendidikan dan kesehatan dibatalkan, kemudian DAK fisik bidang perumahan, bidang pariwisata dan bidang infrastruktur air minum (penugasan) dialokasikan kembali hingga terakhir menjadi sebesar Rp32.813.357.000,00 dan pada perubahan anggaran kembali mengalami penyesuaian alokasi menjadi Rp30.184.005.000,00.

Realisasi penerimaan DAK Fisik didasarkan atas besaran realisasi belanja yang dibiayai dari dana DAK. Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 adalah sebesar 97,36% dari target yang ditetapkan.



b. DAK Non Fisik

Rincian realiasi penerimaan DAK Non Fisik adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 25 Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
DAK Non Fisik :				
Tunjangan Profesi Guru	47.709.286.000,00	47.709.286.000,00	100,00	47.276.119.900,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	253.950.000,00	100,00	0,00
BOK dan BOKB	12.370.914.000,00	16.595.748.433,00	134,15	9.670.248.907,00
BOP PAUD	6.799.800.000,00	6.542.737.346,00	96,22	6.445.567.573,00
Peningkatan kapasitas koperasi, UKM dan ketenagakerjaan	491.010.000,00	482.736.879,00	98,32	380.000.000,00
Pelayanan Adm Kependudukan	1.078.477.000,00	887.061.459,00	82,25	872.658.155,00
Akreditasi Puskesmas	811.790.000,00	0,00	0,00	0,00
Jaminan Persalinan	1.008.525.000,00	0,00	0,00	0,00
BOP Pendidikan Kesetaraan	2.123.200.000,00	2.120.300.000,00	99,86	1.185.300.000,00
BOP Penyelenggaraan museum	700.000.000,00	667.047.500,00	95,29	600.000.000,00
BO Pengawasan Obat dan Makanan	231.391.000,00	0,00	0,00	0,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	344.050.000,00	100,00	0,00
Jumlah	73.668.443.000,00	75.602.917.617,00	102,63	66.429.894.535,00

Pada penetapan APBD DAK Non fisik dianggarkan sebesar Rp74.289.592.000,00 selanjutnya mengalami beberapa kali refocusing sehingga menjadi sebesar Rp73.668.443.000,00. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan sebesar Rp204.314.000,00 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Pekalongan kembali mendapatkan alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III sebesar Rp3.202.500.000,00. Untuk mewadahi penambahan alokasi BOK tambahan ini maka ditetapkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2020.

6.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Dana Penyesuaian – Dana Insentif Daerah (DID)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 sebesar Rp30.908.716.000,00. DID merupakan insentif bagi daerah yang dianggap berprestasi atas katagori tertentu. Katagori tersebut meliputi katagori utama dan katagori kinerja. Salah satu point yang masuk dalam katagori utama adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan DID Tambahan sebesar Rp14.940.590.000,00 atas dasar keberhasilan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu daerah yang masuk zona non hijau, merupakan daerah kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 /PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Pekalongan kembali mendapatkan DID Tambahan Periode Kedua sebesar Rp12.506.607.000,00. DID tambahan diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sehingga secara keseluruhan, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi DID sebesar Rp58.355.913.000,00 dan terealisasi dalam jumlah yang sama atau 100%. Realisasi DID tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 75,45% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp33.260.942.000,00.

6.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

6.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Penerimaan ini merupakan penerimaan bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penganggaran transfer Pemerintah Provinsi selain menyesuaikan keputusan gubernur, juga memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta alokasi kurang bayar.

Mekanisme pencairan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap bulan setelah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan rekomendasi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 selanjutnya mengalami refocusing sehingga alokasinya menjadi sebesar Rp60.000.000.000,00. Selanjutnya dalam perubahan APBD alokasi bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah mendapatkan tambahan alokasi sehingga menjadi sebesar Rp72.000.000.000,00.

Realisasi penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2020 adalah sebesar Rp63.377.912.445,00 atau sebesar 88,02% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp72.000.000.000,00. Rincian penerimaan bagi hasil pajak Provinsi dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 6. 26 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 dan 2019

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagi Hasil PKB	21.360.000.000,00	17.730.566.441,00	83,01	21.423.169.984,00
Bagi Hasil BBNKB	10.397.760.000,00	6.013.245.666,00	57,83	10.626.802.998,00
Bagi Hasil PBBKB	18.000.000.000,00	12.254.753.070,00	68,08	18.684.042.078,00
Bagi Hasil PAP	2.240.000,00	3.219.639,00	143,73	3.360.123,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	22.240.000.000,00	27.376.127.629,00	123,09	21.430.061.062,00
Jumlah	72.000.000.000,00	63.377.912.445,00	88,02	72.167.436.245,00

Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 4,13% jika dibandingkan realisasi penerimaan bagi hasil pajak Provinsi tahun 2019 sebesar Rp72.167.436.245,00.

6.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya merupakan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan TMMD, Bantuan Sarpras Daerah, dan Bantuan Pendidikan. Penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi berdasarkan DPA dan DPPA Provinsi Jawa Tengah. Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari Provinsi mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 27 Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2020 dan 2019

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
TMMD	612.000.000,00	612.000.000,00	100,00	675.000.000,00
Bantuan Sarpras Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00	15.841.152.045,00
Bantuan Pendidikan	2.302.000.000,00	2.182.000.000,00	94,79	2.085.000.000,00
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	535.000.000,00
Jumlah	11.914.000.000,00	11.794.000.000,00	98,99	19.136.152.045,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada penetapan APBD 2020 tidak dialokasikan selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/0010374 tentang Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota



Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11.914.000.000,00.

Realisasi Penerimaan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11.794.000.000,00 atau 98,99% dari anggaran perubahan sebesar Rp11.914.000.000,00. Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 38,37% jika dibandingkan realisasi penerimaan bantuan provinsi tahun 2019 sebesar Rp19.136.152.045,00.

6.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

6.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tahun 2020 merupakan penerimaan hibah dana BOS dari Pemerintah Provinsi. Rincian penerimaan hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 28 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020 (Rp)			TA 2019 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hibah dari Pemerintah	-	-	0,00	1.692.000.000,00
Hibah dana BOS	22.496.400.000,00	22.449.445.400,00	99,79	22.257.677.589,00
Jumlah	22.496.400.000,00	22.449.445.400,00	99,79	23.949.677.589,00

Pada tahun 2020 Kota Pekalongan hanya mendapatkan alokasi BOS regular untuk 88 sekolah negeri yang terdiri dari 61 SD dan 17 SMP. Pagu anggaran BOS Regular didasarkan pada data dapodik jumlah siswa dikalikan alokasi BOS per siswa. Adapun besaran alokasi BOS persiswa adalah sebesar Rp900.000,00/siswa untuk SD dan Rp1.100.000,00/siswa untuk SMP.

Mekanisme pencairan dana BOS regular berasal dari RKUD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung ke rekening BOS masing-masing sekolah. Pencairan dana BOS dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun pada bulan Januari April dan september. Alokasi penerimaan BOS pada penetapan APBD sebesar Rp22.378.640.000,00, dengan adanya refocusing mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 15.975.098.000,00, selanjutnya pada perubahan anggaran alokasi kembali naik menjadi sebesar Rp22.496.400.000,00.

Realisasi penerimaan BOS tahun 2020 adalah sebesar Rp22.449.445.400,00 atau 99,79% dari anggaran perubahan yaitu sebesar Rp22.496.400.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 6,26% jika dibandingkan realisasi penerimaan dana BOS tahun 2019 sebesar Rp23.949.677.589,00

b. Belanja

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020. Belanja daerah meliputi Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.



2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja Lain-lain/Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi belanja daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp944.840.460.675,56 atau sebesar 93,30% dari anggaran perubahan sebesar Rp1.012.737.890.000,00. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 1,00% jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp954.397.012.827,00.

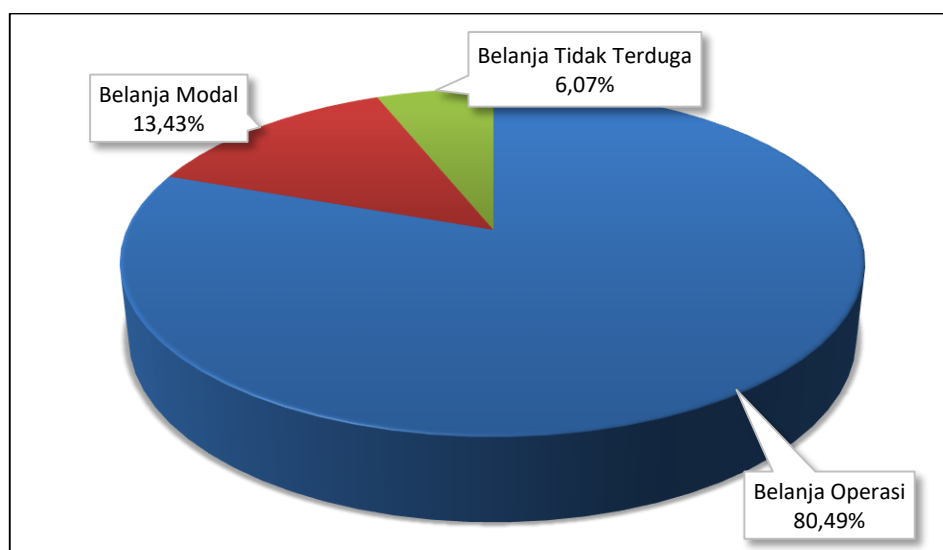
Pada saat dilakukan refocusing, anggaran belanja mengalami penurunan sebesar Rp115.097.926.000,00 dari anggaran penetapan sebesar Rp1.055.857.482.000,00 menjadi sebesar Rp940.759.556.000,00 pada anggaran refocusing, namun pada perubahan anggaran, belanja kembali naik menjadi sebesar Rp1.012.737.890.000,00.

Rincian belanja dan transfer dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 29 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2020 dan 2019

Belanja dan Transfer :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	809.711.074.000,00	760.543.104.727,56	93,93	771.512.589.320,00
Belanja Modal	139.410.651.000,00	126.926.093.953,00	91,04	182.153.984.579,00
Belanja Tidak Terduga	63.616.165.000,00	57.371.261.995,00	90,18	730.438.928,00
Jumlah	1.012.737.890.000,00	944.840.460.675,56	93,30	954.397.012.827,00

Proporsi masing-masing belanja dan transfer terhadap total belanja dan transfer dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 6. 2 Proporsi Masing-Masing Pos Belanja dan Transfer terhadap Total Belanja dan Transfer



Berdasarkan gambar diatas, bahwa proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 80,49%, belanja modal sebesar 13,43% dan belanja tidak terduga sebesar 6,07%. Proporsi belanja operasi menurun jika dibandingkan belanja operasi tahun 2019 sebesar 80,84%, proporsi belanja modal turun jika dibandingkan dengan belanja modal tahun 2019 sebesar 16,57%, sedangkan belanja tak terduga meningkat dibandingkan dengan belanja tak terduga tahun 2019 sebesar 0,08%.

6.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi (BO) Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Rincian belanja operasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 30 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

Belanja Operasi :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	424.636.365.000,00	394.421.563.850,00	92,88	390.898.339.975,00
Belanja Barang & Jasa	340.770.147.000,00	327.664.407.877,56	96,15	338.655.157.845,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	6.803.500,00
Belanja Hibah	40.956.062.000,00	36.250.151.000,00	88,00	29.310.400.000,00
Bantuan Sosial	3.348.500.000,00	2.206.982.000,00	65,91	11.920.375.000,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	721.513.000,00
Jumlah	809.711.074.000,00	760.543.104.727,56	93,93	771.512.589.320,00

Belanja operasi ditetapkan dalam APBD sebesar Rp846.471.385.000,00 selanjutnya dalam refokusing alokasi belanja operasi sebesar Rp19.500.000.000,00 dipindahkan ke Belanja Tidak Terduga yang digunakan sebagai tambahan penyediaan *social safety net/jaring* pengaman sosial. Pada APBD perubahan alokasi belanja operasi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp Rp809.711.074.000,00.

Realisasi belanja operasi tahun 2020 adalah sebesar Rp760.543.104.727,56 atau sebesar 93,93% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp809.711.074.000,00. Realisasi belanja operasi mengalami penurunan sebesar 1,42% jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2019 sebesar Rp771.512.589.320,00. Realisasi belanja operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur, dan Belanja Pegawai Dana BLUD.



Alokasi belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp430.566.911.000,00 selanjutnya dalam rangka refokusing maka sebagian belanja pegawai digeser ke Belanja Tidak Terduga sehingga berkurang menjadi sebesar Rp412.252.309.000,00. Pada perubahan anggaran, alokasi belanja pegawai mengalami kenaikan sehingga menjadi Rp424.636.365.000,00.

Realisasi belanja pegawai tahun 2020 adalah sebesar Rp394.421.563.850,00 atau sebesar 92,88% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp424.636.365.000,00. Realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 0,90% jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp390.898.339.975,00. Peningkatan terbesar belanja pegawai pada belanja pegawai BLUD. Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 31 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Belanja Pegawai :	TAHUN 2020			TAHUN 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Gaji dan Tunjangan	290.484.963.000,00	261.951.211.121,00	90,18	264.884.354.193,00
Tambahan Penghasilan PNS	53.534.182.000,00	44.476.053.344,00	83,08	45.501.492.539,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.215.632.000,00	5.114.900.000,00	98,07	4.519.500.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.014.872.000,00	776.855.960,00	76,55	3.782.712.700,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	693.458.000,00	542.210.171,00	78,19	596.245.370,00
Uang Lembur	112.260.000,00	91.878.142,00	81,84	228.630.764,00
Honorarium PNS	14.253.594.000,00	13.212.251.994,00	92,69	16.741.336.500,00
Honorarium Non PNS	7.441.425.000,00	7.260.522.658,00	97,57	6.464.991.400,00
Honorarium pengelolaan dana BOS	1.000.889.000,00	1.015.604.600,00	101,47	614.455.000,00
Belanja Pegawai Dana BLUD	50.885.090.000,00	59.980.075.860,00	117,87	47.564.621.509,00
Jumlah	424.636.365.000,00	394.421.563.850,00	92,88	390.898.339.975,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja gaji dan tunjangan ditetapkan dalam APBD sebesar Rp292.875.137.000,00 pada saat refokusing mengalami penurunan menjadi sebesar Rp287.924.519.000,00, selanjutnya pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp290.484.963.000,00.

Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2020 adalah sebesar Rp261.951.211.121,00 atau sebesar 92,88% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp290.484.963.000,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,11% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp264.884.354.193,00. Jumlah PNS Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah 2.956 orang, lebih sedikit dibandingkan jumlah PNS per 31 Desember 2019 sebanyak 3.142.

b. Tambahan Penghasilan PNS

Belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2020 merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja diberikan berdasarkan :



1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2020
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27B Tahun 2020.

Tambahan Penghasilan PNS ditetapkan dalam APBD sebesar Rp57.428.438.000,00 pada saat refokusing mengalami penurunan menjadi sebesar Rp56.477.208.000,00, selanjutnya pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp53.534.182.000,00.

Realisasi belanja pos ini pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 44.476.053.344,00 atau sebesar 83,08% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp53.534.182.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 2,25% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp45.501.492.539.

c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH.

Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari dua belanja yaitu belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD serta belanja biaya penunjang operasional KDH/WKDH. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan Tahun 2020. Sedangkan untuk belanja penunjang operasional KDH/WKDH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15A Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.215.632.000,00 tidak mengalami perubahan pada saat refokusing maupun perubahan anggaran.

Realisasi belanja ini pada tahun 2020 sebesar Rp5.114.900.000,00 atau sebesar 98,07% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.215.632.000,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 13,17% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp4.519.500.000,00.

d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah tahun anggaran berkenaan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan jika mencapai target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dibayarkan secara triwulanan.



Insentif pemungutan pajak daerah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp980.375.000,00 pada saat refokusing mengalami penurunan menjadi sebesar Rp614.365.000,00, selanjutnya pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp1.014.872.000,00. Perubahan alokasi insentif pemungutan pajak daerah menyesuaikan dengan alokasi dari target pajaknya.

Realisasi belanja ini pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp776.855.960,00 atau sebesar 76,55% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.014.872.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 79,46% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp3.782.712.700,00, hal ini dikarenakan turunnya target penerimaan pajak daerah sebagai akibat pandemi Covid-19.

e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Insentif pemungutan retribusi daerah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp437.423.000,00 pada saat refokusing mengalami penurunan menjadi sebesar Rp430.846.000,00, selanjutnya pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp693.458.000,00. Perubahan alokasi insentif pemungutan pajak daerah menyesuaikan dengan alokasi dari target retribusinya.

Realisasi belanja insentif pemungutan retribusi daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp542.210.171,00 atau sebesar 78,19% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp693.458.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 9,08% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp596.345.370,00. Hal ini disebabkan karena hal ini dikarenakan turunnya target penerimaan retribusi daerah sebagai akibat pandemi Covid-19 dan ada beberapa pos retribusi yang tidak mencapai target sehingga tidak memperoleh insentif.

f. Uang Lembur

Belanja uang lembur ditetapkan dalam APBD sebesar Rp258.941.000,00 pada saat refokusing mengalami penurunan menjadi sebesar Rp155.108.000,00, selanjutnya pada perubahan anggaran turun menjadi sebesar Rp112.260.000,00. Perubahan alokasi uang lembur ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk membatasi pelaksanaan lembur dalam masa pandemi covid-19.

Realisasi belanja uang lembur tahun 2020 adalah sebesar Rp91.878.142,00 atau sebesar 81,84% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp112.260.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 59,81% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp228.630.764,00.

g. Honorarium PNS

Belanja honorarium PNS dibayarkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020.

Belanja honorarium PNS ditetapkan dalam APBD sebesar Rp16.511.593.000,00 pada saat refokusing mengalami penurunan menjadi



sebesar Rp13.473.273.000,00 selanjutnya pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp14.253.594.000,00.

Realisasi belanja honorarium PNS sebesar Rp13.212.251.994,00 atau sebesar 92,69% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp14.253.594.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 21,08% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp16.741.336.500,00. Rincian belanja honorarium PNS dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. 32 Realisasi Belanja Honorarium PNS Tahun 2020 dan 2019

Honorarium PNS	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Panitia Pelaksana Kegiatan	8.962.259.000,00	8.269.064.500,00	92,27	11.716.433.250,00
Tim Pengadaan Barang Jasa	238.675.000,00	197.637.500,00	82,81	191.347.500,00
Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	164.700.000,00	124.685.000,00	75,70	148.791.250,00
Penatausahaan Keuangan	4.804.810.000,00	4.551.514.994,00	94,73	4.570.314.500,00
Tim Monitoring	38.000.000,00	24.200.000,00	63,68	8.250.000,00
Tim Penyusunan Materi	15.450.000,00	15.450.000,00	100,00	106.200.000,00
Tim Perencanaan Pengadaan	29.700.000,00	29.700.000,00	-	-
Jumlah	14.253.594.000,00	13.212.251.994,00	92,69	16.741.336.500,00

h. Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Non PNS digunakan untuk membayar honorarium non PNS yang ber SK Walikota. Jumlah pegawai non PNS yang ber SK Walikota per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 291 orang.

Belanja Honorarium Non PNS ditetapkan dalam APBD sebesar Rp7.632.610.000,00 pada saat refokusing mengalami penurunan menjadi sebesar Rp7.461.645.000,00 selanjutnya pada perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 7.441.425.000,00.

Realisasi belanja honorarium non PNS tahun 2020 adalah Rp7.260.522.658,00 atau sebesar 97,57% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp7.441.425.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 12,31% dari realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp6.464.991.400,00 karena adanya peningkatan penerimaan honor menyesuaikan UMR Kota Pekalongan.

i. Belanja Honorarium Pengelolaan Dana BOS

Belanja honorarium pengelolaan dana BOS didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana BOS satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD.

Belanja honorarium pengelolaan dana BOS ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.033.500.000,00 pada saat refokusing naik menjadi sebesar Rp1.232.300.000,00 selanjutnya pada perubahan anggaran turun menjadi sebesar Rp1.000.889.000,00.

Realisasi belanja honorarium pengelolaan dana BOS pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.015.604.600,00 atau 101,47% dari anggaran setelah perubahan yaitu sebesar Rp1.000.889.000,00. Realisasi tahun 2019 ini mengalami kenaikan sebesar 65,29% dibanding realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp614.455.000,00.



Realisasi belanja melebihi anggaran karena terbitnya ketetapan besaran belanja bantuan keuangan provinsi muncul setelah APBD-P tahun 2020 ditetapkan, sehingga diwadahi dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2020. Penganggaran dan realisasi belanja BOS merupakan akumulasi belanja BOS dari 71 SD negeri dan 17 SMP negeri se Kota Pekalongan.

j. Belanja Pegawai Dana BLUD

Belanja pegawai dana BLUD ditetapkan dalam APBD sebesar Rp48.193.262.000,00 pada saat refocusing turun menjadi sebesar Rp39.267.413.000,00 selanjutnya pada perubahan anggaran naik lagi menjadi sebesar Rp50.885.090.000,00.

Belanja pegawai dana BLUD tahun 2020 terealisasi sebesar Rp59.980.075.860,00 atau 117,87% dari anggaran perubahan yaitu sebesar Rp50.885.090.000,00. Realisasi belanja pegawai dana BLUD merupakan akumulasi dari belanja 16 BLUD yaitu RSUD Bendan, 14 Puskesmas dan PSPJ. Realisasi belanja pegawai BLUD mengalami peningkatan sebesar 26,10% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp47.564.621.509,00 karena adanya pemecahan BLUD puskesmas menjadi 14 BLUD Puskesmas, dan adanya penambahan petugas untuk penanganan pasien Covid-19.

Realisasi belanja pegawai dana BLUD melebihi anggaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan BLUD dan ambang batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 64B Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Dokumen Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan. Apabila pendapatan BLUD sudah melebihi target, maka dimungkinkan penambahan belanja BLUD dalam batas tertentu sehingga melebihi anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja pegawai dana BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 33 Realisasi Belanja Pegawai Dana BLUD Tahun 2020

BLUD	Belanja Pegawai
BLUD Puskesmas Bendan	1.833.637.228,00
BLUD Puskesmas Kramatsari	634.752.500,00
BLUD Puskesmas Medono	559.449.215,00
BLUD Puskesmas Tirto	766.190.401,00
BLUD Puskesmas Klego	600.989.659,00
BLUD Puskesmas Sokorejo	1.022.234.509,00
BLUD Puskesmas Tondano	647.854.176,00
BLUD Puskesmas Noyontaan	666.161.756,00
BLUD Puskesmas Dukuh	708.662.015,00
BLUD Puskesmas Krapyak Kidul	832.248.121,00
BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	1.597.275.451,00
BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	1.344.442.434,00
BLUD Puskesmas Jenggot	998.112.787,00
BLUD Puskesmas Buaran	512.094.982,00
PSPJ	108.848.956,00
RSUD Bendan	47.147.121.670,00
Jumlah	59.980.075.860,00



6.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan pakai habis kantor, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, beasiswa Pendidikan PNS, dan kursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, pemeliharaan, barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, dan barang dan jasa dana BLUD.

Belanja Barang dan Jasa ditetapkan dalam APBD sebesar Rp372.767.474.000,00 pada saat refocusing turun menjadi sebesar Rp288.631.144.000,00 selanjutnya pada perubahan anggaran naik lagi menjadi sebesar Rp340.770.147.000,00.

Realisasi belanja barang 2020 adalah sebesar Rp327.664.407.877,56 atau sebesar 96,15% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp340.770.147.000,00. Realisasi ini turun sebesar 3,99% dibanding realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp340.770.147.000,00. Realisasi belanja barang dan jasa dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. 34 Realisasi Belanja barang Tahun 2020 dan 2019

Belanja Barang	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.032.042.000,00	9.624.104.134,00	95,93	7.155.917.715,00
Belanja Bahan/Material	16.922.757.000,00	16.122.796.646,00	95,27	13.567.757.013,00
Belanja Jasa Kantor	131.558.552.000,00	123.372.413.755,00	93,78	126.538.392.876,00
Belanja Premi Asuransi	22.672.780.000,00	22.091.253.249,00	97,44	18.577.161.318,00
Belanja Perawatan Kendaraan	7.495.799.000,00	6.553.200.253,00	87,42	7.120.581.390,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.460.946.000,00	4.050.618.649,00	90,80	6.045.509.622,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.389.179.000,00	1.351.943.111,00	97,32	2.105.439.747,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	181.600.000,00	112.610.000,00	62,01	853.687.000,00
Belanja Sewa Peralatan Kantor	1.336.544.000,00	1.016.434.000,00	76,05	2.521.742.500,00
Belanja Makanan dan Minuman	18.929.547.000,00	16.665.338.100,00	88,04	21.659.204.490,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00	979.669.650,00
Belanja Pakaian Kerja	959.222.000,00	941.156.300,00	98,12	1.859.932.900,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	179.300.000,00	166.890.000,00	93,08	612.823.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	24.874.091.000,00	23.683.378.571,00	95,21	28.730.773.848,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	62.680.000,00	62.680.000,00	100,00	103.820.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	405.380.000,00	390.280.100,00	96,28	936.858.350,00
Belanja Pemeliharaan	13.083.282.000,00	12.296.028.579,00	93,98	21.078.853.944,00
Belanja Jasa Konsultansi	3.308.307.000,00	2.288.367.450,00	69,17	5.189.185.700,00
Belanja Hibah Barang Atau Jasa	5.350.093.000,00	5.185.448.390,00	96,92	9.434.308.386,00
Uang Yang Akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak ketiga	4.876.550.000,00	4.726.006.000,00	96,91	1.487.250.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	143.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang	2.606.991.000,00	2.532.331.470,00	97,14	1.701.364.100,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.811.163.000,00	10.292.860.167,00	131,77	2.922.701.510,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.098.638.000,00	4.121.017.123,00	80,83	6.330.528.799,00
Belanja Inventaris Non Kapitalisasi	211.370.000,00	207.375.344,00	98,11	128.101.424,00
Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	147.450.000,00	85.500.000,00	57,99	-
Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	36.045.474.000,00	40.785.287.302,56	113,15	35.265.005.163,00
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	20.663.730.000,00	18.832.409.184,00	91,14	15.605.587.400,00
JUMLAH	340.770.147.000,00	327.664.407.877,56	96,15	338.655.157.845,00



Belanja barang dan jasa BLUD dan BOS masih dilaporkan secara total mengikuti penganggarannya. Apabila diperinci, hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Merupakan akumulasi belanja barang dan jasa dari 16 BLUD yaitu RSUD Bendan, Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu (PSPJ), dan 14 Puskesmas. Rincian belanja barang dan jasa BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 35 Realisasi Belanja barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2020

Belanja Barang dan Jasa BLUD	TA. 2020
	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18.048.437.101,00
Belanja Bahan/Material	12.729.358.334,00
Belanja Jasa Kantor	3.790.363.698,56
Belanja Premi Asuransi	1.565.096.266,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	174.062.037,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	774.947.825,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.147.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.350.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	14.813.500,00
Belanja Makanan dan Minuman	572.625.692,00
Belanja Pakaian	45.363.600,00
Belanja Perjalanan Dinas	70.580.858,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan	101.747.811,00
Belanja Pemeliharaan	1.882.802.346,00
Belanja Jasa Konsultansi	704.240.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	41.449.164,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	184.895.300,00
Belanja Inventaris Non Kapitalisasi	60.006.770,00
Uang untuk penanganan dampak sosial	16.000.000,00
Jumlah	40.785.287.302,56

BLUD	Belanja Barjas
BLUD Puskesmas Bendan	409.302.982,00
BLUD Puskesmas Kramatsari	136.331.712,00
BLUD Puskesmas Medono	87.772.239,00
BLUD Puskesmas Tirto	151.297.163,00
BLUD Puskesmas Klego	115.284.370,00
BLUD Puskesmas Sokorejo	269.435.065,00
BLUD Puskesmas Tondano	117.256.594,00
BLUD Puskesmas Noyontaan	125.822.492,00
BLUD Puskesmas Dukuh	125.750.654,00
BLUD Puskesmas Krapyak Kidul	159.098.721,00
BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	289.502.394,00
BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	381.618.811,00
BLUD Puskesmas Jenggot	146.373.514,00
BLUD Puskesmas Buaran	147.300.189,00
PSPJ	75.587.800,00
RSUD Bendan	38.047.552.602,56
Jumlah	40.785.287.302,56



Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp40.785.287.302,56 melebihi anggaran setelah perubahan sebesar Rp36.045.474.000,00, karena berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 64B Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan Pentapan dan Perubahan Dokumen Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Benda Kota Pekalongan bahwa belanja BLUD RSUD Benda dimungkinkan melebihi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBD dalam batas tertentu apabila pendapatan BLUD tersebut telah melampaui pendapatan sebagaimana ditargetkan dalam APBD.

- b. Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan akumulasi belanja barang dan jasa pada 88 sekolah negeri yang berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu 71 SD dan 17 SMP. Rincian belanja barang dan jasa BOS adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 36 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2020

Belanja Barang dan Jasa BOS	TA 2020
	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	2.351.849.952
Belanja Bahan/Material	2.111.382.285
Belanja Jasa Kantor	7.027.695.995
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.069.950
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.921.885.809
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.727.900
Belanja Makanan dan Minuman	2.644.257.231
Belanja Pakaian Kerja	574.000
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	72.044.000
Belanja Perjalanan Dinas	650.000
Belanja kursus	8.990.000
Belanja Pemeliharaan	611.452.173
Belanja Inventaris Non Kapitalisasi	1.998.829.889
Jumlah	18.832.409.184,00

6.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang yang ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ini bersifat bantuan yang peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus, dan memenuhi persyaratan penerima hibah serta harus digunakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang



Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Belanja hibah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp40.488.500.000,00 pada saat refocusing turun menjadi sebesar Rp39.283.100.000,00 selanjutnya pada perubahan anggaran naik lagi menjadi sebesar Rp40.956.062.000,00.

Realisasi belanja hibah tahun 2020 adalah sebesar Rp36.250.151.000,00 atau 88,51% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp40.956.062.000,00. Realisasi belanja hibah mengalami kenaikan sebesar 20,71% jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah tahun 2019 sebesar Rp30.031.913.000,00. Adapun rincian realisasi belanja hibah tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 37 Realisasi Belanja Barang Hibah Tahun 2020 dan 2019

BELANJA HIBAH		2020			2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hibah kepada Pemerintah	17.050.000.000,00	17.048.550.000,00	99,99	1.100.000.000,00
2	Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	13.982.100.000,00	10.335.800.000,00	73,92	28.210.400.000,00
3	Hibah Kepada Badan/Lembaga Kependidikan	9.163.962.000,00	8.112.600.000,00	88,53	0,00
4	Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik	760.000.000,00	753.201.000,00	99,11	721.513.000,00
JUMLAH HIBAH		40.956.062.000,00	36.250.151.000,00	88,51	30.031.913.000,00

Hibah Kepada Pemerintah

Hibah kepada Pemerintah merupakan hibah kepada instansi vertikal berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kota Pekalongan. Realisasi hibah kepada Pemerintah adalah sebesar Rp17.048.550.000,00 mengalami kenaikan sebesar 1449,87% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp1.100.000.000,00. Adapun rincian realisasi belanja hibah kepada Pemerintah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan, sebesar Rp13.100.000.000,00
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekalongan, sebesar Rp2.500.000.000,00
- Kepolisian Resort Pekalongan Kota, sebesar Rp1.000.000.000,00
- Kodim 0710/Pekalongan, sebesar Rp448.550.000,00

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan merupakan hibah yang diberikan kepada 210 Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. Realisasi hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah sebesar Rp8.112.600.000,00 sedangkan realisasi belanja hibah ini tahun 2019 sebesar Rp0,00.



Hibah kepada Badan/Lembaga kependidikan

Hibah kepada Badan/Lembaga kependidikan merupakan hibah kepada lembaga kependidikan untuk Bantuan Operasional (BOP) PAUD dan Kesetaraan (DAK) sebanyak 285 lembaga pendidikan. Realisasi hibah kepada Badan/Lembaga Kependidikan adalah sebesar Rp10.335.800.000,00 mengalami penurunan sebesar 63,36% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp28.210.800.000,00.

Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada partai pemenang Pemilu dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2020 adalah sebesar Rp753.201.000,00 atau 99,11% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp760.000.000,00. Realisasi bantuan keuangan kepada parpol ini mengalami kenaikan sebesar 4,39% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp721.513.000,00. Adapun rincian realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 38 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan 2019

Belanja Bantuan Keuangan :	TA 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realiasi
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GOLKAR	202.831.000,00	202.831.000,00	100,00	196.367.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS	62.808.000,00	62.808.000,00	100,00	71.761.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT	-	-	#DIV/0!	18.734.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP	116.987.000,00	116.987.000,00	100,00	110.779.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA	42.065.000,00	42.065.000,00	100,00	48.295.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKB	146.378.000,00	146.378.000,00	100,00	114.450.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP	81.322.000,00	81.322.000,00	100,00	84.581.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN	55.834.000,00	55.834.000,00	100,00	57.806.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasdem	31.920.000,00	31.920.000,00	100,00	13.300.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hanura	13.056.000,00	13.056.000,00	100,00	5.440.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol lainnya	6.799.000,00	-	0,00	-
Jumlah	760.000.000,00	753.201.000,00	99,11	721.513.000,00

6.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 meliputi belanja bantuan Sosial kepada individu dan atau keluarga serta belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan.

Belanja bantuan sosial ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.648.500.000,00 pada saat refocusing tidak mengalami perubahan, selanjutnya pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp3.348.500.000,00.



Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2020 adalah sebesar Rp2.206.982.000,00 atau 65,91% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.348.500.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial ini mengalami penurunan sebesar 83,80% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp13.621.739.100,00. Adapun rincian realisasi belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 39 Realisasi Belanja Barang Bantuan Sosial Tahun 2020

No	Uraian Bantuan Sosial	Anggaran Stlh Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		(Rp.)	(Rp)	%	
	BELANJA BANTUAN SOSIAL				
1	Bansos kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.701.364.100,00
2	Bansos kepada Individu dan/atau Keluarga	2.502.500.000,00	2.160.982.000,00	86,35	5.746.375.000,00
3	Bansos bidang Pendidikan kepada individu dan/atau keluarga	846.000.000,00	46.000.000,00	5,44	-
4	Bansos kepada Lembaga Non Pemerintah	0,00	0,00	0,00	6.174.000.000,00
	Jumlah	3.348.500.000,00	2.206.982.000,00	65,91	13.621.739.100,00

6.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kota Pekalongan meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Belanja modal ditetapkan dalam APBD sebesar Rp207.386.097.000,00, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disese 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial mengamanatkan untuk melakukan rasionalisasi terhadap Belanja Modal minimal 50%, sehingga pada saat refocusing belanja modal mengalami rasionalisasi menjadi sebesar Rp109.333.152.000,00, selanjutnya pada perubahan anggaran naik menjadi sebesar Rp139.410.651.000,00, kenaikan terbesar pada belanja modal pengadaan tanah yang digunakan untuk penanganan rob.

Realisasi belanja modal tahun 2020 adalah sebesar Rp126.926.093.953,00 atau sebesar 91,04% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp139.410.651.000,00. Realisasi belanja modal ini mengalami peningkatan sebesar 30,32% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2019 sebesar sebesar Rp182.153.984.579,00. Rincian belanja modal tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 6. 40 Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019

Belanja Modal :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tanah	14.074.216.000,00	13.144.232.065,00	93,39	3.912.172.520,00
Peralatan dan Mesin	32.035.198.000,00	29.119.788.699,00	90,90	35.522.056.921,00
Gedung dan Bangunan	35.721.198.000,00	33.911.226.174,00	94,93	70.163.070.715,00
Jalan	56.887.973.000,00	50.106.236.575,00	88,08	68.876.027.946,00
Aset Tetap Lainnya	692.066.000,00	644.610.440,00	93,14	3.299.127.177,00
Aset Lainnya	-	0,00	-	381.529.300,00
Jumlah	139.410.651.000,00	126.926.093.953,00	91,04	182.153.984.579,00

Realisasi belanja modal tahun 2020 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

6.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp11.050.556.000,00 pada saat refocusing turun menjadi sebesar Rp2.633.410.000,00, hal ini untuk memenuhi amanat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 bahwa belanja modal harus dirasionalisasi minimal 50%. Selanjutnya pada perubahan anggaran mengingat kebutuhan untuk penanganan rob, maka pengadaan tanah mendapatkan tambahan alokasi sehingga menjadi sebesar Rp14.074.216.000,00.

Belanja modal pengadaan tanah tahun 2020 sebesar Rp13.144.232.065,00 atau 93,39% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp14.074.216.000,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 235,98% dibanding realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.912.172.520,00.

Rincian Belanja modal tanah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 41 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	327.500.000,00	316.151.680,00
Belanja modal Pengadaan tanah sarana jalan	651.450.000,00	362.107.600,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	216.160.000,00	211.247.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	12.879.106.000,00	12.254.725.785,00
Jumlah	14.074.216.000,00	13.144.232.065,00

- a. Pengadaan tanah sarana kesehatan Puskesmas
 Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 1 bidang yang direncanakan untuk Lahan Parkir Puskesmas Kramatsari seluas 198 m² dengan anggaran sebesar Rp327.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp316.151.680,00 atau sebesar 96,53%
- b. Pengadaan tanah sarana jalan
 Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk Interchange Tol sebanyak 3 bidang : tanah wakaf an MIS Duwet luas 192 m², tanah wakaf an MIS Duwet luas 9 m², tanah Seluas 231 m² an Ratna Puspa Dewi Makmur Santoso. Realisasi belanja ini sebesar Rp362.107.600,00 atau 55,58% dari anggaran sebesar Rp651.450.000,00.



- c. Pengurugan dan pematangan tanah
 Merupakan belanja pengurugan yang mengkapitalisasi nilai tanah, yaitu berupa pengurugan tanah halaman Dinparbudpora. dengan anggaran sebesar Rp216.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp211.247.000,00 atau sebesar 97,73%
- d. Pengadaan tanah bangunan pengairan
 Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 127 bidang dengan total luas 26.450 m² untuk pembangunan Rumah Pompa Kel. Panjang Baru, Rumah Pompa Kel. Pasikratonkramat, kolam retensi, dan lain-lain, dengan anggaran sebesar Rp12.879.106.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.254.725.785,00 atau 95,15%. Adapun rincian pengadaan tanah bangunan pengairan ini sebagaimana dalam **Lampiran 9**.

6.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin ditetapkan dalam APBD sebesar Rp30.078.834.000,00 pada saat refokusing turun menjadi sebesar Rp22.189.234.000,00, selanjutnya pada perubahan anggaran alokasi bertambah sehingga menjadi sebesar Rp31.959.798.000,00, kenaikan terutama pada pengadaan yang terkait dengan penanganan covid-19.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2020 adalah sebesar Rp29.045.998.699,00 atau sebesar 90,88% dari anggaran perubahan sebesar Rp31.959.798.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp35.522.056.921,00 maka realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 18,02%.

Secara lebih rinci belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 42 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019

Belanja Modal :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Alat-Alat Besar Darat	561.100.000,00	518.236.999,00	92,36	1.595.027.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	6.534.990.000,00	6.405.187.173,00	98,01	2.649.816.000,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	179.750.000,00	177.339.050,00	98,66	187.610.030,00
Alat Angkut Apung Bermotor	100.200.000,00	96.700.000,00	96,51	107.690.000,00
Alat Bengkel Bermesin	48.900.000,00	46.890.000,00	95,89	53.766.650,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	73.348.000,00	69.677.000,00	95,00	209.624.070,00
Alat Ukur	48.650.000,00	47.047.032,00	96,71	167.988.000,00
Alat Pengolahan	431.435.000,00	428.156.000,00	99,24	81.155.000,00
Alat Kantor	1.590.132.000,00	1.514.852.800,00	95,27	1.417.616.540,00
Alat Rumah Tangga	1.663.292.000,00	1.536.265.975,00	92,36	3.399.347.335,00
Komputer	5.938.567.000,00	3.568.673.185,00	60,09	5.695.251.120,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	369.824.000,00	352.644.501,00	95,35	852.455.150,00



Belanja Modal :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Alat Studio	536.971.000,00	514.465.389,00	95,81	595.385.320,00
Alat Komunikasi	146.163.000,00	142.252.125,00	97,32	935.762.600,00
Alat Kedokteran	6.707.886.000,00	6.556.985.329,00	97,75	13.214.146.306,00
Alat Kesehatan/BM BLUD	4.184.776.000,00	3.943.379.660,00	94,23	1.498.623.492,00
Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	-	90.477.500,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	43.000.000,00	42.930.000,00	99,84	204.066.014,00
Peralatan dan Mesin Dana BOS	2.800.814.000,00	3.084.316.481,00	110,12	1.362.115.794,00
Pengadaan Rambu-Rambu	0,00	0,00	-	1.204.133.000,00
Jumlah	31.959.798.000,00	29.045.998.699,00	90,88	35.522.056.921,00

a. Belanja Modal Alat Kesehatan/BM BLUD

Belanja Modal Alat Kesehatan/BM BLUD secara total mengikuti penganggarannya, teralisasi sebesar Rp3.943.379.660,00 atau 94,23% dari anggaran perubahan yaitu sebesar Rp4.184.776.000,00. Belanja modal BLUD merupakan akumulasi dari belanja modal 16 BLUD yaitu RSUD Bendan, PSPJ, 14 Puskesmas. Adapun rincian belanja modal BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 43 Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2020 dan 2019

Belanja Modal :	TA. 2020
	Realisasi
Alat-alat Berat	34.536.500
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3.850.000
Alat-alat bengkel	2.865.000
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	6.798.000
Peralatan Kantor	294.065.950
Perlengkapan Kantor	239.930.135
Komputer	433.860.087
mebeulair	63.117.400
Peralatan Dapur	189.535.300
Alat-alat Studio	39.511.000
Alat-alat Komunikasi	23.055.000
Alat-alat Ukur	1.155.000
Alat-alat Kedokteran	87.873.071
Konstruksi Jembatan	19.800.000
Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.250.000
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.495.977.217
Buku/Kepustakaan	1.000.000
Alat-alat Persenjataan/Keamanan	4.200.000
Total	3.943.379.660,00



BLUD	Belanja Modal
BLUD Puskesmas Bendan	69.454.000,00
BLUD Puskesmas Kramatsari	49.512.400,00
BLUD Puskesmas Medono	26.278.546,00
BLUD Puskesmas Tirto	45.204.200,00
BLUD Puskesmas Klego	69.668.000,00
BLUD Puskesmas Sokorejo	28.073.700,00
BLUD Puskesmas Tondano	52.170.000,00
BLUD Puskesmas Noyontaan	38.690.000,00
BLUD Puskesmas Dukuh	32.759.500,00
BLUD Puskesmas Krapyak Kidul	47.472.585,00
BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	33.577.625,00
BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	39.094.226,00
BLUD Puskesmas Jenggot	42.777.750,00
BLUD Puskesmas Buaran	21.995.000,00
PSPJ	80.784.600,00
RSUD Bendan	3.265.867.528,00
Jumlah	3.943.379.660,00

b. Belanja Peralatan dan Mesin dana BOS

Belanja peralatan dan mesin dana BOS merupakan akumulasi belanja dari 88 sekolah negeri yang terdiri dari 71 Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Belanja Peralatan dan Mesin dana BOS terealisasi sebesar Rp3.084.316.481,00.

Tabel 6. 44 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2020

Belanja Modal :	Realisasi TA. 2020
Alat Bantu	2.450.000,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.575.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	5.655.000,00
Alat Ukur	2.505.000,00
Alat Pengolah	41.670.640,00
Alat Kantor	393.680.720,00
Alat Rumah Tangga	316.329.400,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	129.894.000,00
Alat Studio	116.313.050,00
Peralatan Pemancar	3.000.000,00
Unit Alat Laboratorium	81.435.091,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	94.054.880,00
Komputer Unit	1.837.819.400,00
Peralatan Komputer	43.784.300,00
Alat Sar	4.200.000,00
Instalasi Air Bersih / Air Baku	3.000.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah	200.000,00
Jumlah	3.080.566.481,00



6.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.285.164.000,00 pada saat refocusing turun menjadi sebesar Rp32.063.259.000,00, hal ini untuk memenuhi amanat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 bahwa belanja modal harus dirasionalisasi minimal 50%. Selanjutnya pada perubahan anggaran alokasi bertambah sehingga menjadi sebesar Rp35.721.198.000,00, kenaikan terutama terkait dengan pengadaan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2020 merupakan realisasi belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan yaitu sebesar Rp33.911.226.174,00 atau sebesar 94,93% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp35.721.198.000,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar 51,67% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp70.163.070.715,00.

Tabel 6. 45 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020

Belanja Modal :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	20.262.884.000,00	19.623.206.784,00	96,84	28.587.117.813,00
Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	93.000.000,00	91.061.000,00	97,92	147.147.000,00
Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah	0,00	0,00	0,00	462.534.000,00
Pengadaan Konstruksi Pengelolaan Sampah	0,00	0,00	0,00	1.187.400.000,00
Pengadaan Konstruksi Taman Kota	837.725.000,00	726.088.000,00	86,67	6.180.080.000,00
Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	4.039.319.000,00	3.614.639.096,00	89,49	14.539.859.348,00
Pengadaan Konstruksi IPAL	93.595.000,00	91.766.000,00	98,05	
Pengadaan Konstruksi Peternakan, Perikanan dan Pertanian	708.380.000,00	575.768.410,00	81,28	752.842.000,00
Pengadaan Konstruksi Saluran IPAL	8.645.000,00	0,00	0,00	2.286.571.537,00
Pengadaan Auning/Pagar Besi dan sejenisnya	28.900.000,00	28.900.000,00	100,00	132.961.000,00
Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pagar	423.900.000,00	393.666.525,00	92,87	142.849.000,00
Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor (DANA DAK)	0,00	0,00	0,00	4.820.750.000,00
Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum (DANA DAK)	9.000.000.000,00	8.542.141.779,00	94,91	8.971.003.817,00
Pengadaan Konstruksi Peternakan, Perikanan dan Pertanian (DANA DAK)	0,00	0,00	0,00	1.951.955.200,00
Jumlah	35.496.348.000,00	33.687.237.594,00	94,90	70.163.070.715,00

6.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ditetapkan dalam APBD sebesar Rp77.410.255.000,00 pada saat refocusing turun menjadi sebesar Rp49.270.772.000,00, hal ini untuk memenuhi amanat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 bahwa belanja modal harus dirasionalisasi minimal 50%. Selanjutnya pada perubahan anggaran alokasi bertambah sehingga menjadi sebesar



Rp56.887.973.000,00, kenaikan terutama terkait dengan pengadaan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 adalah sebesar Rp50.106.236.575,00 atau sebesar 88,08% dari anggaran perubahan sebesar Rp56.887.973.000,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ini mengalami penurunan sebesar 27,25% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp68.876.027.946,00.

Secara lebih rinci belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 46 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

Belanja Modal :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jalan	46.607.407.000,00	42.080.842.000,00	90,29	55.936.229.869,00
Jembatan	0,00	0,00	-	28.195.000,00
Bangunan Air Irigasi	3.833.089.000,00	2.274.918.750,00	59,35	11.283.466.390,00
Bangunan Air Kotor	5.554.000.000,00	4.928.222.075,00	88,73	1.044.593.000,00
Instalasi Air Kotor	6.102.000,00	6.100.000,00	99,97	51.220.450,00
Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	456.000.000,00	438.350.000,00	96,13	88.815.575,00
Jaringan Air Minum	13.575.000,00	13.175.000,00	97,05	-
Jaringan Listrik	417.800.000,00	364.628.750,00	87,27	435.107.662,00
Jaringan Telepon	-	0,00	-	8.400.000,00
Jumlah	56.887.973.000,00	50.106.236.575,00	88,08	68.876.027.946,00

6.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.535.288.000,00 pada saat refokusing turun menjadi sebesar Rp3.176.477.000,00. Selanjutnya pada perubahan anggaran alokasi berkurang kembali menjadi sebesar Rp692.066.000,00.

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2020 adalah sebesar Rp644.610.440,00 atau sebesar 93,14% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp692.066.000,00. Sebagian realisasi belanja aset tetap lainnya yaitu sebesar Rp409.181.940,00 merupakan belanja aset tetap lainnya yang berasal dari dana BOS. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 80,46% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp3.299.127.177,00.

Rincian lebih lanjut tentang belanja aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. 47 Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Modal (BM)	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	BM-Buku / Kepustakaan	39.567.000,00	37.268.500,00	94,19	209.329.900,00
2	BM-Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	70.000.000,00	69.900.000,00	99,86	1.757.000,00
4	BM-Sarpras Olahraga	129.325.000,00	128.260.000,00	99,18	22.000.000,00
5	Belanja aset tetap lainnya (BOS)	453.174.000,00	409.181.940,00	90,29	3.066.040.277,00
	Jumlah	692.066.000,00	644.610.440,00	93,14	3.299.127.177,00



6.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya ditetapkan dalam APBD sebesar Rp345.700.000,00 pada saat refocusing turun menjadi sebesar Rp0,00. Selanjutnya pada perubahan anggaran dialokasikan kembali sebesar Rp75.400.000,00.

Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2020 adalah sebesar Rp73.790.000,00 atau sebesar 97,86% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp75.400.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 8065,94% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp381.529.300,00,00.

Realiasi belanja aset lainnya berupa pengadaan software di BKD sebesar Rp48.390.000,00 dan pembelian alat musik di Dinparbudpora sebesar Rp25.400.000,00.

6.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga disebutkan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.000.000.000,00, anggaran tersebut direncanakan untuk penanganan banjir yang setiap tahun melanda Kota Pekalongan. Dengan adanya pandemi Covid-19 maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan mengalokasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan covid-19 sebagian dalam program dan kegiatan yang ada dan sebagian lagi dianggarkan melalui belanja tidak terduga, sehingga alokasi belanja tidak terduga bertambah menjadi sebesar Rp6.500.000.000,00.

Selanjutnya dalam rangka menahan gejolak masyarakat sebagai akibat dihentikannya aktivitas ekonomi untuk menahan laju penyebaran covid-19, maka dilakukan pergeseran alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dari belanja langsung ke Belanja Tidak Terduga sebesar Rp19.500.000.000 yang digunakan sebagai tambahan penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan DID Tambahan sebesar Rp14.940.590.000,00 yang dialokasikan dalam belanja tidak terduga dan digunakan untuk kegiatan dalam rangka penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat. Alokasi belanja tidak terduga menjadi sebesar Rp75.090.761.000,00.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 /PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Pekalongan kembali mendapatkan DID Tambahan Periode Kedua sebesar Rp12.506.607.000,00. DID tambahan diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional bagi Pemerintah Daerah yang



berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Alokasi belanja tidak terduga menjadi sebesar Rp88.611.351.000,00.

Pada perubahan anggaran dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat, berdasarkan evaluasi tersebut, maka sebagian anggaran belanja tidak terduga dialihkan ke belanja prioritas lainnya sehingga alokasi belanja tidak terduga menjadi sebesar Rp63.616.165.000,00.

Besaran realisasi dana tak terduga tahun 2020 adalah sebesar Rp57.371.261.995,00 atau 90,18% dari anggaran perubahan yaitu sebesar Rp63.616.165.000,00.

Penggunaan belanja tidak terduga tahun 2020 adalah untuk :

1. Penanganan Darurat Banjir, terealisasi sebesar Rp1.084.054.010,00
2. Penanganan Banjir Rob, terealisasi sebesar Rp2.760.286.500,00
3. Penanganan Bencana Cuaca Ekstrem, terealisasi sebesar Rp180.740.000,00
4. Ganti Rugi Kerusakan Rumah Warga an. HARYADI S. akibat robohnya tower komunikasi Diskominfo, terealisasi sebesar Rp4.500.000,00
5. Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Deviden PT. BPR Bank Pekalongan Tahun 2018, terealisasi sebesar Rp127.416.937,00
6. Penanganan Pandemi Covid-19, terealisasi sebesar Rp26.935.023.345,00
7. Penanganan Pandemi Covid-19 (DID Tambahan I), terealisasi sebesar Rp14.321.693.202,00
8. Penanganan Pandemi Covid-19 (DID Tambahan II), terealisasi sebesar Rp12.074.510.001,00

Rincian penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dalam **Lampiran 10**.

c. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Rincian Pembiayaan Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 48 Realisasi Pembiayaan daerah Tahun 2020 dan 2019

Pembiayaan Daerah :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	107.651.710.000,00	108.747.997.650,61	101,02	92.028.388.994,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.521.530.000,00	4.520.630.000,00	99,98	14.154.129.976,00
Pembiayaan Netto	103.130.180.000,00	104.227.367.650,61	101,06	77.874.259.018,00

Realisasi pembiayaan netto tahun 2020 adalah sebesar Rp104.227.367.650,61 atau sebesar 101,06% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp103.130.180.000,00. Realisasi pembiayaan netto meningkat sebesar 32,94% jika dibandingkan dengan pembiayaan netto tahun 2019 sebesar Rp77.874.259.016,00. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :



6.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Rincian penerimaan pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 49 Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah Tahun 2020 dan 2019

Penerimaan Pembiayaan Daerah :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penggunaan SiLPA	95.101.710.000,00	95.101.710.311,61	100,00	87.928.207.176,00
Pencairan dana cadangan	12.550.000.000,00	12.704.351.488,00	101,23	300.000.000,00
Pinjaman dalam negeri	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	941.935.851,00	100,00	2.000.181.818,00
Jumlah	107.651.710.000,00	108.747.997.650,61	101,02	92.028.388.994,00

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp108.044.271.650,61 atau sebesar 100,36% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp107.651.710.000,00. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah ini mengalami peningkatan sebesar 17,40% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp92.028.388.994,00.

6.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Realisasi Penggunaan SiLPA tahun 2020 adalah sebesar Rp95.101.710.311,61 atau sebesar 100,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp95.101.710.000,00,00. Realisasi Penggunaan SiLPA ini mengalami peningkatan sebesar 8,16% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp87.928.207.176,00. Realisasi penggunaan SiLPA ini merupakan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun anggaran 2019.

6.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Realisasi Pencairan Dana Cadangan tahun 2020 adalah sebesar Rp12.704.351.488,00 atau sebesar 101,23% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp12.550.000.000,00. Pencairan Dana Cadangan ini digunakan untuk pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

6.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah

Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah tahun 2020 adalah sebesar 941.936.851,00. Rincian penerimaan pembiayaan yang berasal dari penarikan kembali investasi pemerintah daerah dana bergulir ketahanan pangan dan perikanan dari *chanelling agency* PD Bank Pekalongan sebesar Rp941.936.851,00,00.



6.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 adalah sebesar Rp4.521.530.000,00 atau sebesar 99,98% dari anggaran perubahan sebesar Rp4.520.630.000,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah ini mengalami penurunan sebesar 68,06% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp14.154.129.976,00. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 50 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah Tahun 2020 dan 2019

Pengeluaran Pembiayaan Daerah :	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	4.607.388.226,00
Penyertaan Modal	4.518.000.000,00	4.518.000.000,00	100,00	7.742.000.000,00
Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri	3.530.000,00	2.630.000,00	74,50	1.804.741.750,00
Jumlah	4.521.530.000,00	4.520.630.000,00	99,98	14.154.129.976,00

6.1.3.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal terealisasi sebesar Rp4.518.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran perubahan sebesar Rp4.518.000.000,00. Dasar hukum penyertaan modal adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan dan Keputusan Walikota Nomor 757/159 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan rincian realisasi pengeluaran penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyertaan modal kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp1.268.000.000,00;
- 2) Penyertaan modal kepada Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan sebesar Rp2.250.000.000,00;
- 3) Penyertaan modal kepada PD. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp400.000.000,00;
- 4) Penyertaan modal kepada PD. BKK Jateng sebesar Rp400.000.000,00;
- 5) Penyertaan modal kepada PD. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp200.000.000,00.

Penyertaan modal yang tidak mencapai pagu anggaran yang ditetapkan adalah PDAM.

6.1.3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri terealisasi sebesar Rp2.630.000,00 atau 64,32% dari anggaran perubahan sebesar Rp3.530.000,00. Pembayaran pokok pinjaman ini merupakan pembayaran hutang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kepada Pihak Ketiga sebesar Rp2.630.000,00.



6.1.4 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Perhitungan APBD (SiKPA) 31 Desember 2020, yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 51 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA. 2020	TA. 2019
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan dan Belanja		
a. Pendapatan	953.155.394.614,95	971.624.464.120,61
b. Belanja	944.840.460.675,56	954.397.012.827,00
Surplus (Defisit) Anggaran	8.314.933.939,39	17.227.451.293,61
2 Pembiayaan		
a. Penerimaan Daerah	108.747.997.650,61	92.028.388.994,00
b. Pengeluaran daerah	4.520.630.000,00	14.154.129.976,00
Pembiayaan Netto	104.227.367.650,61	77.874.259.018,00
3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	112.542.301.590,00	95.101.710.311,61

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2020 adalah sebesar Rp112.542.301.590,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Dari target pendapatan sebesar Rp909.607.710.000,00 terealisasi sebesar Rp953.155.394.614,95, sehingga terdapat kelebihan pendapatan sebesar Rp Rp43.547.684.614,95.
- 2) Dari anggaran belanja sebesar Rp1.012.737.890.000,00 terealisasi sebesar Rp944.840.460.675,56, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp67.897.429.324,44, yang terdiri dari :
 - a) Sisa belanja operasi sebesar Rp49.167.969.272,44;
 - b) Sisa belanja modal sebesar Rp12.484.557.047,00;
 - c) Sisa belanja tidak terduga sebesar Rp6.244.903.005,00.
- 3) Dari anggaran pembiayaan netto sebesar Rp103.130.180.000,00 terealisasi sebesar Rp104.227.367.650,61, sehingga terdapat lebih pembiayaan sebesar Rp393.461.650,61.

Jika dilihat dari rincian kas, maka SiLPA dapat diuraikan sebagai berikut



Tabel 6. 52 Uraian Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA. 2020	TA. 2019
	Rp	Rp
Kas di BUD	83.881.778.889,00	81.884.779.309,00
Kas di BLUD RSUD Bendan	25.641.791.785,00	9.744.757.200,61
Kas di BLUD Puskesmas	-	1.022.557.275,00
Kas di BLUD BKPM	-	59.871.109,00
Kas di BLUD Puskesmas Bendan	206.074.553,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Kramatsari	81.961.885,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Medono	64.309.794,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Tirta	101.807.617,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Klego	94.676.374,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Sokorejo	123.193.948,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Tondano	91.656.440,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Noyontaan	28.103.651,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Dukuh	149.114.772,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Krapyak Kidul	114.006.252,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	51.522.647,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	138.335.672,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Jenggot	89.982.309,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Buaran	155.268.506,00	-
Kas di BLUD PSPJ	914.345,00	72.782.800,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	299.838,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	701.500,00	10.805.000,00
Kas lainnya	1.527.140.813,00	2.306.157.618,00
Jumlah	112.542.641.590,00	95.101.710.311,61
Dikurangi Utang PFK	340.000,00	-
Jumlah SiLPA	112.542.301.590,00	95.101.710.311,61

Adapun detail SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dalam **Lampiran 11**.

Dari SiLPA kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.881.778.889,00, sebesar Rp8.259.740.238,00 merupakan SiLPA terikat yaitu SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat (*earmark*) :

- a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1.481.518.102,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) DAK Reguler Pendidikan, saldo awal sebesar Rp 2.358.000,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp6.536.609.000,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp6.533.096.000,00, saldo akhir sebesar Rp5.871.000,00
 - 2) DAK Reguler Kesehatan, saldo awal sebesar Rp34.912.000,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp15.964.018.200,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp15.954.987.090,00, saldo akhir sebesar Rp43.943.110,00
 - 3) DAK Reguler Perumahan dan Permukiman, saldo awal sebesar Rp18.179.000,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp2.455.125.000,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp 2.431.446.000,00, saldo akhir sebesar Rp41.858.000,00
 - 4) DAK Reguler Jalan, saldo awal sebesar Rp47.428.400,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp0,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp0,00, saldo akhir sebesar Rp47.428.400,00
 - 5) DAK Penugasan Kesehatan, saldo awal sebesar Rp996.293.150,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp2.502.924.511,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp2.502.924.511,00, saldo akhir sebesar Rp996.293.150,00



- 6) DAK Penugasan Air Minum, saldo awal sebesar Rp300.378.000,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp0,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp0,00, saldo akhir sebesar Rp300.378.000,00
- 7) DAK Penugasan Sanitasi, saldo awal sebesar Rp9.770.000,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp0,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp0,00, saldo akhir sebesar Rp9.770.000,00
- 8) DAK Penugasan Pasar, saldo awal sebesar Rp5.432.974,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp0,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp0,00, saldo akhir sebesar Rp5.432.974,00
- 9) DAK Penugasan Pariwisata, saldo awal sebesar Rp0,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp1.929.923.007,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp1.899.379.539,00, saldo akhir sebesar Rp30.543.468,00
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 6.759.341.753,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tunjangan Profesi Guru PNSD, saldo awal sebesar Rp702.928.620,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp47.709.286.000,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp45.532.797.160,00, saldo akhir sebesar Rp2.879.417.460,00
 - 2) Tambahan Penghasilan Guru PNSD, saldo awal sebesar Rp232.050.000,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp253.950.000,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp418.250.000,00, saldo akhir sebesar Rp232.050.000,00
 - 3) Bantuan Operasional Kesehatan, saldo awal sebesar Rp627.692.272,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp15.493.569.637,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp13.836.640.864,00, saldo akhir sebesar Rp2.284.621.045,00
 - 4) Bantuan Operasional Keluarga Berencana, saldo awal sebesar Rp46.705.204,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp1.102.178.796,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp905.037.074,00, saldo akhir sebesar Rp243.846.926,00
 - 5) Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, saldo awal sebesar Rp8.273.121,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp482.736.879,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp468.760.600,00, saldo akhir sebesar Rp22.249.400,00
 - 6) Pelayanan Administrasi Kependudukan, saldo awal sebesar Rp191.415.541,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp887.061.459,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp931.602.654,00, saldo akhir sebesar Rp146.874.346,00
 - 7) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, saldo awal sebesar Rp257.062.654,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp 6.542.737.346,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp 6.166.452.424,00, saldo akhir sebesar Rp633.347.576,00
 - 8) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, saldo awal sebesar Rp2.900.000,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp2.120.300.000,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp1.988.100.000,00, saldo akhir sebesar Rp135.100.000,00



- 9) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, saldo awal sebesar Rp32.952.500,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp667.047.500,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp518.480.000,00, saldo akhir sebesar Rp181.520.000,00
- 10) Dana Pelayanan Kepariwisata, saldo awal sebesar Rp0,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp344.050.000,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp343.735.000,00, saldo akhir sebesar Rp315.000,00
- c. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), saldo awal sebesar Rp 31.761.805,00, penerimaan tahun 2020 sebesar Rp6.883.683.000,00, pengeluaran tahun 2020 sebesar Rp6.896.564.422,00, saldo akhir sebesar Rp18.880.383,00

Sedangkan sisanya sebesar Rp75.622.038.651,00 merupakan SiLPA tidak terikat atau SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih

6.2.1 Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2019 adalah sebesar Rp95.101.710.311,61 seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

6.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020

Berdasarkan surplus anggaran sebesar Rp 8.314.933.939,39 dan realisasi pembiayaan netto Rp104.227.367.650,61, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebesar Rp 112.542.301.590,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari target pendapatan sebesar Rp909.607.710.000,00 terealisasi sebesar Rp953.155.394.614,95, sehingga terdapat kelebihan pendapatan sebesar Rp Rp43.547.684.614,95.
- b. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.012.737.890.000,00 terealisasi sebesar Rp944.840.460.675,56, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp67.897.429.324,44.
- c. Terdapat kelebihan pembiayaan netto sebesar Rp1.097.187.650,61.

6.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp112.542.301.590,00, yang terdiri dari :



Tabel 6. 53 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA. 2020	TA. 2019
	Rp	Rp
Kas di BUD	83.881.778.889,00	81.884.779.309,00
Kas di BLUD RSUD Bendan	25.641.791.785,00	9.744.757.200,61
Kas di BLUD Puskesmas	-	1.022.557.275,00
Kas di BLUD BKPM	-	59.871.109,00
Kas di BLUD Puskesmas Bendan	206.074.553,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Kramatsari	81.961.885,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Medono	64.309.794,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Tirta	101.807.617,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Klego	94.676.374,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Sokorejo	123.193.948,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Tondano	91.656.440,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Noyontaan	28.103.651,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Dukuh	149.114.772,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Krapyak Kidul	114.006.252,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	51.522.647,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	138.335.672,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Jenggot	89.982.309,00	-
Kas di BLUD Puskesmas Buaran	155.268.506,00	-
Kas di BLUD PSPJ	914.345,00	72.782.800,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	299.838,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	701.500,00	10.805.000,00
Kas lainnya	1.527.140.813,00	2.306.157.618,00
Jumlah	112.542.641.590,00	95.101.710.311,61
Dikurangi Utang PFK	340.000,00	-
Jumlah SiLPA	112.542.301.590,00	95.101.710.311,61

3. Neraca

Neraca Pemerintah Kota Pekalongan menggambarkan posisi keuangan aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan neraca per 31 Desember 2019, dengan uraian sebagai berikut :

6.3.1 Aset

Total aset Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.921.917.451.388,13, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 6. 54 Aset Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Aset Lancar	188.160.659.155,61	154.210.158.699,70	22,02
Investasi Jangka Panjang	95.675.200.074,49	92.147.877.182,26	3,83
Aset Tetap	2.493.125.176.286,83	2.452.572.023.682,23	1,65
Dana Cadangan	-	12.704.351.488,00	(100,00)
Aset Lainnya	144.956.415.871,20	145.039.811.623,11	(0,06)
Jumlah	2.921.917.451.388,13	2.856.674.222.675,30	2,28

Nilai aset per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,28% jika dibandingkan dengan nilai aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.856.674.222.675,30. Komposisi aset Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

6.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp188.160.659.155,61 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. 55 Aset Lancar Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Kas dan Setara Kas	112.542.862.590,00	95.101.710.311,61	18,34
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang	38.826.307.094,86	43.378.338.498,57	-10,49
Belanja Dibayar Dimuka	43.753.050,00	135.573.791,67	-67,73
Persediaan	36.747.736.420,75	15.594.536.097,85	135,64
Jumlah	188.160.659.155,61	154.210.158.699,70	22,02

Saldo aset lancar per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 22,02% jika dibandingkan dengan saldo aset lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp154.210.158.699,70. Rincian aset lancar dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Rekening ini menggambarkan saldo kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, BLUD dan BOS. Pengelolaan kas baik di kas daerah, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BOS maupun BLUD didasarkan pada aturan sebagai berikut :



- a. perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 076/0002 dan 0025/HT.01.01/007/2018 tentang Pengelolaan Uang Daerah (RKUD/giro)
- b. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 18A tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
- c. Terdapat 2 rekening penampungan kas yaitu :
 1. Rekening penampungan pembayaran PBB pada Bank Jateng (nomor rekening 1-007-00359-1). Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran PBB. Realisasi pembayaran PBB pada rekening ini langsung akan pindah ke rekening kasda pada sore harinya. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2020 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00.
 2. Rekening penampungan pembayaran *e-tax* pada Bank Jateng (nomor rekening 1-007-00510-1). Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan BPHTB. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2020 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00.

Adapun rincian saldo per tanggal 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 56 Saldo per tanggal 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019

Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Kas di Kas Daerah	83.881.778.889,00	26.884.779.309,00	212,00
Kas di Bendahara Penerimaan	701.500,00	10.805.000,00	-93,51
Kas di Bendahara Pengeluaran	299.838,00	0,00	100,00
Kas di BLUD	27.132.720.550,00	10.899.968.384,61	148,92
Kas Lainnya	1.527.361.813,00	2.306.157.618,00	-33,77
Setara Kas	0,00	55.000.000.000,00	-100,00
Jumlah	112.542.862.590,00	95.101.710.311,61	18,34

Saldo kas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp112.542.862.590,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

6.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp83.881.778.889,00. Kas di Kas Daerah merupakan kas di RKUD Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan nomor rekening 1-007-00009-1. Rincian Kas di Kas Daerah sebagaimana dalam **Lampiran 12**.



6.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp299.838,00, yang merupakan bunga dari rekening BTT Bagian Kesra.

6.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp701.500,00, yang terdiri dari :

- a. Kas di bendahara penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan atas penerimaan retribusi RPH sebesar Rp178.000,00.
- b. Kas di bendahara penerimaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atas penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar Rp523.500,00.

6.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.132.720.550,00, yang terdiri dari :

- a. Saldo kas di BLUD RSUD Bendan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.641.791.785,00 dengan perincian:
 1. saldo bank sebesar Rp25.563.583.285,00 terdiri dari :
 - rekening Bank Jateng nomor 2-007-16094-4 sebesar Rp5.563.583.285,00
 - deposito pada Bank Jateng sebesar Rp20.000.000.000,00
 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp78. 208.500,00
- b. Saldo kas di BLUD Puskesmas Bendan adalah sebesar Rp206.074.553,00 dengan perincian:
 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25230-6 sebesar Rp205.864.553,00.
 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp210.000,00
- c. Saldo kas di BLUD Puskesmas Kramatsari per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp81.961.885,00 dengan perincian:
 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25225-0 sebesar Rp81.821.885,00.
 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp140.000,00
- d. Saldo kas di BLUD Puskesmas Medono per per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp64.309.794,00 dengan perincian:
 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25224-1 sebesar Rp46.824.970,00.
 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp80.000,00
 3. saldo kas di bendahara pengeluaran BLUD sebesar Rp17.404.824,00
- e. Saldo kas di BLUD Puskesmas Tirto per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp101.807.617,00 dengan perincian:
 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25222-5 sebesar Rp101.627.617,00.
 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp180.000,00
- f. Saldo kas di BLUD Puskesmas Klego per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp94.676.374,00 dengan perincian:
 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25233-1 sebesar Rp94.486.374,00.
 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp190.000,00
- g. Saldo kas di BLUD Puskesmas Sokorejo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp123.193.948,00 dengan perincian:
 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25227-6 sebesar Rp120.438.948,00.
 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp2.755.000,00



- h. Saldo kas di BLUD Puskesmas Tondano per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp91.656.440,00 dengan perincian:
 - 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25231-4 sebesar Rp91.616.440,00.
 - 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp40.000,00
- i. Saldo kas di BLUD Puskesmas Noyontaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.103.651,00 dengan perincian:
 - 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25229-2 sebesar Rp27.928.651,00.
 - 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp175.000,00
- j. Saldo kas di BLUD Puskesmas Dukuh per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp149.114.772,00 dengan perincian:
 - 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25219-5 sebesar Rp148.944.772,00.
 - 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp170.000,00
- k. Saldo kas di BLUD Puskesmas Krapyak Kidul per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp114.006.252,00 dengan perincian:
 - 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25220-9 sebesar Rp113.906.252,00.
 - 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp100.000,00
- l. Saldo kas di BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp51.522.647,00 dengan perincian:
 - 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25232-2 sebesar Rp51.117.647,00.
 - 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar 405.000,00
- m. Saldo kas di BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp138.335.672,00 dengan perincian:
 - 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25226-8 sebesar Rp136.750.672,00.
 - 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar
- n. Saldo kas di BLUD Puskesmas Jenggot per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp89.982.309,00 dengan perincian:
 - 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25228-4 sebesar Rp89.502.309,00.
 - 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp480.000,00.
- o. Saldo kas di BLUD Puskesmas Buaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp155.268.506,00 dengan perincian:
 - 1. rekening Bank Jateng nomor 3-007-25223-3 sebesar Rp154.468.506,00.
 - 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp800.000,00.
- p. Saldo kas di BLUD PSPJ per 31 Desember 2020 di bank Jateng nomor rekening 2-007-11045-9 adalah sebesar Rp914.345,00.

6.3.1.1.1.5 Kas Lainnya

Saldo Dana Bos

Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.527.361.813,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 6. 57 Saldo Kas Lainnya – Saldo Dana BOS per 31 Desember 2020

Jenjang Pendidikan	Saldo Bos Per 31 Desember 2019 (Neraca)	Tahun 2020		Saldo Bos Per 31 Desember 2020
		Penerimaan BOS	Belanja BOS	
SD	670.769.948	13.144.345.208	13.378.061.690	437.053.466
SMP	1.635.387.670	10.145.839.190	10.690.918.513	1.090.308.347
Jumlah	2.306.157.618	23.290.184.398	24.068.980.203	1.527.361.813

Saldo Dana BOS per masing-masing rekening sebagai berikut :

- a. SD Negeri Kraton Kidul, No Rekening 2007035465, saldo Rp8.212.291,00
- b. SD Negeri Kramatsari 01, No Rekening 2007035597, saldo Rp813.759,00
- c. SD Negeri Bendan 01, No Rekening 3007098056, saldo Rp1.380.936,00
- d. SD Negeri Bendan 03, No Rekening 2007035724, saldo Rp2.874.498,00
- e. SD Negeri Bendan 04, No Rekening 2007035457, saldo Rp7.525.507,00
- f. SD Negeri Bendan 08, No Rekening 2007036003, saldo Rp8.475.656,00
- g. SD Negeri Sapuro 01, No Rekening 2007035813, saldo Rp9.111.831,00
- h. SD Negeri Sapuro 05, No Rekening 2007035384, saldo Rp4.304.454,00
- i. SD Negeri Podosugih 01, No Rekening 2007035571, saldo Rp2.318.905,00
- j. SD Negeri Podosugih 03, No Rekening 2007035767, saldo Rp228.156,00
- k. SD Negeri Medono 01, No Rekening 2007036224, saldo Rp4.261.222,00
- l. SD Negeri Medono 04, No Rekening 2007035252, saldo Rp520.070,00
- m. SD Negeri Medono 07, No Rekening 2007035520, saldo Rp1.483.503,00
- n. SD Negeri Medono 08, No Rekening 2007035937, saldo Rp5.344.571,00
- o. SD Negeri Kebulen, No Rekening 3007190521, saldo Rp6.728.818,00
- p. SD Negeri Tirto 01, No Rekening 2007035716, saldo Rp3.214.244,00
- q. SD Negeri Tirto 03, No Rekening 2007036232, saldo Rp34.241.986,00
- r. SD Negeri Pasirsari 01, No Rekening 2007035660, saldo Rp170.678,00
- s. SD Negeri Pasirsari 02, No Rekening 2007036381, saldo Rp61.800,00
- t. SD Negeri Tegalrejo, No Rekening 2007035953, saldo Rp3.150.184,00
- u. SD Negeri Bumirejo, No Rekening 2007035791, saldo Rp689.646,00
- v. SD Negeri Pringlangu, No Rekening 2007035945, saldo Rp206.316,00
- w. SD Negeri Keputran 04, No Rekening 2007036011, saldo Rp2.826.250,00
- x. SD Negeri Keputran 06, No Rekening 2007035503, saldo Rp3.183.634,00
- y. SD Negeri Landungsari 01, No Rekening 2007035350, saldo Rp54.638.141,00
- z. SD Negeri Landungsari 04, No Rekening 2007035031, saldo Rp11.854.076,00
- aa. SD Negeri Landungsari 05, No Rekening 3007097564, saldo Rp253.471,00
- ab. SD Negeri Poncol 01, No Rekening 2007035325, saldo Rp35.497.656,00
- ac. SD Negeri Poncol 02, No Rekening 2007035007, saldo Rp30.257.278,00
- ad. SD Negeri Poncol 03, No Rekening 2007035554, saldo Rp487.760,00
- ae. SD Negeri Sampangan 01, No Rekening 3007097904, saldo Rp222.975,00
- af. SD Negeri Klego 01, No Rekening 2007036071, saldo Rp2.293.600,00
- ag. SD Negeri Klego 04, No Rekening 2007035511, saldo Rp227.998,00
- ah. SD Negeri Gamer 01, No Rekening 2007035066, saldo Rp13.100.604,00
- ai. SD Negeri Gamer 02, No Rekening 2007035368, saldo Rp137.604,00
- aj. SD Negeri Sokorejo, No Rekening 2007035023, saldo Rp37.280,00
- ak. SD Negeri Baros, No Rekening 2007034931, saldo Rp203.346,00
- al. SD Negeri Dekoro, No Rekening 2007035074, saldo Rp20.982,00
- am. SD Negeri Karangmalang, No Rekening 2007035406, saldo Rp1.342.642,00



- an. SD Negeri Kradenan 01, No Rekening 3007097220, saldo Rp21.721.000,00
- ao. SD Negeri Kradenan 04, No Rekening 3007097211, saldo Rp6.942.963,00
- ap. SD Negeri Buaran, No Rekening 3007097483, saldo Rp1.003.909,00
- aq. SD Negeri Banyurip Ageng, No Rekening 2007035333, saldo Rp1.218.156,00
- ar. SD Negeri Jenggot, No Rekening 3007097254, saldo Rp6.034.876,00
- as. SD Negeri Kertoharjo 01, No Rekening 2007035414, saldo Rp316.000,00
- at. SD Negeri Kertoharjo 02, No Rekening 2007035431, saldo Rp239.532,00
- au. SD Negeri Kuripan Kidul 02, No Rekening 2007035643, saldo Rp2.602.438,00
- av. SD Negeri Kuripan Lor 01, No Rekening 3007097386, saldo Rp14.933.750,00
- aw. SD Negeri Kuripan Lor 02, No Rekening 3007097343, saldo Rp5.022.755,00
- ax. SD Negeri Yosorejo 01, No Rekening 3007097432, saldo Rp180.000,00
- ay. SD Negeri Yosorejo 02, No Rekening 2007035392, saldo Rp870.533,00
- az. SD Negeri Duwet, No Rekening 2007035589, saldo Rp194.292,00
- ba. SD Negeri Soko, No Rekening 3007097394, saldo Rp885.792,00
- bb. SD Negeri Panjang Wetan 01, No Rekening 2007036437, saldo Rp19.743.322,00
- bc. SD Negeri Panjang Wetan 03, No Rekening 2007036127, saldo Rp3.900.982,00
- bd. SD Negeri Panjang Wetan 04, No Rekening 2007035856, saldo Rp143.743,00
- be. SD Negeri Kandang Panjang 01, No Rekening 2007035635, saldo Rp22.185.739,00
- bf. SD Negeri Kandang Panjang 02, No Rekening 3007097971, saldo Rp7.398.852,00
- bg. SD Negeri Kandang Panjang 10, No Rekening 2007035619, saldo Rp25.545.311,00
- bh. SD Negeri Dukuh, No Rekening 2007035546, saldo Rp32.299,00
- bi. SD Negeri Kraton, No Rekening 3007097688, saldo Rp8.631.316,00
- bj. SD Negeri Krapyak Lor 01, No Rekening 3007098137, saldo Rp200.074,00
- bk. SD Negeri Krapyak Lor 02, No Rekening 2007035651, saldo Rp225.482,00
- bl. SD Negeri Krapyak Lor 04, No Rekening 3007098102, saldo Rp5.350.000,00
- bm. SD Negeri Krapyak Lor 05, No Rekening 2007036089, saldo Rp337.331,00
- bn. SD Negeri Krapyak Kidul 02, No Rekening 2007036402, saldo Rp71.300,00
- bo. SD Negeri Bandengan 01, No Rekening 2007035970, saldo Rp540.715,00
- bp. SD Negeri Bandengan 02, No Rekening 2007035686, saldo Rp5.630.682,00
- bq. SD Negeri Pabean, No Rekening 2007036135, saldo Rp14.145.468,00
- br. SD Negeri Degayu 01, No Rekening 2007036020, saldo Rp30.000,00
- bs. SD Negeri Degayu 02, No Rekening 3007148894, saldo Rp381.000,00
- bt. SMP Negeri 1 Pekalongan, No Rekening 3007097246, saldo Rp55.861.122,00
- bu. SMP Negeri 2 Pekalongan, No Rekening 2007035830, saldo Rp31.308.664,00
- bv. SMP Negeri 3 Pekalongan, No Rekening 2007035309, saldo Rp5.270.771,00
- bw. SMP Negeri 4 Pekalongan, No Rekening 2007034957, saldo Rp109.749.575,00
- bx. SMP Negeri 5 Pekalongan, No Rekening 2007034990, saldo Rp103.692.599,00
- by. SMP Negeri 6 Pekalongan, No Rekening 2007034981, saldo Rp84.984.188,00
- bz. SMP Negeri 7 Pekalongan, No Rekening 2007035899, saldo Rp104.638.987,00
- ca. SMP Negeri 8 Pekalongan, No Rekening 2007036275, saldo Rp111.398.547,00
- cb. SMP Negeri 9 Pekalongan, No Rekening 2007036305, saldo Rp21.610.195,00
- cc. SMP Negeri 10 Pekalongan, No Rekening 2007034892, saldo Rp41.660.105,00
- cd. SMP Negeri 11 Pekalongan, No Rekening 2007027977, saldo Rp23.645.741,00
- ce. SMP Negeri 12 Pekalongan, No Rekening 3007105168, saldo Rp16.956.967,00
- cf. SMP Negeri 13 Pekalongan, No Rekening 3007185650, saldo Rp102.545.118,00



- cg. SMP Negeri 14 Pekalongan, No Rekening 2007036178, saldo Rp22.829.229,00
- ch. SMP Negeri 15 Pekalongan, No Rekening 2007036291, saldo Rp18.044.584,00
- ci. SMP Negeri 16 Pekalongan, No Rekening 2007087503, saldo Rp239.748.954,00
- cj. SMP Negeri 17 Pekalongan, No Rekening 2007034833, saldo Rp14.844.297,00

Saldo total seluruh rekening dana BOS adalah sebesar Rp1.547.353.583,00, atau lebih besar Rp19.991.770,00 dari saldo BOS sebesar Rp1.527.361.813,00, adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Terdapat saldo Blokgrand SMP N 4 sebesar Rp18.425.000,00
- b. Terdapat kelebihan setor SMPN 14 sebesar Rp10.351,00
- c. Terdapat kelebihan Setor SDN Soko sebesar Rp277.903,00
- d. Terdapat uang pribadi Bendahara yang terseter ke Rek BOS SDN Kraton Kidul sebesar Rp1.232.571,00
- e. Terdapat uang pribadi Bendahara yang terseter ke Rek BOS SMPN 05 sebesar Rp36.545,00
- f. Terdapat uang pribadi Bendahara yang terseter ke Rek BOS SMPN 08 sebesar Rp9.400,00

Adapun laporan Sisa kas untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

Saldo Dana BTT

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penanganan covid-19 dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) maka 48 SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut membuka rekening pada Bank Jateng Cabang Pekalongan. Adapun Saldo pada Rekening Dana BTT tersebut per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.779.838,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terdapat 16 rekening dengan saldo Rp 0,00
- b. Terdapat 27 rekening dengan saldo Rp 10.000,00, merupakan uang pribadi bendahara yang digunakan untuk pembukaan rekening, yaitu : Dinsos P2KB, Kel. Kauman, Kel. Sapuro Kebulen, Kel. Degayu, Kel. Kandang Panjang, Kel. Bandengan, Kel. Podosugih, Kel. Padukuan Kraton, Kel. Pasir Kramat Kraton, Kel. Krapyak, Kel. Panjang Wetan, Kel. Medono, Kel. Kalibaros, Kel. Noyontaansari, Kel. Gamer, Kel. Kuripan Yosorejo, Kel. Buaran Kradenan, Kel. Panjang Baru, Kel. Bendan Kergon, Kel. Kuripan Kertoharjo Kel. Klego, Kel. Banyurip, Kel. Tirto Kel. Pringrejo, Kel. Sokoduwet, Kel. Poncol, Kel. Jenggot.
- c. Terdapat 3 rekening dengan saldo Rp 50.000,00, merupakan uang pribadi bendahara yang digunakan untuk pembukaan rekening, yaitu : DPMPPA, Dinas perhubungan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- d. Terdapat 1 rekening dengan saldo Rp 1.010.000,00, merupakan uang pribadi bendahara, yaitu : Kelurahan Setono
- e. Terdapat 1 rekening dengan saldo Rp 299.838,00, merupakan bunga tabungan yaitu : Bagian Kesra

Adapun rincian saldo dari masing-masing rekening BTT dapat dilihat pada **Lampiran 14.**



Saldo BOK

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) maka 14 puskesmas yang melaksanakan kegiatan tersebut membuka rekening pada Bank Jateng Cabang Pekalongan. Adapun Saldo pada Rekening Dana BOK tersebut per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp724.314,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Puskesmas Bendan, No rekening 3007254571, saldo sebesar Rp65.500,00
- b. Puskesmas Kramatsari, No rekening 3007254601, saldo sebesar Rp53.000,00
- c. Puskesmas Tirto, No rekening 3007254520, saldo sebesar Rp50.000,00
- d. Puskesmas Medono, No rekening 3007254651, saldo sebesar Rp50.000,00
- e. Puskesmas Noyontaan, No rekening 3007254708, saldo sebesar Rp50.000,00
- f. Puskesmas Tondano, No rekening 3007254660, saldo sebesar Rp50.000,00
- g. Puskesmas Klego, No rekening 3007254643, saldo sebesar Rp50.000,00
- h. Puskesmas Sokorejo, No rekening 3007254597, saldo sebesar Rp55.014,00
- i. Puskesmas Kusuma Bangsa, No rekening 3007254627, saldo sebesar Rp50.800,00
- j. Puskesmas Krapyak Kidul, No rekening 3007254686, saldo sebesar Rp50.000,00
- k. Puskesmas Dukuh, No rekening 3007254562, saldo sebesar Rp50.000,00
- l. Puskesmas Pekalongan Selatan, No rekening 3007254589, saldo sebesar Rp50.000,00
- m. Puskesmas Jenggot, No rekening 3007254635, saldo sebesar Rp50.000,00
- n. Puskesmas Buaran, No rekening 3007254694, saldo sebesar Rp50.000,00

Saldo tersebut merupakan uang pribadi bendahara yang masih tertinggal di rekening tersebut.

6.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Pemerintah Kota Pekalongan tidak mempunyai aset lancar dalam bentuk investasi jangka pendek.

6.3.1.1.3 Piutang

Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Saldo piutang Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.826.307.094,86. Saldo piutang per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 10,49% jika dibandingkan dengan saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp43.378.338.498,57. Rincian piutang daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 58 Piutang Daerah Tahun 2020 dan 2019

Uraian		Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019	Naik/Turun
		Rp	Rp	%
A.	Piutang Pendapatan	52.026.205.268,50	45.002.682.491,50	15,61
1	Piutang Pajak	36.373.126.790,00	31.912.580.850,00	13,98
2	Piutang Retribusi	5.961.272.467,50	5.981.129.734,50	-0,33
3	Piutang Dana Perimbangan	2.115.427.950,00	5.357.622.501,00	-60,52
4	Piutang Dana Bagi Hasil	7.576.378.061,00	1.751.349.406,00	332,60
B.	Piutang Lainnya	18.469.099.136,54	27.348.911.387,05	-32,47
1	Piutang Lain2 PAD Yang Sah	18.469.099.136,54	27.348.911.387,05	-32,47
C.	Penyisihan Piutang	-31.668.997.310,18	-28.973.255.379,98	9,30
Jumlah		38.826.307.094,86	43.378.338.498,57	-10,49



Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan maka Piutang Daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota tersebut adalah sebagai berikut :

a. Piutang Pajak

Tabel 6. 59 Umur Piutang Pajak beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
Piutang Macet	lebih dari 5 tahun	100%

b. Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

Tabel 6. 60 Umur Piutang Retribusi beserta Piutang Tidak Tertagih

Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun	10%
Piutang Diragukan	2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
Piutang Macet	lebih dari 3 tahun	100%

6.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

Dasar pengakuan piutang pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SPT PBB atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKPD, yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum diterima pembayaran dari wajib pajak. Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.373.126.790,00, yang terdiri dari:



Tabel 6. 61 Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020

Jenis Piutang Pajak	Saldo per 31 Desember 2020
Pajak Hotel	25.002.800,00
Pajak Restoran	85.910.985,00
Pajak Hiburan	3.654.000,00
Pajak Reklame	818.315.816,00
Pajak Air Tanah	389.087.762,00
Pajak Bumi dan Bangunan	35.051.155.427,00
Jumlah	36.373.126.790,00

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 973/084 Tahun 2020 tentang Penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 bahwa Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kadaluarsa, PBB P2 yang terdapat ketetapan ganda, peralihan hak, obyek telah beralih fungsi menjadi fasilitas umum/fasilitas sosial, serta adanya bukti bayar, sehingga piutang dan tunggaknya tidak mungkin tertagih lagi. Adapun rincian penghapusan piutang pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 62 Penghapusan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020

Jenis Piutang Pajak	Saldo Piutang	Penghapusan Piutang	Saldo per 31 Desember 2020
Pajak Hotel	25.927.800,00	925.000,00	25.002.800,00
Pajak Restoran	89.525.985,00	3.615.000,00	85.910.985,00
Pajak Hiburan	4.654.000,00	1.000.000,00	3.654.000,00
Pajak Reklame	1.079.124.096,00	260.808.280,00	818.315.816,00
Pajak Parkir	4.630.000,00	4.630.000,00	-
Pajak Air Tanah	390.342.508,00	1.254.746,00	389.087.762,00
Pajak Sarang Burung Walet	14.480.000,00	14.480.000,00	-
Pajak Bumi dan Bangunan	35.217.120.659,00	165.965.232,00	35.051.155.427,00
Jumlah	36.825.805.048,00	452.678.258,00	36.373.126.790,00

Piutang pajak disajikan sesuai dengan umur piutang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. 63 Piutang Pajak berdasarkan Umur Piutang

No	Uraian	<1 Tahun (2020)	1 th s.d <=2 th (2019)	2 th <= x <= 5 th (2016-2018)	> 5 th (<2016)	Jumlah
1	Pajak Hotel	-	-	25.002.800,00	-	25.002.800,00
2	Pajak Restoran	-	14.707.525,00	71.203.460,00	-	85.910.985,00
3	Pajak Hiburan	-	-	3.654.000,00	-	3.654.000,00
4	Pajak Reklame	446.402.478,00	345.302.525,00	26.610.813,00	-	818.315.816,00
5	Pajak Air Tanah	301.148.720,00	74.037.170,00	13.295.872,00	606.000,00	389.087.762,00
6	PBB P2	6.904.592.220,00	5.193.907.121,00	10.117.263.868,00	12.835.392.218,00	35.051.155.427,00
	Jumlah	7.652.143.418,00	5.627.954.341,00	10.257.030.813,00	12.835.998.218,00	36.373.126.790,00

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan maka Piutang Daerah yang disajikan dalam Neraca



Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Sehingga nilai penyisihan piutang pajak berdasarkan umur piutang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 64 Penyisihan Piutang Pajak berdasarkan Umur Piutang

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2020)	1 th s.d <= 2 th (2019)	2 th < sd <= 5 th (2016-2018)	> 5 th (<2016)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Pajak Hotel	-	-	12.501.400,00	-	12.501.400,00
2	Pajak Restoran	-	1.470.752,50	35.601.730,00	-	37.072.482,50
3	Pajak Hiburan	-	-	1.827.000,00	-	1.827.000,00
4	Pajak Reklame	2.232.012,39	34.530.252,50	13.305.406,50	-	50.067.671,39
5	Pajak Air Tanah	1.505.743,60	7.403.717,00	6.647.936,00	606.000,00	16.163.396,60
6	PBB P2	34.522.961,10	519.390.712,10	5.058.631.934,00	12.835.392.218,00	18.447.937.825,20
	Jumlah	38.260.717,09	562.795.434,10	5.128.515.406,50	12.835.998.218,00	18.565.569.775,69

Tabel 6. 65 Saldo piutang pajak setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih

No	URAIAN	PIUTANG PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG PAJAK SETELAH DIKURANGI PIUTANG TDK TERTAGIH
1	Pajak Hotel	25.002.800,00	12.501.400,00	12.501.400,00
2	Pajak Restoran	85.910.985,00	37.072.482,50	48.838.502,50
3	Pajak Hiburan	3.654.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00
4	Pajak Reklame	818.315.816,00	50.067.671,39	768.248.144,61
5	Pajak Air Tanah	389.087.762,00	16.163.396,60	372.924.365,40
6	PBB P2	35.051.155.427,00	18.447.937.825,20	16.603.217.601,80
	Jumlah	36.373.126.790,00	18.565.569.775,69	17.807.557.014,31

Saldo piutang pajak bersih per 31 Desember 2020 adalah sebesar 17.807.557.014,31. Jika dibandingkan dengan saldo piutang bersih per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp15.379.696.255,62, maka saldo piutang per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 11,88%, Kenaikan ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 66 Saldo Piutang Pajak Bersih per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019

Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Pajak Hotel	12.501.400,00	16.516.200,00	-24,31
Pajak Restoran	48.838.502,50	51.457.717,38	-5,09
Pajak Hiburan	1.827.000,00	2.235.000,00	-18,26
Pajak Reklame	768.248.144,61	499.404.243,28	53,83
Pajak Air Tanah	372.924.365,40	152.551.087,64	144,46
PBB	16.603.217.601,80	14.657.531.007,33	13,27
Jumlah	17.807.557.014,31	15.379.695.255,62	15,79



6.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2020 sebelum penyisihan piutang adalah sebesar Rp5.961.272.466,50. Rincian piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. 67 Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2020

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2020
	Rp
PKD Titik Strategis	105.820.010,00
PKD Sewa Tanah	680.073.048,00
PKD Sarang Burung	5.850.000,00
PKD Administrasi Umum	275.000,00
Kolam renang	15.000.000,00
PKD Sewa ec tanah bengkok	6.150.000,00
Pemakaian sarana dan prasarana reklame	10.000.000,00
Retribusi ijin trayek	801.600,00
Retribusi parkir	683.617.000,00
Retribusi pemakaian tempat pasar/grosir/kios/toko	3.181.529.631,00
Retribusi ijin gangguan	34.193.500,00
Retribusi IMB	285.364.200,00
Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat	244.442.500,00
Retribusi PKD sewa rusunawa slamaran	320.070.902,00
Retribusi PKD sewa rusunawa kuripan	169.517.283,50
Retribusi PKD sewa rusunawa panjang baru	33.049.640,00
Retribusi menara telekomunikasi	185.518.152,00
Jumlah	5.961.272.466,50

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 973/084 Tahun 2020 tentang Penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 bahwa Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah kadaluarsa, sehingga piutang dan tunggakannya tidak mungkin tertagih lagi. Adapun rincian penghapusan piutang retribusi adalah sebagai berikut :



Tabel 6. 68 Rincian Penghapusan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020

Jenis Piutang Retribusi	Saldo Piutang Retribusi	Penghapusan Piutang	Saldo Piutang Per 31 Desember 2020
PKD Titik Strategis	812.466.260,00	706.646.250,00	105.820.010,00
PKD Sewa Tanah	680.073.048,00	0	680.073.048,00
PKD Sarang Burung	5.850.000,00	0	5.850.000,00
PKD Administrasi Umum	275.000,00	0	275.000,00
Kolam renang	15.000.000,00	0	15.000.000,00
PKD Sewa ec tanah bengkok	6.150.000,00	0	6.150.000,00
Pemakaian sarana dan prasarana reklame	10.000.000,00	0	10.000.000,00
Retribusi ijin trayek	801.600,00	0	801.600,00
Retribusi parkir	683.617.000,00	0	683.617.000,00
Retribusi pemakaian tempat pasar/grosir/kios/toko	3.193.185.871,00	11.656.240,00	3.181.529.631,00
Retribusi ijin gangguan	34.193.500,00	0	34.193.500,00
Retribusi IMB	285.364.200,00	0	285.364.200,00
Retribusi pemakaman dan penguburan mayat	244.442.500,00	0	244.442.500,00
Retribusi PKD sewa rusunawa slamatan	320.070.902,00	0	320.070.902,00
Retribusi PKD sewa rusunawa kuripan	169.517.283,50	0	169.517.283,50
Retribusi PKD sewa rusunawa panjang baru	33.049.640,00	0	33.049.640,00
Retribusi menara telekomunikasi	185518153	0	185.518.152,00
Jumlah		718.302.490,00	5.961.272.466,50

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. 69 Piutang Retribusi berdasarkan Umur Piutang

UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2020)	1 th s.d <=2 th (2019)	2 th < d <=3 th (2018)	> 3 th (<2017)	Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
PKD Titik Strategis	288.250,00	4.376.501,00	2.202.500,00	-	6.867.251,00
PKD Sewa Tanah	2.555.585,86	15.303.752,10	-	15.918.356,00	33.777.693,96
PKD Sarang Burung	-	-	-	5.850.000,00	5.850.000,00
PKD Administrasi Umum	-	-	-	275.000,00	275.000,00
Kolam renang	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00
PKD Sewa ec tanah bengkok	10.750,00	-	2.000.000,00	-	2.010.750,00
Pemakaian sarana dan prasarana reklame	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Retribusi ijin trayek	-	-	42.400,00	716.800,00	759.200,00
Retribusi parkir	463.200,00	53.360.200,00	19.245.000,00	18.885.000,00	91.953.400,00
Retribusi pemakaian tempat pasar/grosir/kios/toko	495.129,05	3.374.913,10	104.409.620,50	2.839.935.449,00	2.948.215.111,65
Retribusi ijin gangguan	-	-	-	34.193.500,00	34.193.500,00
Retribusi IMB	-	-	14.249.100,00	256.866.000,00	271.115.100,00
Retribusi pemakaman dan penguburan mayat	38.525,00	559.250,00	12.462.500,00	206.220.000,00	219.280.275,00
Retribusi PKD sewa rusunawa slamatan	952.871,66	6.473.389,60	7.713.613,00	49.335.448,00	64.475.322,26
Retribusi PKD sewa rusunawa kuripan	546.862,64	2.046.527,50	10.658.567,25	18.362.346,00	31.614.303,39
Retribusi PKD sewa rusunawa panjang baru	162.364,52	3.985,30	268.442,00	-	434.791,82
Retribusi menara telekomunikasi	-	-	-	185.518.152,00	185.518.152,00
JUMLAH	5.513.538,73	86.498.518,60	173.251.742,75	3.647.076.051,00	3.912.339.851,08



Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 70 Saldo Piutang Retribusi dan Penyisihan piutang Retribusi Tidak tertagih

NO	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TDK TERTAGIH
1	PKD Titik Strategis	105.820.010,00	6.867.251,00	98.952.759,00
2	PKD Sewa Tanah	680.073.048,00	33.777.693,96	646.295.354,04
3	PKD Sarang Burung	5.850.000,00	5.850.000,00	-
4	PKD Administrasi Umum	275.000,00	275.000,00	-
5	Kolam renang	15.000.000,00	15.000.000,00	-
6	PKD Sewa ec tanah bengkok	6.150.000,00	2.010.750,00	4.139.250,00
7	Pemakaian sarana dan prasarana reklame	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
8	Retribusi ijin trayek	801.600,00	759.200,00	42.400,00
9	Retribusi parkir	683.617.000,00	91.953.400,00	591.663.600,00
10	Retribusi pemakaian tempat pasar/grosir/kios/toko	3.181.529.631,00	2.948.215.111,65	233.314.519,35
11	Retribusi ijin gangguan	34.193.500,00	34.193.500,00	-
12	Retribusi IMB	285.364.200,00	271.115.100,00	14.249.100,00
13	Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat	244.442.500,00	219.280.275,00	25.162.225,00
14	Retribusi PKD sewa rusunawa slamaran	320.070.902,00	64.475.322,26	255.595.579,74
15	Retribusi PKD sewa rusunawa kuripan	169.517.283,50	31.614.303,39	137.902.980,11
16	Retribusi PKD sewa rusunawa panjang baru	33.049.640,00	434.791,82	32.614.848,19
17	Retribusi menara telekomunikais	185.518.152,00	185.518.152,00	-
	Jumlah	5.961.272.466,50	3.912.339.851,08	2.048.932.615,43

Saldo piutang retribusi bersih per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.048.932.615,43. Jika dibandingkan dengan saldo piutang bersih per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.826.953.015,55, maka saldo piutang per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 12,15%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. 71 Saldo Piutang Retribusi Bersih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

PKD Titik Strategis	98.952.759,00	83.917.735,95	17,92
PKD Sewa Tanah	646.295.354,05	248.538.149,58	160,04
PKD sewa rumah dinas	0,00	275.205,06	-100,00
PKD Sewa ec tanah bengkok	4.139.250,00	3.600.000,00	14,98
Pemakaian sarana dan prasarana reklame	9.000.000,00	9.950.000,00	-9,55
Retribusi ijin trayek	42.400,00	76.320,00	-44,44
Retribusi parkir	591.663.600,00	614.663.315,00	-3,74
Retribusi pemakaian tempat pasar/grosir/kios/toko	233.314.519,35	486.147.837,86	-52,01
Retribusi ijin gangguan	0,00	1.697.700,00	-100,00
Retribusi IMB	14.249.100,00	36.487.480,00	-60,95
Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat	25.162.225,00	38.929.437,50	-35,36
Retribusi PKD sewa rusunawa slamaran	255.595.579,74	179.448.611,54	42,43
Retribusi PKD sewa rusunawa kuripan	137.902.980,11	103.946.822,64	32,67
Retribusi PKD sewa rusunawa panjang baru	32.614.848,19	19.274.400,44	69,21
JUMLAH	2.048.932.615,43	1.826.953.015,55	12,15



6.3.1.1.3.3 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Saldo piutang transfer pemerintah lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.116.427.950,00 yang merupakan piutang dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bagi Hasil Pajak Pusat sebesar Rp2.171.894.194,00
- b. Bagi Hasil SDA Pusat sebesar (Rp56.466.244,00)

Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 Kota Pekalongan mendapatkan alokasi kurang bayar DBH SDA Pusat sebesar Rp2.167.896.572,00 namun terdapat lebih bayar DBH sebesar Rp2.482.382.044,00 sehingga masih ada kelebihan bayar sebesar Rp56.466.244,00.

6.3.1.1.3.4 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp Rp7.576.378.061,00, yang merupakan piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6. 72 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Jenis Piutang Bagi Hasil	Per 31 Desember 2020
	Rp
Pajak Kendaraan bermotor	3.860.753.223,00
Bea balik nama kendaraan bermotor	1.144.248.203,00
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	2.570.745.450,00
Pajak air permukaan	631.185,00
Jumlah	7.576.378.061,00

6.3.1.1.3.5 Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya sebelum penyisihan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.124.860.473,00. Adapun besaran penyisihan sebesar Rp9.159.366.489,00 sehingga piutang bersih piutang lainnya adalah sebesar Rp2.965.493.983,00. Rincian piutang lainnya adalah sebagai berikut :



Tabel 6. 73 Rincian Piutang Lainnya

No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Denda PBB	8.720.250.040,00	6.445.763.694,75	2.274.486.345,25
2	Piutang denda non PBB	344.763.588,91	297.240.801,06	47.522.787,85
3	Piutang denda parkir	54.036.668,00	21.924.594,00	32.112.074,00
4	Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi	49.816.666,67	36.021.854,17	13.794.812,50
5	Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House	54.053.247,43	54.053.247,43	0,00
6	Piutang Bunga Dana Bergulir KKP	242.750.900,41	237.184.583,75	5.566.316,67
7	Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Koperasi	1.056.339,00	5.281,70	1.051.057,31
8	Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Trading House	0,00	0	0,00
9	Piutang Bunga Jasa Tabungan DB KKP	3.401.790,00	17.008,95	3.384.781,05
10	Piutang Hand Traktor	5.596.500,00	5.596.500,00	0,00
11	Piutang Ternak	13.605.000,00	13.605.000,00	0,00
12	Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak	44.471.949,00	44.471.949,00	0,00
13	Piutang pokok perguliran ternak awal dan redistribusi	121.885.016,00	121.885.016,00	0,00
14	Piutang Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00
15	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
16	Piutang BLUD	8.813.411.431,13	1.913.318.151,62	6.900.093.279,50
	-PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN)	8.481.641.431,00	1.911.659.302,00	6.569.982.129,00
	-PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN)	331.770.000,13	1.658.849,62	330.111.150,50
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN	18.469.099.136,54	9.191.087.682,42	9.278.011.454,12

6.3.1.1.3.6 Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.668.997.310,18, meningkat Rp2.695.741.930,20 dibandingkan saldo penyisihan piutang tahun 2019 sebesar Rp28.973.255.379,98. Penyisihan piutang terdiri dari :

- a. Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp22.477.909.626,76, terdiri dari :
 1. Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp18.565.569.775,69, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 6.64.
 2. Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp3.912.339.851,07, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 6.69.
- b. Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp9.191.087.682,42, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 6.73.

6.3.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.753.050,00. Saldo belanja dibayar dimuka dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Asuransi mobil dinas pada Bagian Umum Setda sebesar Rp36.387.633,33, dengan nilai premi setahun sebesar Rp39.695.600,00 untuk 6 mobil yaitu G1A, G6A, G5A, G17A, G121A, G45A.
 Masa berlaku asuransi adalah 3 Desember 2020 sampai 3 Desember 2021 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 11 bulan.
- b. Asuransi mobil dinas pada Sekretariat Dewan sebesar Rp7.365.416,67 dengan nilai premi sebesar Rp8.035.000,00 untuk 1 mobil yaitu G7015A.
 Masa berlaku asuransi adalah 2 Desember 2020 sampai dengan 2 Desember 2021 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 11 bulan.



6.3.1.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa :

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*);
- Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.

Tabel 6. 74 Saldo Persediaan per 31 Desember 2020

URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Bahan	101.755.216,11	7.786.132.932,13	7.678.455.012,02	209.433.136,22
Suku Cadang	-	112.387.695,00	111.227.695,00	1.160.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.444.535.817,14	15.454.879.695,91	15.132.569.244,28	1.766.846.268,77
Obat-obatan	13.955.710.958,84	64.174.172.473,00	43.526.506.082,33	34.603.377.349,50
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	52.273.400,00	153.880.100,00	51.036.925,00	155.116.575,00
Natura Dan Pakan	33.260.705,76	5.915.423.856,79	5.936.881.471,29	11.803.091,26
Persediaan Penelitian	7.000.000,00	330.428.609,00	337.428.609,00	-
Pipa	-	84.298.000,00	84.298.000,00	-
Jumlah	15.594.536.097,85	94.011.603.361,83	72.858.403.038,92	36.747.736.420,75

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.747.736.420,75 meningkat sebesar 135,65% dibandingkan saldo persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.594.536.097,85.

Tabel 6. 75 Persediaan Berdasarkan OPD per 31 Desember 2020

OPD	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
DINDIK	567.000,00	5.245.717.634,00	5.244.867.134,00	1.417.500,00
DINKES	5.963.857.432,00	35.370.980.600,68	13.871.647.214,70	27.463.190.817,97
RSUD BENDAN	7.839.644.552,85	33.850.868.181,15	34.384.005.095,72	7.306.507.638,28
DPUPR	142.021.705,00	2.028.638.934,00	2.031.967.039,00	138.693.600,00
DINPERKIM	6.319.500,00	119.530.000,00	123.362.650,00	2.486.850,00
SATPOL PP	11.776.600,00	321.047.465,00	329.683.365,00	3.140.700,00
BPBD	82.116.050,00	3.933.432.400,00	3.862.187.825,00	153.360.625,00
KESBANGPOL	1.617.800,00	29.600.000,00	30.580.300,00	637.500,00
DINSOSP2KB	610.959.569,00	997.977.759,00	1.088.372.992,00	520.564.336,00
DINPERINAKER	7.250.100,00	240.833.610,00	223.131.810,00	24.951.900,00
DPMP2A	6.256.569,00	110.237.400,00	111.174.115,00	5.319.854,00
DINPERPA	55.693.400,00	339.238.414,00	345.443.414,00	49.488.400,00
DLH	7.182.350,00	384.811.020,00	382.678.670,00	9.314.700,00
DINDUKCAPIL	520.885.528,00	915.065.750,00	630.618.668,00	805.332.610,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



OPD	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
DISHUB	33.723.290,00	356.257.700,00	369.157.990,00	20.823.000,00
DISKOMINFO	3.816.440,00	409.947.100,00	405.102.466,50	8.661.073,50
DINDAGKOP	61.360.350,00	343.270.820,00	335.923.920,00	68.707.250,00
DPMPSTP	188.100,00	189.151.000,00	189.174.600,00	164.500,00
DINPARBUDPORA	21.250.900,00	921.064.750,00	937.468.650,00	4.847.000,00
DINARPUS	56.718.200,00	197.516.067,00	246.331.667,00	7.902.600,00
DKP	-	607.304.890,00	605.789.890,00	1.515.000,00
BAPPEDA	12.611.800,00	69.385.800,00	71.510.700,00	10.486.900,00
BKD	34.957.150,00	606.721.772,00	609.384.022,00	32.294.900,00
BKPPD	5.273.400,00	66.543.800,00	66.348.700,00	5.468.500,00
SETDA	61.924.200,00	3.690.649.650,00	3.709.470.600,00	43.103.250,00
SETWAN	21.939.000,00	570.211.848,00	576.187.580,00	15.963.268,00
INSPEKTORAT	12.359.262,00	73.920.961,00	71.281.675,00	14.998.548,00
KEC. PKL. UTARA	2.261.000,00	368.218.050,00	366.855.250,00	3.623.800,00
KEC. PKL. SELATAN	2.513.000,00	456.337.900,00	454.648.600,00	4.202.300,00
KEC. PKL. BARAT	1.713.750,00	681.653.603,00	674.435.353,00	8.932.000,00
KEC. PKL. TIMUR	5.778.100,00	515.468.483,00	509.611.083,00	11.635.500,00
JUMLAH	15.594.536.097,85	94.011.603.361,83	72.858.403.038,92	36.747.736.420,75

Saldo awal persediaan tahun 2020 merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.594.536.097,85 meningkat sebesar 27,77% dibandingkan saldo awal persediaan tahun 2019 sebesar Rp12.205.600.745,65.

Penerimaan persediaan tahun 2020 sebesar Rp94.011.603.361,83 meningkat sebesar 23,24% dibandingkan penerimaan persediaan tahun 2019 sebesar Rp76.281.349.924,13.

Pengeluaran persediaan tahun 2020 sebesar Rp72.858.403.038,92 menurun sebesar 0,05% dibandingkan pengeluaran persediaan tahun 2019 sebesar Rp72.892.414.571,93.

Apabila dilihat dari sumber penerimaannya, persediaan tahun 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Persediaan APBD	Rp 29.354.507.425,79
b. Belanja Modal APBD	Rp 35.112.867,00
c. Belanja Persediaan Dana BOS	Rp 4.714.711.439,00
d. Belanja Persediaan Dana BLUD	Rp 24.057.069.142,01
e. Hibah dari Provinsi	Rp 24.829.006.603,30
f. Belanja BTT/DID	Rp 7.077.371.008,38
g. Hibah Lain	Rp 3.943.824.876,35
Jumlah	Rp 94.011.603.361,83



Tabel 6. 76 Penerimaan Persediaan Berdasarkan OPD per 31 Desember 2020

OPD	PERSEDIAAN APBD	BELANJA MODAL APBD	BOS	BLUD	PROVINSI	BTT/DID	HIBAH LAIN
DINDIK	380.868.250,00	-	4.714.711.439,00	-	-	150.137.945,00	-
DINKES	8.145.523.676,00	2.865.867,00	-	899.702.496,00	24.418.281.683,30	1.738.245.578,38	166.361.300,00
RSUDBENDAN	6.542.464.648,79	-	-	23.157.366.646,01	-	466.799.410,00	3.684.237.476,35
DPUPR	1.788.024.434,00	-	-	-	-	240.614.500,00	-
DINPERKIM	119.530.000,00	-	-	-	-	-	-
SATPOL PP	315.740.715,00	3.721.000,00	-	-	-	1.585.750,00	-
BPBD	283.215.800,00	-	-	-	162.350.100,00	3.487.866.500,00	-
KESBANGPOL	29.600.000,00	-	-	-	-	-	-
DINSOSP2KB	644.636.839,00	-	-	-	248.374.820,00	11.740.000,00	93.226.100,00
INPERINAKER	183.093.610,00	3.300.000,00	-	-	-	54.440.000,00	-
DPMP2A	84.727.900,00	-	-	-	-	25.509.500,00	-
DINPERPA	182.185.914,00	3.875.000,00	-	-	-	153.177.500,00	-
DLH	378.082.020,00	275.000,00	-	-	-	6.454.000,00	-
DINDUKAPIL	915.065.750,00	-	-	-	-	-	-
DISHUB	308.187.700,00	12.400.000,00	-	-	-	35.670.000,00	-
DISKOMINFO	402.947.100,00	-	-	-	-	7.000.000,00	-
DINDAGKOP	294.465.820,00	-	-	-	-	48.805.000,00	-
DPMP2SP	187.864.000,00	1.287.000,00	-	-	-	-	-
DINPARBUDPORA	866.854.750,00	215.000,00	-	-	-	53.995.000,00	-
DINARPUS	197.516.067,00	-	-	-	-	-	-
DKP	290.459.515,00	-	-	-	-	316.845.375,00	-
BAPPEDA	69.385.800,00	-	-	-	-	-	-
BKD	606.721.772,00	-	-	-	-	-	-
BKPPD	66.543.800,00	-	-	-	-	-	-
SETDA	3.434.354.650,00	-	-	-	-	256.295.000,00	-
SETWAN	570.211.848,00	-	-	-	-	-	-
INSPEKTORAT	73.920.961,00	-	-	-	-	-	-
KEC.PKL. UTARA	368.218.050,00	-	-	-	-	-	-
KEC.PKL. SELATAN	455.737.900,00	600.000,00	-	-	-	-	-
KEC.PKL. BARAT	654.689.653,00	4.774.000,00	-	-	-	22.189.950,00	-
KEC.PKL. TIMUR	513.668.483,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL	29.354.507.425,79	35.112.867,00	4.714.711.439,00	24.057.069.142,01	24.829.006.603,30	7.077.371.008,38	3.943.824.876,35

Rincian lebih lanjut masing-masing jenis persediaan per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan

Tabel 6. 77 Persediaan Bahan per 31 Desember 2020

URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Bahan Bangunan dan Konstruksi	31.911.204,00	6.087.427.335,90	5.992.293.235,90	127.045.304,00
Bahan Kimia	67.765.440,17	93.445.296,11	99.027.929,06	62.182.807,22
Bahan Bakar Dan Pelumas	1.100.071,94	590.473.707,12	589.993.854,06	1.579.925,00
Bahan Baku	335.000,00	165.612.293,00	165.947.293,00	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Bahan/Bibit Tanaman	293.500,00	772.627.000,00	755.105.400,00	17.815.100,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	350.000,00	21.245.000,00	21.245.000,00	350.000,00
Isi Tabung Gas	-	18.015.800,00	17.555.800,00	460.000,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	37.286.500,00	37.286.500,00	-
JUMLAH	101.755.216,11	7.786.132.932,13	7.678.455.012,02	209.433.136,22

b. Suku Cadang

Tabel 6. 78 Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2020

URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Suku Cadang Alat Angkutan	-	5.439.000,00	5.439.000,00	-
Suku Cadang Alat Pertanian	-	99.863.695,00	98.703.695,00	1.160.000,00
Suku Cadang Lainnya	-	7.085.000,00	7.085.000,00	-
JUMLAH	-	112.387.695,00	111.227.695,00	1.160.000,00

c. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Tabel 6. 79 Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2020

URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Alat Tulis Kantor	116.290.667,00	1.939.424.710,06	1.943.624.848,87	112.090.528,19
Kertas Dan Cover	37.319.850,00	1.456.335.918,00	1.389.173.632,00	104.482.136,00
Bahan Cetak	206.037.700,00	1.424.777.124,00	1.012.399.304,00	618.415.520,00
Benda Pos	622.000,00	251.744.500,00	245.274.500,00	7.092.000,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	684.042.478,00	3.367.513.288,00	3.510.728.628,00	540.827.138,00
Bahan Komputer	5.742.000,00	386.491.700,00	380.707.000,00	11.526.700,00
Perabot Kantor	133.421.846,12	2.837.786.030,97	2.802.725.286,51	168.482.590,58
Alat Listrik	119.805.745,00	1.153.525.135,88	1.256.478.812,88	16.852.068,00
Perlengkapan Dinas	-	8.250.000,00	5.150.000,00	3.100.000,00
Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	344.228.949,00	343.918.949,00	310.000,00
Suvenir/Cendera Mata	-	275.769.600,00	274.259.600,00	1.510.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	141.253.531,02	2.009.032.740,00	1.968.128.683,02	182.157.588,00
JUMLAH	1.444.535.817,14	15.454.879.695,91	15.132.569.244,28	1.766.846.268,77

Saldo bahan cetak tersebut termasuk blanko dokumen kependudukan pada Dindukcapil yang sudah tidak digunakan sebesar Rp87.657.153,00, berupa :

- 1) Blanko KTP, sebanyak 19.663 lembar, sebesar Rp28.118.090,00
- 2) Blanko KK, sebanyak 4000 lembar, sebesar Rp12.800.000,00
- 3) Blanko Akta Kelahiran, sebanyak 9.971 lembar, sebesar Rp46.739.063

d. Obat-obatan

Tabel 6. 80 Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2020

URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Obat	8.426.095.858,69	33.848.413.784,68	16.706.262.963,33	25.568.246.680,04
Obat-Obatan Lainnya	5.529.615.100,15	30.325.758.688,32	26.820.243.119,00	9.035.130.669,46
JUMLAH	13.955.710.958,84	64.174.172.473,00	43.526.506.082,33	34.603.377.349,50



Pengeluaran persediaan tersebut di atas termasuk pengeluaran obat yang kadaluarsa/*expired* pada tahun 2020 sebesar Rp4.544.655,32. Rincian persediaan yang kadaluarsa sebagaimana dalam **Lampiran 15**.

e. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan

Tabel 6. 81 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2020

URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	52.273.400,00	153.880.100,00	51.036.925,00	155.116.575,00
JUMLAH	52.273.400,00	153.880.100,00	51.036.925,00	155.116.575,00

f. Natura dan Pakan

Tabel 6. 82 Persediaan Natura Dan Pakan per 31 Desember 2020

URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Natura	33.260.705,76	5.754.811.856,79	5.776.519.471,29	11.553.091,26
Pakan	-	155.862.000,00	155.612.000,00	250.000,00
Natura Dan Pakan Lainnya	-	4.750.000,00	4.750.000,00	-
JUMLAH	33.260.705,76	5.915.423.856,79	5.936.881.471,29	11.803.091,26

g. Persediaan Penelitian

Tabel 6. 83 Persediaan Penelitian dan Pipa per 31 Desember 2020

Persediaan Penelitian	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Persediaan Penelitian Lainnya	7.000.000,00	330.428.609,00	337.428.609,00	-
JUMLAH	7.000.000,00	330.428.609,00	337.428.609,00	-

h. Persediaan Pipa

Tabel 6. 84 Persediaan Pipa per 31 Desember 2020

Persediaan Pipa	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Pipa Plastik Pvc (Upvc)	-	84.298.000,00	84.298.000,00	-
JUMLAH	-	84.298.000,00	84.298.000,00	-

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 16**.

6.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang Pemerintah Kota Pekalongan merupakan penempatan dana Pemerintah Kota Pekalongan dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD dan dalam bentuk penyertaan modal lainnya dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman



investasinya menjadi investasi non permanen dan investasi permanen. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp95.675.200.074,49. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,83% jika dibandingkan dengan saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp92.147.877.182,26. Rincian investasi jangka panjang per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 85 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019

Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Investasi Non Permanen	277.066.500,00	1.482.586.701,00	(81,31)
Penyisihan Diragukan Tertagih	-	(284.890.450,00)	(100,00)
Investasi Permanen	95.398.133.574,49	90.950.180.931,26	4,89
Jumlah	95.675.200.074,49	92.147.877.182,26	3,83

6.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Program dana bergulir yang disalurkan dan dikelola bekerja sama dengan PD BPR Bank Pekalongan (penggantian nama dari PD BPR Bank Pasar Pekalongan) selaku *channelling agency* adalah dana bergulir usaha ketahanan pangan dan KKP perikanan, dana bergulir kepada lembaga koperasi dan simpan pinjam dan dana bergulir koperasi UKM dan Trading House. Sedangkan dana bergulir hewan ternak disalurkan dan dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan. Saldo investasi non permanen – dana bergulir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp277.066.500,00. Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 76,87% jika dibandingkan dengan saldo investasi non permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.197.696.251,00. Investasi non permanen dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 86 Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019

Uraian Investasi Non Permanen	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Investasi dalam Proyek Pembangunan	296.274.000,00	1.000.000.000,00	(70,37)
Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	264.765.850,00	482.586.701,00	(45,14)
Dana Bergulir diragukan tertagih	(283.973.350,00)	(284.890.450,00)	(0,32)
Jumlah	277.066.500,00	1.197.696.251,00	(76,87)

Investasi non permanen selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.3.1.2.1.1 Investasi dalam Proyek Pembangunan

Penyajian investasi non permanen berdasarkan *Net Realizable Value (NRV)* yang disajikan sebesar sisa pokok perguliran dikurangi dengan penyisihan atas dana bergulir



yang diragukan dapat ditagih. Saldo investasi dalam proyek pembangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp296.274.000,00.

Investasi dalam proyek tahun 2020 merupakan dana bergulir KKP (Ketahanan Pangan dan Perikanan). Dana bergulir Ketahanan Pangan dan KKP Perikanan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008. Terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012. Saldo bersih (setelah penyisihan atas dana bergulir yang diragukan tidak tertagih) investasi dana bergulir ketahanan pangan dan KKP Perikanan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp277.066.500,00, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 87 Dana Bergulir – KKP (Ketahanan Pangan dan Perikanan) per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah
Dana Bergulir pada Penerima	296.274.000,00
Penyisihan atas Dana Bergulir diragukan tertagih	19.207.500,00
Nilai Bersih Dana Bergulir	277.066.500,00
Dana pokok yang mengendap di BPR Bank Pekalongan	-
Jumlah Nilai dana Bergulir (nett)	277.066.500,00

Nilai investasi dana bergulir KKP diragukan tertagih sebesar Rp19.207.500,00 merupakan nilai pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Jumlah dana bergulir yang diterima oleh PD BPR Bank Pekalongan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp3.390.790,00. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPKD Kota Pekalongan dengan PD BPR Bank Pekalongan Nomor 900/1266 dan 658/BP/VI 2020 tanggal 15 Juni 2020 bahwa setiap penerimaan angsuran dana bergulir akan di setorkan ke Kasda, sehingga saldo dana bergulir pada rekening penampungan (PD BPR Bank Pekalongan dengan nomor rekening 203-01898) tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 namun demikian rekening di PD BPR Bank Pekalongan tidak ditutup dan masih tetap digunakan untuk menampung sisa angsuran dana bergulir dari para debitur.

6.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir ini merupakan dana bergulir pinjaman modal kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Trading House* melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008. Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp264.765.850,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 88 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	Per 31 Desember 2020
Dana Bergulir - Trading House	232.586.701,00
Dana Bergulir - Koperasi UKM	32.179.149,00
Jumlah	264.765.850,00

Penjelasan tentang investasi non permanen trading house dan koperasi UKM dapat disajikan sebagai berikut :



a. Dana Bergulir – Trading House

Dana bergulir ini merupakan dana bergulir pinjaman modal kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Trading House* melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008. Saldo Investasi Non Permanen dalam Dana Bergulir Koperasi UKM dan *Trading House* per 31 Desember 2020 sebelum dikurangi dengan penyisihan atas dana bergulir adalah sebesar Rp232.586.701,00, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 89 Dana Bergulir – Trading House

Uraian	Jumlah
Dana dari Pemerintah Kota Pekalongan	1.125.000.000,00
Angsuran yang telah disetor ke Kas Daerah	892.413.299,00
Dana Bergulir pada Penerima	232.586.701,00
Penyisihan atas Dana Bergulir diragukan tertagih	(232.586.701,00)
Dana pokok yang mengendap di BPR Bank Pekalongan	0,00
Jumlah Nilai Dana Bergulir	0,00

Dana bergulir trading house yang macet sudah diserahkan kepada KPKNL per tanggal 1 Desember 2016 dengan surat penyerahan nomor 1047 sd 1060/BP/XII/2016 untuk 14 penunggak dengan nilai penyerahan sebesar Rp414.599.944,00 dan sampai posisi 31 Desember 2020 masih menyisakan 9 penunggak dengan nilai tunggakan sebesar Rp232.586.701,00.

b. Dana Bergulir – Simpan Pinjam Koperasi

Dana bergulir ini merupakan dana bergulir kepada sebelas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006. Saldo investasi non permanen dana bergulir – Simpan Pinjam Koperasi bersih adalah sebesar Rp0,00, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 90 Dana Bergulir – Simpan Pinjam Koperasi

Uraian	Jumlah
Dana Bergulir pada Penerima	32.179.149,00
Jumlah Investasi	32.179.149,00
Penyisihan Dana Bergulir yang diragukan tidak tertagih	(32.179.149,00)
Saldo mengendap di Bank Pekalongan	0,00
Jumlah Investasi Dana Bergulir	0,00

Penyisihan dana bergulir yang diragukan tidak tertagih sebesar Rp32.179.149,00 merupakan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Pada tanggal 19 Pebruari 2020 telah dilakukan penarikan terhadap saldo dana bergulir Simpan Pinjam Koperasi yang mengendap di PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp217.820.851,00, sehingga saldo dana bergulir pada tanggal tersebut Rp0,00, namun demikian rekening di PD Bank Pekalongan tidak ditutup dan masih tetap digunakan untuk menampung sisa angsuran dana bergulir dari para debitur.



6.3.1.2.1.3 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Saldo dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp283.973.350,00, terdiri dari:

- Dana bergulir diragukan tertagih - Ketahanan Pangan dan Perikanan, sebesar Rp19.207.500,00
- Dana bergulir diragukan tertagih - *Trading House*, sebesar Rp232.586.701,00
- Dana bergulir diragukan tertagih - Simpan Pinjam Koperasi, sebesar Rp32.179.149,00

6.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen merupakan penyertaan modal pemerintah daerah (PMPD) pada Lembaga Keuangan bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, PDAM Kota Pekalongan dan PT. PRPP Jateng.

Saldo investasi permanen penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp95.398.133.574,49. Saldo investasi permanen tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,89% jika dibandingkan dengan saldo investasi permanen tahun 2019 sebesar Rp90.950.180.931,26. Saldo investasi permanen terdiri dari : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, sebesar Rp95.092.933.574,50 dan Investasi Permanen Lainnya, sebesar Rp305.200.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. 91 Investasi Permanen Pemerintah Kota Pekalongan

Investasi Permanen	Kepemilikan	31-Des-20	31 Des 2019	Naik/Turun
	Saham (%)	(Rp)	(Rp)	%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		95.092.933.574,49	90.644.980.931,26	4,91
PT. Bank Jateng		23.661.000.000,00	22.393.000.000,00	5,66
BPR Bank Pekalongan	99,80	12.206.387.032,06	11.867.572.419,00	2,85
BPR BKK Kota Pekalongan	46,13	4.325.295.319,08	4.205.185.466,37	2,86
PT. BKK Jateng	2,14	7.350.000.000,00	6.950.000.000,00	5,76
Perumda Tirtayasa	98,21	47.550.251.223,36	45.229.223.045,89	5,13
Investasi Permanen Lainnya		305.200.000,00	305.200.000,00	-
PT PRPP Jateng	0,61	305.200.000,00	305.200.000,00	-
Jumlah		95.398.133.574,49	90.950.180.931,26	4,89



Tabel 6. 92 Perhitungan Investasi Permanen Pemerintah Kota Pekalongan

Entitas	% Kepemilikan	Saldo Awal	Tambahan Setoran Modal	Pembagian Dividen	Pengumuman Laba	Bagian Laba Pemda	Saldo Akhir Investasi
<i>Equity Method</i>							
BPR Bank Pekalongan	99,80%	11.867.572.419,00	400.000.000,00	-561.120.276,00	759.900.553,00	499.934.889,06	12.206.387.032,06
BPR BKK Kota Pekalongan	46,13%	4.205.185.466,37	200.000.000,00	-160.595.604,00	354.778.673,00	80.705.456,71	4.325.295.319,08
Perumda Tirtayasa	98,21%	45.229.223.045,89	2.250.000.000,00	-499.247.703,00	793.623.938,00	570.275.880,47	47.550.251.223,36
<i>Cost Method</i>							
PT.BKK Jateng	2,14%	6.950.000.000,00	400.000.000,00	-	-	-	7.350.000.000,00
Bank Jateng	0,62%	22.393.000.000,00	1.268.000.000,00	-4.597.516.188,00	-	-	23.661.000.000,00
PT PRPP Jateng	0,61%	305.200.000,00		-2.603.279,00	-	-	305.200.000,00
Saldo Akhir Investasi		90.950.180.931,26	4.518.000.000,00	-5.821.083.050,00	1.908.303.164,00	1.150.916.226,24	95.398.133.574,49

6.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp95.398.133.574,49. Saldo penyertaan modal tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,91% jika dibandingkan dengan saldo penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp90.950.180.931,26.

Penambahan nilai penyertaan modal tersebut dikarenakan pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyertaan modal kepada :

- PT. Bank Jateng sebesar Rp1.268.000.000,00;
- Perumda Tirtayasa (PDAM) Kota Pekalongan sebesar Rp2.250.000.000,00;
- BPR Bank Pekalongan sebesar Rp400.000.000,00;
- PT. BKK Jateng sebesar Rp400.000.000,00;
- BPR BKK Pekalongan sebesar Rp200.000.000,00.

Jumlah total penyertaan modal pada tahun 2020 adalah sebesar Rp4.518.000.000,00 namun nilai investasi permanen yang bertambah sebesar Rp4.447.952.643,24. Hal ini disebabkan karena metode pencatatan masing-masing BUMD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan untuk kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya atau sebesar nilai penyertaan modal, sedangkan untuk kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dicatat menggunakan metode ekuitas. Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, nilai investasi pada PT. Bank Jateng, PT. BKK Jateng dihitung dengan metode biaya. Sedangkan BPR Bank Pekalongan, BPR BKK Pekalongan dan Perumda Tirtayasa (PDAM) dicatat dengan metode ekuitas.



PT. BKK Jateng merupakan BUMD baru yang merupakan hasil merger BKK-BKK yang ada di kabupaten/kota se Jawa Tengah, salah satunya adalah BKK Utara Kota Pekalongan.

6.3.1.2.2.2 Investasi Permanen Lainnya

Investasi permanen lainnya merupakan investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. PRPP Jateng. Saldo investasi permanen lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp305.200.000,00. Saldo investasi permanen tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan saldo investasi permanen lainnya tahun 2020 sebesar Rp305.200.000,00. Untuk penghitungan nilai investasi pada PT. PRPP Jateng dihitung dengan metode biaya.

Perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas dan biaya dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

6.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

LKD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 ini sudah menyajikan laporan sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut, terjadi perubahan posisi penggolongan dalam saldo awal aset tetap tahun 2020.

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2020 dengan nilai buku sebesar Rp2.493.125.176.286,83 meningkat sebesar Rp40.553.152.604,60 dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp2.452.572.023.682,23 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. 93 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan

Jenis Aset Tetap	31-Des-19	01-Jan-20	Penambahan	Pengurangan	31-Des-20
	(Rp)	Kode Baru (Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	1.311.204.062.019,37	1.311.204.062.019,37	37.433.265.073,00	15.192.908.493,00	1.333.444.418.599,37
Peralatan dan Mesin	455.160.610.773,76	462.183.268.455,63	92.681.008.470,07	14.594.928.302,71	540.269.348.622,99
Gedung & Bangunan	763.793.036.482,84	757.977.743.482,84	67.182.222.748,00	19.554.286.032,37	805.605.680.198,47
Jalan, Irigasi & Jaringan	829.609.216.352,69	829.609.216.352,69	66.797.403.460,00	12.611.051.050,00	883.795.568.762,69
Aset Tetap Lainnya	35.865.985.752,78	34.658.621.070,91	714.783.240,00	1.433.633.201,91	33.939.771.109,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	16.583.297.199,00	16.583.297.199,00	10.831.967.597,00	26.246.034.497,00	1.169.230.299,00
Akumulasi Penyusutan	-959.644.184.898,21	-959.644.184.898,21	-189.581.511.086,36	-44.126.854.679,88	-1.105.098.841.304,69
Nilai Buku	2.452.572.023.682,23	2.452.572.023.682,23			2.493.125.176.286,83



Rincian lebih lanjut masing-masing jenis aset tetap per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.3.1.3.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.333.444.418.599,37 bertambah sebesar Rp22.240.356.580,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp1.311.204.062.019,37. Penambahan sebesar Rp22.240.356.580,00 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan:

- Realisasi Belanja Modal Tanah	Rp	13.144.232.065,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp	2.997.715.773,00
- Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan	Rp	15.960.000,00
- Koreksi Tambah Kapitalisasi Tanah	Rp	14.667.808.535,00
- Inventarisasi	Rp	6.607.548.700,00
Jumlah penambahan	Rp	37.433.265.073,00

Pengurangan;

- Koreksi Kurang Kapitalisasi Tanah	Rp	14.667.808.535,00
- Penghapusan Barang Inventaris	Rp	525.099.958,00
Jumlah pengurangan	Rp	15.192.908.493,00

Penambahan dan pengurangan Tanah selain dari Realisasi Belanja Modal terdapat juga Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah dan Juga Inventarisasi.

Penambahan aset tetap tanah meliputi :

a. Reklasifikasi tambah aset tetap

Penambahan dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp2.997.715.773,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 94 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap

OPD	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap
Jumlah	2.997.715.773,00
DPUPR	584.854.000,00
DINPERKIM	215.603.000,00
DINAS PENDIDIKAN	1.135.978.216,00
DINDAGKOP	254.520.000,00
DINPARBUDPORA	806.760.557,00
Jumlah	2.997.715.773,00

b. Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

Kapitalisasi tanah pada tahun 2020 sebesar Rp15.960.000,00 dari belanja pemeliharaan terjadi pada OPD DPUPR berupa jasa perencanaan pengurangan Lapangan Sorogenen.

c. Koreksi Tambah Kapitalisasi Tanah

Koreksi tambah kapitalisasi tanah tahun 2020 pada OPD BKD, BPBD, DINPERKIM dan Kelurahan Panjang Wetan terdapat koreksi tambah jumlah aset



tetap tanah sebesar Rp14.667.808.535,00 karena proses pensertifikatan, adapun rincian sebagai berikut :

- 1) BKD terdapat penambahan 10 bidang tanah/ register dari proses pemecahan sertifikat 1 bidang tanah (split) menjadi 11 Sertifikat Hak Pakai;
- 2) BPBD terdapat penambahan 1 bidang tanah register dari proses pensertifikatan 1 bidang tanah menjadi 2 Sertifikat Hak Pakai;
- 3) Kelurahan Panjang Wetan terdapat penambahan 2 bidang tanah/ register dari proses pensertifikatan 1 bidang tanah menjadi 3 Sertifikat Hak Pakai;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menambahkan urugan di Tanah Lapangan Bola Volly di Perumahan Limas

d. Inventarisasi Tanah

Inventarisasi 5 bidang Tanah sebesar Rp6.607.548.700,00 pada OPD/ UPB :

- 1) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan tercatat pada UPB Bagian Umum Setda berupa Tanah Lapangan Bola Voly sebanyak 1 bidang;
- 2) UPB Kelurahan Buaran Kradenan menambah 4 bidang berupa Tanah Usaha karena adanya proses tukar menukar tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan dengan tanah milik Pondok Pesantren Modern Al Qur'an Kota Pekalongan. Adapun rincian 4 bidang tanah tersebut sebagaimana disajikan pada **Lampiran 18**.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengurangan Pasar Darurat Sorogenen
- 4) Dinas Kesehatan melakukan pengurangan pada Puskesmas Jenggot
- 5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan pengurangan pada Objek wisata pantai slamaran

Pengurangan aset tetap tanah meliputi :

a. Penghapusan Aset Tetap (Tanah)

Penghapusan aset tetap tanah sebesar Rp525.099.958,00 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga karena pengurangan tanah lapangan sepak bola senilai Rp98.785.000,00 yang terletak di Kelurahan Gamer dan UPB Kelurahan Buaran Kradenan sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 030/731 Tahun 2020 karena adanya proses tukar menukar tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan dengan tanah milik Pondok Pesantren Modern Al Qur'an Kota Pekalongan adapun rincian bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 95 Penghapusan Aset Tetap Tanah

No	Nama Barang	Kode Barang	Reg	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Lokasi	Status Tanah			Nilai Perolehan (Rp)
							Hak	Sertifikat		
								Tanggal	Nomor	
1	Tanah Usaha	01.01.02.07.001	0010	5.637	1945	buaran rt 05 rw 02	Hak Pakai	26/06/ 2008	BD.547586 HP.00013	410.582.958,00
2	Tanah Usaha	01.01.02.07.001	0015	187	1945	buaran rt 05 rw 02	Hak Pakai	26/06/ 2008	BD.547587 HP.00014	15.732.000,00



b. Koreksi Kurang Kapitalisasi Tanah

Koreksi kurang kapitalisasi tanah tahun 2020 pada OPD BKD, BPBD, DINPERKIM dan Kelurahan Panjang Wetan terdapat pada jumlah aset tetap tanah sebesar Rp14.667.808.535,00 karena proses pensertifikatan, adapun rincian sebagai berikut :

- 1) BKD terdapat penambahan 10 bidang tanah/ register dari proses pemecahan sertifikat 1 bidang tanah (split) menjadi 11 Sertifikat Hak Pakai;
- 2) BPBD terdapat penambahan 1 bidang tanah register dari proses pensertifikatan 1 bidang tanah menjadi 2 Sertifikat Hak Pakai;
- 3) Kelurahan Panjang Wetan terdapat penambahan 2 bidang tanah/ register dari proses pensertifikatan 1 bidang tanah menjadi 3 Sertifikat Hak Pakai;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menambahkan urugan di Tanah Lapangan Bola Volly di Perumahan Limas

Penjelasan tambahan atas aset tetap tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Didalam aset tetap tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan terdapat 3.077 bidang tanah, yang tercatat sebagai aset tetap tanah sebanyak 3.075 bidang sementara 2 (dua) bidang dicatat pada aset lainnya sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga :

Tabel 6. 96 Bidang Tanah yang Dicatat pada Aset Lainnya sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	No.Sertifikat	Luas (m ²)	Hak Atas Tanah	Alamat	Penggunaan	Pihak Ketiga
1	AW 484191	3.900	Hak Pengelolaan	Jl. Mangga	Mall Banjarsari	PT. DISC Semarang
2	AB 972114	10.775	Hak Pakai (Proses Hak Pengelolaan)	Jl. Dr. Sutomo	Ex. Terminal Lama	PT. Prima Lestari Investindo

- b. Adapun tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 1.115 bidang yang belum bersertifikat sebanyak 1.960 bidang. Dari 1.115 bidang tanah yang bersertifikat sudah tercatat dalam SIMBADA sebanyak 1.085 bidang adapun sisanya sejumlah 30 bidang tanah belum dapat diidentifikasi.
- c. Didalam aset tetap tanah Pemerintah Kota Pekalongan terdapat tanah yang disewakan kepada pihak lain, dan atas tanah tersebut dikenakan sewa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, serta dicatat sebagai pendapatan sewa tanah pada lain-lain PAD yang sah. Aset tetap tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berstatus Tanah Negara. Namun demikian atas tanah - tanah tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Atas dasar Surat Penguasaan tanah tersebut Pemerintah kota Pekalongan telah menginventarisir tanah – tanah sebagai upaya pengamanan terhadap asset Pemerintah.



Adapun tanah negara yang di sewakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ada pada **Lampiran 19.**

- d. Berdasarkan Berita Acara Nomor 030/5938 tanggal 9 Maret 2001 tentang Serah Terima Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen Satuan Kerja Instansi Vertikal Departemen yang Dialihkan kepada Kota Pekalongan serta dokumen lain yang sah terdapat beberapa bidang tanah yang dialihkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 97 Bidang Tanah yang Dialihkan

No	Instansi	Jenis Barang	Alamat	Luas		Sertifikat HP No	Penggunaan Sekarang
				Tanah (m2)	Bangunan (m2)		
1.	Cabang Dinas Tenaga Kerja	Tanah Gedung Kantor	Jl. Majapahit Kel. Podosugih	392	162	HP No 44	Kantor Diskominfo
2.	Cabang Dinas Sosial	Tanah Gedung Kantor	Jl. Majapahit Kel. Podosugih	630	630	HP No 41	Kantor Satpol PP
3.	Cabang Dinas Sosial	Tanah Gedung Kantor	Kel. Panjang Wetan	840	256	HP No 33	-
4.	Cabang Dinas Perindustrian	Tanah Gedung Kantor	Jl. Majapahit No 10 Podosugih	1,000	200	HP No 30	Kantor BKPPD

Atas peralihan tersebut masih terdapat dokumen yang tidak lengkap sehingga Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan Surat Walikota Pekalongan Nomor 030/2418 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Permohonan Surat Keterangan terkait kelengkapan dokumentasi, administrasi dan pelepasan hak atas tanahnya dimana sertifikat asli HP No. 30 yang sekarang digunakan untuk Kantor BKPPD Kota Pekalongan belum diserahkan namun demikian hasil terakhir koordinasi ke BPKAD provinsi Jawa Tengah bahwa disana juga tidak menyimpan sertifikat asli tersebut.

- e. Berdasarkan Berita Acara tanggal 31 Maret 1990 tentang Serah Terima Fisik, Material dan Finansial Bagi 16 (Enam Belas) Desa/Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, bahwa terdapat penyerahan aset dari Kabupaten Pekalongan kepada Kota Pekalongan, namun demikian sampai dengan saat ini belum adanya kejelasan hak atas tanah terhadap tanah Pasar Banyurip yang telah tercatat di Pemerintah Kota Pekalongan karena dobel catat dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. 98 Aset yang diserahkan dari Kabupaten Pekalongan

No Urut	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (m2)	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal Usul
1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Tanah Bangunan Pasar	6.270	Jl.Raya Banyurip Kel.Banyurip Alit	Pasar Banyu Urip	Hibah

- f. Sebagian tanah eks bengkok di beberapa kelurahan telah berubah fungsinya, adapun tanah eks bengkok dimaksud adalah sebagaimana terdapat pada **Lampiran 20.**



- g. Terdapat 1 (satu) bidang tanah yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga, adapun tanah dan bangunan gedung yang sekarang digunakan oleh Sekretariat Tagana berlokasi di Jl. Rajawali dengan sertifikat HP No. 71 An. Pemerintah Kota Pekalongan digugat oleh Sdr. Oey Joe Po yang juga memiliki sertifikat HM No. 533 dan HM No. 534 dan merupakan bidang tanah yang sama (tumpang tindih/overlap), rincian tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 99 Tanah yang Masih Sengketa dengan pihak Ketiga

SKPD	Jenis Barang	Kode Barang	No. Reg	Luas	Tahun	No. Sertifikat	Alamat	Nilai (Rp)
Dinsos P2KB	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.03	1	357	1950	BO 709737	Jl. Rajawali	205.500.000,00

- h. Terdapat 13 (tiga belas) bidang tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yang dihuni oleh warga, dengan rincian pada **Lampiran 21**
 Warga yang telah menghuni tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan tersebut telah mengajukan permohonan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan atas permohonan tersebut telah disetujui melalui DPRD Kota Pekalongan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 29/DPRD/XII/2013 tentang Persetujuan Terhadap Permohonan Pelepasan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Poncol dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur, namun demikian atas rekomendasi DPRD Kota Pekalongan tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena adanya kendala pada teknis pelaksanaan lelang dan pembiayaan karena sebagian besar warga merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- i. TA 2020 terdapat penambahan jumlah dan nilai atas tanah dari pengadaan pada OPD DPU dan PR, adapun rincian tanah tersebut sebagaimana disajikan pada **Lampiran 22**.
- j. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa bidang tanah eks bengkok yang terkena kegiatan interchange jalan tol Kota Pekalongan, adapun rincian tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 23**.
- k. Terdapat aset tetap tanah yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga (Instansi Vertikal), adapun rincian tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 24**.

6.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp540.269.348.622,99 meningkat sebesar Rp85.108.737.849,23 dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp455.160.610.773,76.

Peningkatan tersebut sebesar Rp85.108.737.849,23 berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan :



- Koreksi Nilai Perolehan	Rp	2.049.125.010,07
- Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp	29.036.152.699,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa	Rp	1.198.039.925,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	54.223.568.982,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp	1.018.581.080,00
- Inventarisasi	Rp	5.154.415.774,00
- Hutang Pihak Ketiga	Rp	1.125.000,00
- Transfer Masuk	Rp	5.275.994.773,00
Migrasi Kode Barang	Rp	7.022.657.681,87
Jumlah penambahan	Rp	104.979.660.924,94

Pengurangan :

- Penghapusan Barang Inventaris	Rp	11.452.224.672,71
- Reklasifikasi rekening Aset Tetap	Rp	2.684.277.151,00
- Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi	Rp	458.426.479,00
- Transfer Keluar	Rp	5.275.994.773,00

Jumlah pengurangan	Rp	19.870.923.075,71
--------------------	----	-------------------

Penambahan Peralatan selain dari Realisasi Belanja Modal terdapat juga Koreksi Nilai Perolehan, Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa, hibah dan Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan Mesin.

a. Koreksi Nilai Perolehan

Koreksi nilai perolehan dilakukan karena adanya koreksi aset tetap peralatan mesin sebesar 2.049.125.010,07. Koreksi tersebut terjadi karena adanya perbedaan pembulatan dengan sistem, barang belum tercatat di simbada dan perubahan kode rekening karena adanya Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 yang menimbulkan penambahan Aset Tetap dari Ekstrakomtabel.

Tabel 6. 100 Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin

OPD	Nama Barang	Nominal
Perbedaan Pembulatan		
DPMPTSP	Meja Resepsionis	0,04
DPMPTSP	P.C Unit	0,02
DPMPTSP	Peralatan Jaringan Lain-lain	0,01
Barang belum tercatat di Simbada		
PUSKESMAS JENGOT	Printer (Peralatan Personal Komputer)	720.000,00
PUSKESMAS JENGOT	Printer (Peralatan Personal Komputer)	775.000,00
PUSKESMAS JENGOT	Stabilizer	1.006.500,00
PUSKESMAS JENGOT	Monitor	2.486.000,00
PUSKESMAS JENGOT	Hard Disk	1.452.000,00
PUSKESMAS NOYONTAAN	Kipas Angin	550.000,00
PUSKESMAS SOKOREJO	Lemari Plastik	400.000,00
Aset Tetap dari Ekstrakomtabel karena kodefikasi		



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



OPD	Nama Barang	Nominal
Dinhub	Rambu Jalan	1.645.358.510,00
Dinhub	Traffic Light	4.456.300,00
Dinhub	Rambu Cermin	230.459.500,00
DINDUKCAPIL	Rambu Papan Tambahan	26.011.200,00
BPBD	Rambu Papan Tambahan	98.950.000,00
SATPOL PP	Rambu Papan Tambahan	20.000.000,00
SATPOL PP	Rambu Papan Tambahan	16.500.000,00
Jumlah		2.049.125.010,07

b. Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa

Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa merupakan pengakuan atas aset tetap yang bersumber dari belanja APBD Kota Pekalongan selain dari Belanja Modal yang menghasilkan Aset tetap.

Yang pertama berupa kapitalisasi BOP (Biaya Oprasional) atau biaya-biaya yang timbul dalam proses untuk perolehan Aset Tetap yang dapat di atribusi langsung terhadap aset tersebut dan yang kedua merupakan pembelian langsung yang berwujud aset tetap. Berikut daftar Kapitalisasi aset Tetap sebesar Rp1.198.039.925,00 yang berasal dari Belanja barang jasa.

Tabel 6. 101 Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
DPUPR	7,00	56.452.000,00	Portable Water Pump 1UNIT Rp2.582.000,00, Rak Besi 1unit @6.080.000,00, Rak Besi 4unit @9.479.000,00, Rak Besi 1unit @9.874.000,00
DISHUB	18,00	205.240.000,00	Fixed IP Camera, H265, 2 Mp (ATCS) dipasang di TL Posis 1unit @13090000, CCTV CC Room ATCS 1unit @4.900.000,00, Luminer Lampu Aspek 3 x 30 cm 24 VDC (ATCS) 1unit @13.420.000, Modul CPU UMC 690 24 VDC (ATCS) 1unit 19.910.000, Modul Firing UMC 690 220 VAC (ATCS) 1unit @11.990.000,00, Mesin Control TL Cadangan (Realisasi Belanja Modal) 2unit @12.320.000,00
Pusk. Medono	1,00	640.000,00	BelanjaBlender Philips
Pusk. Tirta	3,00	2.400.000,00	Pembelian Hardisk 1 @925.000,00, monitor komputer @925.000, 00, Layar Tripod @550.000,00
Pusk. Klego	1,00	575.000,00	Pompa Air Shimizu 575.000,00
Pusk. Kusbang	6,00	6.843.235,00	Tensimeter 3 Unit @1.368.384,00, Nebulizer 1 @869.700,00, Timbangan bayi 1 @500.000,00, Tensimeter 1 unit Rp1.368.383,00
Pusk. Jenggot	2,00	1.650.000,00	Pompa Air Shimizu 575.000
RSUD BENDAN		810.780.690,00	Kapitalisasi Toyota HI ACE Commute Rp150.700.000,00, BOP non BM Rp2.000.000,00 (Toyota HI ACE) Rp600.000,00 (Sprayer), Rp1.800.000,00 (Ventilator&Modena), Rp7.200.000, Rp1.800.000,00 (Biosafety Cabinet Type BSC 1800IIB2-X), reklas mengkapitalisasi bangunan Rp 126.553.000,00, reklas ke jaringan Rp 190.000.140,00, Reklas mengkapitalisasi KDP Rp 283.237.000,00, Kapitalisasi peralatan mesin Rp 55.745.000,00
SDN BENDAN 03	1,00	1.469.000,00	Loudspeaker asatron
SDN GAMER 1	4,00	2.700.000,00	thermo gun 2 @550.000,00, Tenda 2 @800.000,00
SDN PW 1	3,00	2.475.000,00	Botol Semprotan 500.000, Tandon Air (Penguin) 500ltr 1.000.000, 00 Thermo Gun 925.000,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
SDN KP 1	3,00	1.750.000,00	Penyemprot hama elektrik 650.000,00, termometer Badan 2 @550.000,00
SDN DUWET	1,00	550.000,00	Thermogun 1
SMP N 05	1,00	575.000,00	Samsak Gantung
SMP N 14	8,00	14.366.000,00	1 unit Penyemprot Mesin (Power spayer) @Rp770.000, 1 unit Box Bilik Body Temperature @7.328.000,00, 2 unit Barcode Reader @1.230.000 dan @770.000, 4 unit Thermometer Digital @1.024.000 dan @1.110.000
SMP N 16	3,00	2.650.000,00	Elektrik Spray 1.350.000, Termogun 1.300.000
DKP	3,00	3.170.000,00	Pembelian papan nama instansi RP1.600.000 dan pembelian 2 BUAH TOA seharga Rp785.000/unit
BAPPEDA	1,00	595.000,00	Mobile Modem (Mwifi)
DISKOMINFO	2,00	4.000.000,00	TPLINK 2 Unit @Rp2.000.000
KEL. PKK	6,00	8.244.000,00	Barang Inventaris Non Kapitalisasi Gordyn 4 Unit @Rp1.686.000, Sprayer 2 unit @Rp750.000
Sekretariat Dewan	10,00	70.915.000,00	Pembelian Gordyn 3 Unit @5.782.300, 1 Unit @8.531.620, 6 Unit @7.026.040
Jumlah	84,00	1.198.039.925,00	

- c. Hibah dari Pihak Ketiga
 Hibah merupakan pemberian dari Pihak diluar Pemda kepada pemda secara sah. Daftar Hibah Peralatan Mesin yang di terima oleh Pemda Kota Pekalongan selama periode 2020 sebesar Rp54.223.568.982,00 sebagaimana dalam **Lampiran 25**.
- d. Reklasifikasi tambah aset tetap
 Berikut penjelasan penambahan dari Reklasifikasi Tambah Peralatan Mesin sebesar Rp1.018.581.080,00 hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara Rekening Belanja Modal dengan Realisasi Fisik belanja. Sehingga diperlukan penyesuaian terhadap akun rekening tersebut.

Tabel 6. 102 Rekalisasi Tambah Peralatan Mesin 2020

SKPD	Jumlah	Reklas dari Aset Tetap			Ekstrakomtabel
		Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
DPMPSTP	31.982.500,00	31.982.500,00			
KEL. BANDENGAN	2.000.000,00		2.000.000,00		
DKP	1.806.000,00	1.806.000,00			
SATPOL PP	119.585.000,00			119.585.000,00	
DISHUB	15.238.580,00	13.838.580,00	1.400.000,00		
SMPN 13	11.000.000,00			11.000.000,00	
SMPN 5	590.000,00			590.000,00	
SMPN 7	2.000.000,00			2.000.000,00	
SMPN 2	11.825.000,00			11.825.000,00	
SMPN 3	1.525.000,00			1.525.000,00	
SDN PONCOL 1	1.800.000,00			1.800.000,00	
SDN PRINGLANGU	730.000,00				730.000,00
SDN SAMPANGAN 01	650.000,00				650.000,00
SDN PODOSUGIH 3	700.000,00			700.000,00	
SDN PANJANG WETAN 4	3.270.000,00			1.175.000,00	2.095.000,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



SKPD	Jumlah	Reklas dari Aset Tetap			Ekstrakomtabel
		Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
SDN MEDONO 7	600.000,00				600.000,00
SDN MEDONO 1	650.000,00				650.000,00
SDN KRAPYAK LOR 5	1.500.000,00			1.500.000,00	
SDN KRAMATSARI 1	975.000,00				975.000,00
SDN KRADENAN 1	600.000,00				600.000,00
SDN GAMER 2	800.000,00				800.000,00
SDN DEGAYU 2	1.500.000,00			1.500.000,00	
SDN LANDUNGSARI 1	2.000.000,00				2.000.000,00
DPUPR	593.424.000,00		593.424.000,00		
DINDIK	4.100.000,00			4.100.000,00	
SDN KANDANG PANJANG 2	1.000.000,00				1.000.000,00
SMPN 14	6.730.000,00				.730.000,00
JUMLAH	1.018.581.080,00	247.627.080,00	596.824.000,00	157.300.000,00	16.830.000,00

- e. Inventarisasi tambah aset tetap
 Inventarisasi Aset Tetap sebesar Rp5.154.415.774,00 berasal dari barang yang belum tercatat barang yang diperoleh dari Belanja Tak Terduga untuk COVID sebesar Rp642.557.467,00 dan Dana Insentif Daerah untuk COVID sebesar Rp4.474.345.611,00. Rincian inventarisasi aset tetap dari BTT dan DID sebagaimana dalam **Lampiran 26**.
- f. Hutang Pada Pihak Ketiga
 Hutang kepada pihak ke tiga sebesar Rp1.125.000,00 pada OPD RSUD Bendan. Hal ini dikarenakan adanya kurang bayar kepada pihak ketiga yang sudah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah berupa BOP pada jalan IGD.
- g. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin
 Transfer masuk peralatan dan mesin sebesar Rp5.275.994.773,00 dapat dirinci sebagaimana dalam **Lampiran 27**.
- h. Migrasi Kode Barang
 Penambahan peralatan mesin sebesar Rp7.022.657.681,87 terjadi karena adanya perubahan kode barang dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2018.
 Kode barang Peralatan Mesin dari Golongan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.815.293.000,00 dan dari Golongan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.207.364.681,87.

Pengurangan Peralatan mesin

- a. Penghapusan Barang Inventaris
 Daftar Penghapusan Barang Inventaris berupa peralatan mesin di tahun 2020 sebesar Rp11.452.224.672,71 yang terdiri dari penghapusan karena dilelang sebagaimana dalam **Lampiran 28**.
- b. Reklasifikasi Peralatan mesin



Reklasifikasi kurang atas peralatan mesin sebesar Rp 2.684.277.151,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 103 Reklasifikasi Kurang Peralatan Mesin Tahun 2019

SKPD	Jumlah	Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke				Aset Tak Berwujud (Software)
		Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	
DINKOMINFO	217.148.285,00		213.688.550			3.459.735,00
DINPERPA	78.746.000,00	15.900.000,00	62.846.000,00			
PUS. KLEGO	38.863.885,00		38.863.885,00			
RSUD	2.309.918.981,00	588.970.123,00	190.600.140,00	1.000.000,00	1.529.348.718,00	
KECAMATAN BARAT	39.600.000,00	24.600.000,00	15.000.000,00			
Jumlah	2.684.277.151,00	629.470.123,00	520.998.575,00	1.000.000,00	1.529.348.718,00	3.459.735,00

- c. Belanja Modal Tidak dikapitalisasi
 Belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp458.426.479,00 dapat dijelaskan sebagai berikut. Belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi sebesar Rp179.018.485,00 dan ekstrakomtabel sebesar Rp230.595.219,00, belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp48.812.775,00, dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 29**.
- d. Transfer Keluar Peralatan dan Mesin
 Transfer keluar peralatan dan mesin sebesar Rp5.275.994.773,00 dapat dirinci sebagaimana dalam **Lampiran 30**.

Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp93.849.930.326,29 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp446.419.418.296,70 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 6. 104 Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Uraian	Penambahan Ak.penysusutan	Pengurangan Ak.penysusutan	Jumlah
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2019			(358.105.807.805,75)
Beban penyusutan	(94.018.452.150,60)		(94.018.452.150,60)
Koreksi tambah akumulasi penyusutan	(2.412.233.614,94)	(0,01)	(2.412.233.614,93)
Hibah			
Penghapusan		(11.377.088.280,58)	11.377.088.280,58
Transfer antar SKPD	(1.422.334.077,00)	(1.422.334.077,00)	
Penambahan karena kodefikasi	(3.260.013.006,00)		(3.260.013.006,00)
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2020	(101.113.032.848,54)	(12.799.422.357,59)	(446.419.418.296,70)



6.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar 805.605.680.198,47 mengalami peningkatan sebesar Rp 41.812.643.715,63 dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp 757.977.743.482,84.

Peningkatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.812.643.715,63 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan:

- Koreksi Tambah Kapitalisasi Gedung	Rp	1.191.400.215,00
- Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	Rp	33.921.072.174,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa	Rp	391.413.540,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	15.000.000,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp	27.776.557.996,00
- Inventarisasi aset	Rp	3.821.954.823,00
- Transfer Masuk	Rp	1.901.229.525,00
- Hutang Pihak Ketiga	Rp	64.824.000,00
Jumlah penambahan	Rp	69.083.452.273,00

Pengurangan :

- Koreksi Kurang Kapitalisasi Gedung	Rp	1.191.400.215,00
- Penghapusan barang Inventaris	Rp	3.629.806.006,37
- Reklasifikasi rekening Aset Tetap	Rp	14.450.845.617,00
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	Rp	282.234.194,00
- Transfer Keluar	Rp	1.901.229.525,00
- Migrasi Kode Barang	Rp	5.815.293.000,00
Jumlah pengurangan	Rp	27.270.808.557,37

Penjelasan lanjutan atas mutasi tambah aset tetap gedung bangunan selain dari belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Koreksi Kapitalisasi Gedung

Aset tetap gedung dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah dilakukan pemecahan nilai bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp1.191.400.215,00 yang awalnya dicatat sebagai 1 gedung menjadi 2 gedung, diantaranya Rp516.486.000,00 di jalan Perintis Kemerdekaan eks UPTD Barat dan Rp674.914.215,00 di eks UPTD Barat (Medono).

b. Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa

Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp391.413.540,00, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 6. 105 Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020

OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
DPUPR	3,00	314.089.000	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir - Pekerjaan Rehab Rumah Pompa dan Rumah Jaga Sibulan Rp.72.202.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kota - Pekerjaan Jogging Track / Pedestrian di Taman Slamaran Rp.127.759.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kota - Pekerjaan Revitalisasi Gedung Green House Taman Nursery Rp.72.668.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kota - Pekerjaan Pedestrian / Jogging Track di Taman Monumen Juang 45 Rp.41.460.000,00
DPUPR		35.997.000,00	DED Penataan Taman Nursery pada Kegiatan Penyusunan Detail Engineering sebesar Rp 4.863.000,00. DED/Perencanaan Penataan Kawasan Jetayu pada Kegiatan Penyusunan Detail Engineering sebesar Rp 9.826.000,00. Jamuan Snack dan Makan Rapat Paparan DED Pekerjaan Pemel Penataan Kawasan Jetayu pada Kegiatan Penyusunan Detail Engineering sebesar Rp 615.000,00. Penataan Paving Kawasan Selatan Setda pada Kegiatan DID Tambahan Pemulihan Ekonomi Daerah sebesar Rp 8.294.000,00. Jamuan Rapat Penataan Taman Nursery, Lapangan Setda, Taman dan Jembatan MI Sudirman, Lapangan Banyurip, Musholla Sorogonen, PJU LIK Nursery dan Mangga (Rp. 6.560.000) serta Foto Copy (Rp. 1.167.000) pada Kegiatan Penyusunan Detail Engineering sebesar Rp 12.399.000,00.
DKP		2.921.400,00	Perencanaan rehabilitasi gedung kantor, untuk 8 pekerjaan dan baru ada pekerjaan tempat parkir untuk tahun 2020
DINPERKIM		6.223.000,00	
DINPARBUDPORA		7.593.140,00	Untuk jasa perencanaan kegiatan DAK pengembangan OW Slamaran
DINAS KESEHATAN		4.740.000,00	
DINSOSP2KB		19.850.000,00	Jasa perencanaan untuk pembangunan pagar, parkir dan paving kantor Dinsos (awalnya dianggarkan pd BM penetapan Th 2020 untuk perencanaan dan pembangunannya namun ada refocusing anggaran dan anggaran untuk pembangunan fisik pagar, parkir dan paving dihapus sehingga anggaran perencanaan yang sudah terealisasi dialihkan ke belanja barang jasa, namun pada perubahan anggaran 2020 pembangunan fisik ternyata pagar, parkir dan paving dianggarkan lagi dan selesai fisiknya 100% dan atas perencanaan pada barjas belum diatribusikan ke fisiknya
Jumlah	3,00	391.413.540,00	

c. Hibah Dari Pihak Ketiga

Hibah untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.000.000,00 pada Puskesmas pembantu Pabean berupa 1 unit Bangunan Klinik/Puskesmas dari BKM Tri Mulia.



d. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Tabel 6. 106 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan

SKPD	Jumlah	Penambahan Dari Reklasifikasi Aset Tetap		
		Peralatan Mesin	Jalan, Irigasi dan Jaringan	KDP
DLH	197.248.000,00		197.248.000,00	
DINPERPA	15.900.000,00	15.900.000,00		
RSUD	18.450.383.620,00	588.970.123,00		17.861.413.497,00
DPUPR	2.616.090.750,00		666.980.750,00	1.949.110.000,00
DINPERKIM	175.409.626,00		175.409.626,00	
KECAMATAN BARAT	24.600.000,00	24.600.000,00		
DINDAGKOP	6.296.926.000,00			6.296.926.000,00
Jumlah	27.776.557.996,00	629.470.123,00	1.039.638.376,00	26.107.449.497,00

e. Inventarisasi

Pada tahun 2020 inventarisasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.821.954.823,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 6. 107 Inventarisasi Gedung dan Bangunan

OPD	Inventarisasi	Keterangan
DPUPR	409.368.000,00	Inventarisasi Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (Pembangunan Kawasan Ekonomi Rakyat Tirta / Penataan Paving) @213.326.000 ; Penataan Paving Kawasan Selatan Setda @196.042.000 Tahun 2020
DLH	172.100.000,00	Inventarisasi Bangunan Gedung Instalasi Permanen (REHAB BERAT IPAL LINDI TPA DEGAYU) @172.100.000 Tahun 2020
DINPARBUDPORA	198.195.000,00	Inventarisasi Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen Tahun 2020
DINDAGKOP	981.343.000,00	Inventarisasi Pemeliharaan Pasar Grogolan (perbaikan atap dan saluran) @197.162.000 ; Pemeliharaan Pasar Kuripan (perbaikan pintu gerbang, instalasi air khusus ayam, perbaikan CCTV) @197.212.000 ; Pemeliharaan Pasar Banyurip (perbaikan iwf dan atap, perbaikan pintu pagar, perbaikan instalasi) @98.015.000 ; Pemeliharaan Pasar Podosugih (Keramik aula, perbaikan saluran) @98.168.000 ; Pemeliharaan Pasar Patiunus (pemasangan lampu, perbaikan talang air), Pemeliharaan saluran, pagar pasar darurat sorogonen @390.786.000 Tahun 2020
DINPERINAKER	952.886.854,00	Inventarisasi Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen Tahun 2020
BKD	441.240.000,00	Inventarisasi Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Permanen di Jl. HOS Cokroaminoto dgn luas 868m2 Tahun 2020
DINKES	277.793.019,00	Inventaris Bangunan Klinik/Puskesmas @99.154.026 ; Bangunan Gedung Kantor Permanen @64.683.375 ; Bangunan Gedung Kantor Permanen @59.475.618 ; Bangunan Rumah Sakit Paru-Paru @54.480.000 Tahun 2020
DINPERKIM	389.028.950,00	Inventaris Pembayaran pekerjaan 100% Pembangunan MCK Krapyak 1 Kepada CV. Tapal Kuda Perkasa @194.764.950,00 ; Pembayaran pekerjaan 100% Pembangunan MCK Krapyak 2 Kepada CV. Bhakti Karya @194.264.000,00 Tahun 2020
Jumlah	3.821.954.823,00	



- f. Hutang Pada Pihak Ketiga Gedung dan Bangunan
 Hutang pada pihak ke tiga sebesar Rp64.824.000,00 terjadi pada 2 OPD, dengan rincian sebagai berikut;
- 1) DPUPR sebesar Rp58.912.000,00 berupa Biaya Kegiatan Penataan Kawasan Kota - Pekerjaan Jogging Track / Pedestrian Taman dan Jembatan di Depan MI Sudirman Panjang Wetan yang belum dibayar
 - 2) DINPERKIM sebesar Rp5.912.000,00 berupa biaya pembuatan Gapuro Gg.1 RW.07 Kelurahan Panjang Wetan yang belum dibayar
- g. Transfer Masuk Gedung dan Bangunan
 Transfer masuk gedung dan bangunan sebesar Rp 1.901.229.525,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. 108 Transfer Masuk Gedung dan Bangunan

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DINPERKIM	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	229.410.000,00	-	229.410.000,00	DINDIK
BPBD	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Semi Permanen	390.786.000,00	-	390.786.000,00	DINDAGKOP UKM
BKD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	123.403.750,00	2.468.075,00	120.935.675,00	DINDIK
BKD	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	208.525.750,00	-	208.525.750,00	DINDIK
BKD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	116.100.310,00	-	116.100.310,00	DINDIK
PANJANG WETAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	146.825.000,00		146.825.000,00	KEC PKL UTARA
KRAPYAK	Bangunan Gedung Kantor Permanen	148.435.000,00	-	148.435.000,00	KEC PKL UTARA
PANJANG BARU	Bangunan Gedung Kantor Permanen	147.585.000,00	-	147.585.000,00	KEC PKL UTARA
KURIPAN KERTOHARJO	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	114.635.750,00	-	114.635.750,00	DINDIK
PODOSUGIH	Bangunan Kamar Mandi	89.729.000,00	-	89.729.000,00	DINDIK
SETONO	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	68.588.965,00	-	68.588.965,00	KEC PKL TIMUR
KALIBAROS	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	117.205.000,00	-	117.205.000,00	DINDIK
Jumlah		1.901.229.525,00	2.468.075,00	1.898.761.450,00	

Penjelasan lebih lanjut mutasi kurang aset tetap Gedung Bangunan sebagai berikut :

- a. Koreksi Kapitalisasi Gedung
 Aset tetap gedung dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah dilakukan pemecahan nilai bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp1.191.400.215,00 yang awalnya dicatat sebagai 1 gedung menjadi 2 gedung, diantaranya Rp516.486.000,00 di jalan Perintis Kemerdekaan eks UPTD Barat dan Rp674.914.215,00 di eks UPTD Barat (Medono).



- b. Penghapusan barang Inventaris
 Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 3.629.806.006,37 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 109 Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

OPD	Jumlah	Hibah	Di Lelang		Hilang/ Dimusnahkan
			032/784/2020	032/749/2020	
			28-Okt-20	22-Sep-20	
Puskesmas Tirto	699.272.216,37		699.272.216,37		
Pustu Pabean	182.103.000,00		182.103.000,00		
DINDAGKOP UKM	1.280.361.740,00		1.280.361.740,00		
DINPARBUDPORA	1.468.069.050,00			1.468.069.050,00	
JUMLAH	3.629.806.006,37	-	2.161.736.956,37	1.468.069.050,00	-

- c. Reklasifikasi Kurang Barang Inventaris
 Reklasifikasi kurang gedung dan bangunan sebesar Rp14.450.845.617,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 110 Reklasifikasi Kurang Gedung Dan Bangunan

SKPD	Jumlah	Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke				Reklas Tambah dari Aset Lainnya
		Tanah	Peralatan Mesin	Jalan, Irigasi dan Jaringan	KDP	
DINDAGKOP	111.218.000,00				111.218.000,00	
DPTMPTSP	126.769.500,00		31.982.500,00	94.787.000,00		
KEC. TIMUR	43.531.000,00				18.031.000,00	25.500.000,00
KEC. UTARA	8.350.000,00					8.350.000,00
KEC. SELATAN	22.000.000,00					22.000.000,00
DINPERPA	101.160.820,00			51.785.720,00	49.375.100,00	
DKP	1.806.000,00		1.806.000,00			
DINPARBUD	2.095.621.507,00	806.760.557,00		1.236.860.950,00	52.000.000,00	
RSUD	8.542.141.779,00				8.542.141.779,00	
BKD	816.385.215,00					816.385.215,00
DISHUB	213.838.580,00		213.838.580,00			
DPUPR	1.232.045.000,00	584.854.000,00				647.191.000,00
DINDIK	1.135.978.215,51	1.135.978.215,51				
Jumlah	14.450.845.616,51	2.527.592.772,51	247.627.080,00	1.383.433.670,00	8.772.765.879,00	1.519.426.215,00

- d. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi
 Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp282.234.194,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 6. 111 Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB C				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
DINPERKIM	10.328.632,00			10.328.632,00	Perbaikan MCK Umum RT 03 RW 05 Area Makam Sapuro, Jl. Ky Ashari, Sapuro Indah, Kel. Sapuro Kebulen
DINHUB	12.400.000,00			12.400.000,00	Pembangunan 2 pos jaga lain-lain
DINKES	138.641.500,00		138.641.500,00		Pemeliharaan/Perbaikan Bangunan di 14 Puskesmas (Pembelian Bahan Material, Upah Tukang dll)
PSPJ	9.846.000,00		9.846.000,00		Pembuatan Talang pintu anti banjir
DINDIK	73.868.062,00	73.868.062,00			Pembangunan 2 kamar mandi untuk 2 sekolah dasar
SDN Panjang Wetan 04	3.000.000,00			3.000.000,00	Pembangunan Gapura Besi
SMPN 07	7.150.000,00			7.150.000,00	Pembangunan Awning
Kel. Krapyak	10.500.000,00			10.500.000,00	Pembangunan Auning tempat parkir
Kel. Panjang Baru	10.500.000,00			10.500.000,00	Pembangunan MCK di wilayah rt 03 rw 01
Kel. Buaran Kradenan	6.000.000,00			6.000.000,00	Pembuatan Auning Pagar Besi
Jumlah	282.234.194,00	73.868.062,00	148.487.500,00	59.878.632,00	

e. Transfer Keluar Gedung dan Bangunan

Transfer keluar gedung dan bangunan sebesar Rp1.901.229.525,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. 112 Transfer Keluar Gedung dan Bangunan

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DINDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	123.403.750,00	2.468.075,00	120.935.675,00	BKD
DINDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	208.525.750,00	-	208.525.750,00	BKD
DINDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	116.100.310,00	-	116.100.310,00	BKD
DINDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	114.635.750,00	-	114.635.750,00	KURIPAN KERTO HARJO
DINDIK	Bangunan Kamar Mandi	89.729.000,00	-	89.729.000,00	PODOSUGIH
DINDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	117.205.000,00	-	117.205.000,00	KALIBAROS
DINDIK	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	229.410.000,00	-	229.410.000,00	DINPERKIM
DINDAGKOP UKM	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Semi Permanen	390.786.000,00	-	390.786.000,00	BPBD
KEC PKL UTARA	Bangunan Gedung Kantor Permanen	147.585.000,00	-	147.585.000,00	PANJANG BARU
KEC PKL UTARA	Bangunan Gedung Kantor Permanen	148.435.000,00	-	148.435.000,00	KRAPYAK
KEC PKL UTARA	Bangunan Gedung Kantor Permanen	146.825.000,00	-	146.825.000,00	PANJANG WETAN
KEC PKL TIMUR	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	68.588.965,00	-	68.588.965,00	SETONO
Jumlah		1.901.229.525,00	2.468.075,00	1.898.761.450,00	



f. Migrasi Kode Barang

Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.815.293.000,00 terjadi karena adanya perubahan kode barang dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2018.

Kode barang yang berubah dari Golongan Gedung dan Bangunan ke Peralatan Mesin sebesar Rp5.815.293.000,00.

Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp595.068.465.458,22 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp210.537.214.740,25 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 6. 113 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Penambahan Ak.Penyusutan	Pengurangan Ak.Penyusutan	Jumlah
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2019			(200.600.405.562,62)
Biaya penyusutan	(15.196.175.954,63)		(15.196.175.954,63)
Koreksi kapitalisasi penyusutan	(810.152.136,00)	(810.152.136,00)	-
Penghapusan		(1.540.412.115,00)	1.540.412.115,00
Reklas Aset Tetap ke Aset Lain-lain		(458.941.656,00)	458.941.656,00
Transfer antar SKPD	(2.468.075,00)	(2.468.075,00)	-
Akumulasi karena Kodefikasi (pindah KIB)		(3.260.013.006,00)	3.260.013.006,00
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2020	(16.008.796.165,63)	(6.071.986.988,00)	(210.537.214.740,25)

6.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp883.795.568.762,69 meningkat sebesar Rp54.186.352.410,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp829.609.216.352,69.

Peningkatan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp54.186.352.410,00 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan

- Koreksi Tambah Kapitalisasi	Rp	7.047.443.846,00
- Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	50.106.236.575,00
- Kapitalisasi Belanja pemeliharaan	Rp	3.144.339.042,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	0,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp	2.337.702.245,00
- Inventarisasi	Rp	3.882.822.452,00
- Transfer Masuk	Rp	37.482.271.922,36
- Hutang Pihak Ketiga	Rp	278.859.300,00
Jumlah penambahan	Rp	104.279.675.382,36

Pengurangan :

- Koreksi Kurang Kapitalisasi	Rp	7.047.443.846,00
- Penghapusan barang Inventaris	Rp	3.506.236.828,00
- Reklasifikasi rekening Aset Tetap	Rp	2.028.855.376,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



- Belanja Modal yang tidak dikapitaliasi	Rp	21.115.000,00
- Transfer Keluar	Rp	37.482.271.922,36
Jumlah pengurangan	Rp	50.093.322.972,36

Penjelasan Lebih Lanjut mutasi Tambah dan kurang atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selain dari belanja modal sebagai berikut:

Penambahan

- a. Koreksi Kapitalisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Koreksi kapitalisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.047.443.846,00 dapat dilihat dalam rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 6. 114 Koreksi Tambah Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
Kel. Sapuro Kebulen	68.650.000,00	68.650.000,00	Koreksi Kapitalisasi jumlah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 2 unit/register jalan desa
Kel. Sokoduwet	514.950.000,00	514.950.000,00	Koreksi Kapitalisasi jumlah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 11 unit/register saluran drainage
Dinperkim	6.461.593.846,00	6.461.593.846,00	Koreksi Kapitalisasi jumlah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 82 unit/register saluran drainage
Kel. Buaran Kradenan	2.250.000,00	2.250.000,00	Koreksi transfer kapitalisasi
JUMLAH	7.047.443.846,00	7.047.443.846,00	

- b. Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan
 Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.144.339.042,00 pada OPD DPUPR dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 115 Koreksi Tambah Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

OPD	Nilai	Keterangan
DPUPR	26.900.000,00	Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Pematus Kramatsari II dan III
DPUPR	64.000.000,00	Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Pematus Jalan Se-Kota (Pembangunan Saluran Jl. Rasamala ke Kalimati)
DPUPR	47.400.000,00	Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Pematus Jalan Supriyadi
DPUPR	32.000.000,00	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Pematus Jalan Otto Iskandardinata
DPUPR	64.530.000,00	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan - Pekerjaan Pengecatan Jembatan Gambaran
DPUPR	63.579.000,00	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan - Pekerjaan Pengecatan Jembatan Slamaran
DPUPR	70.958.000,00	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan - Pekerjaan Pengecatan Jembatan Seruni
DPUPR	74.454.000,00	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan - Pekerjaan Pengecatan Jembatan Jl. Tembus Hos Cokroaminoto - Jl. Pelita V
DPUPR	1.206.052.000,00	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Primer 9
DPUPR	79.808.000,00	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



DPUPR	615.658.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Turap / Talud / Bronjong 5
DPUPR	202.414.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kota - Pekerjaan Pembuatan Kolam Air Mancur di Lapangan Jetayu
DPUPR	504.806.182,00	Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota / Berkala Penerangan Jalan Umum 8
DPUPR	36.600.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kota - Pekerjaan Perbaikan Lampu Hias di Taman Monumen Djoeng45
DPUPR	2.700.000,00	Honorarium PPKom Rehab dan Pemeliharaan Deker/Jembatan se kota pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
DPUPR	3.897.000,00	DED Penataan Kawasan Jetayu pada Kegiatan Penyusunan Detail Engineering
DPUPR	12.900.000,00	Honor PPKOM Pejabat Pengadaan BJ dan PPHP DED PJU kel. Jenggot, DED Pembuatan Taman & Jembatan MI Sudirman, DED Penataan Workshop Bina Marga pada Kegiatan Penyusunan Detail Engineering (Rp. 4.500.000)
DPUPR	5.879.000,00	Pekerjaan DED pembuatan PJU RW 14 dan RW 15 Sapuro Kebulen pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum
DPUPR	3.600.000,00	Honorarium Belanja Jasa Konsultasi pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum
DPUPR	6.344.000,00	Supervisi/Pengawasan Pembuatan PJU RW 14 dan RW 15 Sapuro Kebulen pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum (Rp. 3.972.000)
DPUPR	9.850.000,00	DED Penataan Kawasan Jetayu (Jalan Cendrawasih) pada Kegiatan Penyusunan Detail Engineering
DINPARBUDPORA	10.009.860,00	Untuk jasa perencanaan kegiatan DAK pengembangan OW Slamaran
TOTAL	3.144.339.042,00	

- c. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Reklasifikasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.337.702.245,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 116 Reklasifikasi Tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi

SKPD	Jumlah	Penambahan Reklasifikasi Aset Tetap dari		
		Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya
DINKOMINFO	213.688.550,00	213.688.550,00		
DPMPSTP	94.787.000,00		94.787.000,00	
DINPERPA	114.631.720,00	62.846.000,00	51.785.720,00	
DINPARBUD	1.236.860.950,00		1.236.860.950,00	
PUS. KLEGO	177.448.885,00	38.863.885,00		
RSUD	190.600.140,00	190.600.140,00		
DINPERKIM	294.685.000,00			294.685.000,00
KECAMATAN BARAT	15.000.000,00	15.000.000,00		
Jumlah	2.337.702.245,00	520.998.575,00	1.383.433.670,00	294.685.000,00



d. Inventarisasi

Pada tahun 2020 terjadi inventarisasi pada 3 OPD sebesar Rp3.882.822.452,00, dengan rincian pada tabel dibawah ini;

Tabel 6. 117 Inventarisasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

OPD	Inventarisasi	Keterangan
DPUPR	2.508.283.650,00	Inventarisasi Peningkatan Jl. Merak @173.689.000 ; Peningkatan Jl. Ahmad Dahlan @192.455.000 ; Peningkatan Jl. Banyurip Alit - Ageng @188.513.000 ; Pemeliharaan Jl. Semarang @194.344.000 ; Normalisasi Saluran Pematius Jl. A. Yani @185.877.000 ; Pemeliharaan Saluran Pematius Jl. Sulawesi @192.493.000 ; Pemeliharaan Saluran Pematius Jl. Urip Sumoharjo @25.750.000 ; Pemeliharaan Saluran Pematius Jl. Progo @25.600.000 ; Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Pematius Jl. Slamet @25.629.000 Tahun 2020
		Pemeliharaan Saluran Jl. Pati Unus @147.587.000 ; Pemeliharaan Saluran Gg Umbul @153.652.000 ; Saluran Kandang Ayam Panjang Wetan @99.255.200 ; Pemeliharaan Pintu Air Stasiun Pompa Sepucung @77.925.000 ; Normalisasi Saluran Asem Binatur III (Depan Stadion Hoegeng - Hilir Bandengan) @196.664.200 ; Normalisasi Saluran Asem Binatur I @191.261.000 ; Normalisasi Saluran Jl. Surabaya dan Semarang @86.129.000 ; Normalisasi Saluran Kurinci @196.455.000 ; Normalisasi Saluran Jl. Patriot Utara @97.208.750 Tahun 2020
		Inventarisasi Penyambungan Daya Listrik Baru Panjang Wetan Gg 3 A @3.902.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Krapyak Kidul Gg 5 @3.902.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Krapyak Kidul Gg 5A @3.902.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Jl. Tunas Raya Perum Gama Permai @3.902.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Panjang Wetan Gg 5 @3.903.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Kampung Baru Panjang Wetan @3.903.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Panjang Wetan @3.901.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Jl. KHA Dahlan Gg 12 RT 04 RW 03 Tirta @3.901.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Ds Tirta Kampung Baru Gg Ilalang @3.901.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Jl. WR Supratman Gg Umbul @3.901.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Panjang Wetan RT 06 RW 07 @3.901.000 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Tirta Kampung Baru @3.719.500 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Kusuma Bangsa Gg 3 RT 04 RW 01 @3.719.500 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Panjang Wetan Kampung Baru RT 04 RW 08 @3.719.500 ; Penyambungan Daya Listrik Baru Perum BRD Blok I RT 10 RW 20 @3.719.500 Tahun 2020
RSUD BENDAN	362.540.000,00	Inventarisasi pengadaan darurat pengaspalan dari jl. Slamet ke IGD baru @362.540.000 Tahun 2020
DINPERKIM	1.011.998.802,00	Inventaris Saluran Drainase Permukiman Kelurahan Degayu Luas 1303 m2 @629.548.802 ; Peningkatan Jalan Cor Jl. Sidomukti 09 RT. 06 RW.03 Kel. Panjang Baru @98.190.000 ; Cor Beton Jl. Kramatsari 2 Kel. Pasirkatonkramat @185.965.000 ; Pengaspalan Jalan di krapyak Kidul Gg. 5 @98.295.000 Tahun 2020
Jumlah	3.882.822.452,00	

e. Transfer Masuk

Transfer masuk jalan jembatan dan irigasi sebesar Rp37.482.271.922,36 dapat dirinci sebagaimana dalam **Lampiran 31**.

f. Hutang Pihak Ketiga

Hutang pada pihak ke tiga sebesar Rp 278.859.300,00 terjadi pada 2 OPD, dengan rincian sebagai berikut;

1. DPUPR sebesar Rp 17.046.000,00 Berupa Biaya Kegiatan Penataan Kawasan Kota - Pekerjaan Plat Dekker Taman dan Jembatan di Depan MI Sudirman Panjang Wetan yang belum dibayar
2. DINPERKIM sebesar Rp 261.813.300,00 Berupa Biaya Pembangunan Saluran Jl. WR. Supratman (Lanjutan) & Biaya Peningkatan Jalan Jawa Gg. II RT 03 RW 17 Kel. Bendan Kergon yang belum dibayar.



Pengurangan :

Penjelasan Lebih Lanjut mutasi kurang atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut :

a. Koreksi Kapitalisasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

Koreksi kapitalisasi jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp7.047.443.846,00 dapat dilihat dalam rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 6. 118 Koreksi kurang saldo awal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
Kel. Sapuro Kebulen	68.650.000,00	68.650.000,00	Koreksi Kapitalisasi jumlah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 2 unit/register jalan desa
Kel. Sokoduwet	514.950.000,00	514.950.000,00	Koreksi Kapitalisasi jumlah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 11 unit/register saluran drainage
Dinperkim	6.461.593.846,00	6.461.593.846,00	Koreksi Kapitalisasi jumlah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 82 unit/register saluran drainage
Kel. Buaran Kradenan	2.250.000,00	2.250.000,00	Koreksi transfer kapitalisasi
JUMLAH	7.047.443.846,00	7.047.443.846,00	

b. Penghapusan Barang Inventarisasi

Penghapusan Barang Inventaris Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.506.236.828,00 dapat dirinci sebagaimana dalam **Lampiran 32**.

c. Reklasifikasi rekening Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Reklasifikasi Kurang Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.028.855.376,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 119 Rekalsifikasi Rekening Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

SKPD	Jumlah	Pengurangan Rekalsifikasi Aset Tetap ke			
		Tanah	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	KDP
DLH	367.910.000,00			197.248.000,00	170.662.000,00
KEL. BANDENGAN	2.000.000,00		2.000.000,00		
DISHUB	1.400.000,00		1.400.000,00		
DPUPR	1.482.135.750,00		593.424.000,00	666.980.750,00	221.731.000,00
DINPERKIM	175.409.626,00			175.409.626,00	
DLH	367.910.000,00			197.248.000,00	170.662.000,00
Jumlah	2.028.855.376,00	-	596.824.000,00	1.039.638.376,00	392.393.000,00

d. Belanja Modal Tidak dikapitalisasi

Koreksi atas Belanja Modal Tidak dikapitalisasi terjadi pada 2 OPD sebesar Rp 28.515.000,00 dengan rincian:

1. Dinas Lingkungan Hidup berupa pembuatan pagar BRC dan 30 buah komposter @Rp 350.000,00.
2. Diskominfo berupa Belanja Jasa Perencanaan Redesain Instalasi Listrik sebesar Rp 7.400.000,00.



e. Transfer Keluar

Transfer keluar jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp37.482.271.922,36 dapat dirinci sebagaimana **Lampiran 33**.

Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp435.914.238.634,95 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar 447.881.330.127,74 dengan penjelasan sebagai berikut;

Tabel 6. 120 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2019

Uraian	Penambahan Ak.penysutan	Pengurangan Ak.penysutan	Jumlah
Ak.penysutan PER 31 Desember 2019			(400.937.971.529,84)
Biaya penysutan	(48.334.908.091,83)		(48.334.908.091,83)
Koreksi akm penysutan atas kapitalisasi	(2.066.548.203,00)	1.551.929.547,00	(514.618.656,00)
Penghapusan		1.906.168.149,93	1.906.168.149,93
Reklas Aset Tetap	-	-	-
Transfer antar SKPD	(25.516.302.299,36)	25.516.302.299,36	-
Inventarisasi	-	-	-
Ak.penysutan PER 31 Desember 2020	(75.917.758.594,19)	28.974.399.996,29	(447.881.330.127,74)

6.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.939.771.109,00 berkurang sebesar Rp1.926.214.643,78 dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp35.865.985.752,78.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.926.214.643,78 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan

- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	644.610.440,00
- Kaptalisasi belanja Barang dan Jasa	Rp	4.389.800,00
- Hibah	Rp	1.735.000,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap lainnya	Rp	64.048.000,00

Jumlah penambahan	Rp	714.783.240,00
-------------------	----	----------------

Pengurangan:

- Penghapusan Barang Inventaris	Rp	718.224.161,91
- Reklasifikasi rekening Aset Tetap	Rp	672.163.000,00
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	Rp	43.246.040,00
- Migrasi Kode Barang	Rp	1.207.364.681,87
Jumlah pengurangan	Rp	2.640.997.883,78

Penjelasan lebih lanjut Mutasi Tambah atas Aset Tetap Lainnya selain yang berasal dari Belanja Modal antara lain:



- a. Hibah dari Pihak ke tiga
 Pada tahun 2020 Pemerintah Kota pekalongan mendapat bantuan hibah Aset Tetap Lainnya dari pemerintah Pemerintah Pusat sebesar Rp1.735.000,00 berupa Buku Umum Lain-lain sebanyak 16 unit.
- b. Kapitalisasi Belanja barang dan jasa
 Kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp4.389.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 121 Belanja Barang Jasa Aset Tetap Lainnya

OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
KEL. BENER	1	100.000,00	Kumpulan tulisan Hukum Rp100.000,00
KEL. SAPURO KEBULEN	7	734.900,00	Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Buku
KEC. PKL TIMUR	3	385.000,00	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain
KEL. SETONO	3	400.000,00	Hukum Pidana Lingkungan Hidup Rp120.000, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT Rp150.000, Pokok-pokok Acara Hukum Perdata Rp130.000
KEL. BUARAN KRADENAN	2	240.000,00	Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Buku
KEL. BANYURIP	3	409.900,00	3 unit Buku Umum Lain lain
SDN BANYURIP AGENG	20	2.120.000,00	PJOK K13 N Kelas 6 @Rp 106.000,00
Jumlah	39,00	4.389.800,00	

- c. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Lainnya
 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap lainnya sebesar Rp64.048.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 122 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Lainnya

SKPD	Jumlah	Penambahan dari Reklasifikasi		
		Peralatan Mesin	Reklas dari Aset Lainnya	Ekstrakomtabel
RSUD	1.000.000,00	1.000.000,00		
SMPN 5	10.919.000,00			10.919.000,00
SDN PANJANG WETAN 4	10.883.000,00			10.883.000,00
SDN KEPUTRAN 6	13.080.000,00			13.080.000,00
SDN KARANGMALANG	2.766.000,00			2.766.000,00
DINPARBUD	25.400.000,00		25.400.000,00	
Jumlah	64.048.000,00	1.000.000,00	25.400.000,00	37.648.000,00

Penjelasan Lebih Lanjut mutasi kurang atas Aset Tetap lainnya selain dari Belanja Modal sebagai berikut :

- a. Penghapusan barang Inventaris
 Penghapusan Barang Inventaris Aset Tetap lainnya sebesar Rp718.224.161,91 dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 6. 123 Penghapusan Barang Aset Tetap Lainnya

OPD	Dielang			Dimusnahkan	Jumlah
	030 / 758 / 2020	030/800/2020	032/749/2020	030/800/2020	
	08/10/2020	20-nov-20	22/09/2020	20-nov-20	
Bagian Adm. Pembangunan	192.500,00				192.500,00
SDN Landungsari 01		92.172.709,00			92.172.709,00
SDN Poncol 02				136.857.285,00	136.857.285,00
SDN Klego 04		9.277.100,00			9.277.100,00
SDN Gamer 02		6.862.343,00			6.862.343,00
SDN Baros		1.395.504,00			1.395.504,00
SDN Krapyak Lor 02		5.250.176,00			5.250.176,00
SDN Jenggut		1.584.002,00			1.584.002,00
SDN Krapyak Kidul 02		8.417.390,00			8.417.390,00
TK Pembina Barat		2.360.000,00			2.360.000,00
SMP N 04		71.608.000,00			71.608.000,00
SMP N 07		12.543.100,00			12.543.100,00
SMP N 09		40.461.658,91			40.461.658,91
SMP N 12		13.436.500,00			13.436.500,00
SMP N 14		132.253.538,00			132.253.538,00
SMP N 16		103.751.056,00			103.751.056,00
BAPPEDA	72.500,00				72.500,00
DINPARBUDPORA			79.728.800,00		79.728.800,00
JUMLAH	265.000,00	501.373.076,91	79.728.800,00	136.857.285,00	718.224.161,91

b. Reklasifikasi rekening Aset Tetap

Reklasifikasi Kurang Aset Tetap lainnya sebesar Rp672.163.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 6. 124 Reklasifikasi Kurang Aset Tetap lainnya

SKPD	Jumlah	Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke		
		Tanah	Peralatan Mesin	Jalan, Irigasi dan Jaringan
SATPOL PP	119.585.000,00		119.585.000,00	
SMPN 13	11.000.000,00		11.000.000,00	
SMPN 7	2.000.000,00		2.000.000,00	
SMPN 2	11.825.000,00		11.825.000,00	
SMPN 3	1.525.000,00		1.525.000,00	
SDN PONCOL 1	1.800.000,00		1.800.000,00	
SDN PODOSUGIH 3	700.000,00		700.000,00	
SDN PANJANG WETAN 4	1.175.000,00		1.175.000,00	
SDN KRAPRAK LOR 5	1.500.000,00		1.500.000,00	
SDN DEGAYU 2	1.500.000,00		1.500.000,00	
DINPERKIM	510.288.000,00	215.603.000,00		294.685.000,00
DINDIK	8.675.000,00		8.675.000,00	
SMPN 5	590.000,00		590.000,00	
Jumlah	672.163.000,00	215.603.000,00	161.875.000,00	294.685.000,00



- c. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi
 Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp43.246.040,00 merupakan Realisasi Belanja Modal yang tidak mencerminkan sebagai aset tetap sesuai dengan Kriteria Aset Tetap dapat diperinci sebagai berikut. Belanja modal yang menjadi ekstrakomtabel sebesar Rp33.770.500,00, belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp9.475.540,00. Rincian belanja tidak dikapitalisasi aset tetap lainnya sebagaimana dalam **Lampiran 34**.
- d. Migrasi Kode Barang
 Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.207.364.681,87 terjadi karena adanya perubahan kode barang dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2018.
 Kode barang yang berubah dari Golongan Aset Tetap Lainnya ke Peralatan Mesin sebesar Rp1.207.364.681,87

6.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.169.230.299,00 berkurang sebesar Rp15.414.066.900,00 dibandingkan dengan Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2019 Rp16.583.297.199,00.
 Pengurangan sebesar Rp15.414.066.900,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 125 Penambahan Kontruksi dalam Pengerjaan

SKPD	Saldo Akhir 2019	Penambahan				Pengurangan		Saldo Akhir 2020
		Reklas Tambah dari			Inventarisasi	Reklas Kurang ke		
		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan		Bangunan Gedung	Irigasi dan Jaringan	
DLH				170.662.000				170.662.000
DINDAGKOP	6.185.708.000		111.218.000			6.296.926.000		-
KEC. TIMUR	711.017.199		18.031.000					729.048.199
DINPERPA			49.375.100					49.375.100
DINPARBUD			52.000.000					52.000.000
RSUD	7.863.445.000	1.529.348.718	8.542.141.779		137.460.000	17.861.413.497	138.585.000	72.397.000
DINKES								-
DPUPR	1.823.127.000			221.731.000		1.949.110.000		95.748.000
Jumlah	16.583.297.199	1.529.348.718	8.772.765.879	392.393.000	137.460.000	26.107.449.497	138.585.000	1.169.230.299



Berikut daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 :

Tabel 6. 126 Daftar Kontruksi dalam Pengerjaan

No	JENIS	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	DPU				
	Pekerjaan DED / Perencanaan Peningkatan Jalan Bukhori dan Jalan Klego-Slamaran		95.748.000,00		95.748.000,00
	Pembangunan Rumah Pompa Kel. Pasirkratonkramat	1.039.777.000,00	110.983.000,00	1.150.760.000,00	-
	Pengadaan Rumah Pompa Kel. Tirta	783.350.000,00	15.000.000,00	798.350.000,00	-
2	RSUD Bendan				
	Pembangunan Gedung IGD RSUD Bendan	7.863.445.000,00	10.208.950.497,00	17.999.998.497,00	72.397.000,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	Pembangunan Pasar Sugihwaras baru Jl. Dr. Cipto	6.185.708.000,00	111.218.000,00	6.296.926.000	-
4	Dinas Lingkungan Hidup				
	Pembuatan DED Zona IV TPA Degayu Keg Revitalisasi tempat pengolahan sampah		170.662.000,00		170.662.000,00
5	Dinas Pertanian Pangan				
	DED Pagar Kantor dan IPAL	-	49.375.100,00	-	49.375.100,00
6	DINPARBUDPORA				
	Perencanaan Gedung PIBB		52.000.000,00		52.000.000,00
7	Kecamatan Pekalongan Timur				
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kel Noyontaansari	711.017.199,00	18.031.000,00		729.048.199,00
	JUMLAH KDP	16.583.297.199,00	10.831.967.597,00	26.246.034.497,00	1.169.230.299,00

Pada KDP Gedung Serbaguna Kelurahan Noyontaansari pada tahun 2020 tidak ada pengerjaan fisik karena adanya refokusing anggaran

6.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.105.098.841.304,69 meningkat 15,16% atau sebesar Rp 145.454.656.406,48 dibandingkan dengan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp959.644.184.898,21.



Akumulasi penyusutan aset tetap ini terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, sebesar Rp 446.419.418.296,70
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, sebesar Rp 210.537.214.740,25
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, sebesar Rp 447.881.330.127,74
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp 260.878.140,00

6.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 144.956.415.871,20. Aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 127 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020

Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.328.020.000,00	12.582.540.000,00	(2,02)
Aset Tidak Berwujud	1.028.037.308,20	1.283.030.799,80	(19,87)
Aset Lain-lain	131.373.354.901,00	130.956.964.761,31	0,32
Uang Jaminan	227.003.662,00	217.276.062,00	4,48
Jumlah	144.956.415.871,20	145.039.811.623,11	(0,06)

Penjelasan lebih lanjut aset lainnya adalah sebagai berikut :

6.3.1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 12.328.020.000,00. Kemitraan dengan Pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kemitraan BOT Mall Banjarsari (Nilai Rp 1.248.000.000,00)

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan PT. Dian Insan Sarana Cipta (DISC) dalam kerjasama pengelolaan Pasar Banjarsari sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan. Pembangunan Pasar Banjarsari dan Mall Banjarsari di atas tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan seluas 17.330 m² senilai Rp 5.545.600.000,00 dengan Hak Pakai Pemerintah Kota berlokasi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan sampai dengan addendum IV Nomor 050/01853 Tanggal 5 Agustus 2010 terdapat kerjasama kemitraan BOT untuk Mall Banjarsari dan BTO untuk Pasar Banjarsari. Untuk Kemitraan Mall Banjarsari Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat HGB diatas HPL atas tanah seluas 3.900 m² senilai Rp 1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah). Nilai bangunan Mall Banjarsari (Atrium/Plaza



tiga lantai) pada tahun 2012 sebesar Rp24.037.146.545,00 (dua puluh empat milyar tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan hasil LHP BPK RI atas LKD Tahun 2012, terkait dengan bangunan mall Banjarsari dan bangunan pasar, BPK merekomendasikan Walikota Pekalongan agar Pemerintah Kota Pekalongan memperhitungkan kembali nilai Aset Tetap sebesar Rp9.000.047.320,00 (sembilan milyar empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penghitungan kembali Pemisahan Aset Bangunan Pasar Banjarsari dan Atrium Banjarsari. Hasil penghitungan kembali dituangkan dalam berita acara Perhitungan Pemisahan Aset Bangunan Pasar Banjarsari dan Atrium Banjarsari Nomor 050/0980.1 tanggal 14 Mei 2013. Berdasarkan berita acara tersebut, maka nilai bangunan mall banjarsari terkoreksi menjadi sebesar Rp26.272.678.000,00 atau bertambah sebesar Rp2.235.531.455,00 dari nilai semula sebesar Rp24.037.146.545,00. Perjanjian dimaksud berlaku sejak 25 September 2005 s/d 11 Juni 2032.

- b. Kemitraan BOT Ramayana (Nilai Rp11.080.020.000,00)
Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan PT. Prima Lestari Investindo dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18/PLI/IV/2012 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Noyontaan atas tanah seluas ± 9.660 m² senilai Rp11.080.020.000,00. Adapun nilai investasi atas kemitraan BOT Ramayana adalah sebesar Rp54.048.700.000,00, dan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun.

Nilai kemitraan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp254.520.000,00 dibanding nilai kemitraan tahun 2019 yaitu sebesar Rp12.582.540.000,00 yang disebabkan karena berakhirnya BOT antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan CV. Putra Perdana sebagaimana dalam perjanjian kerjasama nomor 511.3/0062 tentang Perjanjian kerjasama penataan dan pembangunan rumah dan toko di lokasi pasar grogolan lama Kotamadya Pekalongan. Namun sampai dengan selesainya perjanjian ternyata CV. Putra Perdana tidak melaksanakan penyerahan, sehingga untuk pengamanan aset maka dilakukan pengambilalihan pengelolaan ruko eks psar grogolan lama dengan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 032/162 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. Selanjutnya aset tersebut ditetapkan sebagai barang milik daerah Kota Pekalongan.

6.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.028.037.308,20. Aset tak berwujud memiliki umur ekonomis 5 tahun. Rincian aset tak berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 6. 128 Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

OPD	Jumlah	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Sekretariat DPRD/DPRD	49.635.000,00	39.708.000,00	9.927.000,00
Bagian Adm. Pembangunan	75.150.000,00	30.060.000,00	45.090.000,00
Bagian Hukum	34.199.950,00	34.199.950,00	-
Badan Keuangan Daerah	705.234.330,00	533.845.930,00	171.388.400,00
DPUPR	130.857.100,00	99.964.040,00	30.893.060,00
Dinas Perhubungan	210.707.725,00	140.411.725,00	70.296.000,00
Dinas Kesehatan	321.507.000,00	243.024.200,00	78.482.800,00
RSUD BENDAN	1.320.446.886,00	1.214.387.154,40	106.059.731,60
Dinas Pendidikan	644.303.884,05	298.283.084,05	346.020.800,00
DINSOS	9.490.800,00	9.490.800,00	-
DINDUKAPIL	62.229.600,00	56.640.560,00	5.589.040,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	11.385.681,00	9.408.544,80	1.977.136,20
Dinas Pertanian dan Pangan	8.250.000,00	6.600.000,00	1.650.000,00
DINDAGKOP	109.131.200,00	72.934.960,00	36.196.240,00
DPMPSTP	473.656.400,00	449.131.400,00	24.525.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	29.590.000,00	11.836.000,00	17.754.000,00
BKPPD	52.405.000,00	42.463.000,00	9.942.000,00
DINARPUS	199.887.481,00	140.254.368,60	59.633.112,40
DINKOMINFO	239.232.235,00	226.619.247,00	12.612.988,00
Jumlah	4.687.300.272,05	3.659.262.963,85	1.028.037.308,20

Saldo aset tak berwujud 2020 sebesar Rp1.028.037.308,20 mengalami penurunan sebesar Rp254.993.491,60 dibandingkan dengan saldo aset tak berwujud tahun 2019 sebesar Rp1.283.030.799,80. Rinciannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

Penambahan:

- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Rp	204.953.600,00
- Hibah	Rp	87.800.000,00
- Reklas tambah dari Aset tetap	Rp	3.459.735,00
Total Penambahan	Rp	296.213.335,00

- a. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 Pengadaan Aset tak berwujud sebesar Rp204.953.600,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pengadaan dari Belanja Modal



Pengadaan Aset tak berwujud dari belanja modal sebesar Rp 48.390.000,00 pada OPD Badan Keuangan Daerah berupa Software Aplikasi E-BPHTB.

- 2) Pengadaan dari Belanja Barang Jasa
Pengadaan Aset tak berwujud dari belanja barang jasa sebesar Rp156.563.600,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. 129 Pengadaan Aset Tak Berwujud Dari Belanja Barang Jasa

OPD	NILAI (RP)	KETERANGAN
DINARPUS	21.566.600,00	- Belanja e-book Belanja E Book Perpustakaan (Buku Elektronik) di PT. Gramedia Pustaka Utama Rp 8.713.100,00 - Belanja E Book Perpustakaan (Buku Elektronik) di CV. Ar-Ruzz Media tahun 2020 Rp 7.181.900,00 - Belanja E-Book Perpustakaan (Buku Elektronik) Tahun 2020 Rp 5.671.600,00
Dinas Pendidikan	134.997.000,00	- Pengadaan aplikasi e-apbs Rp 99.996.000 - Pengadaan aplikasi ppdb online Rp 35.001.000,00
Jumlah	156.563.600,00	

- b. Hibah
Total hibah aset tak berwujud tahun 2020 sebesar Rp 87.800.000,00. Total hibah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
- 1) Hibah Aset tak berwujud dari Bank Jateng sebesar Rp 48.800.000,00 pada OPD Badan Keuangan Daerah berupa Software Aplikasi E-BPHTB.
 - 2) Hibah juga diberikan Bank Jateng kepada Dinas Perhubungan berupa aplikasi SIMPKB (E-KIR) sebesar Rp 39.000.000,00
- c. Reklasifikasi Tambah Aset Tak Berwujud
Reklasifikasi tambah aset tak berwujud dari belanja modal aset tetap sebesar Rp3.459.735,00 pada OPD Dinas Komunikasi dan Informatika berupa software batik TV Rp 1.559.735,00 dan Rp 1.900.000,00.

6.3.1.5.2.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud tahun 2020 sebesar Rp3.659.262.963,85 mengalami kenaikan sebesar Rp551.206.826,60 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.108.056.137,25 karena ada beban amortisasi tahun berjalan dan koreksi amortisasi pada OPD BKD, dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 6. 130 Pengadaan Aset Tak Berwujud Dari Belanja Barang Jasa

OPD	Jumlah	Beban Amortisasi Tahun 2020	Koreksi Amortisasi
DINDIK	123.907.700,00	123.907.700,00	
DINKES	39.241.400,00	39.241.400,00	
RSUD BENDAN	81.289.777,20	81.289.777,20	
DPUPR	22.893.420,00	22.893.420,00	
DISHUB	20.832.000,00	20.832.000,00	
DINDUKAPIL	2.794.520,00	2.794.520,00	
DINDAGKOPUKM	21.826.240,00	21.826.240,00	
DPMPSTSP	44.914.200,00	44.914.200,00	
Bag. Hukum	2.939.990,00	2.939.990,00	
BKD	102.366.400,00	82.846.400,00	19.520.000,00
BKPPD	9.942.000,00	9.942.000,00	
DINSOSP2KB	-	-	
DINARPUS	24.806.496,20	24.806.496,20	
DISKOMINFO	18.950.547,00	18.950.547,00	
DINPERPAN	1.650.000,00	1.650.000,00	
DKP	1.977.136,20	1.977.136,20	
SEKRETARIAT DPRD	9.927.000,00	9.927.000,00	
DLH	5.918.000,00	5.918.000,00	
Bag. Minbang	15.030.000,00	15.030.000,00	
Jumlah	551.206.826,60	531.686.826,60	19.520.000,00

6.3.1.4.3 Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang Rusak Berat dan Aset non aktif yakni aset yang dipinjam pakai kepada pihak ke tiga dan aset tanah eks bengkok yang terkena rob (idle), sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja pada SKPD selaku pengguna Barang. Adapun Aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Nilai Buku Rp131.373.354.901,00 yang terdiri dari Nilai Perolehan Rp155.961.866.471,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. Rp.24.588.511.570,00. Nilai Perolehan bertambah sebesar Rp1.519.426.215,00 dibandingkan dengan saldo aset lain-lain 31 Desember 2019 Rp 154.442.440.256,00. Penambahan sebesar Rp 1.519.426.215,00 tersebut berasal dari penambahan Reklasifikasi rekening dari Aset Tetap sebesar Rp. 1.519.426.215,00.

Penambahan Aset lain-lain sebesar Rp 1.519.426.215,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- Badan Keuangan Daerah terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 141.471.000,00 yang digunakan untuk rehab gedung panwaslu.
- Badan Keuangan Daerah terdapat Reklas dari Aset Gedung menjadi Aset lain-lain karena pinjam pakai sebesar Rp674.914.215,00.



- c. DPUPR terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp647.191.000,00 yang digunakan untuk rehab rumah dinas Kajari Rp216.039.000,00, rumah dinas Dandim Rp214.044.000,00 dan rumah dinas Kapolres Rp217.108.000,00
- d. Kecamatan Pekalongan Selatan terdapat Reklas Belanja Modal DED Gedung Kantor Kelurahan Sokoduwet yang direklas ke aset lain-lain sebesar Rp22.000.000,00
- e. Kecamatan Pekalongan Utara terdapat Reklas Belanja Modal Jasa Perencanaan Rehab Gedung Kantor Kel Bandengan yang direklas ke aset lain-lain sebesar Rp8.350.000,00
- f. Kecamatan Pekalongan Selatan terdapat Reklas Belanja Modal Jasa Perencanaan Rehab Aula Kelurahan Kalibaros yang direklas ke aset lain-lain sebesar Rp25.500.000,00

Informasi terkait tanah yang tergenang rob dan peralatan mesin yang dipinjam-pakaikan adalah sebagai berikut :

- a. Aset tetap tanah eks bengkok pada beberapa kelurahan terendam rob (pasang laut) sehingga tidak bisa ditanam padi, atas pencatatan tanah tersebut direklasifikasi ke aset lain-lain pada aset lainnya, adapun tanah eks bengkok dimaksud tercantum dalam **Lampiran 35**.
- b. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak ketiga (Instansi Vertikal), atas pencatatan tersebut direklasifikasikan ke aset lain-lain pada aset lainnya, adapun rincian gedung dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 131 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjam Pakaikan kepada Pihak Ketiga

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas Lantai (m ²)	Letak / Lokasi Alamat	Nilai Perolehan (Rp)	Ket	SKPD Pencatat
		Kode Barang	Reg					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.0	8	315.25	Jl. Majapahit No. 8 Podosugih	441.668.318,00	Sekretariat KORPRI/ BAZDA	BKD
2	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.0	9	380	JL.GAJAH MADA	886.905.500,00	Rumdin Kajari	BKD
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.0	7	145	JL.BANDUNG	124.817.450,00	Polsek Timur	BKD
4	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.0	6	280	JL.BAHAGIA 23	817.548.300,00	Rumdin Kapolresta	BKD
5	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.0	11	280	JL.BAHAGIA 1	822.629.800,00	Rumdin Wakapolresta	BKD
6	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.0	10	280	JL.GAJAH MADA	770.336.800,00	Rumdin Dandim	BKD
7	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.0	13	280	JL.BAHAGIA 5	455.349.800,00	Rumdin Kasdim	BKD
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.0	1	305	JL. VETERAN NO.27	589.135.750,00	Unit Donor Darah PMI	BKD
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.0	2	0	Jl. Tondano	163.350.000,00	Kantor Eks Kantor BP4	BKD
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.0	1	212	Jl. Pembangunan No. 4	665.658.600,00	Panwaslu	BKD
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.0	1	0	Jl. Pantai Sari	310.105.000,00	Gedung Lanal	DKP
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.0	2	954	Jl. Sriwijaya	3.287.660.758,00	Gedung KPU	BKD
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.0	5	136	Jl. Karya Bhakti	270.100.000,00	Sekretariat AKN	Dinkes



No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas Lantai (m2)	Letak / Lokasi Alamat	Nilai Perolehan (Rp)	Ket	SKPD Pencatat
		Kode Barang	Reg					
14	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	03.11.02.03.01	1	54	Jl. Dharma Bhakti Medono	35.000.000,00	Gedung AKN	Dinkes
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	23	85,6	Jl. Perintis Kemerdekaan	2.186.810.222,00	Gedung AKN	BKD

Nilai buku aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp 131.373.354.901,00.

6.3.1.4.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp24.588.511.570,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 6. 132 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020

Uraian	Penambahan Ak.penysusutan	Pengurangan Ak.penysusutan	Jumlah
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2019			(23.485.475.494,69)
Biaya penyusutan	(644.094.419,31)		(644.094.419,31)
Koreksi saldo awal	-	-	-
Reklas Aset Tetap	(458.941.656,00)	-	(458.941.656,00)
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2020	(1.103.036.075,31)		(24.588.511.570,00)

6.3.1.4.4 Uang Jaminan

Uang jaminan merupakan uang jaminan rusunawa sebesar Rp227.003.662,00 yang tersimpan pada rekening Simpeda di Bank Jateng Nomor 3007098048 an. Pengelola Rusunawa dan berada dalam tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Uang jaminan adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan. Uang jaminan rusunawa dapat dirinci sebagai berikut :

- Uang jaminan penghuni Rusun Slamaran sebesar Rp92.325.862,00
- Uang jaminan penghuni Rusun Kuripan sebesar Rp78.142.800
- Uang Jaminan penghuni Rusun Panjang Baru Rp56.535.000,00

Dalam rekening koran Rusun Kuripan Rp 78.577.800,00 terdapat selisih Rp435.000,00 karena ada dobel transfer an. M. Yusuf Marbun, rekening koran Rusun Panjang baru Rp57.315.000,00 terdapat selisih Rp780.000,00 karena koreksi saldo awal tahun lalu (ada nama yang belum masuk ke dalam laporan).

Kewajiban dan Ekuitas

6.3.2.1 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 17.678.074.030,11 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 6. 133 Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Kewajiban Jangka pendek	17.678.074.030,11	25.841.538.443,32	-31,59
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
Jumlah	17.678.074.030,11	25.841.538.443,32	-31,59

Pemerintah Kota Pekalongan hanya mempunyai kewajiban jangka pendek. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharap dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp561.000,00, yang terdiri dari :

- Utang PFK Taperum pada PPKD, sebesar Rp340.000,00
- Utang Pembayaran Pajak pada Dinas Pendidikan, sebesar Rp221.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. 134 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2020

NO	SKPD	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PELUNASAN	SALDO AKHIR
1	DINAS PENDIDIKAN	Utang PFK Resto	-	221.000,00	-	221.000,00
2	SKPKD	Utang Taperum	-	340.000,00	-	340.000,00
	JUMLAH		-	561.000,00	-	561.000,00

6.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.224.591.670,00, yang terdiri dari :

- RSUD Bendan
 Total pendapatan diterima dimuka pada RSUD Bendan sebesar Rp2.104.414.750,00 dengan rincian :
 - Sewa lahan sebesar Rp8.500.000,00
 - Pembayaran klaim tahap IV sebesar Rp2.095.914.750,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat sebesar Rp16.126.667,00.
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Pendapatan diterima dimuka atas retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebesar Rp8.760.000,00



- d. Dinas Perhubungan
Total pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perhubungan sebesar Rp91.243.300,00 dengan perincian :
 - 1. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp90.915.566,67.
 - 2. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi izin trayek sebesar Rp327.733,33.
- e. Badan Keuangan Daerah
Total pendapatan diterima dimuka pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp423.296.350,00 dengan perincian :
 - 1. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi sewa lahan titik strategis sebesar Rp87.715.096,00.
 - 2. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi sewa tanah sebesar Rp31.792.920,00.
 - 3. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi sewa garapan eks bengkok sebesar Rp299.621.667,00
 - 4. Pendapatan diterima dimuka atas pemakaian sarana dan prasarana reklame sebesar Rp4.166.667,00
- f. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
Total pendapatan diterima dimuka pada SKPKD sebesar Rp580.750.603,00 dengan perincian :
 - 1. Pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame/billboard/videotron/ megatron sebesar Rp552.009.239,00
 - 2. Pendapatan diterima dimuka atas reklame kain sebesar Rp28.741.364,00

6.3.2.1.2 Utang Belanja

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 14.154.825.778,11, yang terdiri dari : utang pada RSUD Bendan, BLUD Puskesmas, BLUD PSPJ, Dinas kesehatan, DPUPR, Dinperkim. Rincian utang belanja adalah sebagai berikut :



Tabel 6. 135 Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2020

Jenis Utang	Jumlah (Rp)
Utang Belanja pada BLUD RSUD Bendan	13.408.738.938,19
Utang Jasa Pelayanan pada BLUD Puskesmas:	342.464.501,92
UPT PUSKESMAS BENDAN	90.752.757,00
UPT PUSKESMAS BUARAN	60.282.034,00
UPT PUSKESMAS DUKUH	3.817.643,84
UPT PUSKESMAS JENGGOT	17.253.900,00
UPT PUSKESMAS KLEGO	2.442.650,00
UPT PUSKESMAS KRAMATSARI	1.862.500,00
UPT PUSKESMAS KRAPYAK	9.486.034,00
UPT PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL	1.528.875,00
UPT PUSKESMAS KUSUMA BANGSA	29.583.350,00
UPT PUSKESMAS MEDONO	19.598.024,00
UPT PUSKESMAS NOYONTAAN	3.369.750,00
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN	58.773.641,00
UPT PUSKESMAS SOKOREJO	36.651.950,00
UPT PUSKESMAS TIRTO	3.281.493,08
UPT PUSKESMAS TONDANO	3.779.900,00
Utang Pada Dinas Kesehatan	42.505.038,00
Utang Jamkesda RSUD Kraton	9.066.100,00
Utang Jamkesda R. ARO Pekalongan	4.906.250,00
Utang Jamkesda RS Siti Khotijah	24.708.788,00
Utang Jamkesda RSUD Budi Rahayu	3.823.900,00
Utang pada DPUPR	93.392.000,00
Utang Belanja pembuatan taman dan jembatan depan	93.392.000,00
Utang pada Dinperkim	267.725.300,00
Utang Belanja pembangunan saluran WR Supratman	223.803.300,00
Utang Belanja peningkatan jalan Jawa gg. II	38.010.000,00
Utang Belanja pembuatan gapuro gg. I Panjang Wetan	5.912.000,00
Jumlah	14.154.825.778,11

Pada tahun 2020, telah dibayarkan hutang belanja Pemerintah Kota Pekalongan melalui rekening pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.630.000,00 yaitu pembayaran hutang belanja Dinperinaker.

Tabel 6. 136 Saldo Utang Berdasar Jenis Belanja Per 31 Desember 2020

Utang Belanja	Tahun 2020
Belanja Pegawai	7.037.905.550,92
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.997.672.550,92
Utang Belanja Pegawai Dana BLUD	40.233.000,00
Belanja Barang Jasa	6.754.677.927,19
Utang Belanja Jasa	242.551.507,00
Utang Belanja Pemeliharaan	60.226.750,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas	846.650,00
Utang Belanja Bahan Pakai Habis	247.023.700,00



Utang Belanja	Tahun 2020
Utang Belanja Bahan/ Material	6.177.348.320,19
Utang Belanja Makanan dan Minuman	9.931.000,00
Utang Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.000.000,00
Utang Belanja Inventaris Non Kapitalisasi	2.750.000,00
Belanja Modal	362.242.300,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.517.000,00
Utang Belanja Modal Jalan	267.725.300,00
JUMLAH	14.154.825.778,11

6.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp298.095.582,00, terdiri dari :

a. Utang Jangka Pendek Lainnya, sebesar Rp71.091.920,00

b. Utang Uang Jaminan, sebesar Rp227.003.662,00

dengan perincian sebagai berikut :

6.3.2.1.3.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.091.920,00, yang merupakan lebih bayar pajak maupun retribusi, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6. 137 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2020

Jenis Utang	Jumlah (Rp)
Lebih Bayar	
Lebih Bayar retribusi sewa (BKD)	4,00
Lebih bayar PBB (SKPKD)	29.712.381,00
Lebih bayar retribusi pasar (Dindagkop)	4.858.400,00
Lebih bayar Lain-lain PAD yang Sah	36.521.135,00
Jumlah	71.091.920,00

6.3.2.1.3.2 Utang Uang Jaminan

Saldo Utang Uang Jaminan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp227.003.662,00, yang merupakan utang uang jaminan rusunawa, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6. 138 Saldo Utang Uang Jaminan Per 31 Desember 2020

Jenis Utang	Jumlah (Rp)
Utang Uang Jaminan Rusunawa	
Rusunawa Slamiran	92.325.862,00
Rusunawa Kuripan	78.142.800,00
Rusunawa Panjang baru	56.535.000,00
Jumlah	227.003.662,00



6.3.2.2 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.904.239.377.358,02. Rincian ekuitas dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 139 Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Ekuitas 31 Desember 2019	2.830.832.684.231,98
Surplus/Defisit LO	70.846.123.798,90
Koreksi Ekuitas	2.560.569.327,14
Ekuitas 31 Desember 2020	2.904.239.377.358,02

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 140 Penjelasan Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah		Naik/Turun (%)
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Kegiatan Operasional :			
Pendapatan - LO	1.037.951.849.527,71	997.637.774.889,78	4,04
Beban - LO	962.337.342.440,42	883.957.098.008,92	8,87
Surplus/Defisit	75.614.507.087,29	113.680.676.880,86	-33,49
Defisit Non Operasional	4.636.466.336,80	6.688.482.217,08	-30,68
Surplus/Defisit Sblm Pos Luar Biasa	70.978.040.750,49	106.992.194.663,78	-33,66
Beban Luar Biasa	131.916.951,59	730.438.928,00	-81,94
Surplus/Defisit LO	70.846.123.798,90	106.261.755.735,78	-33,33

a. Kegiatan Operasional

6.4.1.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan-LO tahun 2020 adalah sebesar Rp1.037.951.849.527,71 meningkat sebesar 4,04% bila dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2019 sebesar Rp997.637.774.889,78. Pendapatan-LO dapat dirinci sebagai berikut :

6.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 6. 141 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)
	2020	2019	
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO :			
Pajak Daerah - LO	81.244.763.202,00	91.299.275.643,00	-11,01
Retribusi Daerah - LO	15.671.187.835,67	17.554.406.636,00	-10,73
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.751.035.693,23	5.856.763.925,89	-1,81
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	174.583.433.329,51	111.166.751.640,49	57,05
Jumlah	277.250.420.060,41	225.877.197.845,38	22,74

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020 sebesar Rp277.250.420.060,41 atau meningkat sebesar 22,74% dibandingkan realiasi tahun 2019 sebesar Rp225.877.197.845,38. Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan. Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2020 adalah sebesar Rp81.244.763.202,00 atau turun sebesar 11,01% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp91.299.275.643,00. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 142 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian Pajak Daerah - LO	Tahun		Naik/Turun (%)
	2020	2019	
Pajak Hotel	4.956.346.037,00	7.416.060.994,00	-33,17
Pajak Restoran	9.976.150.015,00	13.465.232.758,00	-25,91
Pajak Hiburan	2.005.179.328,00	5.549.614.728,00	-63,87
Pajak Reklame	2.157.686.557,00	2.624.998.343,00	-17,80
Pajak Penerangan Jalan	21.101.750.935,00	21.840.421.391,00	-3,38
Pajak Parkir	893.030.186,00	1.873.920.896,00	-52,34
Pajak Air Tanah	3.230.847.181,00	1.568.194.395,00	106,02
PBB Pedesaan dan Perkotaan	18.272.172.435,00	17.467.333.205,00	4,61
BPHTB	18.651.600.528,00	19.493.498.933,00	-4,32
Jumlah	81.244.763.202,00	91.299.275.643,00	-11,01

6.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing OPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah sebesar Rp15.671.187.835,67 atau turun sebesar 10,73% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp17.554.406.636,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 6. 143 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian Retribusi Daerah - LO	Tahun		Naik/Turun %
	2020	2019	
Ret. Pelayanan Kesehatan	149.922.500,00	183.282.000,00	-18,20
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	683.180.000,00	692.966.000,00	-1,41
Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	45.700.250,00	27.812.083,00	64,32
Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.104.957.000,00	1.755.001.000,00	-37,04
Ret. Pelayanan Pasar	2.340.202.950,00	2.492.994.149,00	-6,13
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	417.444.650,00	487.026.283,33	-14,29
Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	36.345.000,00	21.635.000,00	67,99
Ret. Tera dan Tera Ulang	49.174.500,00	64.616.000,00	0,00
Ret. Pemakaian Kekayaan daerah	3.834.679.359,00	4.109.978.404,00	-6,70
Ret. Tempat Pelelangan	5.305.162.710,00	5.326.851.300,00	-0,41
Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	23.700.000,00	8.400.000,00	182,14
Ret. Rumah Potong Hewan	74.589.000,00	90.007.500,00	-17,13
Ret. Tempat Olahraga	169.681.500,00	647.670.250,00	-73,80
Ret. IMB	1.378.331.350,00	1.607.129.600,00	-14,24
Ret. Izin Trayek	2.801.066,67	4.657.066,67	-39,85
Ret. Perpanjangan IMTA	55.316.000,00	34.380.000,00	60,90
Jumlah	15.671.187.835,67	17.554.406.636,00	-10,73

6.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil penyertaan modal pada tahun 2020 adalah sebesar Rp5.751.035.693,23 atau mengalami penurunan sebesar 1,81% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp5.856.763.925,89. Rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 6. 144 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun		Naik/Turun %
	2020	2019	
Bagian Laba Perusda	572.879.159,48	540.883.804,90	129,07
Bagian Laba BUMD	580.640.345,75	1.177.784.784,99	-50,70
Bagian Laba Bank Jateng	4.597.516.188,00	4.138.095.336,00	11,10
Jumlah	5.751.035.693,23	5.856.763.925,89	-1,81

6.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO tahun 2020 adalah sebesar Rp174.583.433.329,51 atau mengalami kenaikan sebesar 57,05% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp111.166.751.640,49. Realisasi lain-lain PAD yang sah dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 6. 145 Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian Pajak Daerah - LO	Tahun		Naik/Turun (%)
	2020	2019	
Hasil penjualan aset daerah yg tdk dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan jasa giro	1.815.523.494,00	1.901.775.984,00	-4,54
Pendapatan bunga	6.357.894.649,00	9.331.792.218,00	-31,87
Tuntutan ganti kerugian uang daerah	3.435.000,00	7.100.000,00	-51,62
Pendapatan denda atas keterlambatan	295.977.462,00	200.079.367,00	47,93
Pendapatan denda pajak	1.864.174.774,00	1.651.642.418,02	12,87
Pendapatan denda retribusi	1.000.000,00	12.734.350,00	-92,15
Pendapatan dari pengembalian	395.461.213,00	1.527.506.719,00	-74,11
Pendapatan BLUD	161.803.370.511,51	95.885.665.446,47	68,75
Lain-lain PAD yang sah lainnya	2.046.596.226,00	648.455.138,00	215,61
Jumlah	174.583.433.329,51	111.166.751.640,49	57,05

6.4.1.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2020 adalah sebesar Rp703.422.751.564,00 atau mengalami penurunan sebesar 4,77% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp738.673.298.145,00. Pendapatan Transfer – LO dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. 146 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun (%)
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Pendapatan Transfer - LO :			
Transfer Pemerintah Pusat - LO	564.069.897.464,00	615.690.443.449,00	-8,38
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	58.355.913.000,00	33.260.942.000,00	0,00
Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LO	69.202.941.100,00	70.585.760.651,00	-1,96
Bantuan Keuangan - LO	11.794.000.000,00	19.136.152.045,00	-38,37
Jumlah	703.422.751.564,00	738.673.298.145,00	-4,77

6.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat – LO sebesar Rp564.069.897.464,00 atau mengalami penurunan sebesar 8,38% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp615.690.443.449,00. Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 6. 147 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO			
Bagi Hasil Pajak - LO	24.160.712.490,00	22.557.670.368,00	7,11
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO	1.562.760.639,00	1.827.183.033,00	-14,47
DAU - LO	433.354.907.000,00	475.842.089.000,00	-8,93
DAK Fisik - LO	29.388.599.718,00	49.033.606.513,00	-40,06
DAK Non Fisik - LO	75.602.917.617,00	66.429.894.535,00	13,81
Jumlah	564.069.897.464,00	615.690.443.449,00	-8,38

6.4.1.1.2.1 Penerimaan Bagi Hasil Pajak – LO terdiri dari:

Penerimaan bagi hasil pajak – LO merupakan bagi hasil pajak pusat, terealisasi sebesar Rp24.160.712.490,00 atau mengalami peningkatan sebesar 7,11% bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp22.557.670.368,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak – LO dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 148 Realisasi Penerimaan bagi Hasil pajak-LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Penerimaan Bagi Hasil Pajak :			
Bagi Hasil dari PBB sektor Pertambangan	0,00	105.057.042,00	-100,00
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29	14.076.001.161,00	10.971.870.970,00	28,29
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.583.329.566,00	6.952.472.039,00	-5,31
Bagi Hasil dari PBB	3.501.381.763,00	4.528.270.317,00	-22,68
Jumlah	24.160.712.490,00	22.557.670.368,00	7,11

6.4.1.1.2.1.2 Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA – LO

Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LO terealisasi sebesar Rp1.908.985.632,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,48% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1.562.760.639,00. Realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LO terdiri dari :



**Tabel 6. 149 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA – LO
 Tahun 2020 dan 2019**

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO :			
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	544.954,00	0,00	#DIV/0!
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	186.534.350,00	140.696.400,00	32,58
Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan	788.276.289,00	590.155.800,00	33,57
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	56.090.685,00	95.052.100,00	-40,99
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	11.661.706,00	419.934.900,00	-97,22
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	38.123.288,00	29.773.800,00	28,04
Bagi Hasil dari SDA Kehutanan/IIUPH	158.110.022,00	0,00	100,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan/PSDH	-9.607.000,00	56.505.816,00	-117,00
Bagi Hasil SDA Perikanan/Pungutan Perus. Perikanan	225.622.861,00	174.305.192,00	29,44
Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Minerba/Royalti	-776.759,00	585.298,00	-232,71
Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Migas/SDA Minyak Bumi	776.150.964,00	53.183.158,00	1.359,39
Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Migas/SDA Gas Bumi	-692.347.145,00	255.362.209,00	-371,12
Bagi Hasil dari SDA Panas Bumi/Iuran Tetap dan Iuran Produksi	24.376.424,00	11.628.360,00	109,63
JUMLAH	1.562.760.639,00	1.827.183.033,00	-14,47

6.4.1.1.2.1.3 Penerimaan DAU – LO

Penerimaan DAU – LO tahun 2020 adalah sebesar Rp433.354.907.000,00 atau turun 8,93% dibanding realisasi tahun 2019 sebesar Rp475.842.089.000,00.

6.4.1.1.2.1.4 Penerimaan DAK Fisik – LO

Sama dengan DAU, tidak terdapat perbedaan penerimaan DAK Fisik – LO dengan penerimaan DAK Fisik – LRA. Adapun Penerimaan DAK – LO adalah sebesar Rp29.388.599.718,00 atau mengalami penurunan sebesar 29,64% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp41.768.518.285,00. Realisasi Penerimaan DAK-LO dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 150 Realisasi Penerimaan DAK– LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah		Naik/Turun (%)
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Penerimaan DAK - LO :			
DAK Bid.Pendidikan	6.536.609.000,00	7.388.796.000,00	-11,53
DAK Bid.Kesehatan	18.466.942.711,00	14.558.643.610,00	26,85
DAK Bid.Lingkungan Hidup	0,00	832.500.000,00	-100,00
DAK Bid.KB dan Kel. Sejahtera	0,00	2.428.392.400,00	-100,00
DAK Bid.Pertanian	0,00	1.513.879.312,00	-100,00
DAK Bid.Infrastruktur Air Minum	0,00	2.178.261.000,00	-100,00
DAK Bid.Infrastruktur Sanitasi	0,00	1.369.400.000,00	-100,00
DAK Bid. Infrastruktur Jalan	0,00	12.694.618.400,00	-100,00
DAK Bid Perumahan	2.455.125.000,00	3.220.394.000,00	-23,76
DAK Bid. Perdagangan	0,00	1.473.436.791,00	-100,00
DAK-Bid Pariwisata	1.929.923.007,00	1.375.285.000,00	40,33
Jumlah	29.388.599.718,00	41.768.518.285,00	-29,64



6.4.1.1.2.1.5 Penerimaan DAK Non Fisik – LO

Pendapatan DAK Non Fisik – LO tahun 2020 adalah sebesar Rp75.602.917.617,00 atau mengalami peningkatan sebesar 13,81% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp66.429.894.535,00. Penerimaan DAK Non Fisik – LO terdiri dari :

Tabel 6. 151 Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik – LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah 2020	Jumlah 2019
Dana Alokasi Khusus Non Fisik :		
BOK	15.493.569.637,00	8.801.822.929,00
BOP PAUD	6.542.737.346,00	6.445.567.573,00
TPG	47.709.286.000,00	47.276.119.900,00
Tambahan Penghasilan Guru PNS	253.950.000,00	0,00
Administrasi kependudukan	887.061.459,00	872.658.155,00
BOKB	1.102.178.796,00	868.425.978,00
BOP Pendidikan kesetaraan	2.120.300.000,00	1.185.300.000,00
BOP Museum	667.047.500,00	600.000.000,00
Peningkatan kapasitas Koperasi	482.736.879,00	380.000.000,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	0,00
Jumlah	75.602.917.617,00	66.429.894.535,00

6.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya - LO merupakan pendapatan dana insentif daerah (DID). Penerimaan DID pada tahun 2020 adalah sebesar Rp58.355.913.000,00 atau meningkat sebesar 75,45% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp33.260.942.000,00.

6.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya- LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp69.202.941.100,00 atau turun sebesar 11,46 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp78.159.164.010,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6. 152 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah 2020	Jumlah 2019
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
PKB	19.839.970.258,00	23.093.113.024,00
BBNKB	7.157.493.869,00	12.759.436.158,00
PBBKB	14.825.498.520,00	19.732.386.656,00
Pajak Air Permukaan	3.850.824,00	3.695.504,00
Pajak Rokok	27.376.127.629,00	22.570.532.668,00
Jumlah	69.202.941.100,00	78.159.164.010,00

6.4.1.1.2.4 Bantuan Keuangan – LO

Penerimaan bantuan keuangan – LO adalah sebesar Rp11.794.000.000,00 atau turun sebesar 38,37% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp19.136.152.045,00. Adapun perincian bantuan keuangan – LO adalah sebagai berikut :



Tabel 6. 153 Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Bantuan Keuangan - LO :			
TMMD	612.000.000,00	675.000.000,00	-9,33
Sarpras Daerah	9.000.000.000,00	15.841.152.045,00	-43,19
Bantuan Pendidikan	2.182.000.000,00	2.085.000.000,00	4,65
SIPD	0,00	535.000.000,00	0,00
Jumlah	11.794.000.000,00	19.136.152.045,00	-38,37

6.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2020 merupakan pendapatan hibah yaitu sebesar Rp57.278.677.903,30 atau mengalami kenaikan sebesar 72,25% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp33.087.278.899,40. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 154 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Hibah dari Pemerintah	9.602.049.800,00	6.050.194.221,00	58,71
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	24.660.496.503,30	4.740.022.089,40	87,74
Hibah dari Badan /Lembaga / Organisasi Swasta	299.750.000,00	39.385.000,00	661,08
Pendapatan Hibah dari kel masy /perorangan	266.936.200,00	0,00	100,00
Pendapatan hibah BOS	22.449.445.400,00	22.257.677.589,00	0,86
Jumlah	57.278.677.903,30	33.087.278.899,40	73,11

6.4.1.2 Beban – LO

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebesar Rp962.337.342.440,42 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 155 Beban – LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Beban - LO :			
Beban Operasi - LO	962.337.342.440,42	883.235.585.008,92	8,96
Beban Transfer - LO	0,00	721.513.000,00	-100,00
Jumlah	962.337.342.440,42	883.957.098.008,92	8,87

Rincian tentang beban – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :



6.4.1.2.1 Beban Operasi – LO

Beban Operasi – LO tahun 2020 adalah sebesar Rp962.337.342.440,42 atau mengalami kenaikan sebesar 8,96% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp883.235.585.008,92, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 156 Beban Operasi – LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Beban Operasi - LO :			
Beban Pegawai	371.113.554.600,92	372.550.705.965,00	-0,39
Beban Barang dan Jasa	349.411.431.358,19	364.672.033.357,97	-4,18
Beban Bunga	0,00	6.803.500,00	0,00
Beban Hibah	41.505.852.550,00	29.310.400.000,00	41,61
Beban Bantuan Sosial	36.916.624.370,00	11.920.375.000,00	209,69
Beban Amortisasi dan Penyusutan	158.986.195.582,97	103.276.506.692,86	53,94
Beban Penyesuaian Piutang	4.396.325.028,96	1.498.760.305,90	193,33
Beban Lain-lain	7.358.949,38	187,19	0,00
Jumlah	962.337.342.440,42	883.235.585.008,92	8,96

Rincian lebih lanjut tentang beban operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai – LO terealisasi sebesar Rp371.113.554.600,92 atau mengalami penurunan sebesar 0,39% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp372.550.705.965,00. Rincian beban pegawai-LO sebagai berikut :

Tabel 6. 157 Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Beban Pegawai - LO :			
Gaji dan Tunjangan	261.947.478.729,00	264.884.354.193,00	-1,11
Tambahan Penghasilan PNS	44.479.785.736,00	45.501.492.539,00	-2,25
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.114.900.000,00	4.519.500.000,00	13,17
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	776.855.960,00	3.782.712.700,00	-79,46
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	542.210.171,00	596.245.370,00	-9,06
Uang Lembur	91.878.142,00	228.630.764,00	-59,81
Beban Pegawai dana BLUD	57.144.841.262,92	52.423.315.399,00	9,01
Beban Pegawai dana BOS	1.015.604.600,00	614.455.000,00	65,29
Jumlah	371.113.554.600,92	372.550.705.965,00	-0,39

Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa – LO tahun 2020 adalah sebesar Rp 349.411.431.358,19 atau mengalami penurunan sebesar 4,18% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp364.672.033.357,97 yang terdiri dari :



Tabel 6. 158 Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Beban Barang dan Jasa - LO :			
Beban Persediaan	72.858.403.038,92	72.892.414.571,93	-0,05
Beban Pemeliharaan	8.999.217.987,00	12.494.978.093,00	-27,98
Beban Perjalanan Dinas	23.701.265.071,00	28.731.743.848,00	-17,51
Beban Jasa	243.852.545.261,27	250.552.896.845,04	-2,67
Jumlah	349.411.431.358,19	364.672.033.357,97	-4,18

6.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

Beban persediaan tahun 2020 adalah sebesar Rp 72.858.403.038,92 atau mengalami kenaikan sebesar 0,05% dari dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp72.892.414.571,93 yang terdiri dari:

Tabel 6. 159 Realisasi Persediaan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Beban Persediaan :			
Barang Pakai Habis - Bahan	7.678.455.012,02	0,00	100,00
Barang Pakai Habis - Suku Cadang	111.227.695,00	0,00	100,00
Barang Pakai Habis - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	15.132.569.244,28	0,00	100,00
Barang Pakai Habis - Obat-Obatan	43.526.506.082,33	0,00	100,00
Barang Pakai Habis - Untuk Dijual/Diserahkan	51.036.925,00	0,00	100,00
Barang Pakai Habis - Natura Dan	5.936.881.471,29	0,00	100,00
Barang Pakai Habis - Penelitian	337.428.609,00	0,00	100,00
Barang Tak Habis Pakai - Pipa	84.298.000,00	0,00	100,00
Persediaan Pakai Habis	0,00	34.247.584.078,24	-100,00
Persediaan Bahan/ Material	0,00	38.644.830.493,69	-100,00
Jumlah	72.858.403.038,92	72.892.414.571,93	-0,05

Tabel 6. 160 Rincian Beban Persediaan Tahun 2020

URAIAN	BEBAN PERSEDIAAN
Bahan	7.678.455.012,02
Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.992.293.235,90
Bahan Kimia	99.027.929,06
Bahan Bakar Dan Pelumas	589.993.854,06
Bahan Baku	165.947.293,00
Bahan/Bibit Tanaman	755.105.400,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	21.245.000,00
Isi Tabung Gas	17.555.800,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	37.286.500,00
Suku Cadang	111.227.695,00
Suku Cadang Alat Angkutan	5.439.000,00
Suku Cadang Alat Pertanian	98.703.695,00
Suku Cadang Lainnya	7.085.000,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



URAIAN	BEBAN PERSEDIAAN
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	15.132.569.244,28
Alat Tulis Kantor	1.943.282.848,87
Kertas Dan Cover	1.388.167.632,00
Bahan Cetak	1.013.447.304,00
Benda Pos	245.574.500,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.510.728.628,00
Bahan Komputer	380.707.000,00
Perabot Kantor	2.802.725.286,51
Alat Listrik	1.256.478.812,88
Perlengkapan Dinas	5.150.000,00
Perlengkapan Pendukung Olah Raga	343.918.949,00
Suvenir/Cendera Mata	274.259.600,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.968.128.683,02
Obat-obatan	43.526.506.082,33
Obat	16.706.262.963,33
Obat-Obatan Lainnya	26.820.243.119,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	51.036.925,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	51.036.925,00
Natura Dan Pakan	5.936.881.471,29
Natura	5.776.519.471,29
Pakan	155.612.000,00
Natura Dan Pakan Lainnya	4.750.000,00
Persediaan Penelitian	337.428.609,00
Persediaan Penelitian Lainnya	337.428.609,00
Pipa	84.298.000,00
Pipa Plastik Pvc (Upvc)	84.298.000,00
JUMLAH	72.858.403.038,92

6.4.1.2.1.3 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan tahun 2020 adalah sebesar Rp8.999.217.987,00 atau mengalami penurunan sebesar 27,98% dari dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp12.494.978.093,00 yang terdiri dari:



Tabel 6. 161 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Pemeliharaan :			
Gedung dan Bangunan	2.314.541.034,00	3.919.112.817,00	-40,94
Jalan	1.113.271.050,00	705.131.763,00	57,88
Jembatan	519.808.406,00	62.190.185,00	735,84
Alat-Alat Berat	104.843.700,00	114.936.400,00	-8,78
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	21.732.000,00	60.624.500,00	-64,15
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	18.042.000,00	9.910.000,00	82,06
Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	54.662.000,00	100.538.500,00	-45,63
Alat-alat Bengkel	17.521.000,00	48.206.400,00	-63,65
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3.900.000,00	0,00	100,00
Peralatan Kantor	427.824.379,00	378.785.571,00	12,95
Perlengkapan Kantor	621.663.000,00	641.936.325,00	-3,16
Komputer	638.186.200,00	755.779.800,00	-15,56
Mebeulair	341.276.245,00	360.188.699,00	-5,25
Peralatan Dapur	19.985.000,00	33.515.600,00	-40,37
Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.899.250,00	27.872.980,00	-93,19
Alat-alat Studio	45.428.400,00	187.637.600,00	-75,79
Alat-alat Komunikasi	37.855.800,00	69.517.550,00	-45,54
Alat-alat Ukur	0,00	3.450.000,00	-100,00
Alat-alat Kedokteran	436.190.000,00	432.398.100,00	0,88
Alat-alat Laboratorium	23.999.415,00	30.427.389,00	-21,13
Sungai / Jaringan Air / Irigasi / Drainase	825.629.490,00	868.841.980,00	-4,97
Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	512.757.818,00	2.679.176.505,00	-80,86
Instalasi Listrik dan Telepon	309.059.000,00	291.012.800,00	6,20
Buku/Kepustakaan	525.000,00	93.602.129,00	-99,44
Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	6.780.000,00	10.242.000,00	-33,80
Hewan/Ternak dan Tanaman	0,00	12.879.000,00	-100,00
Bahu Jalan/Trotoir	97.892.300,00	249.923.700,00	-60,83
Instalasi Pengolahan	1.750.000,00	6.602.800,00	-73,50
Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan	71.146.000,00	51.514.000,00	38,11
Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor	69.581.500,00	46.868.000,00	48,46
Marka Jalan	193.358.000,00	197.472.000,00	-2,08
Sarana Prasarana Olah Raga	0,00	15.895.000,00	-100,00
Turap/Talud/Bronjong	135.325.500,00	13.495.000,00	902,78
Peralatan Pemilah / Pencacah Sampah	12.784.500,00	15.293.000,00	-16,40
Jumlah	8.999.217.987,00	12.494.978.093,00	-27,98

6.4.1.2.1.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas tahun 2020 adalah sebesar Rp23.701.265.071,00 atau mengalami penurunan sebesar 17,51% dari dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp28.731.743.848,00 yang terdiri dari:

Tabel 6. 162 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Beban Perjalanan Dinas :			
Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.035.250.000,00	36.072.500,00	2.769,91
Beban perjalanan dinas luar daerah	22.666.015.071,00	28.695.671.348,00	-21,01
Jumlah	23.701.265.071,00	28.731.743.848,00	-17,51

Terdapat selisih beban perjalanan dinas dengan belanja perjalanan dinas sebesar Rp136.500,00 karena ada reklas dari belanja persediaan ke perjalanan dinas sebesar Rp136.500,00 dan reklas dari BTT ke perjalanan dinas sebesar Rp17.750.000,00



6.4.1.2.1.5 Beban Jasa

Beban jasa tahun 2020 adalah sebesar Rp243.852.545.261,27 atau mengalami penurunan sebesar 4,17% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp250.552.896.845,04 yang terdiri dari:

Tabel 6. 163 Realisasi Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Beban Jasa :			
Belanja Jasa Kantor	125.394.331.731,00	131.970.879.378,00	-6,66
Beban Premi Asuransi	22.204.705.238,67	18.515.375.211,83	19,81
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	6.443.450.706,00	7.134.386.140,00	-10,26
Beban Cetak dan Penggandaan	1.987.007.439,00	4.705.290.499,00	-58,45
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.407.353.111,00	2.110.164.747,00	-35,93
Beban Sewa Sarana Mobilitas	114.110.000,00	953.606.900,00	-88,19
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.483.080.000,00	2.634.816.300,00	-61,42
Beban Makanan dan Minuman	17.666.832.400,00	24.983.575.624,00	-33,29
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	27.780.000,00	979.669.650,00	-97,68
Beban Pakaian Kerja	977.156.300,00	1.859.932.900,00	-49,40
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	166.890.000,00	629.323.500,00	-73,48
Beban Jasa Konsultasi	2.231.083.050,00	5.346.752.250,00	-56,91
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	62.680.000,00	103.820.000,00	-39,63
Beban kursus	390.280.100,00	936.858.350,00	-58,34
Honorarium PNS	13.221.876.994,00	16.752.136.500,00	-21,20
Honorarium Non PNS	7.260.522.658,00	6.464.991.400,00	12,31
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.362.500.000,00	1.632.475.000,00	194,65
Beban Barang dan Jasa Dana BLUD	8.564.924.634,56	9.497.813.128,21	-9,80
Beban Barang Dana BOS	14.297.109.565,00		100,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	12.640.492.124,04	2.907.915.767,00	253,96
Beban Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	4.289.397.123,00	6.649.987.459,00	-38,03
Beban Barang Inventaris Non kapitalisasi	503.482.087,00	3.783.126.141,00	-86,69
Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	155.500.000,00	0,00	100,00
Jumlah	243.852.545.261,27	250.552.896.845,04	-4,17

6.4.1.2.1.6 Beban Hibah – LO

Beban hibah tahun 2020 adalah sebesar Rp41.505.852.550,00 atau mengalami kenaikan sebesar 41,61% dari dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp29.310.400.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 6. 164 Realisasi Beban Hibah – LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun %
	Tahun 2020	Tahun 2019	
Beban Hibah - LO :			
Beban Hibah kepada Pemerintah	17.048.550.000,00	1.100.000.000,00	1.449,87
Beban Hibah kepada Masyarakat	5.255.701.550,00	0,00	100,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	10.335.800.000,00	28.210.400.000,00	-63,36
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga Kependidikan	8.112.600.000,00	0,00	100,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	753.201.000,00	0,00	100,00
Jumlah	41.505.852.550,00	29.310.400.000,00	41,61



6.4.1.2.1.7 Beban Bantuan Sosial – LO

Beban bantuan sosial LO tahun 2020 adalah sebesar Rp36.916.624.370,00 atau naik sebesar 209,69% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp11.920.375.000,00, yang terdiri dari :

Tabel 6. 165 Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	(%)
Beban Bantuan Sosial - LO :			
Bantuan sosial kepada Individu dan/atau keluarga	36.870.624.370,00	0,00	100,00
Bantuan sosial bidang pendidikan kepada Individu dan/atau keluarga	46.000.000,00	0,00	100,00
Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	6.174.000.000,00	-100,00
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	5.746.375.000,00	148,89
<i>Jumlah</i>	36.916.624.370,00	11.920.375.000,00	209,69

6.4.1.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 adalah sebesar Rp158.986.195.582,97 atau meningkat 53,84% dibanding tahun 2019 yaitu sebesar Rp103.276.506.692,86. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 ini terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp158.344.879.760,37 dan beban amortisasi sebesar Rp531.686.826,60.

Perincian beban penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 166 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	94.018.452.150,60	41.451.494.478,02	126,82
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	15.196.305.854,63	14.747.983.357,74	3,04
Beban Penyusutan Jalan	48.334.778.191,83	46.050.810.154,13	0,00
Beban amortisasi aset tidak berwujud	531.686.826,60	570.264.059,60	-6,76
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	644.094.419,31	455.954.643,37	41,26
Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	260.878.140,00	0,00	100,00
Jumlah	158.986.195.582,97	103.276.506.692,86	53,94

Terdapat selisih sebesar Rp13.531.539.176,49 antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun 2020 dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun 2020, karena ada koreksi akumulasi penyusutan atas mutasi tambah maupun mutasi kurang aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

- a) adanya koreksi tambah dari Akumulasi penyusutan sebesar Rp32.230.038.405,30 yang terdiri dari :
- 1) Koreksi tambah kapitalisasi penyusutan aset tetap Rp5.288.933.953,94
 - 2) Transfer Antar SKPD Rp26.941.104.451,36



- b) adanya Koreksi Kurang atas Akumulasi Penyusutan sebesar Rp45.761.577.581,79 yang terdiri dari :
- 1) Koreksi kurang kapitalisasi penyusutan aset tetap Rp2.362.081.683,01
 - 2) Penghapusan barang Inventaris Rp14.823.668.545,51
 - 3) Transfer antar SKPD Rp26.941.104.451,36
 - 4) Reklas atas Aset Tetap sebesar Rp458.941.656,00
 - 5) Beban penyusutan aset lain-lain Rp644.094.419,31
 - 6) Beban amortisasi Rp531.686.826,60

6.4.1.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tahun 2020 adalah sebesar Rp4.396.325.028,96 atau naik 193,33% dibanding tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.498.760.305,90. Beban penyisihan ini merupakan akumulasi dari beban penyisihan piutang pajak, beban penyisihan piutang retribusi, beban penyisihan lain-lain PAD yang sah dan beban penyisihan piutang lainnya.

6.4.1.2.1.10 Beban Lain-lain

Beban lain-lain tahun 2020 adalah sebesar Rp 7.358.949,38. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp187,19.

6.4.1.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Jumlah surplus kegiatan operasional adalah sebesar Rp75.614.507.087,29 yang merupakan hasil penghitungan dari pendapatan-LO sebesar Rp1.037.951.849.527,71 dikurangi beban – LO sebesar Rp 962.337.342.440,42.

6.4.1.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah defisit kegiatan non operasional adalah sebesar Rp 4.636.466.336,80, yang terdiri dari :

6.4.1.4.1 Penjualan aset non lancar

Penjualan aset non lancar sebesar Rp3.938.025.498,48, meningkat sebesar 5,92% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.717.878.692,61.

6.4.1.4.2 Defisit dari kegiatan non operasional lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp698.440.838,32. Defisit kegiatan non operasional tahun 2020 menurun 30,68,16% dibanding tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.970.603.524,47.

6.4.3 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa merupakan beban atas belanja tidak terduga untuk mengatasi bencana dan hal yang tidak berulang tahun 2020 sebesar Rp 131.916.951,59. Beban luar biasa tahun 2020 mengalami penurunan 81,94% dibanding tahun 2019 yaitu sebesar Rp730.438.928,00



5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Tabel 6. 167 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 Rp	Tahun 2019 Rp	Naik/Turun %
Aktivitas Operasi	134.971.475.380,39	199.092.795.785,61	-32,21
Aktivitas Investasi	-117.518.450.440,00	-191.923.960.213,00	-38,77
Aktivitas Pendanaan	-2.630.000,00	-4.741.750,00	0,00
Aktivitas Transitoris	340.000,00	-1.510.455,00	-122,51
Jumlah	17.450.734.940,39	7.162.583.367,61	143,64

Selama periode tahun 2020 terjadi surplus arus kas bersih sebesar Rp17.450.866.058,39, mengalami kenaikan sebesar 143,64% jika dibandingkan dengan arus kas bersih tahun 2019.

6.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 168 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 Rp	Tahun 2019 Rp	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	952.885.842.102,95	971.335.824.033,61	-1,90
Arus Kas Keluar	817.914.366.722,56	772.243.028.248,00	5,91
Arus Kas Bersih	134.971.475.380,39	199.092.795.785,61	-32,21

Realisasi arus kas bersih per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp134.971.606.498,39. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 32,21%. Kenaikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :



Tabel 6. 169 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019

Arus Masuk Kas	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Penerimaan Pajak Daerah	76.255.221.742,00	87.578.474.262,00	(12,93)
Penerimaan Retribusi Daerah	14.880.228.419,00	16.657.441.492,00	(10,67)
Penerimaan Hsl Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.821.083.050,00	6.101.173.105,00	(4,59)
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	132.641.849.637,95	102.151.706.347,61	29,85
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	27.182.869.066,00	17.751.480.700,00	53,13
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	1.780.895.008,00	1.275.750.200,00	39,60
Penerimaan DAU	433.354.907.000,00	475.842.089.000,00	(8,93)
Penerimaan DAK	104.991.517.335,00	115.463.501.048,00	(9,07)
Penerimaan Dana Penyesuaian	58.355.913.000,00	33.260.942.000,00	75,45
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	63.377.912.445,00	72.167.436.245,00	(12,18)
Penerimaan Hibah	22.449.445.400,00	23.949.677.589,00	(6,26)
Penerimaan Lainnya	11.794.000.000,00	19.136.152.045,00	(38,37)
Jumlah	952.885.842.102,95	971.335.824.033,61	(1,90)

Terjadi penurunan arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar 1,90% jika dibandingkan dengan arus masuk kas tahun 2019 sebesar Rp971.335.824.033,61.

Terdapat selisih antara arus kas masuk operasi dengan pendapatan daerah setelah dikurangi pendapatan penjualan aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp9.541.426,00. Selisih tersebut berasal dari Kas di bendahara penerimaan tahun 2019 yang disetor ke kasda pada tahun 2020 sebesar Rp10.805.000,00 dikurangi Kas di bendahara penerimaan tahun 2020 yang belum masuk ke kasda sebesar Rp 1.132.456,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, yang menyebutkan bahwa pendapatan LRA diakui ketika ada kas masuk ke kasda maupun dalam entitas akuntansi (bendahara penerimaan)

6.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp76.255.221.742,00 meningkat sebesar 12,93% dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp87.578.474.262,00.

Penerimaan pajak daerah tahun 2020 terdiri dari :

- Pajak Hotel, sebesar Rp4.964.375.637,00
- Pajak Restoran, sebesar Rp9.978.634.015,00
- Pajak Hiburan, sebesar Rp2.005.995.328,00
- Pajak Reklame, sebesar Rp1.718.062.911,00
- Pajak Penerangan Jalan, sebesar Rp21.101.750.935,00
- Pajak Parkir, sebesar Rp893.030.186,00
- Pajak Air Tanah, sebesar Rp2.999.527.177,00
- PBB P2, sebesar Rp13.942.245.025,00
- BPHTB, sebesar Rp18.651.600.528,00



6.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp14.880.228.419,00 turun sebesar 10,67% dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp16.657.441.492,00.

Penerimaan retribusi daerah tahun 2020 terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp149.922.500,00
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, sebesar Rp683.180.000,00
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar, Rp39.870.000,00
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebesar Rp1.061.652.000,00
- e. Retribusi Pelayanan Pasar, sebesar Rp2.298.607.328,00
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebesar Rp390.602.800,00
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, sebesar Rp36.345.000,00
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sebesar Rp49.174.500,00
- i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebesar Rp3.165.032.831,00
- j. Retribusi Tempat Pelelangan, sebesar Rp5.305.162.710,00
- k. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, sebesar Rp23.700.000,00
- l. Retribusi Rumah Potong Hewan, sebesar Rp74.411.000,00
- m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, sebesar Rp169.158.000,00
- n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebesar Rp1.378.331.350,00
- o. Retribusi Izin Trayek, sebesar Rp2.518.400,00
- p. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), sebesar Rp52.560.000,00

6.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 sebesar Rp5.821.083.050,00 turun sebesar 4,59% dibandingkan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 sebesar Rp6.101.173.105,00.

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah :

- a. PD. BPR Bank Pekalongan, sebesar Rp561.120.276,00
- b. PT. Bank Jateng, sebesar Rp4.597.516.188,00
- c. PD. BPR BKK Kota Pekalongan, sebesar Rp160.595.604,00
- d. PDAM Kota Pekalongan, sebesar Rp499.247.703,00
- e. PT. PRPP Jawa Tengah, sebesar Rp2.603.279,00

6.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2020 sebesar Rp132.641.849.637,95 meningkat sebesar 29,85% dibandingkan penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2019 sebesar Rp102.151.706.347,61

Penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2020 terdiri dari :

- a. Penerimaan Jasa Giro, sebesar Rp1.817.636.302,00
- b. Pendapatan Bunga, sebesar Rp6.643.278.580,00
- c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sebesar Rp3.435.000,00



- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, sebesar Rp295.977.462,00
- e. Pendapatan Denda Pajak, sebesar Rp354.312.137,00
- f. Pendapatan Denda Retribusi, sebesar Rp1.000.000,00
- g. Pendapatan dari Pengembalian, sebesar Rp395.461.213,00
- h. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, sebesar Rp2.036.123.119,00
- i. Pendapatan BLUD, sebesar Rp121.001.366.096,95
- j. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, sebesar Rp93.259.728,00

6.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2020 sebesar Rp27.182.869.066,00 naik sebesar 53,13% dibandingkan penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2019 sebesar Rp17.751.480.700,00.

Penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2020 terdiri dari :

- a. Bagi Hasil dari PBB, sebesar Rp3.334.666.350,00
- b. Bagi Hasil dari PPh, sebesar Rp17.293.842.578,00
- c. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebesar Rp6.554.360.138,00

6.5.1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2020 sebesar Rp1.780.895.008,00 naik sebesar 39,60% dibandingkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2019 sebesar Rp1.275.750.200,00.

Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2020 terdiri dari :

- a. Sumber Daya Hutan, sebesar Rp186.534.350,00
- b. Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan, sebesar Rp788.276.289,00
- c. Pertambangan Minyak Bumi, sebesar Rp56.090.685,00
- d. Pertambangan Gas Bumi, sebesar Rp11.661.706,00
- e. Pertambangan Panas Bumi, sebesar Rp38.123.288,00
- f. Pertambangan Mineral & Batubara, sebesar Rp511.153,00
- g. Pertambahan Minyak Bumi & Gas Bumi Rp699.697.537,00

6.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan dana alokasi umum tahun 2020 sebesar Rp433.354.907.000,00 turun sebesar 8,93% dibandingkan penerimaan dana alokasi umum tahun 2019 sebesar Rp475.842.089.000,00.

6.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan dana alokasi khusus tahun 2020 sebesar Rp104.991.517.335,00 turun sebesar 9,07% dibandingkan penerimaan dana alokasi khusus tahun 2019 sebesar Rp115.463.501.048,00.

Penerimaan dana alokasi khusus tahun 2020 terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), sebesar Rp29.388.599.718,00, terdiri dari :
 - 1. Dana Alokasi Khusus bidang Perumahan, sebesar Rp2.455.125.000,00
 - 2. Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata, sebesar Rp1.929.923.007,00
 - 3. DAK bidang Pendidikan SD/SLB, sebesar Rp4.905.350.000,00
 - 4. DAK Bidang Pendidikan SMP, sebesar Rp1.493.158.000,00



5. DAK Bidang Pendidikan PAUD, sebesar Rp138.101.000,00
6. DAK bidang Kesehatan sub bidang Pelayanan Dasar, sebesar Rp3.121.981.542,00
7. DAK bidang Kesehatan sub bidang Pelayanan Rujukan, sebesar Rp10.648.749.156,00
8. DAK bidang Kesehatan sub bidang Pelayanan Kefarmasian, sebesar Rp1.458.297.502,00
9. DAK bidang Kesehatan sub bidang Keluarga Berencana, sebesar Rp734.990.000,00
10. DAK Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penurunan Stunting (Penugasan), sebesar Rp322.725.000,00
11. DAK Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pengendalian Penyakit (Penugasan), sebesar Rp2.180.199.511,00
- b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), sebesar Rp75.602.917.617,00, terdiri dari :
 1. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD), sebesar Rp47.709.286.000,00
 2. Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD)), sebesar Rp253.950.000,00
 3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebesar Rp6.542.737.346,00
 4. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan, sebesar Rp482.736.879,00
 5. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, sebesar Rp887.061.459,00
 6. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), sebesar Rp1.102.178.796,00
 7. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), sebesar Rp15.493.569.637,00
 8. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, sebesar Rp2.120.300.000,00
 9. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum, sebesar Rp667.047.500,00
 10. Dana Pelayanan Kepariwisata, sebesar Rp344.050.000,00

6.5.1.1.9 Penerimaan Dana Penyesuaian

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan dana penyesuaian tahun 2020 sebesar Rp58.355.913.000,00 meningkat sebesar 75,45% dibandingkan penerimaan dana penyesuaian tahun 2019 sebesar Rp33.260.942.000,00

6.5.1.1.10 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan pendapatan bagi hasil pajak tahun 2020 sebesar Rp63.377.912.445,00 turun sebesar 12,18% dibandingkan penerimaan pendapatan bagi hasil pajak tahun 2019 sebesar Rp72.167.436.245,00.

Penerimaan pendapatan bagi hasil pajak tahun 2020 merupakan bagi hasil pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Bagi Hasil PKB, sebesar Rp17.730.566.441,00
- b. Bagi Hasil BBNKB, sebesar Rp6.013.245.666,00
- c. Bagi Hasil PBBKB, sebesar Rp12.254.753.070,00



- d. Bagi Hasil PAP, sebesar Rp3.219.639,00
- e. Bagi Hasil Pajak Rokok, sebesar Rp27.376.127.629,00

6.5.1.1.11 Penerimaan Hibah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan hibah tahun 2020 sebesar Rp22.449.445.400,00 turun sebesar 6,26% dibandingkan penerimaan hibah tahun 2019 sebesar Rp23.949.677.589,00. Penerimaan hibah tahun 2020 merupakan hibah dana BOS.

6.5.1.1.12 Penerimaan Lainnya

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan lainnya tahun 2020 sebesar Rp11.794.000.000,00 turun sebesar 38,37% dibandingkan penerimaan lainnya tahun 2019 sebesar Rp19.136.152.045,00.

Penerimaan lainnya tahun 2020 merupakan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- a. Bantuan TMMD, sebesar Rp612.000.000,00
- b. Bantuan Sarpras Daerah, sebesar Rp9.000.000.000,00
- c. Bantuan Pendidikan, sebesar Rp2.182.000.000,00

6.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 6. 170 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019

Arus Keluar Kas	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Pembayaran Pegawai	394.421.563.850,00	390.898.339.975,00	0,90
Pembayaran Barang dan Jasa	327.664.407.877,56	338.655.157.845,00	(3,25)
Pembayaran bunga	-	6.803.500,00	
Pembayaran Hibah	36.250.151.000,00	29.310.400.000,00	23,68
Pembayaran Bantuan Sosial	2.206.982.000,00	11.920.375.000,00	(81,49)
Pembayaran Bantuan Keuangan		721.513.000,00	(100,00)
Pembayaran Tak Terduga	57.371.261.995,00	730.438.928,00	7.754,35
Jumlah	817.914.366.722,56	772.243.028.248,00	5,91

Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 817.914.366.722,56 meningkat sebesar 5,91% jika dibandingkan dengan arus keluar kas tahun 2019 sebesar Rp772.243.028.248,00.

6.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran pegawai tahun 2020 sebesar Rp394.421.563.850,00 meningkat sebesar 0,90% dibandingkan pembayaran pegawai tahun 2019 sebesar Rp390.898.339.975,00

Pembayaran pegawai tahun 2020, terdiri dari :

- a. Gaji dan Tunjangan, sebesar Rp261.951.211.121,00
- b. Tambahan Penghasilan PNS, sebesar Rp 44.476.053.344,00



- c. Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp5.114.900.000,00
- d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah, sebesar Rp776.855.960,00
- e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, sebesar Rp542.210.171,00
- f. Uang Lembur, sebesar Rp91.878.142,00
- g. Honorarium PNS, sebesar Rp13.212.251.994,00
- h. Honorarium Non PNS, sebesar Rp7.260.522.658,00
- i. Honorarium Pengelolaan Dana BOS, sebesar Rp1.015.604.600,00
- j. Belanja Pegawai Dana BLUD, sebesar Rp59.980.075.860,00

6.5.1.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran barang tahun 2020 sebesar Rp327.664.407.877,56 turun sebesar 3,25% dibandingkan pembayaran barang tahun 2019 sebesar Rp338.655.157.845,00

Pembayaran barang tahun 2020 terdiri dari :

- a. Belanja Bahan Pakai Habis, sebesar Rp9.624.104.134,00
- b. Belanja Bahan/Material, sebesar Rp16.121.776.646,00
- c. Belanja Jasa Kantor, sebesar Rp197.405.007.531,56
- d. Belanja Premi Asuransi, sebesar Rp22.091.253.249,00
- e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, sebesar Rp6.553.200.253,00
- f. Belanja Cetak dan Penggandaan, sebesar Rp4.050.618.649,00
- g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, sebesar Rp1.351.943.111,00
- h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas, sebesar Rp112.610.000,00
- i. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, sebesar Rp1.016.434.000,00
- j. Belanja Makanan dan Minuman, sebesar Rp16.665.338.100,00
- k. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, sebesar Rp22.680.000,00
- l. Belanja Pakaian Kerja, sebesar Rp941.156.300,00
- m. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, sebesar Rp166.890.000,00
- n. Belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp23.683.378.571,00
- o. Belanja Pemeliharaan, sebesar Rp12.296.028.579,00
- p. Belanja Jasa Konsultansi, sebesar Rp2.288.367.450,00
- q. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, sebesar Rp5.185.448.390,00
- r. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, sebesar Rp146.680.000,00
- s. Belanja kursus, sebesar Rp390.280.100,00
- t. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, sebesar Rp4.726.006.000,00
- u. Belanja Inventaris Non Kapitalisasi, sebesar Rp207.375.344,00
- v. Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, sebesar Rp85.500.000,00
- w. Belanja Bantuan Sosial barang, sebesar Rp2.532.331.470,00

6.5.1.2.4 Pembayaran Hibah

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran hibah tahun 2020 sebesar Rp36.250.151.000,00 meningkat sebesar 23,68% dibandingkan pembayaran hibah tahun 2019 sebesar Rp29.310.400.000,00

Pembayaran hibah tahun 2020 terdiri dari :



- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah, sebesar Rp17.048.550.000,00
- b. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan, sebesar Rp10.335.800.000,00
- c. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga Kependidikan, sebesar Rp8.112.600.000,00
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebesar Rp753.201.000,00

6.5.1.2.5 Pembayaran Bantuan Sosial

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran bantuan sosial tahun 2020 sebesar Rp2.206.982.000,00 turun sebesar 81,49% dibandingkan pembayaran bantuan sosial tahun 2019 sebesar Rp11.920.375.000,00

Pembayaran bantuan sosial tahun 2020 digunakan untuk:

- a. Bansos kepada individu dan/atau keluarga, sebesar Rp2.160.982.000,00
- b. Bansos bidang Pendidikan kepada individu dan/atau keluarga, sebesar Rp46.000.000,00

6.5.1.2.6 Pembayaran Tak Terduga

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran tak terduga tahun 2020 sebesar Rp57.371.261.995,00 meningkat sebesar 7.754,35% dibandingkan pembayaran tak terduga tahun 2019 sebesar Rp730.438.928,00.

Pembayaran tak terduga tahun 2020 digunakan untuk:

- a. Penanganan Darurat Banjir, terealisasi sebesar Rp1.084.054.010,00
- b. Penanganan Banjir Rob, terealisasi sebesar Rp2.760.286.500,00
- c. Penanganan Bencana Cuaca Ekstrem, terealisasi sebesar Rp180.740.000,00
- d. Ganti Rugi Kerusakan Rumah Warga an. HARYADI S. akibat robohnya tower komunikasi Diskominfo, terealisasi sebesar Rp4.500.000,00
- e. Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Deviden PT. BPR Bank Pekalongan Tahun 2018, terealisasi sebesar Rp127.416.937,00
- f. Penanganan Pandemi Covid-19, terealisasi sebesar Rp26.935.023.345,00
- g. Penanganan Pandemi Covid-19 (DID Tambahan I), terealisasi sebesar Rp14.321.693.202,00
- h. Penanganan Pandemi Covid-19 (DID Tambahan II), terealisasi sebesar Rp12.074.510.001,00

6.5.1.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi selama tahun 2020 adalah defisit sebesar Rp191.923.960.213,00.

Rincian arus kas bersih dari aktivitas investasi dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 6. 171 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 Rp	Tahun 2019 Rp	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	13.925.643.513,00	2.579.412.592,00	439,88
Arus Kas Keluar	131.444.093.953,00	194.503.372.805,00	-32,42
Arus Kas Bersih	-117.518.450.440,00	-191.923.960.213,00	-38,77

Rincian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Rincian arus masuk kas dari aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. 172 Arus Kas dari Aktivitas Investasi berasal Penjualan Aset Tetap

Uraian	Tahun 2020 Rp	Tahun 2019 Rp	Naik/Turun %
Penjualan aset tetap	279.356.174,00	279.230.774,00	0,04
Pencairan dana cadangan	12.704.351.488,00	300.000.000,00	4.134,78
Penerimaan kembali investasi Pemda	941.935.851,00	2.000.181.818,00	-52,91
Arus Kas Masuk	13.925.643.513,00	2.579.412.592,00	439,88

6.5.2.1.1 Penjualan Aset Tetap

Realisasi arus masuk kas dari penjualan aset tetap tahun 2020 sebesar Rp279.356.174,00 naik sebesar 0,04% dibandingkan penjualan aset tetap tahun 2019 sebesar Rp279.230.774,00. Berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada tahun 2020 berupa penjualan peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan drum bekas dan penjualan hasil penebangan pohon.

6.5.2.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Realisasi arus masuk kas dari pencairan dana cadangan tahun 2020 sebesar Rp12.704.351.488,00 yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020.

6.5.2.1.3 Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan kembali investasi pemerintah daerah tahun 2020 sebesar Rp941.935.851,00 merupakan penerimaan kembali dana bergulir KKP dari BPR Bank Pekalongan.

6.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan pembelian aset tetap berupa Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :



Tabel 6. 173 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Perolehan Tanah	13.144.232.065,00	3.912.172.520,00	235,98
Perolehan Peralatan dan Mesin	26.584.477.482,00	35.449.652.521,00	-25,01
Perolehan Gedung dan Bangunan	36.371.747.391,00	70.221.428.115,00	-48,20
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.106.236.575,00	68.876.027.946,00	-27,25
Perolehan Aset Tetap Lainnya	645.610.440,00	3.299.732.177,00	-80,43
Perolehan Aset Lainnya	73.790.000,00	394.971.300,00	-81,32
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	4.607.388.226,00	-100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.518.000.000,00	7.742.000.000,00	-41,64
Jumlah	131.444.093.953,00	194.503.372.805,00	-32,42

Arus keluar kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 32,42% % jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp194.503.372.805,00.

6.5.2.2.1 Perolehan Tanah

Realisasi arus keluar kas dari perolehan tanah tahun 2020 sebesar Rp13.144.232.065,00 naik sebesar 235,98% dibandingkan perolehan tanah tahun 2019 sebesar Rp3.912.172.520,00.

Perolehan tanah tahun 2020, terdiri dari :

- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung, sebesar Rp316.151.680,00
- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung, sebesar Rp12.828.080.385,00

6.5.2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin

Realisasi arus keluar kas dari perolehan peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp26.584.477.482,00 naik sebesar 25,01% dibandingkan perolehan peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp35.449.652.521,00.

Perolehan peralatan dan mesin tahun 2020, terdiri dari :

- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat, sebesar Rp518.236.999,00
- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, sebesar Rp6.405.187.173,00
- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, sebesar Rp177.339.050,00
- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor, sebesar Rp96.700.000,00
- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin, sebesar Rp46.890.000,00
- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin, sebesar Rp69.677.000,00
- Belanja modal Pengadaan Alat Ukur, sebesar Rp47.047.032,00
- Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan, sebesar Rp428.156.000,00
- Belanja modal Pengadaan Alat Kantor, sebesar Rp1.514.852.800,00
- Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga, sebesar Rp1.536.265.975,00
- Belanja modal Pengadaan Komputer, sebesar Rp3.617.063.185,00
- Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat, sebesar Rp352.644.501,00



- m. Belanja modal Pengadaan Alat Studio, sebesar Rp539.865.389,00
- n. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi, sebesar Rp142.252.125,00
- o. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran, sebesar Rp6.556.985.329,00
- p. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan, sebesar Rp603.722.132,00
- q. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup, sebesar Rp42.930.000,00
- r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS, sebesar Rp3.084.316.481,00
- s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, sebesar Rp804.346.311,00

6.5.2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan

Realisasi arus keluar kas dari perolehan gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp36.371.747.391,00 turun sebesar 51,71% dibandingkan perolehan gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp70.221.428.115,00.

Perolehan gedung dan bangunan tahun 2020, terdiri dari :

- a. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, sebesar Rp33.596.176.594,00
- b. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, sebesar Rp93.000.000,00
- c. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu, sebesar Rp217.700.000,00
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS, sebesar Rp7.150.000,00
- e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, sebesar Rp2.460.521.217,00

6.5.2.2.4 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi arus keluar kas dari perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 sebesar Rp50.106.236.575,00 turun sebesar 27,25% dibandingkan perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2019 sebesar Rp68.876.027.946,00.

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 terdiri dari :

- a. Belanja modal Pengadaan Jalan, sebesar Rp 42.080.842.000,00
- b. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi, sebesar Rp 2.274.918.750,00
- c. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor, sebesar Rp 4.928.222.075,00
- d. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor, sebesar Rp 6.100.000,00
- e. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, sebesar Rp 438.350.000,00
- f. Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum, sebesar Rp 13.175.000,00
- g. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik, sebesar Rp 364.628.750,00

6.5.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Realisasi arus keluar kas dari perolehan aset tetap lainnya tahun 2020 sebesar Rp645.610.440,00 turun sebesar 81,32% dibandingkan perolehan aset tetap lainnya tahun 2019 sebesar Rp3.299.732.177,00.

Perolehan aset tetap lainnya tahun 2020 terdiri dari :

- a. Buku / Kepustakaan, sebesar Rp37.268.500,00
- b. Barang bercorak kesenian/Kebudayaan, sebesar Rp69.900.000,00
- c. Sarpras Olahraga, sebesar Rp128.260.000,00
- d. Aset tetap lainnya Dana BOS, sebesar Rp409.181.940,00
- e. Aset Tetap Lainnya Dana BLUD, sebesar Rp1.000.000,00



6.5.2.2.6 Perolehan Aset Lainnya

Realisasi arus keluar kas dari perolehan aset lainnya tahun 2020 sebesar Rp73.790.000,00 turun sebesar 81,32% dibandingkan perolehan aset lainnya tahun 2019 sebesar Rp394.971.300,00.

Perolehan aset lainnya tahun 2020 terdiri dari :

- a. software/aplikasi, sebesar Rp48.390.000,00
- b. alat musik, sebesar Rp25.400.000,00

6.5.2.2.7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Realisasi arus keluar kas dari penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2020 sebesar Rp4.518.000.000,00, terdiri dari :

- a. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp1.268.000.000,00
- b. Penyertaan modal kepada PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp2.250.000.000,00
- c. Penyertaan modal kepada PD.BPR Bank Pekalongan sebesar Rp400.000.000,00
- d. Penyertaan modal kepada PD.BKK Pekalongan Utara sebesar Rp400.000.000,00
- e. Penyertaan modal kepada PD.BPR BKK Pekalongan sebesar Rp200.000.000,00

6.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. 174 Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan
Tahun 2020 dan 2019**

Uraian	Tahun 2020 Rp	Tahun 2019 Rp	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	0,00	1.800.000.000,00	-100,00
Arus Kas Keluar	2.630.000,00	1.804.741.750,00	-99,85
Arus Kas Bersih	-2.630.000,00	-4.741.750,00	-44,54

6.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus masuk kas dari aktivitas pendanaan.

6.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan berasal dari pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:



Tabel 6. 175 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri		1.800.000.000,00	-100,00
Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya	2.630.000,00	4.741.750,00	-44,54
Jumlah	2.630.000,00	1.804.741.750,00	-99,85

Arus keluar kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 99,85% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.804.741.750,00.

6.5.3.2.1 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

Realisasi arus keluar kas dari Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya tahun 2020 merupakan pembayaran hutang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kepada Pihak Ketiga sebesar Rp2.630.000,00.

6.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang transitoris dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6. 176 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Arus Kas Masuk	61.026.210.308,11	57.835.705.918,00	5,52
Arus Kas Keluar	61.025.649.308,11	57.837.216.373,00	5,51
Arus Kas Bersih	561.000,00	-1.510.455,00	-137,14

6.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris berasal dari :

Tabel 6. 177 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Penerimaan PFK	61.026.210.308,11	57.835.705.918,00	5,52
Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu			-
Kiriman Uang Masuk			-
Jumlah	61.026.210.308,11	57.835.705.918,00	5,52

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan PFK yang terdiri dari potongan Iuran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerimaan Taperum serta penerimaan Askes dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD. Dana tersebut merupakan hak dan harus dibayarkan kepada pihak ketiga, bukan merupakan hak/pendapatan bagi



Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp61.026.210.308,11. Penerimaan PFK ini merupakan penerimaan pemotongan PFK yang melalui Bendahara Umum Daerah mengalami kenaikan 5,52% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp57.835.705.918,00.

6.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris berasal dari :

Tabel 6. 178 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas	Tahun 2019	Tahun 2019	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Pengeluaran PFK	61.025.649.308,11	57.837.216.373,00	5,51
Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu			-
Kiriman Uang Keluar			
Jumlah	61.025.649.308,11	57.837.216.373,00	5,51

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. Pengeluaran PFK terdiri dari pembayaran potongan Iuran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan Taperum serta penerimaan Askes dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD dengan nilai akumulasi sebesar Rp61.025.649.308,11 atau mengalami kenaikan 4,06% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 57.837.216.373,00.

6.5.5 Sisa Akhir Kas

Saldo akhir kas tahun 2020 adalah sebesar Rp 112.542.862.590,00 atau naik sebesar Rp17.441.283.396,39 dibanding saldo kas tahun 2019 yaitu sebesar Rp95.101.710.311,61. Rincian saldo akhir kas dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 6. 179 Saldo Akhir Kas Tahun 2020

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik/Turun %
	Rp	Rp	
Saldo Akhir Kas Di BUD	83.881.778.889,00	81.884.779.309,00	
Deposito	0,00	55.000.000.000,00	
Saldo di RKUD	83.881.778.889,00	26.884.779.309,00	
Saldo Kas Di Bendahara	1.001.338,00	10.805.000,00	
Saldo Akhir Kas di Bend. Pengeluaran	299.838,00	0,00	
Saldo Akhir Kas di Bend. Penerimaan	701.500,00	10.805.000,00	
Saldo Akhir di BLUD	27.132.720.550,00	10.899.968.384,61	148,92
RSUD Bendan	25.641.791.785,00	9.744.757.200,61	
Puskesmas	0,00	1.022.557.275,00	
BKPM	0,00	59.871.109,00	
BLUD Puskesmas Bendan	206.074.553,00	0,00	
BLUD Puskesmas Kramatsari	81.961.885,00	0,00	
BLUD Puskesmas Medono	64.309.794,00	0,00	
BLUD Puskesmas Tirta	101.807.617,00	0,00	
BLUD Puskesmas Klego	94.676.374,00	0,00	
BLUD Puskesmas Sokorejo	123.193.948,00	0,00	
BLUD Puskesmas Tondano	91.656.440,00	0,00	
BLUD Puskesmas Noyontaan	28.103.651,00	0,00	
BLUD Puskesmas Dukuh	149.114.772,00	0,00	
BLUD Puskesmas Krapyak Kidul	114.006.252,00	0,00	
BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	51.522.647,00	0,00	
BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	138.335.672,00	0,00	
BLUD Puskesmas Jenggot	89.982.309,00	0,00	
BLUD Puskesmas Buaran	155.268.506,00	0,00	
PSPJ	914.345,00	72.782.800,00	
Saldo Kas Lainnya (Saldo Dana BOS)	1.527.361.813,00	2.306.157.618,00	
Saldo Akhir Kas	112.542.862.590,00	95.101.710.311,61	18,34

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2020. Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.904.239.377.358,02, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. 180 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Uraian	Jumlah
Saldo Ekuitas 31 Des 2019	2.830.832.684.231,98
Surplus/Defisit LO	70.846.123.798,90
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2.560.569.327,14
Ekuitas 31 Desember 2020	2.904.239.377.358,02



6.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.830.832.684.231,98.

6.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus / (Defisit)-LO tahun 2020 adalah sebesar Rp70.846.123.798,90.

6.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp2.560.569.327,14.

Tabel 6. 181 Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

OPD	KOREKSI DANA BAGI HASIL	KOREKSI RETUR PEMBELIAN	KOREKSI DANA BERGULIR	KOREKSI PERSEDIAAN	INVENTARISASI ASET TETAP	KOREKSI ASET TETAP	PENYESUAIAN SA ASET TETAP	PENYESUAIAN SA AKUMULASI PENYUSUTAN
BAG. UMUM					2.207.604.000,00			
BKD					441.240.000,00	458.941.656,00		
BKP2D								
BLUD PUSK. BENDAN							323.846.574,00	-287.429.559,00
BLUD PUSK. DUKUH				600.000,00			196.739.194,00	-178.126.567,00
BLUD PUSK. JENGGOT							198.425.391,00	-169.721.236,00
BLUD PUSK. KLEGO							194.671.462,00	-174.976.598,00
BLUD PUSK. KRAMATSARI							162.246.112,00	-141.993.440,00
BLUD PUSK. KRAPYAK KIDUL							311.781.381,00	-260.501.765,00
BLUD PUSK. KUSUMA BANGSA							240.009.424,00	-221.866.443,00
BLUD PUSK. MEDONO							254.371.799,00	-226.282.429,00
BLUD PUSK. NOYONTAAN							231.226.220,00	-192.729.009,00
BLUD PUSK. PEKALONGAN SELATAN							376.505.332,00	-330.067.329,00
BLUD PUSK. SOKOREJO							226.315.216,00	-207.550.567,00
BLUD PUSK. TIRTO				600.000,00			186.243.527,00	-171.594.144,00
BLUD PUSK. TONDANO							170.102.381,00	-152.598.651,00
BPBD						28.271.400,00		
DINARPUS								
DINDAGKOP			20.389.000,00					
DINDIK								
DINKES							-372.702.333,00	
DINPARBUDPORA								
DINPERINAKER								
DINPERKIM					629.548.802,00	-206.996.540,00		
DINPERPA								
DISHUB						786.409.457,00		
DPMTSP						0,07		
DPUPR								
KEC BARAT								-10.231.400,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



OPD	KOREKSI DANA BAGI HASIL	KOREKSI RETUR PEMBELIAN	KOREKSI DANA BERGULIR	KOREKSI PERSEDIAAN	INVENTARISASI ASET TETAP	KOREKSI ASET TETAP	PENYESUAIAN SA ASET TETAP	PENYESUAIAN SA AKUMULASI PENYUSUTAN
PKK								
PPKD	-1.903.606,00							
RSUD BENDAN		1.001.000,00						
SATPOL PP						14.285.720,00		
KEL. SOKODUWET						-389.147.460,00		
KEL. JENGGOT								
KEL. KALIBAROS								
KEL. BANYURIP								
BLUD PUSKESMAS BUARAN							277.223.521,00	-254.193.589,00
KEL. BUARAN KRADENAN						10.409.313,00		
DINSOS					37.512.696,00			
JUMLAH	-1.903.606,00	1.001.000,00	20.389.000,00	1.200.000,00	3.315.905.498,00	702.173.546,07	2.977.005.201,00	-2.979.862.726,00

OPD	KOREKSI AK. PENYUSUTAN	AKUMULASI AMORTISASI	KOREKSI PIUTANG	KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	KOREKSI SA PIUTANG	PENYESUAIAN SA PENYISIHAN PIUTANG	KOREKSI UTANG	JUMLAH
BAG. UMUM								2.207.604.000,00
BKD	-463.541.656,00	-19.520.000,00	-700.910.907,00	700.910.907,00				417.120.000,00
BKP2D	-3.600.000,00							-3.600.000,00
BLUD PUSK. BENDAN			-235.000,00	631.667,41	45.910.000,00	-229.550,00		82.494.132,41
BLUD PUSK. DUKUH			185.000,00	38.050,00	3.125.000,00			22.560.677,00
BLUD PUSK. JENGGOT			-15.000,00	22.175,00	1.455.000,00	-7.275,00		30.159.055,00
BLUD PUSK. KLEGO			58.000,00		815.000,00	-4.075,00		20.563.789,00
BLUD PUSK. KRAMATSARI			-250.000,00	39.400,00	2.650.000,00	-13.250,00		22.678.822,00
BLUD PUSK. KRAPYAK KIDUL			100.000,00	12.250,00	1.000.000,00	-5.000,00		52.386.866,00
BLUD PUSK. KUSUMA BANGSA			-1.350.000,00	677.925,00	46.930.000,00	-234.650,00		64.166.256,00
BLUD PUSK. MEDONO			400.000,00	10.950,00	580.000,00	-2.900,00		29.077.420,00
BLUD PUSK. NOYONTAAN				11.900,00	615.000,00	-3.075,00		39.121.036,00
BLUD PUSK. PEKALONGAN SELATAN			-3.195.000,00	379.825,00	30.515.000,00	-152.575,00		73.985.253,00
BLUD PUSK. SOKOREJO			-1.500.000,00	503.773,59	19.960.000,00	-99.800,00		37.628.622,59
BLUD PUSK. TIRTO				10.325,00	795.000,00	-3.975,00		16.050.733,00
BLUD PUSK. TONDANO				7.675,00	295.000,00	-1.475,00		17.804.930,00
BPBD								28.271.400,00
DINARPUS	-2.743.500,00							-2.743.500,00
DINDAGKOP								20.389.000,00
DINDIK	-1.089.956.581,87							-1.089.956.581,87
DINKES						-36.725,00		-372.739.058,00
DINPARBUDPORA	-86.138.200,00							-86.138.200,00
DINPERINAKER	0,01							0,01
DINPERKIM								422.552.262,00
DINPERPA								-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



OPD	KOREKSI AK. PENYUSUTAN	AKUMULASI AMORTISASI	KOREKSI PIUTANG	KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	KOREKSI SA PIUTANG	PENYESUAIAN SA PENYISIHAN PIUTANG	KOREKSI UTANG	JUMLAH
DISHUB								786.409.457,00
DPMPTSP	-0,07							-
DPUPR								-
KEC BARAT								-10.231.400,00
PKK	71.116.031,00							71.116.031,00
PPKD			-254.091.166,85	246.201.460,85				-9.793.312,00
RSUD BENDAN			-20.116.657,00				-2.677.482,00	-21.793.139,00
SATPOL PP	-2.000.000,00							12.285.720,00
KEL. SOKODUWET								-389.147.460,00
KEL. JENGGOT	-80.000,00							-80.000,00
KEL. KALIBAROS	-25.000,00							-25.000,00
KEL. BANYURIP	-90.000,00							-90.000,00
BLUD PUSKESMAS BUARAN			-50.000,00	12.450,00	1.575.000,00	-7.875,00		24.559.507,00
KEL. BUARAN KRADENAN								10.409.313,00
DINSOS								37.512.696,00
JUMLAH	-1.577.058.906,93	-19.520.000,00	-980.970.730,85	949.470.733,85	156.220.000,00	-802.200,00	-2.677.482,00	2.560.569.327,14

BAB VII

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

1. Keadaan Umum

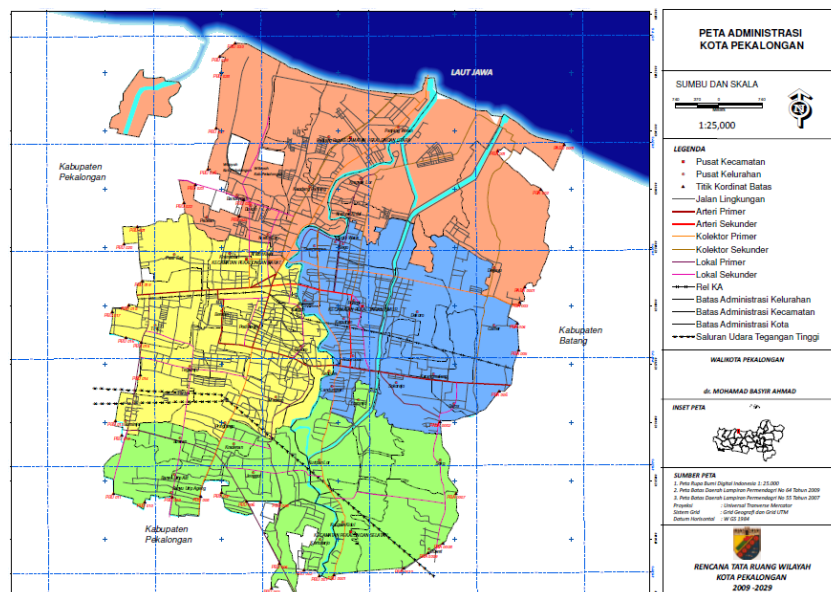
a. Dasar Pembentukan

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Pekalongan ditetapkan sebagai salah satu Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan yang semula Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.

b. Letak Geografis

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60 50" 42"-60 55" 44" Lintang Selatan dan 1090 37" 55" - 1090 42" 19" Bujur Timur. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Peta administrasi Kota Pekalongan sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 7. 1 Peta Administratif Kota Pekalongan



Batas administratif Kota Pekalongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Tabel 7. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	%
Kec. Pekalongan Barat	7	10,05	22,21
Kec. Pekalongan Timur	7	9,52	21,04
Kec. Pekalongan Utara	7	14,88	32,88
Kec. Pekalongan Selatan	6	10,80	23,87
JUMLAH	27	45,25	100,00

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan $\pm$ 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur $\pm$ 7 Km. Secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Utara. Wilayah terluas Kota Pekalongan adalah Kecamatan Pekalongan Utara dengan luas sebesar 14,88 km² atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

Tabel 7. 2 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas (%)
1	Pekalongan Barat	10,50	22
2	Pekalongan Timur	9,52	21
3	Pekalongan Selatan	10,80	24
4	Pekalongan Utara	14,88	33
	Total	45,25	100

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan proyeksi BPS jumlah penduduk Kota Pekalongan pada Tahun 2020 sebanyak 307.150 jiwa, terdiri dari 155.145 jiwa laki-laki dan 152.005 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima Tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 102,07 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102,07 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut.

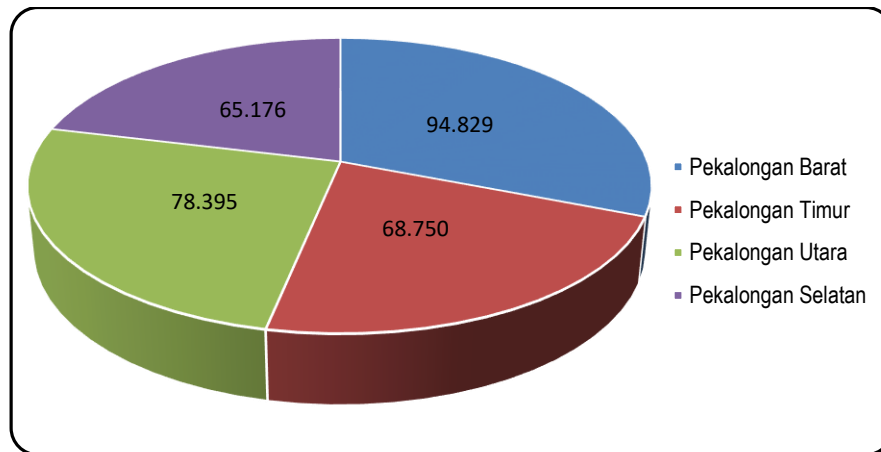


Tabel 7. 3 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2016	149.623	149.599	299.222
2017	150.887	150.983	301.870
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.518	153.579	307.097
2020	155.145	152.005	307.150

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan penyebarannya, pada Tahun 2020 jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 94.829 jiwa, sedangkan di Kecamatan Pekalongan Utara sejumlah 78.395 jiwa, di Kecamatan Pekalongan Timur sejumlah 68.750 jiwa dan di Kecamatan Pekalongan Selatan sejumlah 65.176 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. 2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Berdasarkan Kecamatan (Jiwa)
sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan sepanjang Tahun 2016-2020 dalam kisaran 0,85% sampai 0,96%. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,96%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 0,85%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan selama lima Tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 7. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2016	0,95
2017	0,94
2018	0,96
2019	0,86
2020	0,85

sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021



Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, Tahun 2016 sebesar 6.613 jiwa/km², Tahun 2020 meningkat menjadi 6.788 jiwa/km². Rasio ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan tahun 2020 adalah 41,25 persen, lebih kecil dari Tahun 2019 yang mencapai 42,37 persen. Berikut disajikan tabel kepadatan penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.

Tabel 7. 5 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)
2016	6.613	42,88
2017	6.672	42,64
2018	6.729	42,48
2019	6.787	42,37
2020	6.788	41,25

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021

d. Kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.8484 Tahun 2017, **H. M. Saelany Machfudz, SE**, ditetapkan sebagai Walikota Pekalongan masa jabatan 2016-2021 menggantikan **H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE** yang meninggal dunia pada tanggal 7 September 2017. Sedangkan **H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33-986 Tahun 2020 ditetapkan sebagai Wakil Walikota Pekalongan yang kosong sejak tahun 2017. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2021 Walikota Pekalongan dijabat oleh **H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE** dan Wakil Walikota Pekalongan dijabat oleh **H. Salahudin, STP**. Sedangkan Sekretaris Daerah dijabat oleh **Sri Ruminingsih, SE,M.Si**.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah (3 Asisten dan 9 Bagian);
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Staf Ahli;
- 4) Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Inspektorat;
 - b) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - c) Badan Keuangan Daerah;
 - d) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - e) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f) RSUD;
- 5) Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 - g) Dinas Pendidikan;
 - h) Dinas Kesehatan;
 - i) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



- j) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- m) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n) Dinas Pertanian dan Pangan;
- o) Dinas Lingkungan Hidup;
- p) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q) Dinas Perhubungan;
- r) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- v) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- w) Dinas Kelatan dan Perikanan;
- 6) Kecamatan, terdiri dari :
 - a) Kecamatan Pekalongan Barat;
 - b) Kecamatan Pekalongan Timur;
 - c) Kecamatan Pekalongan Utara;
 - d) Kecamatan Pekalongan Selatan.
- 7) Lembaga lain, yang terdiri dari :
 - a) Satpol PP;
 - b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Anggota DPRD Kota Pekalongan periode 2019-2024 sebanyak 35 orang, merupakan hasil pemilu tahun 2020 telah dilantik dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 14 Agustus 2019. Adapun nama-nama dan partai dari anggota DPRD tersebut sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. 6 Daftar Anggota DPRD Kota Pekalongan Periode 2020 - 2024

No	Anggota Dewan	Partai
1	NUSRON, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ROBIKIN	Partai Kebangkitan Bangsa
3	dr. H. DWI HERI WIBAWA, M.Kes	Partai Golongan Karya
4	H. BUDI SETIAWAN, SE	Partai Golongan Karya
5	ANYTA RIANTI	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	H. ISMET INONU, SH, M.H	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	Ir. H. SAPRUDIN, MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	MOFID, SH	Partai Golongan Karya
9	H. FAISOL KHANNAN, S.H.I	Partai Golongan Karya
10	NASHRULLAH	Partai Keadilan Sejahtera
11	ABDUL ROZAK, S.IP	Partai Persatuan Pembangunan
12	H.M. BAGUS RIZA ASTIAN, S.Sos	Partai Amanat Nasional
13	IDI AMIN	Partai Kebangkitan Bangsa
14	RIANA SETYAWATI, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya
15	EDY SUPRIYANTO	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
16	MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc	Partai Golongan Karya
17	ISNAINI RUHULLAH KUMAINI	Partai Nasional Demokrat
18	IRAWADI SETIAWAN	Partai Keadilan Sejahtera



No	Anggota Dewan	Partai
19	MUKHLIKIN	Partai Persatuan Pembangunan
20	H. MAKMUR SOFYAN MUSTOFA, S.Pd	Partai Amanat Nasional
21	MOCHAMMAD SUFI AKBAR	Partai Kebangkitan Bangsa
22	DRS. HM. FATONI, MH	Partai Kebangkitan Bangsa
23	ABDUL GHOFUR	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
24	FAUZI UMAR LAHJI, SE	Partai Golongan Karya
25	DESY TRIA AMIRA FASA, A.Md	Partai Golongan Karya
26	MUNGZILIN, SH.I	Partai Keadilan Sejahtera
27	H. MABRUR, SH	Partai Persatuan Pembangunan
28	H.M.BOWO LEKSONO, Ah.T, SH, MM, MH	Partai Hati Nurani Rakyat
29	MUHAMMAD LATIFUDDIN	SSKDN
30	JECKY ZAM ZAMI	Partai Kebangkitan Bangsa
31	GUMELAR	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
32	HJ. BALGIS DIAB, SE, MM	Partai Golongan Karya
33	H.AMINUDDIN AZIZ, SE	Partai Golongan Karya
34	DRS.NUR HADI	Partai Persatuan Pembangunan
35	H.M.RIZQON, S.IP	Partai Amanat Nasional

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

Untuk pimpinan DPRD telah ditetapkan dalam rapat paripurna Peresmian, Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan Masa Jabatan 2020-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019, terdiri dari :

- 1) Ketua DPRD : Hj. Balgis Diab, SE, MM
- 2) Wakil Ketua DPRD : Nusron, S.Ag dan Edy Supriyanto

Posisi Ketua DPRD menjadi kosong dengan pengunduran diri Hj. Balgis Diab, SE, MM per 24 Agustus 2020 karena mencalonkan diri sebagai Walikota Pekalongan. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan tersebut Nusron, S.Ag diangkat sebagai Plt Ketua DPRD.

e. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki pegawai sebanyak 2.956 orang, yang terdiri dari PNS dan CPNS dengan rincian menurut golongan seperti tabel berikut:

Tabel 7. 7 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Golongan I	92	84	2,93	2,84
2	Golongan II	532	482	16,93	16,31
3	Golongan III	1.762	1703	56,08	57,61
4	Golongan IV	756	687	24,06	23,24
	Jumlah	3.142	2.956	100,00	100,00

Sumber : BKPPD per 31 Desember 2020



Jika dilihat dari tingkat pendidikan PNS/CPNS pada Pemerintah Kota Pekalongan, maka komposisi yang terbanyak adalah tingkat pendidikan S-1 yaitu sejumlah 1.647 orang dan yang paling sedikit adalah S-3 yaitu 3 orang, seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 8 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	SD	76	61	2,42	2,06
2	SLTP	109	100	3,47	3,38
3	SLTA	585	516	18,62	17,46
4	DIPLOMA I	9	6	0,29	0,20
5	DIPLOMA II	31	27	0,99	0,91
6	DIPLOMA III	358	359	11,39	12,14
7	DIPLOMA IV	38	42	1,21	1,42
8	S-1	1.734	1.647	55,19	55,72
9	S-2	199	195	6,33	6,60
10	S-3	3	3	0,09	0,10
	Jumlah	3.142	2.956	100,00	100,00

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan per 31 Desember 2020

Sedangkan jumlah PNS/CPNS yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tahun 2020, sebanyak 81 orang, yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7. 9 Rekapitulasi PNS/CPNS Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi

No	Tingkat Eselon	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTA	D1	D3	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	2	-	2
3	Eselon IV	-	-	7	19	2	28
4	Staf	14	-	19	25	2	60
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	14	-	26	46	4	90

Sumber: BKPPD Kota Pekalongan per 31 Desember 2020.

Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang terbanyak dari eselon IV.A yaitu sebanyak 271 orang atau 53,87%. Rincian jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.



Tabel 7. 10 Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2019 s/d 2020

No	Tingkat Eselon	Jumlah		Prosentase (%)	
		2019	2020	2019	2020
1	II.A	1	1	0,20	0,20
2	II.B	27	26	5,38	5,28
3	III.A	37	37	7,35	7,52
4	III.B	66	67	13,12	13,62
5	IV.A	271	276	53,87	56,10
6	IV.B	101	85	20,08	17,28
	Jumlah	503	492	100,00	100,00

Sumber: BKPPD Kota Pekalongan per 31 Desember 2020

2. Kerjasama Dengan Pihak Lain

Selama tahun 2020 Pemerintah Kota Pekalongan telah mengadakan kerjasama dengan pihak lain :

Tabel 7. 11 Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)

No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/ Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerjasama	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan - Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan	- Nomor : 474.1/0754 - Nomor : 415.4/0311.03/2020 - Tanggal : 01 Juli 2020	Penerbitan Akta Kelahiran baru, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk Kota Pekalongan yang lahir di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	Tanggal 01 Agustus 2020 s/d 01 Agustus 2022 (2 tahun)
2	Perjanjian Kerjasama	- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Pekalongan - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	- Nomor : 800/07583/2020 - Nomor : 800/0379.2 - Tanggal : 03 April 2020	Fasilitasi Pengembangan Manajemen Kepegawaian tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Tahun Anggaran 2020
3	Perjanjian Kerjasama	- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang	- Nomor : 006.1/501/X/2019 - Nomor : 006.1/474B/X/2019 - Nomor : 300/1160/2019	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama di wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang	Tanggal 18 September 2019 s/d 18 September 2022 (3 tahun)
4	Perjanjian Kerjasama	- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	- Nomor : 476/019 - Nomor : 476/0269 - Tanggal : 02 Januari 2020	Biaya penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau keluarga miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2020	Tanggal 02 Januari 2020 s/d 02 Januari 2021 (1 tahun)
5	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	- Nomor : 019.5/7960/5 - Nomor : 019.6/102/MoU/2020 - Tanggal : 27 Oktober 2020	Pelaksanaan pemeriksaan PCR Covid-19	Tanggal 27 Oktober 2020 s/d 27 April 2021
6	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan	- Nomor : 019.6/97/MoU/2020 - Nomor : 415.4/0003.09/2020 - Tanggal : 30 Desember 2019	Sistem rujukan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan	Tanggal 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 (3 tahun)
7	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - UPTD Pusat Kesehatan	- Nomor : 800/70/III/2020 - Nomor : 019.6/101/MoU/2020	Sistem rujukan pelayanan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Karangdadap Kabupaten Pekalongan ke Rumah	Tanggal 06 Januari 2020 /d 31 Desember 2021 (2 tahun)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/ Jangka Waktu
		Masyarakat Karangdada Kabupaten Pekalongan	Tanggal : 06 Januari 2020	Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	
8	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan	• Nomor : 445/01/1/2019 • Nomor : 019.6/10/MoU/2019	Sistem rujukan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan	
9	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang	• Nomor : 019.6/45/MoU/2019 • Nomor : HK.03.01/I.IV/661.3/2019	Pelayanan rujukan pasien	
10	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Siwalan Kabupaten Pekalongan	• Nomor : 800/192/IV/2019 • Nomor : 019.6/81/MoU/2019 Tanggal : 06 Januari 2020	Rujukan pasien	
11	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan	• Nomor : 044.1/169.3/XII/2019 • Nomor : 0415.4/0039.04/2019	Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesda	
12	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan	• Nomor : 415.4/0044.01/2020 Tanggal 27 Januari 2020	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, KB MOW pasca salin di Rumah Sakit	

Sumber: Bagian Pemerintahan, data diolah

Tabel 7. 12 Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerjasama	• Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan • Fakultas Hukum Universitas Pekalongan	• Nomor : 074/01/HKM/2020 • Nomor : 002/C.06.01/FH/I/2020 Tanggal : 02 Januari 2020	Penyusunan naskah akademik	Tanggal 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022
2	Perjanjian Kerjasama	• Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan • Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Pekalongan	• Nomor : 415.4/02/HKM/2020 • Nomor : 009/PKS/LBH-PKL/I/2020 Tanggal : 02 Januari 2020	Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin	Tanggal 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
3	Kesepakatan Bersama	• Dinas Pendidikan Kota Pekalongan • Universitas Muhammadiyah Surakarta	• Nomor : 800/1026.2 • Nomor : 521/C.211/BR/II/2020 Tanggal : 13 Juli 2020	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Bersubsidi Angkatan Kedua Tahun 2020	Tanggal 13 Juli 2020 s/d 13 Juli 2021
4	Kesepakatan Bersama	• Dinas Pendidikan Kota Pekalongan • Universitas Negeri Jakarta	• Nomor : 800/1126.1 • Nomor : B/10C/UN39/HM.01.00/2020 Tanggal : 27 Juli 2020	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Bersubsidi Angkatan Kedua Tahun 2020	Tanggal 27 Juli 2020 s/d 31 Desember 2020
5	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Pendidikan Kota Pekalongan • STMIK Widya Pratama Pekalongan	• Nomor : 800/2548.2 • Nomor : 31/STMIK.WP/KL/2020 Tanggal : 06 Januari 2020	Pengembangan Aplikasi e-APBS, Database terintegrasi dan PPBD Online	Tanggal 06 Januari 2020 s/d 20 Desember 2020
6	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan • Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero)	• Nomor : 650/2520/XII/2020 • Nomor : KL.701/XII/8/DO.4/2020 Tanggal : 14 Desember 2020	Sewa Lahan PT KAI (Persero) di Jalan Cendrawasih Kota Pekalongan	Tanggal 01 Maret 2020 s/d 28 Februari 2025 (5 tahun)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/Jangka Waktu
7	Kesepakatan Bersama	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan - Lembaga Sertifikasi Profesi Batik	- Nomor : 534/812/MoU/IV/2020 - Nomor : 003/LSPB-KS/IV/2018	Sertifikasi pengrajin batik	Tanggal 24 April 2018 s/d ada perpanjangan nota kesepakatan
8	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kota Pekalongan - Fakultas Hukum Universitas Indonesia	- Nomor : 076/2747 - Nomor : 56/UN2.F5.D/HKP.05.00/2020	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat untuk pembangunan Kota Pekalongan	Tanggal 06 Oktober 2020 s/d 06 Oktober 2024 (4 tahun)
9	Kesepakatan Bersama	- Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan - Universitas Pekalongan	- Nomor : 415.1/02465 - Nomor : 1079/C.06.01.KL/2016	Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Ekonomi, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan	
10	Kesepakatan Bersama	- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan - Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta	Nomor : 415.4/0298	Pengembangan pariwisata di Kota Pekalongan	
11	Kesepakatan Bersama	- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan - Universitas PODOMORO Jakarta	Nomor : 415.4/03680	Pengembangan pariwisata di Kota Pekalongan	
12	Perjanjian Kerjasama	- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan - PT. Asuransi JASINDO INDONESIA	- Nomor : 523.5/1912/11/2020 - Nomor : PKS.021.AJI/408-1/XI/2020	Bantuan premi asuransi nelayan	Tanggal 30 November 2020 s/d 30 November 2021 (1 tahun)
13	Perjanjian Kerjasama	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan - Tim Peneliti Universitas Diponegoro Semarang	- Nomor : 050/2112/VI/2020 - Nomor : 1266/UN7.5.12.2/TU/2020	Studi potensi dan penentuan sumur resapan sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Pekalongan berbasis sistem informasi geografis	Tanggal 15 Juni 2020 s/d 15 November 2020 (5 bulan)
14	Perjanjian Kerjasama	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan - Tim Peneliti Universitas Pekalongan	- Nomor : 050/2113/VI/2020 - Nomor : 510/C.06.01/FIK/VI/2020	Strategi mitigasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 : Optimalisasi peran pentahelix di Kota Pekalongan berdasarkan pendekatan manajemen penyakit berbasis wilayah	Tanggal 15 Juni 2020 s/d 15 November 2020 (5 bulan)
15	Perjanjian Kerjasama	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan - Tim Peneliti STMIK Widya Pratama Pekalongan	- Nomor : 050/2114/VI/2020 - Nomor : 15/VI/RUD.PKL/2020/02	Meningkatkan peranan aparaturnya pemerintah tingkat RT dan RW dalam Dashboard Eksekutif untuk memudahkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengkoordinasi dan memonitoring	Tanggal 15 Juni 2020 s/d 15 November 2020 (5 bulan)
16	Perjanjian Kerjasama	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan - Tim Peneliti Universitas Selamat Sri	- Nomor : 050/2115/VI/2020 - Nomor : 168/C/UNISS/VI/2020	Desain Pendidikan Agama dalam keluarga guna membangun kemampuan problem solving anak	Tanggal 15 Juni 2020 s/d 15 November 2020 (5 bulan)
17	Perjanjian Kerjasama	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan - Tim Peneliti STMIK Widya Pratama Pekalongan	- Nomor : 050/2116/VI/2020 - Nomor : 15/VI/RUD.PKL/2020/01	Edukasi dan mitigasi bencana banjir untuk siaga bencana di Kota Pekalongan	Tanggal 15 Juni 2020 s/d 15 November 2020 (5 bulan)
18	Perjanjian Kerjasama	- Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan - Universitas Gunadarma Jakarta	- Nomor : 415.4/0034/I/2020 - Nomor : 01A/WAREK-IV/UG/I/2020	Pendampingan sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA) Pemerintah Kota Pekalongan	Tanggal 03 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020
19	Perjanjian Kerjasama	- Pemerintah Kota Pekalongan - PT Bali Towerindo Sentra, Tbk.	- Nomor : 030/2072/VIII/2020 - Nomor : 0158/BTS-PEKALONGAN/V/2020	Pemakaian kekayaan daerah milik/dikuasai Pemerintah Kota Pekalongan berupa tanah untuk	Tanggal 14 Agustus 2020 s/d 13 Agustus 2025 (5 tahun)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/Jangka Waktu
				penyelenggaraan pembangunan infrastruktur telekomunikasi	
20	Perjanjian Kerjasama	• Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan • PD BPR Bank Pekalongan	• Nomor : 900/1266 • Nomor : 658/BP/VI/2020	Mekanisme pelimpahan saldo dari rekening penampungan dana bergulir pada PD BPR Bank Pekalongan ke rekening kas umum daerah Kota Pekalongan	Tanggal 15 Juni 2020 s/d seluruh tunggakan dana bergulir telah lunas
21	Perjanjian Kerjasama	• Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan • PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan • PT FTF Globalindo	• Nomor : 0204/HT.01.01/2020 • Nomor : 973/0133/01/2020 • Nomor : 001/PKS-BJ/01/2020	Pengadaan sewa alat dan aplikasi perekaman dan pemantauan pajak daerah online Kota Pekalongan	Tanggal 13 Januari 2020 s/d 13 Januari 2021 (1 tahun)
22	Kesepakatan Bersama	• Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kota Pekalongan • Universitas Dian Nuswantoro Semarang	Tanggal 09 Januari 2020	Pelaksanaan tes SKD dan SKB CPNS formasi tahun 2019	Tanggal 09 Januari 2020 s/d 09 Januari 2021 (1 tahun)
23	Perjanjian Kerjasama	• Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kota Pekalongan • Universitas Diponegoro Semarang	• Nomor : 050/0825.1 • Nomor : 3062/UN7.7.1/KS/2020 Tanggal 14 September 2020	Penyelenggaraan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah tingkat dasar dan Ujian Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah	Tanggal 14 September 2020 s/d 06 November 2020
24	Perjanjian Kerjasama	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	• Nomor : 019.6/001/MoU/2020 Tanggal 02 Januari 2020	Penyelenggaraan penanggulangan bencana	
25	Perjanjian Kerjasama	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan • Rumah Sakit ARO Kota Pekalongan	• Nomor : 010/RSUA/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018	Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tanggal 13 Agustus 2018 s/d 13 Agustus 2020 (2 tahun)
26	Perjanjian Kerjasama	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan • Rumah Sakit H.A. Zaky Djunaid	• Nomor : 050/0419/IV/2020 Tanggal 17 April 2020	Penyelenggaraan penanggulangan bencana	
27	Perjanjian Kerjasama	• Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	• Nomor : 019.6/50/MoU/2019 • Nomor : 019.6/107/MoU/2019 Tanggal 1 Maret 2019	Sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Tanggal 1 Maret 2019 s/d 1 Maret 2021
28	Perjanjian Kerjasama	• Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan • Kepolisian Resor Kota Pekalongan	• Nomor : B/35/X/HUK.8.11/2020 • Nomor : 331.1/0395/X/2020 Tanggal 31 Agustus 2020	Pemberantasan preman dan premanisme serta penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pekalongan	Tanggal 31 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2021
29	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan	• Nomor : Per/10/01/2020 • Nomor : 019.6/05/MoU/2020 Tanggal 01 Januari 2020	Pelaksanaan pelayanan kesehatan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021
30	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	• Nomor : 440/3777.2/XII/2019 • Nomor : 019.6/118/MoU/2019 Tanggal 31 Desember 2019	Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kota Pekalongan tahun 2020	Tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
31	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	• Nomor : 274/FIKES-UNISA/Au/2020 • Nomor :	Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan	Tanggal 03 Agustus 2020 s/d



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/Jangka Waktu
		Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisiyyah Yogyakarta	019.6/113/MoU/2020 Tanggal 03 Agustus 2020	Universitas Aisiyyah Kota Yogyakarta	03 Agustus 2022 (2 tahun)
32	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - Laboratorium Klinik Cito Cabang Pekalongan	- Nomor : 019.6/44/MoU/2020 - Nomor : 04505/CPU004.7/KCA.IV/2020 Tanggal 02 Januari 2020	Pemeriksaan laboratorium penunjang dan patologi anatomi	Tanggal 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
33	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - Laboratorium Klinik dan Radiologi Gajah Mada	- Nomor : 019.6/109/MoU/2020 - Nomor : 004/GM/II/2020 Tanggal 02 Januari 2020	Pemeriksaan Laboratorium penunjang dan patologi anatomi	Tanggal 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
34	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - PT Bendi Nasha Niaga Industri	- Nomor : 198/PKS/BNNI-RSUDPKL/IV/2020 - Nomor : 019.6/62/MoU/2020 Tanggal 01 April 2020	Pengangkutan Limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)	Tanggal 01 April 2020 s/d 31 Maret 2021
35	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - PT Pestindo Central Optima	- Nomor : 019.6/02/MoU/2020 - Nomor : 086/PCO/SMG/MKD/SPK-III/XII/2019 Tanggal 02 Januari 2020	Pest Management Service	Tanggal 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
36	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - PT Andalan Medika Sejahtera Abadi	- Nomor : 019.6/87/MoU/2020 - Nomor : 020/MOU/AMSA/VI/2020 Tanggal 02 Juni 2020	Pengadaan implant ortopaedi untuk peserta BPJS dan Umum	Tanggal 02 Juni 2020 s/d 02 Juni 2021
37	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - PT Value Lucky Medica	- Nomor : 019.6/100/MoU/2020 - Nomor : 002/SPK/PTVLM/X/2020 Tanggal 10 September 2020	Operasional alat sterilisasi ruangan aeromist meizhuo DF-A1	Tanggal 10 September 2020 s/d 10 September 2022 (2 tahun)
38	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - Rumah Sakit H.A. Zaky Djunaid Kota Pekalongan	- Nomor : 031/PKS-RSZZ/XI/2020 - Nomor : 019.6/107/MoU/2020 Tanggal 04 November 2020	Rujukan pelayanan pemeriksaan swab PCR Covid-19	Tanggal 04 November 2020 s/d 03 November 2021 (1 tahun)
39	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisiyyah Pekajangan Kota Pekalongan	- Nomor : 025/PKS-RSIA/101220 - Nomor : 019.6/112/MoU/2020 Tanggal 10 Desember 2020	Rujukan pelayanan pemeriksaan swab PCR Covid-19	Tanggal 10 Desember 2020 s/d 10 Desember 2021 (1 tahun)
40	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Kota Pekalongan	- Nomor : 016/PKS-RS/BR/XI/2020 - Nomor : 019.6/106/MoU/2020 Tanggal 02 November 2020	Rujukan pelayanan pemeriksaan swab PCR Covid-19	Tanggal 02 November 2020 s/d 01 November 2021 (1 tahun)
41	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan	- Nomor : 773/HM.03.1-SPJ/3375/KPU-Kot/VII/2020 - Nomor : 019.6/75/MoU/2020 Tanggal 03 Juli 2020	Dukungan pelayanan kesehatan bagi calon petugas pemutahiran data pemilih penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020	Tanggal 03 Juli 2020 s/d berakhirnya tahap pembentukan PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih)
42	Perjanjian Kerjasama	- Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan - Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan	- Nomor : 1032/HM.03.1-SPJ/3375/KPU-Kot/VII/2020 - Nomor : 019.6/84/MoU/2020 Tanggal 29 Juli 2020	Dukungan pelayanan kesehatan bagi KPU dan Sekretariat KPU Kota Pekalongan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat serta Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat dalam penyelenggaraan pemilihan	Tanggal 29 Juli 2020 s/d berakhirnya tahap pemeriksaan rapid test



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/Jangka Waktu
				Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020	
43	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugerah Kota Pekalongan	• Nomor : 019.6/76/MoU/2019 • Nomor : 044/PKS/RS.A/VII/2019	Sistem rujukan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugerah Kota Pekalongan	
44	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • Klinik Graha Medika	• Nomor : 226/GM/XI-01/2019 • Nomor : 019.6/01/MoU/2019	Pelayanan rujukan pasien	
45	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • PT B. Braun Medical Indonesia	• Nomor : 008/PTBB/LG/III/2019 • Nomor : 019.6/46/MoU/2019	Pinjam pakai alat mesin hemodialisa dan pembelian produk kesehatan habis pakai	
46	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • CV. Dwi Harta Perkasa	• Nomor : DHP.VII.1727/2019 • Nomor : 019.6/71/MoU/2019	Penyediaan label thermal dan printer barcode sebagai sarana penunjang non medis	
47	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang	• Nomor : 019.6/47/MoU/2019 • Nomor : IKS-HUM-068/STIKES-wh/III-2019	Praktek kerja lapangan	
48	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • Universitas Pekalongan	• Nomor : 205/C.06.01/VIII/2019 • Nomor : 019.6/80/MoU/2019	Praktek kerja lapangan jurusan teknik konstruksi	
49	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan	• Nomor : 019.6/58/MoU/2019 • Nomor : 690/041/III/2019	Pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan	
50	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan	• Nomor : 019.6/50/MoU/2019 • Nomor : 019.6/107/MOU/2019	Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
51	Perjanjian Kerjasama	• Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan • PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	• Nomor : KL.702/IX/1/Do.4-20 • Nomor : 019.6/73/MoU/2019	Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan (JKP) PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	
52	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan Kota Pekalongan	• Nomor : 899/KTR/VI-02/12/2019 • Nomor : 980/3751.1/XI/2019	Iuran Premi BPJS Kesehatan	
53	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	• Nomor : 0196/118/MOU/2019 • Nomor : 440/3777.2/XII/2019	Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesda	
54	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Khotijah Kota Pekalongan	• Nomor : 0522/SK/VII-10/UM/2019 • Nomor : 440/3785.1/XII/2019	Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesda	
55	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Karomah Holistic Kota Pekalongan	• Nomor : 36/PKS/RSKH/XII/2019 • Nomor : 440/3779.2/XII/2019	Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesda	
56	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Ibu dan	• Nomor : 004/PKS/RS.A/2020	Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesda	



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/Jangka Waktu
		Anak Anugerah Kota Pekalongan	• Nomor : 440/3778.2/XII/2019		
57	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Kota Pekalongan	• Nomor : 025/PKS.RS/BR/XII/2019 • Nomor : 440/3784.2/XII/2019	Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesda	
58	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit HA. Zaky Djunaid Kota Pekalongan	• Nomor : 031/PKS.RSZD/XII/2019 • Nomor : 440/3780.2/XII/2019	Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesda	
59	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit ARO Kota Pekalongan	• Nomor : 200.1/R SUA/XII/2019 • Nomor : 440/3793.2/XII/2019	Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesda	
60	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Hermina Kota Pekalongan	• Nomor : 980/2361.2/X/2020 • Nomor : 542/PKS/JANGMED/RSHP KL/IX/2020	Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jamkesda	
61	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • PT Jaya Jagat Raya • PT Jasa Medivest	• Nomor : 275.1/JM03/JJR.DINKES/P KL/XI/2020 • Nomor : 633/SPKS/JJR-JAMED-DINKES/PKL/XI/2020	Jasa pengangkutan dan pengolahan limbah medis	
62	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Harian Pagi Radar Pekalongan	• Nomor : 044/188.1/I/2020 Tanggal 15 Januari 2020	Publikasi promosi dan pelayanan kesehatan DINKES Kota Pekalongan tahun 2020	
63	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • LPPL Radio Kota Batik Kota Pekalongan	• Nomor : 044/119.1/I/2020 Tanggal 15 Januari 2020	Liputan penyiaran radio dalam bentuk dialog kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2020	
64	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • PT. Radio Walisanga Kota Pekalongan	• Nomor : 044/174.1/I/2020 Tanggal 20 Januari 2020	Liputan penyiaran radio dalam bentuk bincang kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2020	
65	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Garuda Zitizen Jawa Tengah	• Nomor : 961/121.1/2/2020 Tanggal 05 Januari 2020	Publikasi promosi dan pelayanan kesehatan DINKES Kota Pekalongan tahun 2020	
66	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • LPPL Batik TV Kota Pekalongan	• Nomor : 044/175.1/I/2020 Tanggal 20 Januari 2020	Roadshow Hari Yang Sehat (HAYAT) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2020	
67	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • LPPL Batik TV Kota Pekalongan	• Nomor : 044/175.1/I/2020 Tanggal 20 Januari 2020	Produksi pembuatan film kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2020	
68	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit ARO Kota Pekalongan	• Nomor : 227/R SUA/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, KB MOW pasca salin di Rumah Sakit	
69	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit HA. Zaky Djunaid Kota Pekalongan	• Nomor : 004/PKS-RSZD/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, KB MOW pasca salin di Rumah Sakit	
70	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan	• Nomor : 0458/SK/VII-10/UM/2020 Tanggal 27 Januari 2020	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, KB MOW pasca salin di Rumah Sakit	
71	Perjanjian Kerjasama	• Dinas Kesehatan Kota Pekalongan • Rumah Sakit Karomah Holistic Kota Pekalongan	• Nomor : 90/PKS/RSKH/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, KB MOW pasca salin di Rumah Sakit	



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Bentuk Kerjasama	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/Jangka Waktu
72	Perjanjian Kerjasama	- Dinas Kesehatan Kota Pekalongan - Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugerah Kota Pekalongan	- Nomor : 009/PKS/RS.A/II/2020 - Tanggal 27 Januari 2020	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, KB MOW pasca salin di Rumah Sakit	
73	Perjanjian Kerjasama	- Dinas Kesehatan Kota Pekalongan - Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Kota Pekalongan	- Nomor : 002/PKS-RS/BR/II/2020 - Tanggal 27 Januari 2020	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, KB MOW pasca salin di Rumah Sakit	
74	Perjanjian Kerjasama	- Dinas Kesehatan Kota Pekalongan - Rumah Sakit Hermina Kota Pekalongan	- Nomor : 150/PKS/RSHPKL/III/2020 - Tanggal 17 Februari 2020	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, KB MOW pasca salin di Rumah Sakit	
75	Perjanjian Kerjasama	- Dinas Kesehatan Kota Pekalongan - Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	- Nomor : 019.6/120/MoU/2019 - Tanggal 30 Desember 2019	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, KB MOW pasca salin di Rumah Sakit	
76	Kesepakatan Bersama (ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama)	- Dinas Kesehatan Kota Pekalongan - PT Bintang Toedjoe	- Nomor : 331/B7-Legal/XI/2020 - Nomor : 415.4/3046 - Tanggal 06 November 2020	Pemanfaatan fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	Tanggal 06/11/2020 s/d 31 Desember 2025
77	Perjanjian Kerjasama (tindak lanjut Kesepakatan Bersama Nomor : 331/B7-Legal/XI/2020 dan 415.4/3046)	- Dinas Kesehatan Kota Pekalongan - PT Bintang Toedjoe	- Nomor : 332/B7-Legal/XI/2020 - Nomor : 980/3455.1/XI/2020 - Tanggal 06 November 2020	Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	Tanggal 06/11/2020 s/d 31 Desember 2022

Sumber: Bagian Pemerintahan, data diolah

Tabel 7. 13 Sinergi Pusat dengan Daerah

No	Bentuk Sinergi	Subyek	Nomor	Obyek	TMT/Jangka Waktu
1	Kesepakatan Bersama	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah Kota Pekalongan - PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)	- Nomor : HK.02-CK/17 - Nomor : 600/2676 - Nomor : 135/MOU/SMF-KPUPR-PKP/IX/2020	Dukungan penanganan permukiman kumuh di Kota Pekalongan	Tanggal 30 September 2020 s/d 30 September 2021 (1 tahun)
2	Kesepakatan Bersama	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Pemerintah Kota Pekalongan	- Nomor : HK.02.01-CK/08 - Nomor : 660/087/2020 - Nomor : 180/1618	Penataan permukiman di kawasan Sungai Kupang, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	Tanggal 26 Juni 2020 s/d 26 Juni 2022 (2 tahun)
3	Perjanjian Kerjasama	- Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Kementerian Perdagangan - Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kota Pekalongan	- Nomor : 646/PEN.6/MOU/03/2020 - Nomor : 050/0305 - Tanggal : 09 Maret 2020	Penyelenggaraan pelatihan pengembangan produk untuk pasar ekspor 2020	
4	Perjanjian Kerjasama	- Kementerian Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan	- Nomor : HK.03.01/2.1/2212/2019 - Nomor : 019.6/22/MoU/2019	Penyelenggaraan program Internship Dokter Indonesia	

Sumber: Bagian Pemerintahan, data diolah



3. Pembinaan Batas Wilayah

Pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan batas wilayah tetapi hanya rapat koordinasi dengan Lurah, Camat dan Instansi terkait Pemerintah Kota Pekalongan dan Lurah, Camat, Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta dengan Lurah, Camat dan Instansi Pemerintah Kabupaten Batang terkait pemantauan dan pengamanan batas wilayah.

4. Penanggulangan Bencana

Kota Pekalongan memiliki potensi bencana yang diperkirakan atau dimungkinkan terjadi setiap saat, antara lain :

- Bencana Alam, seperti : Banjir, Abrasi/ Gelombang Ekstrim, Kekeringan, Cuaca Ekstrim / Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Gempa bumi
- Bencana non alam, seperti : Kebakaran gedung & pemukiman, Gagal teknologi, Epidemis & wabah penyakit
- Bencana Sosial, seperti : Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat & teror

Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kota Pekalongan selama tahun 2020, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. 14 Kejadian Bencana Tahun 2020

No	Kejadian	Tempat Kejadian	Tanggal	Dampak
1	Angin Puting Beliung	Rt. 002 Rw. 005 Gg. 7 No. 62 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur	01/01/2020	Rumah Roboh
2	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Rt. 02 Rw. IV Gg. 7b No. 34 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara	02/01/2020	Rumah Roboh
3	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Rt. 02 Rw. 08 Jl. Kauman Baru No. 55 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat	07/01/2020	Rumah Roboh
4	Angin Kencang	Rt. 01 Rw. 09 Gg. 1 No. 9 Jl. Pantai Sari Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara	10/01/2020	Rumah Roboh
5	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Dr. Sutomo Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan	12/01/2020	Pohon Tumbang
6	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Krapyak Lor Gg. 3A Buntu Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Selatan	14/01/2020	Rumah Roboh
7	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Dusun Dekoro Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur	14/01/2020	Rumah Roboh
8	BANJIR	Wilayah Tirta, Pringrejo, Poncol, Klego, Kauman, Kalibaras Sampangan, Kauman Ledok, Keputran Krapyak, Jalan Jawa, Bugisan, Jenggol Setu, Kuripan Kidul, Klego	25-27/01/2020	BANJIR
9	Intensitas Hujan Tinggi	Jl Coklat Perum BinaGriya RT. 04 RW. 07 Kel. Medono Kec. Pekl Barat	05/02/2020	Pohon Tumbang
10	BANJIR	Wilayah Tirta mengakibatkan banjir di RW 01, 02, 03 RW dan 04 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat.	07-09/02/2020	BANJIR
11	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Sriwijaya Rt. 01 Rw. 08 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat	18/02/2020	Pohon Tumbang
12	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Kel. Bendan Kergon Rt. 03 Rw. 07	20/02/2020	Pohon Tumbang
13	Banjir	Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Utara, Sebagian Kecamatan Pekalongan Timur dan Beberapa Kelurahan di Kecamatan Selatan, Kelurahan Tirta	19-20/2/2020	Banjir
14	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur	07/03/2020	Pohon Tumbang
15	Intensitas Hujan Tinggi	Kel. Bendan Kergon Kel. Pekalongan Barat	17/03/2020	Pohon Tumbang



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Kejadian	Tempat Kejadian	Tanggal	Dampak
16	Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Ir. Sutami Kel. Kalibaras Kec. Pekalongan Timur	19/03/2020	Pohon Tumbang
17	Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Patiunus Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur	26/03/2020	Pohon Tumbang
18	Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Ilalang Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara	27/03/2020	Pohon Tumbang
19	Angin Kencang	Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. PKK Kec. Pekalongan Barat	22/04/2020	Pohon Tumbang
20	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. H. Agus Salim Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur	07/05/2020	Pohon Tumbang
21	Intensitas Hujan Lebat	Jl. KH. Hasyim Asy'ari Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur	21/05/2020	Pohon Tumbang
22	Banjir ROB	Wilayah Perum Slamaran Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kel. Panjang Wetan (Bugisan, Panjang Wetan dan Panjang Baru) Pasirsari Kel. PasirKratonKramat Pabean Kel. Padukuhan Kraton	31/5/2020	Banjir ROB
23	Angin Kencang	Boyongsari Gedangan Gg. Cemara No. 23 Rt. 01 Rw. 06	18/7/2020	Rumah Roboh
24	Angin Kencang	Jl. Pantai Dewi Slamaran Rt. 01 Rw. 19 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara	11/08/2020	Rumah Roboh
25	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Permata Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat	15/08/2020	Pohon Tumbang
26	Angin Kencang	Jl. Pantaisari 2 No. 26 Rt. 01 Rw. 09 Kelurahan Panjang Baru	25/8/2020	Rumah Roboh
27	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Degayu Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara	03/09/2020	Rumah Roboh
28	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Rumdin PJKA Kota Pekalongan Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat	05/09/2020	Pohon Tumbang
29	Angin Kencang	Kalibaras Rt. 04 Rw. 07 Kelurahan Kalibaras Kecamatan Pekalongan Timur	05/09/2020	Rumah Roboh
30	Angin Kencang	Pantaisari Gg. Tambak Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Panjang Baru	04/10/2020	Rumah Roboh
31	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Pisangsari Gg. Tongkol Rt. 005 Rw. 011 Kelurahan Panjang Wetan.	09/10/2020	Rumah Roboh
32	Angin Kencang	Jl. Kusuma Bangsa Gg. 03 Pahlawan No. 41 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara	14/10/2020	Rumah Roboh
33	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Perum Gama Permai Jl. Jayabaya Kel. PKK Kec. Pekalongan Barat	24/10/2020	Pohon Tumbang
34	Angin Kencang	Jl. Jetayu (depan GOR Jetayu)	26/10/2020	Pohon Tumbang
35	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Ki Mangunsarkoro Kel. Degayu Kec. Pekalongan Utara	29/10/2020	Pohon Tumbang
36	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Jl. Sulawesi Bendan Gg. 03 No. 5 Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat	30/10/2020	Rumah Roboh
37	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Merbabu Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat	31/10/2020	Pohon Tumbang
38	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Degayu Rt. 06 Rw. 07 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara	04/11/2020	Rumah Roboh
39	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Degayu Rt. 05 Rw. 07 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara	04/11/2020	Rumah Roboh
40	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Degayu Rt. 05 Rw. 07 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara	04/11/2020	Rumah Roboh
41	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Degayu Rt. 05 Rw. 07 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara	04/11/2020	Rumah Roboh
42	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Degayu Rt. 05 Rw. 07 Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara	04/11/2020	Rumah Roboh
43	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Pabean Rt. 003 Rw. 015 Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara	04/11/2020	Rumah Roboh
44	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Patiunus Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur	05/11/2020	Pohon Tumbang
45	Angin Kencang	Jl. Otto Iskandardinata Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Kalibaras Kecamatan Pekalongan Timur	05/11/2020	Rumah Roboh



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



No	Kejadian	Tempat Kejadian	Tanggal	Dampak
46	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Raya Pantura (Perbatasan Kota dan Kabupaten Pekalongan)	06/11/2020	Pohon Tumbang
47	Intensitas Hujan Tinggi	Jl. H. Agus Salim (Lapangan Sorogonen) Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur	06/11/2020	Pohon Tumbang
48	Angin Kencang	Jl. Hos Cokroaminoto Gg. 22 Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Kuripan Kertoharjo	16/11/2020	Rumah Roboh
49	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Diponegoro Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Barat	17/11/2020	Pohon Tumbang
50	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Dr. Cipto Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur	17/11/2020	Pohon Tumbang
51	Angin Kencang dan Intensitas Hujan Tinggi	Jl. HOS Cokroaminoto Kel. Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur	17/11/2020	Pohon Tumbang
52	Angin Kencang	Jl. Kapten Patimura Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur	17/11/2020	Rumah Roboh
53	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Gamer Rt. 01 Rw. 09 Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur	17/11/2020	Rumah Roboh
54	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Jl. Parkit No. 10 Kapling Gamer Permai Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur	17/11/2020	Rumah Roboh
55	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Jl. Jlamprang Gg. 4 Rt. 02 Rw. 14 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara	17/11/2020	Rumah Roboh
56	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Krapyak Lor Mahakam Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara	17/11/2020	Rumah Roboh
57	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Krapyak Kidul Gg. 7-4 A Rt. 06 Rw. 14 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara	17/11/2020	Rumah Roboh
58	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	Krapyak Lor Gg. 3 A Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara	17/11/2020	Rumah Roboh
59	Angin Kencang	Boyongsari Gedangan Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara	17/11/2020	Rumah Roboh
60	Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Angkatan 66 Kel. PKK Kec. Pekalongan Barat	19/11/2020	Pohon Tumbang
61	CUACA EKSTREM (TANGGUL PANTAI SARI JEBOL)	Wilayah Pantai Sari Kota Pekalongan Gelombang Pasang telah merobohkan tanggul pantai beton permanen sepanjang 68 m rusak.	06-11/12/2020	Cuaca Ekstrem
62	Angin Kencang	Jl. Kunti Utara Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara	13/12/2020	Rumah Roboh
63	Angin Kencang	Rt. 3 Rw. X Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan	28/12/2020	Rumah Roboh

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, data diolah

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanganan bencana, antara lain :

a. Pra Bencana

- 1) Memberikan informasi secara dini kepada masyarakat melalui spanduk, leaflet maupun Media sosial.
- 2) Monitoring Daerah Rawan Bencana
- 3) Mengoptimalkan kerjasama dengan relawan, pada tahun 2020 ini BPBD Kota Pekalongan telah menjalin mitra dengan 10 (sepuluh) kelompok relawan yaitu Pekalongan Resque, Mancing mania, Batik resque, Jogo Samudro, MDMC, RAPI, LPBI-NU, BAGANA, FPRB Kelurahan Setono, PMI
- 4) Mengadakan sosialisasi kebencanaan
- 5) Menyiapkan masyarakat untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan seperti melaksanakan kerja bakti bersih sungai, tidak membuang sampah sembarangan
- 6) Menginventarisir potensi serta kemampuan aparat & masyarakat dalam upaya pencegahan & penanggulangan bencana
- 7) Menyiapkan Posko Siaga 24 Jam



- b. Saat Bencana
 - 1) Mendirikan posko Bencana
 - 2) Melakukan evakuasi
 - 3) Memberikan bantuan untuk korban bencana (sandang, pangan, obat dsb)
 - 4) Melakukan perbaikan darurat atas infrastruktur yang mengalami kerusakan (pembuatan tanggul darurat)
- c. Pasca Bencana
 - 1) Melakukan inventarisasi kerusakan & taksiran biaya kerugian & biaya rehabilitasi dan rekonstruksi
 - 2) Melakukan rehabilitasi sarana prasarana

Untuk menanggulangi terjadinya bencana di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan melalui BPBD mengirimkan personil, relawan serta peralatan untuk : membuat tanggul darurat, mengirimkan bantuan logistik dan juga pemberian bantuan bagi korban bencana. Kegiatan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Pada tanggal 20 Februari 2020, terjadi banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan meluapnya sungai bremi dan meduri di Kota Pekalongan ditambah dengan drainase yang mengalir lambat mengakibatkan tergenangnya pemukiman di Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Timur, dan mengakibatkan sekitar 3.338 jiwa mengungsi. Untuk mengatasi dan memfasilitasi para korban bencana banjir tersebut, dengan melalui Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Walikota Pekalongan dikeluarkan anggaran Belanja Dana Tidak Terduga APBD Kota Pekalongan sebesar Rp1.150.000.000,00 yang digunakan untuk fasilitasi dapur umum dan bantuan logistik.
- b. Pada tanggal 31 Mei 2020, terjadi banjir rob yang disebabkan oleh gelombang laut pasang mulai 0,5 m – 1,25 m, sehingga menyebabkan meluapnya sungai yang menggenangi area Kota Pekalongan dengan ketinggian air 30 cm - 70 cm, dan mengakibatkan sekitar 2972 jiwa mengungsi. Untuk mengatasi dan memfasilitasi para korban bencana banjir tersebut, dengan melalui Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Walikota Pekalongan dikeluarkan anggaran Belanja Dana Tidak Terduga APBD Kota Pekalongan sebesar Rp3.300.000.000,00 yang digunakan untuk fasilitasi dapur umum dan bantuan logistik.
- c. Pada tanggal 6 Desember - 11 Desember 2020, terjadi Curah hujan berintensitas sedang lebat, disertai angin kencang, dan gelombang laut tinggi yang mengakibatkan tanggul pantai beton rusak permanen, sehingga menggenangi pemukiman warga dan mengakibatkan sekitar 689 KK terdampak. Untuk mengatasi dan memfasilitasi para korban bencana banjir tersebut, dengan melalui Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Walikota Pekalongan dikeluarkan anggaran Belanja Dana Tidak Terduga APBD Kota Pekalongan sebesar Rp237.950.000,00 yang digunakan untuk fasilitasi perbaikan tanggul.

Selain itu, juga dikeluarkan penetapan status tanggap darurat bencana Corona Virus Disease (Covid-19) sejak Maret 2020. Untuk mencegah semakin banyaknya orang yang terinfeksi/tertular maka dilakukan upaya untuk mengurangi penyebaran virus tersebut yang dianggarkan melalui Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp75.000.000,00.



5. **Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Pekalongan tidak mendapatkan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang dialokasikan di Kota Pekalongan bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) melalui Perangkat Daerah yang ada di Kota Pekalongan yaitu :

a. **Dinas Perumahan dan Permukiman**

1) **Latar Belakang**

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2016, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan



tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dirancang dan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup:

- a) pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota;
- b) penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll);
- c) perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh;
- d) penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-2 untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.

Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

2) Tujuan Program KOTAKU - NSUP

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 program KOTAKU bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- a) Menurunnya luas permukiman kumuh;
- b) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
- c) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- d) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- e) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pada tahun 2020 terdapat Program KOTAKU mereformasi tujuan Program dari 5 menjadi 3 tujuan antara tanpa mengurangi substansi Program. Reformasi tersebut bertujuan untuk percepatan pencapaian tujuan Progra. Ketiga tujuan dimaksud adalah :

- a) Menurunnya Luas Permukiman Kumuh;
- b) Mewujudkan kolaborasi penanganan Kawasan kumuh dari berbagai stakeholder;
- c) Menyediakan infrastruktur permukiman;

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut :

- a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
- b) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
- c) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
- d) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan
- e) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

3) Strategi KOTAKU - NSUP

Selanjutnya untuk mencapai tujuan program maka ditetapkan Strategi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai berikut :

a) Strategi Dasar

Kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

b) Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program Kotaku secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan



permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;

- Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
- Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
- Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
- Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;
- Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
- Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

4) Tahapan Pelaksanaan Program KOTAKU - NSUP

Penyelenggaraan program KOTAKU dilaksanakan dalam empat tahap yakni (1). Tahap Persiapan; (2). Tahap Perencanaan; (3). Tahap Pelaksanaan; (4). Tahap Keberlanjutan. Tahapan penyelenggaraan Program Kotaku meliputi pelaksanaan Siklus di tingkat kelurahan dan siklus pelaksanaan tingkat kota.

5) Siklus KOTAKU di Tingkat Kabupaten

Tahapan/Siklus pelaksanaan Program KOTAKU di Tingkat Kabupaten/Kota dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut :



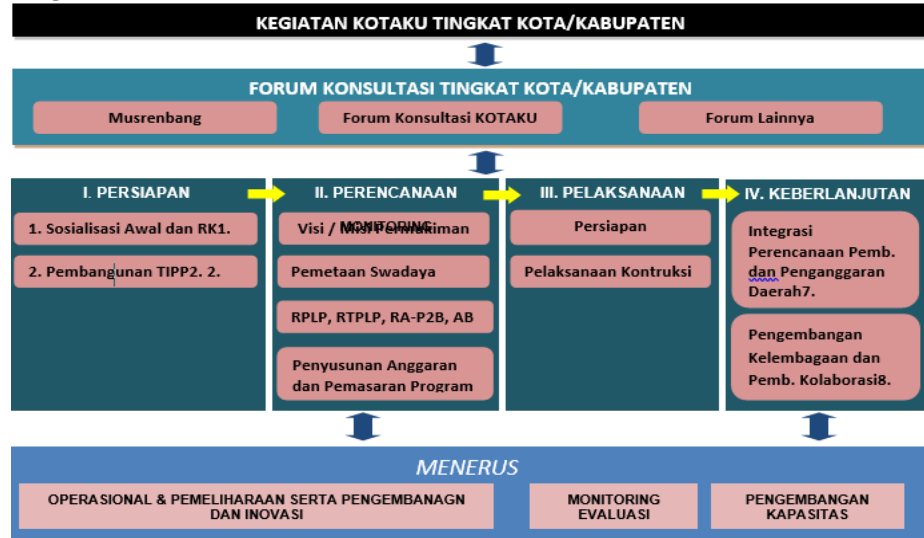
Gambar 7. 3 Tahapan Kegiatan Kotaku Tingkat Kota/Kabupaten

6) Siklus KOTAKU di Tingkat Kelurahan/Desa

Pelaksanaan kegiatan Program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program pembangunan regular tingkat kelurahan/desa dan tingkat kecamatan serta berkoordinasi dengan program tingkat kabupaten/kota lewat forum



konsultasi. Untuk mewujudkan tujuan program berikut tahapan pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa :



Gambar 7. 4 Tahapan Kegiatan Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa

- 7) Realisasi Kolaborasi Penanganan Kumuh Kota Pekalongan Tahun 2020
 Sampai dengan akhir tahun 2020 realisasi kegiatan kolaborasi dalam rangka pencegahan dan penanganan kumuh Kota Pekalongan 2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 7. 15 Realisasi Kolaborasi Penanganan Kumuh Kota Pekalongan Tahun 2020

NO	KEGIATAN	BIAYA	SUMBER PENDANAAN
A	Investasi Kegiatan Fisik :		
1	Jalan, Drainase, MCK, Motor Sampah, Motor Pemadam Kebakaran, Ipal, Air Minum	24.092.067.000	APBD Kota
2	Sheet Pile/Penguatan Tebing Sungai Loji	3.500.000.000	APBD Provinsi
3	RTLH	1.4590.750.000	CSR PT SMF (Persero)
4	RTLH	1.767.500.00	BSPS/DAK
B	Investasi Kegiatan Non Fisik :		
1	Fasilitasi Penyusunan Dokumen LARAP	100.000.000	APBD Kota
2	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Master Plan/RTBL Skala Penataan Kawasan Krapyak	100.000.000	APBD Kota
3	Fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Krapyak	100.000.000	APBD Kota
4	Pendataan Kumuh 2020 dan Review RPLP	279.180.000	Dana Kelurahan

Sumber : Dinperkim, data diolah

b. Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada tahun anggaran 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan mendapatkan dana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dana dari



Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kota Pekalongan. Kegiatan penyaluran Bantuan sarana prasarana Produksi Budidaya melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2020 lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dirjen perikanan budidaya ABT yang cair 3 kelompok antara lain :

1. Pokdakan BULE (Pembenihan Lele) sebesar Rp58.200.000,00
2. Pokdakan Betta Batik (ikan hias) sebesar Rp58.200.000,00
3. Pokdakan Betta Setono Fish (ikan hias) sebesar Rp58.200.000,00

c. Dinas Pertanian dan Pangan

Pada tahun anggaran 2020, Kota Pekalongan mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (APBN) yang diberikan secara langsung melalui rekening kepada 10 (sepuluh) Kelompok penerima bantuan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Ketahanan Pangan dengan total anggaran sebesar Rp150.000.000,00.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat permasalahan antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pemanfaatan pekarangan dari anggota kelompok dan bukan kelompok.
2. Semakin berkurangnya minat dan partisipasi anggota kelompok dalam pengelolaan KRPL.
3. Ketidakjelasan kondisi cuaca dan adanya pandemi covid 19
4. Keterbatasan SDM untuk melakukan pendampingan ke kelompok.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka solusi yang dilakukan adalah :

1. Pemberian sosialisasi dan atau pelatihan terkait optimalisasi pemanfaatan pekarangan kepada kelompok.
2. Sering melaksanakan komunikasi dan kunjungan ke kelompok dan memberikan arahan/motivasi kepada kelompok.
3. Mengantisipasi kondisi cuaca berdasarkan ilmu titen dan dalam melaksanakan kegiatan di kelompok tetap menggunakan Protokol Kesehatan.
4. Membentuk Tim Teknis sehingga pendampingan lebih mudah dilakukan.

Selain itu juga terdapat bantuan berupa barang yang didistribusikan oleh Pihak Ketiga ke kelompok penerima (4 Kelompok) dengan sumber anggaran dari APBD I dan APBD I Penanganann Dampak Covid 19 yaitu Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.

Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan kondisi cuaca dan adanya pandemi covid-19
2. Pengetahuan dan ketrampilan SDM masih terbatas
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki kelompok (bantuan hanya beberapa barang) sehingga kebutuhan lainnya tidak terpenuhi.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka solusi yang dilakukan adalah :

1. Tetap melaksanakann protokol kesehatan.
2. Pemberian sosialisasi dan pelatihan terkait optimalisasi pemanfaatan pekarangan kepada kelompok.
3. Membantu memfasilitasi kelompok yang membutuhkan (sesuai dengan anggaran yang tersedia di Dinas)



d. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pada tahun anggaran 2020, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP.DIPA-026.13.2.452609/2020, tanggal 12 November 2019 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Tahun 2020, Kota Pekalongan mendapatkan alokasi dana dari APBN melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan (BLK Kota Pekalongan) dengan pagu anggaran sebesar Rp1.692.044.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.664.494.540,00 atau 98,37 %.

Anggaran tersebut merupakan anggaran untuk Kegiatan Pelatihan UPTD BLK Tahun 2020. Adapun pelaksanaan kegiatan pelatihan di BLK pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. 16 Kegiatan Pelatihan UPTD BLK Tahun 2020

NO.	NAMA PROGRAM	JAMPEL	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
I	APBN Angkatan I			
	1. Pembuatan Roti dan Kue	140 JP	16 Orang	7 Februari s.d 27 Februari 2020
	2. Practical Office Advance	260 JP	16 Orang	7 Februari s.d 16 Maret 2020
	3. Menjahit Pakaian Sesuai Style 1	260 JP	16 Orang	7 Februari s.d 16 Maret 2020
	4. Menjahit Pakaian Sesuai Style 2	260 JP	16 Orang	7 Februari s.d 16 Maret 2020
	5. Teknisi AC Split	260 JP	16 Orang	7 Februari s.d 16 Maret 2020
	6. Pengelolaan Administrasi Perkantoran	260 JP	16 Orang	7 Februari s.d 16 Maret 2020
	7. Pengelasan SMAW Posisi 3G	340 JP	16 Orang	7 Februari s.d 28 Maret 2020
	8. Teknik Sepeda Motor	340 JP	16 Orang	7 Februari s.d 28 Maret 2020
	Jumlah Angkatan 1 (APBN)		128 Orang	
	Angkatan 2			
	1. Pembuatan Roti dan Kue	140 JP	16 Orang	28 Februari s.d 19 Maret 2020
	2. Teknisi Telepon Selular (Reparasi Perangkat Keras)	260 JP	16 Orang	28 Februari s.d 7 April 2020
	3. Housekeeping	260 JP	16 Orang	28 Februari s.d 7 April 2020
	4. Pengoperasian Mesin Bubut	260 JP	16 Orang	28 Februari s.d 7 April 2020
	5. Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	260 JP	16 Orang	28 Februari s.d 7 April 2020
	6. Kecantikan Kulit dan Rambut	260 JP	16 Orang	28 Februari s.d 7 April 2020
	Jumlah Angkatan 2 (APBN)		96 Orang	
	Angkatan 3			
	1. Perakitan Komputer	180 JP	16 Orang	3 Agustus s.d 2 September 2020
	2. Desain Grafis	260 JP	16 Orang	3 Agustus s.d 14 September 2020
	3. Menjahit Pakaian Sesuai Style 3	260 JP	16 Orang	3 Agustus s.d 14 September 2020
	4. Menjahit Pakaian Sesuai Style 4	260 JP	16 Orang	3 Agustus s.d 14 September 2020
	5. Pengelasan GTAW Posisi 2G	260 JP	16 Orang	3 Agustus s.d 14 September 2020
	6. Teknisi Instalasi Listrik	260 JP	16 Orang	3 Agustus s.d 14 September 2020
	7. Teknisi Engine Tune Up Sepeda Motor Injeksi	300 JP	16 Orang	3 Agustus s.d 19 September 2020
	Jumlah Angkatan 3 (APBN)		112 Orang	
	Jumlah APBN 1,2 DAN 3		336 Orang	
II	APBD			
a.	Angkatan I			
	1. Content Writing	160 JP	16 Orang	21 September s.d. 13 Oktober 2020
	2. Setir Mobil	200 JP	16 Orang	21 September s.d. 19 Oktober 2020



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020



NO.	NAMA PROGRAM	JAMPEL	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
	3. Tata Rias Pengantin	200 JP	16 Orang	21 September s.d. 19 Oktober 2020
	4. Menggambar Teknik Menggunakan AUTOCAD	240 JP	16 Orang	21 September s.d. 24 Oktober 2020
	Jumlah Angkatan 1 (APBD)		64 Orang	
b	Angkatan 2 (DID TAMBAHAN)			
	1. Potong Rambut Pria/Barbershop	200 JP	16 Orang	
	2. Tata Boga	200 JP	16 Orang	
	Jumlah Angkatan 2 (APBD)		32 Orang	
	JUMLAH APBD 1 DAN APBD 2		96 Orang	
	JUMLAH APBD DAN APBN		432 Orang	

Sumber : Dinperinaker, data diolah



BAB VIII **PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 diharapkan dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas). Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Pekalongan selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pekalongan.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 juga diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah Kota Pekalongan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020, melalui laporan keuangan ini diharapkan akan terwujud pengelolaan keuangan yang semakin meningkat.

Pekalongan, 03 Agustus 2021



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	85.250.000.000,00	85.250.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.290.820.000,00	18.290.820.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.363.000.000,00	6.363.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.116.500.000,00	108.116.500.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.020.320.000,00	218.020.320.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.183.473.000,00	25.183.473.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480.230.431.000,00	480.230.431.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	126.976.389.000,00	126.976.389.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	632.390.293.000,00	632.390.293.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.378.640.000,00	22.378.640.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.572.229.000,00	33.572.229.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.950.869.000,00	130.950.869.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	981.361.482.000,00	981.361.482.000,00	0,00	0,00
2.	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	356.937.005.000,00	357.703.147.000,00	766.142.000,00	0,21
2.1.2	Belanja Hibah	40.488.500.000,00	40.488.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	6.500.000.000,00	4.500.000.000,00	225,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	402.074.005.000,00	407.340.147.000,00	5.266.142.000,00	1,31
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	73.629.906.000,00	73.484.656.000,00	(145.250.000,00)	(0,20)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.767.474.000,00	380.922.064.000,00	8.154.590.000,00	2,19
2.2.3	Belanja Modal	207.386.097.000,00	194.110.615.000,00	(13.275.482.000,00)	(6,40)
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	653.783.477.000,00	648.517.335.000,00	(5.266.142.000,00)	(0,81)
	JUMLAH BELANJA	1.055.857.482.000,00	1.055.857.482.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(74.496.000.000,00)	(74.496.000.000,00)	0,00	(0,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.196.000.000,00	52.196.000.000,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.746.000.000,00	78.746.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.496.000.000,00	74.496.000.000,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00


 WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN 2



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	85.250.000.000,00	85.250.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.290.820.000,00	18.290.820.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.363.000.000,00	6.363.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.116.500.000,00	108.116.500.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.020.320.000,00	218.020.320.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.183.473.000,00	25.183.473.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480.230.431.000,00	480.230.431.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	126.976.389.000,00	126.976.389.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	632.390.293.000,00	632.390.293.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.378.640.000,00	22.378.640.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.572.229.000,00	33.572.229.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	612.000.000,00	612.000.000,00	
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.950.869.000,00	131.562.869.000,00	612.000.000,00	0,47
	JUMLAH PENDAPATAN	981.361.482.000,00	981.973.482.000,00	612.000.000,00	0,06
2.	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	356.937.005.000,00	357.703.147.000,00	766.142.000,00	0,21
2.1.2	Belanja Hibah	40.488.500.000,00	40.488.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	26.000.000.000,00	24.000.000.000,00	1.200,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	402.074.005.000,00	426.840.147.000,00	24.766.142.000,00	6,16
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	73.629.906.000,00	73.245.998.000,00	(383.908.000,00)	(0,52)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.767.474.000,00	380.124.626.000,00	7.357.152.000,00	1,97
2.2.3	Belanja Modal	207.386.097.000,00	176.258.711.000,00	(31.127.386.000,00)	(15,01)
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	653.783.477.000,00	629.629.335.000,00	(24.154.142.000,00)	(3,69)
	JUMLAH BELANJA	1.055.857.482.000,00	1.056.469.482.000,00	612.000.000,00	0,06
	SURPLUS/(DEFISIT)	(74.496.000.000,00)	(74.496.000.000,00)	0,00	(0,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.196.000.000,00	52.196.000.000,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.746.000.000,00	78.746.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.496.000.000,00	74.496.000.000,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN 3



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	85.250.000.000,00	53.423.000.000,00	(31.827.000.000,00)	(37,33)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.290.820.000,00	11.763.223.000,00	(6.527.597.000,00)	(35,69)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.363.000.000,00	5.358.000.000,00	(1.005.000.000,00)	(15,79)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.116.500.000,00	77.430.400.000,00	(30.686.100.000,00)	(28,38)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.020.320.000,00	147.974.623.000,00	(70.045.697.000,00)	(32,13)
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.183.473.000,00	31.848.984.000,00	6.665.511.000,00	26,47
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480.230.431.000,00	436.146.579.000,00	(44.083.852.000,00)	(9,18)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	126.976.389.000,00	96.775.320.000,00	(30.201.069.000,00)	(23,78)
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	632.390.293.000,00	564.770.883.000,00	(67.619.410.000,00)	(10,69)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.378.640.000,00	22.378.640.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(20,00)
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.572.229.000,00	30.908.716.000,00	(2.663.513.000,00)	(7,93)
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	612.000.000,00	612.000.000,00	
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.950.869.000,00	113.899.356.000,00	(17.051.513.000,00)	(13,02)
	JUMLAH PENDAPATAN	981.361.482.000,00	826.644.862.000,00	(154.716.620.000,00)	(15,77)
2.	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	356.937.005.000,00	350.662.570.000,00	(6.274.435.000,00)	(1,76)
2.1.2	Belanja Hibah	40.488.500.000,00	37.883.100.000,00	(2.605.400.000,00)	(6,43)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	34.086.788.000,00	32.086.788.000,00	1.604,34

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	402.074.005.000,00	425.280.958.000,00	23.206.953.000,00	5,77
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	73.629.906.000,00	61.530.440.500,00	(12.099.465.500,00)	(16,43)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.767.474.000,00	315.596.922.000,00	(57.170.552.000,00)	(15,34)
2.2.3	Belanja Modal	207.386.097.000,00	111.147.444.500,00	(96.238.652.500,00)	(46,41)
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	653.783.477.000,00	488.274.807.000,00	(165.508.670.000,00)	(25,32)
	JUMLAH BELANJA	1.055.857.482.000,00	913.555.765.000,00	(142.301.717.000,00)	(13,48)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(74.496.000.000,00)	(86.910.903.000,00)	(12.414.903.000,00)	16,67
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.196.000.000,00	78.610.903.000,00	26.414.903.000,00	50,61
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	14.000.000.000,00	0,00	(14.000.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.746.000.000,00	91.160.903.000,00	12.414.903.000,00	15,77
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.496.000.000,00	86.910.903.000,00	12.414.903.000,00	16,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00



 WALIKOTA PEKALONGAN,



 M. SAELANY MACHFUZ

LAMPIRAN 4



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	85.250.000.000,00	53.423.000.000,00	(31.827.000.000,00)	(37,33)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.290.820.000,00	11.763.223.000,00	(6.527.597.000,00)	(35,69)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.363.000.000,00	5.358.000.000,00	(1.005.000.000,00)	(15,79)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.116.500.000,00	75.015.880.000,00	(33.100.620.000,00)	(30,62)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.020.320.000,00	145.560.103.000,00	(72.460.217.000,00)	(33,24)
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.183.473.000,00	31.848.984.000,00	6.665.511.000,00	26,47
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480.230.431.000,00	436.146.579.000,00	(44.083.852.000,00)	(9,18)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	126.976.389.000,00	96.775.320.000,00	(30.201.069.000,00)	(23,78)
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	632.390.293.000,00	564.770.883.000,00	(67.619.410.000,00)	(10,69)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.378.640.000,00	15.975.098.000,00	(6.403.542.000,00)	(28,61)
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(20,00)
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.572.229.000,00	30.908.716.000,00	(2.663.513.000,00)	(7,93)
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	612.000.000,00	612.000.000,00	
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.950.869.000,00	107.495.814.000,00	(23.455.055.000,00)	(17,91)
	JUMLAH PENDAPATAN	981.361.482.000,00	817.826.800.000,00	(163.534.682.000,00)	(16,66)
2.	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	356.937.005.000,00	350.662.570.000,00	(6.274.435.000,00)	(1,76)
2.1.2	Belanja Hibah	40.488.500.000,00	37.883.100.000,00	(2.605.400.000,00)	(6,43)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.648.500.000,00	2.548.500.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	75.090.761.000,00	73.090.761.000,00	3.654,54

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	402.074.005.000,00	466.284.931.000,00	64.210.926.000,00	15,97
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	73.629.906.000,00	61.618.971.000,00	(12.010.935.000,00)	(16,31)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.767.474.000,00	282.676.190.000,00	(90.091.284.000,00)	(24,17)
2.2.3	Belanja Modal	207.386.097.000,00	94.157.611.000,00	(113.228.486.000,00)	(54,60)
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	653.783.477.000,00	438.452.772.000,00	(215.330.705.000,00)	(32,94)
	JUMLAH BELANJA	1.055.857.482.000,00	904.737.703.000,00	(151.119.779.000,00)	(14,31)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(74.496.000.000,00)	(86.910.903.000,00)	(12.414.903.000,00)	16,67
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.196.000.000,00	78.610.903.000,00	26.414.903.000,00	50,61
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	14.000.000.000,00	0,00	(14.000.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.746.000.000,00	91.160.903.000,00	12.414.903.000,00	15,77
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.496.000.000,00	86.910.903.000,00	12.414.903.000,00	16,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00



WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUZ

LAMPIRAN 5



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	85.250.000.000,00	53.423.000.000,00	(31.827.000.000,00)	(37,33)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.290.820.000,00	11.763.223.000,00	(6.527.597.000,00)	(35,69)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.363.000.000,00	5.358.000.000,00	(1.005.000.000,00)	(15,79)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.116.500.000,00	75.015.880.000,00	(33.100.620.000,00)	(30,62)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.020.320.000,00	145.560.103.000,00	(72.460.217.000,00)	(33,24)
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.183.473.000,00	31.848.984.000,00	6.665.511.000,00	26,47
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480.230.431.000,00	436.146.579.000,00	(44.083.852.000,00)	(9,18)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	126.976.389.000,00	103.279.300.000,00	(23.697.089.000,00)	(18,66)
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	632.390.293.000,00	571.274.863.000,00	(61.115.430.000,00)	(9,66)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.378.640.000,00	15.975.098.000,00	(6.403.542.000,00)	(28,61)
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(20,00)
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.572.229.000,00	30.908.716.000,00	(2.663.513.000,00)	(7,93)
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	612.000.000,00	612.000.000,00	
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.950.869.000,00	107.495.814.000,00	(23.455.055.000,00)	(17,91)
	JUMLAH PENDAPATAN	981.361.482.000,00	824.330.780.000,00	(157.030.702.000,00)	(16,00)
2.	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	356.937.005.000,00	350.662.570.000,00	(6.274.435.000,00)	(1,76)
2.1.2	Belanja Hibah	40.488.500.000,00	37.883.100.000,00	(2.605.400.000,00)	(6,43)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	75.090.761.000,00	73.090.761.000,00	3.654,54

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	402.074.005.000,00	466.284.931.000,00	64.210.926.000,00	15,97
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	73.629.906.000,00	61.581.221.000,00	(12.048.685.000,00)	(16,36)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.767.474.000,00	285.398.879.000,00	(87.368.595.000,00)	(23,44)
2.2.3	Belanja Modal	207.386.097.000,00	97.976.652.000,00	(109.409.445.000,00)	(52,76)
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	653.783.477.000,00	444.956.752.000,00	(208.826.725.000,00)	(31,94)
	JUMLAH BELANJA	1.055.857.482.000,00	911.241.683.000,00	(144.615.799.000,00)	(13,70)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(74.496.000.000,00)	(86.910.903.000,00)	(12.414.903.000,00)	16,67
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.196.000.000,00	78.610.903.000,00	26.414.903.000,00	50,61
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	14.000.000.000,00	0,00	(14.000.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.746.000.000,00	91.160.903.000,00	12.414.903.000,00	15,77
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.496.000.000,00	86.910.903.000,00	12.414.903.000,00	16,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00


 WALIKOTA PEKALONGAN,
M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN 6

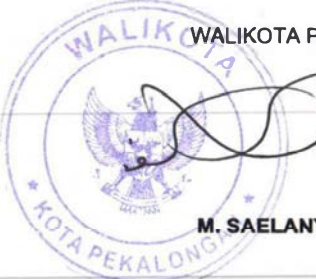


PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	85.250.000.000,00	53.423.000.000,00	(31.827.000.000,00)	(37,33)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.290.820.000,00	11.763.223.000,00	(6.527.597.000,00)	(35,69)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.363.000.000,00	5.358.000.000,00	(1.005.000.000,00)	(15,79)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.116.500.000,00	75.015.880.000,00	(33.100.620.000,00)	(30,62)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.020.320.000,00	145.560.103.000,00	(72.460.217.000,00)	(33,24)
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.183.473.000,00	31.848.984.000,00	6.665.511.000,00	26,47
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480.230.431.000,00	436.146.579.000,00	(44.083.852.000,00)	(9,18)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	126.976.389.000,00	106.481.800.000,00	(20.494.589.000,00)	(16,14)
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	632.390.293.000,00	574.477.363.000,00	(57.912.930.000,00)	(9,16)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.378.640.000,00	15.975.098.000,00	(6.403.542.000,00)	(28,61)
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(20,00)
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.572.229.000,00	45.849.306.000,00	12.277.077.000,00	36,57
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	612.000.000,00	612.000.000,00	
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.950.869.000,00	122.436.404.000,00	(8.514.465.000,00)	(6,50)
	JUMLAH PENDAPATAN	981.361.482.000,00	842.473.870.000,00	(138.887.612.000,00)	(14,15)
2.	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	356.937.005.000,00	350.662.570.000,00	(6.274.435.000,00)	(1,76)
2.1.2	Belanja Hibah	40.488.500.000,00	39.283.100.000,00	(1.205.400.000,00)	(2,98)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	88.631.351.000,00	86.631.351.000,00	4.331,57

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	402.074.005.000,00	481.225.521.000,00	79.151.516.000,00	19,69
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	73.629.906.000,00	61.581.214.000,00	(12.048.692.000,00)	(16,36)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.767.474.000,00	288.602.669.000,00	(84.164.805.000,00)	(22,58)
2.2.3	Belanja Modal	207.386.097.000,00	98.048.152.000,00	(109.337.945.000,00)	(52,72)
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	653.783.477.000,00	448.232.035.000,00	(205.551.442.000,00)	(31,44)
	JUMLAH BELANJA	1.055.857.482.000,00	929.457.556.000,00	(126.399.926.000,00)	(11,97)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(74.496.000.000,00)	(86.983.686.000,00)	(12.487.686.000,00)	16,76
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.196.000.000,00	78.683.686.000,00	26.487.686.000,00	50,75
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	14.000.000.000,00	0,00	(14.000.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.746.000.000,00	91.233.686.000,00	12.487.686.000,00	15,86
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.496.000.000,00	86.983.686.000,00	12.487.686.000,00	16,76
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN 7



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	85.250.000.000,00	53.423.000.000,00	(31.827.000.000,00)	(37,33)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.290.820.000,00	11.763.223.000,00	(6.527.597.000,00)	(35,69)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.363.000.000,00	5.358.000.000,00	(1.005.000.000,00)	(15,79)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.116.500.000,00	75.015.880.000,00	(33.100.620.000,00)	(30,62)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.020.320.000,00	145.560.103.000,00	(72.460.217.000,00)	(33,24)
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.183.473.000,00	31.848.984.000,00	6.665.511.000,00	26,47
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480.230.431.000,00	436.146.579.000,00	(44.083.852.000,00)	(9,18)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	126.976.389.000,00	106.481.800.000,00	(20.494.589.000,00)	(16,14)
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	632.390.293.000,00	574.477.363.000,00	(57.912.930.000,00)	(9,16)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.378.640.000,00	15.975.098.000,00	(6.403.542.000,00)	(28,61)
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(20,00)
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.572.229.000,00	45.849.306.000,00	12.277.077.000,00	36,57
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	11.914.000.000,00	11.914.000.000,00	
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.950.869.000,00	133.738.404.000,00	2.787.535.000,00	2,13
	JUMLAH PENDAPATAN	981.361.482.000,00	853.775.870.000,00	(127.585.612.000,00)	(13,00)
2.	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	356.937.005.000,00	350.662.570.000,00	(6.274.435.000,00)	(1,76)
2.1.2	Belanja Hibah	40.488.500.000,00	39.283.100.000,00	(1.205.400.000,00)	(2,98)
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	88.611.351.000,00	86.611.351.000,00	4.330,57

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	402.074.005.000,00	481.205.521.000,00	79.131.516.000,00	19,68
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	73.629.906.000,00	61.589.739.000,00	(12.040.167.000,00)	(16,35)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.767.474.000,00	288.631.144.000,00	(84.136.330.000,00)	(22,57)
2.2.3	Belanja Modal	207.386.097.000,00	109.333.152.000,00	(98.052.945.000,00)	(47,28)
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	653.783.477.000,00	459.554.035.000,00	(194.229.442.000,00)	(29,71)
	JUMLAH BELANJA	1.055.857.482.000,00	940.759.556.000,00	(115.097.926.000,00)	(10,90)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(74.496.000.000,00)	(86.983.686.000,00)	(12.487.686.000,00)	16,76
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.196.000.000,00	78.683.686.000,00	26.487.686.000,00	50,75
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	14.000.000.000,00	0,00	(14.000.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.746.000.000,00	91.233.686.000,00	12.487.686.000,00	15,86
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.496.000.000,00	86.983.686.000,00	12.487.686.000,00	16,76
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN 8

RINGKASAN PERUBAHAN/PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)									Bertambah/ (Berkurang)		
		APBD Murni 2020	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Pergeseran 4	Pergeseran 5	Pergeseran 6	Pergeseran 7	APBD Perubahan 2020	Pergeseran 9	Rp	%
		Perda No 15 Tahun 2019	Perwal No 21 Tahun 2020	Perwal No 22 Tahun 2020	Perwal No 26 Tahun 2020	Perwal No 32 Tahun 2020	Perwal No 35 Tahun 2020	Perwal No 40 Tahun 2020	Perwal No 43 Tahun 2020	Perda No 4 Tahun 2020	Perwal No 88 Tahun 2020		
4	PENDAPATAN												
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH												
411	Pendapatan Pajak Daerah	85.250.000.000,00	85.250.000.000,00	85.250.000.000,00	53.423.000.000,00	53.423.000.000,00	53.423.000.000,00	53.423.000.000,00	53.423.000.000,00	65.190.000.000,00	65.190.000.000,00	(20.060.000.000,00)	(23,53)
412	Hasil Retribusi Daerah	18.290.820.000,00	18.290.820.000,00	18.290.820.000,00	11.763.223.000,00	11.763.223.000,00	11.763.223.000,00	11.763.223.000,00	11.763.223.000,00	13.070.643.000,00	13.070.643.000,00	(5.220.177.000,00)	(28,54)
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.363.000.000,00	6.363.000.000,00	6.363.000.000,00	5.358.000.000,00	5.358.000.000,00	5.358.000.000,00	5.358.000.000,00	5.358.000.000,00	5.358.000.000,00	5.358.000.000,00	(1.005.000.000,00)	(15,79)
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.116.500.000,00	108.116.500.000,00	108.116.500.000,00	77.430.400.000,00	75.015.880.000,00	75.015.880.000,00	75.015.880.000,00	75.015.880.000,00	89.374.743.000,00	89.374.743.000,00	(18.741.757.000,00)	(17,33)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.020.320.000,00	218.020.320.000,00	218.020.320.000,00	147.974.623.000,00	145.560.103.000,00	145.560.103.000,00	145.560.103.000,00	145.560.103.000,00	172.993.386.000,00	172.993.386.000,00	(45.026.934.000,00)	(20,65)
42	DANA PERIMBANGAN												
421	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.183.473.000,00	25.183.473.000,00	25.183.473.000,00	31.848.984.000,00	31.848.984.000,00	31.848.984.000,00	31.848.984.000,00	31.848.984.000,00	31.848.984.000,00	31.848.984.000,00	6.665.511.000,00	26,47
422	Dana Alokasi Umum	480.230.431.000,00	480.230.431.000,00	480.230.431.000,00	436.146.579.000,00	436.146.579.000,00	436.146.579.000,00	436.146.579.000,00	436.146.579.000,00	436.146.579.000,00	436.146.579.000,00	(44.083.852.000,00)	(9,18)
423	Dana Alokasi Khusus	126.976.389.000,00	126.976.389.000,00	126.976.389.000,00	96.775.320.000,00	96.775.320.000,00	103.279.300.000,00	106.481.800.000,00	103.852.448.000,00	106.953.924.000,00	106.953.924.000,00	(20.022.465.000,00)	(15,77)
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	632.390.293.000,00	632.390.293.000,00	632.390.293.000,00	564.770.883.000,00	564.770.883.000,00	571.274.863.000,00	574.477.363.000,00	574.477.363.000,00	571.848.011.000,00	574.949.487.000,00	(57.440.806.000,00)	(9,08)
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH												
431	Pendapatan Hibah	22.378.640.000,00	22.378.640.000,00	22.378.640.000,00	22.378.640.000,00	15.975.098.000,00	15.975.098.000,00	15.975.098.000,00	15.975.098.000,00	22.496.400.000,00	22.449.420.000,00	5.720.780.000,00	0,32
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	72.000.000.000,00	72.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(4,00)
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.572.229.000,00	33.572.229.000,00	33.572.229.000,00	30.908.716.000,00	30.908.716.000,00	30.908.716.000,00	45.849.306.000,00	45.849.306.000,00	58.355.913.000,00	58.355.913.000,00	24.783.684.000,00	73,82
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	11.914.000.000,00	11.914.000.000,00	11.914.000.000,00	11.914.000.000,00	#DIV/0!
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.950.869.000,00	130.950.869.000,00	131.562.869.000,00	113.899.356.000,00	107.495.814.000,00	107.495.814.000,00	122.436.404.000,00	133.738.404.000,00	164.766.313.000,00	164.719.333.000,00	33.768.464.000,00	25,79
	JUMLAH PENDAPATAN	981.361.482.000,00	981.361.482.000,00	981.973.482.000,00	826.644.862.000,00	817.826.800.000,00	824.330.780.000,00	842.473.870.000,00	853.775.870.000,00	909.607.710.000,00	912.662.206.000,00	(68.699.276.000,00)	(7,00)
5	BELANJA												
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG												
511	Belanja Pegawai	356.937.005.000,00	357.703.147.000,00	357.703.147.000,00	350.662.570.000,00	350.662.570.000,00	350.662.570.000,00	350.662.570.000,00	350.662.570.000,00	350.943.107.000,00	351.197.057.000,00	(5.739.948.000,00)	(1,61)
514	Belanja Hibah	40.488.500.000,00	40.488.500.000,00	40.488.500.000,00	37.883.100.000,00	37.883.100.000,00	37.883.100.000,00	39.283.100.000,00	39.283.100.000,00	40.956.062.000,00	40.956.062.000,00	467.562.000,00	1,15
515	Belanja Bantuan Sosial	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	2.648.500.000,00	3.348.500.000,00	3.348.500.000,00	700.000.000,00	26,43
518	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	6.500.000.000,00	26.000.000.000,00	34.086.788.000,00	75.090.761.000,00	75.090.761.000,00	88.631.351.000,00	88.611.351.000,00	63.616.165.000,00	63.616.165.000,00	61.616.165.000,00	3.080,81
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	402.074.005.000,00	407.340.147.000,00	426.840.147.000,00	425.280.958.000,00	466.284.931.000,00	466.284.931.000,00	481.225.521.000,00	481.205.521.000,00	458.863.834.000,00	459.117.784.000,00	57.043.779.000,00	14,19
52	BELANJA LANGSUNG												
521	Belanja Pegawai	73.629.906.000,00	73.484.656.000,00	73.245.998.000,00	61.530.440.500,00	61.618.971.000,00	61.581.221.000,00	61.581.214.000,00	61.589.739.000,00	73.693.258.000,00	73.724.784.000,00	94.878.000,00	0,13
522	Belanja Barang dan Jasa	372.767.474.000,00	380.922.064.000,00	380.124.626.000,00	315.596.922.000,00	282.676.190.000,00	285.398.879.000,00	288.602.669.000,00	288.631.144.000,00	340.770.147.000,00	343.127.622.000,00	(29.639.852.000,00)	(7,95)
523	Belanja Modal	207.386.097.000,00	194.110.615.000,00	176.258.711.000,00	111.147.444.500,00	94.157.611.000,00	97.976.652.000,00	98.048.152.000,00	109.333.152.000,00	139.410.651.000,00	139.822.196.000,00	(67.563.901.000,00)	(32,58)
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	653.783.477.000,00	648.517.335.000,00	629.629.335.000,00	488.274.807.000,00	438.452.772.000,00	444.956.752.000,00	448.232.035.000,00	459.554.035.000,00	553.874.056.000,00	556.674.602.000,00	(97.108.875.000,00)	(14,85)
	JUMLAH BELANJA	1.055.857.482.000,00	1.055.857.482.000,00	1.056.469.482.000,00	913.555.765.000,00	904.737.703.000,00	911.241.683.000,00	929.457.556.000,00	940.759.556.000,00	1.012.737.890.000,00	1.015.792.386.000,00	(40.065.096.000,00)	(3,79)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(74.496.000.000,00)	(74.496.000.000,00)	(74.496.000.000,00)	(86.910.903.000,00)	(86.910.903.000,00)	(86.910.903.000,00)	(86.983.686.000,00)	(86.983.686.000,00)	(103.130.180.000,00)	(103.130.180.000,00)	(28.634.180.000,00)	38,44
6	PEMBIAYAAN DAERAH												
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH												
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.196.000.000,00	52.196.000.000,00	52.196.000.000,00	78.610.903.000,00	78.610.903.000,00	78.610.903.000,00	78.683.686.000,00	78.683.686.000,00	95.101.710.000,00	95.101.710.000,00	42.905.710.000,00	82,20
612	Pencairan Dana Cadangan	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	0,00	0,00
614	Penerimaan Pinjaman Daerah	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.000.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.746.000.000,00	78.746.000.000,00	78.746.000.000,00	91.160.903.000,00	91.160.903.000,00	91.160.903.000,00	91.233.686.000,00	91.233.686.000,00	107.651.710.000,00	107.651.710.000,00	28.905.710.000,00	36,71
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH												
622	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.518.000.000,00	4.518.000.000,00	268.000.000,00	6,31
623	Pembayaran Pokok Utang									3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	#DIV/0!
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	4.521.530.000,00	4.521.530.000,00	271.530.000,00	6,39
	PEMBIAYAAN NETTO	74.496.000.000,00	74.496.000.000,00	74.496.000.000,00	86.910.903.000,00	86.910.903.000,00	86.910.903.000,00	86.983.686.000,00	86.983.686.000,00	103.130.180.000,00	103.130.180.000,00	28.634.180.000,00	38,44
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

LAMPIRAN 9**PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN PENGAIRAN**

No	Nama Penjual	Luas	Harga	Ket
1	Ida Nuryati	1,00	8.210.700,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
2	Abdul Nasir	10,00	34.841.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
3	Rodhiyah	100,00	156.903.200,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
4	Casiyatun	102,00	91.277.650,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
5	Sri Mulyati	108,00	154.009.990,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
6	Surono Bin Tjartaman	11,00	3.657.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
7	Titi Restuningsih	115,00	570.546.800,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
8	Anifah	12,00	3.591.600,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
9	Arifah	12,00	3.990.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
10	Masturoh	123,00	205.992.400,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
11	Fatimah	13,00	31.425.640,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
12	M. Ali Said	13,00	20.250.980,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
13	Abdul Nasir	14,00	4.655.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
14	Riza Setia	14,00	30.195.340,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
15	Trijono	14,00	88.747.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
16	Lukqman Hakim	15,00	4.987.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
17	M. Yunus	15,00	4.987.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
18	Ruqayah	15,00	15.274.700,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
19	Suro Mudjiyono	15,00	5.373.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
20	Abdullah R	16,00	5.320.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
21	Khotifah	16,00	59.251.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
22	Nani Hidayati	16,00	5.320.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
23	Achmadi	17,00	12.470.350,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
24	Iwan Kurniawan	17,00	10.167.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
25	Khazimah	17,00	55.530.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
26	Paerah	17,00	30.480.250,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
27	M. Abdul Ghofur	18,00	37.693.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
28	Saiful Amir	18,00	5.387.400,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
29	Abdullah R	197,00	67.472.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
30	Achmad Sachwi	20,00	6.650.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
31	Akhmad Asror	20,00	48.744.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
32	Churoziah	20,00	6.650.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
33	Much. Musalkadhim	22,00	6.584.600,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
34	Luqman Hakim	24,00	8.220.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
35	Ibrahim	25,00	23.304.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
36	Trijono	25,00	8.312.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
37	Hadi Subeno	26,00	32.923.800,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
38	Masduki	26,00	94.892.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
39	Akhmad Asror	27,00	67.459.700,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
40	Moh. Rofiq	28,00	199.736.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
41	Riza Setia	3,00	997.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
42	Latifah	30,00	57.681.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
43	Mujiati	31,00	10.307.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
44	Sri Baiti	31,00	10.617.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
45	Nur Fatkhurrohman	32,00	10.640.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
46	Jurotun	33,00	68.164.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
47	Surono Bin Tjartaman	35,00	138.951.300,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
48	Dinarti	36,00	60.964.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji

No	Nama Penjual	Luas	Harga	Ket
49	Chusnul Chotimah	37,00	12.302.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
50	Moh. Rofiq	37,00	17.279.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
51	Muhammad Yusron	38,00	47.625.700,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
52	Muliah	4,00	3.962.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
53	Abdul Aziz	41,00	22.411.820,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
54	Mohammad Izzudin	41,00	129.542.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
55	Ahmad Kusnaini	41,00	88.577.160,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
56	Hidayah	43,00	14.297.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
57	M. Yunus	44,00	13.605.900,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
58	Abdul Aziz	47,00	15.627.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
59	Abdullah R	470,00	170.328.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
60	Rival Indra Arista	49,00	26.092.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
61	Abdul Ghofur	5,00	1.662.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
62	Abdul Fatah	52,00	210.032.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
63	Wahyuri	55,00	146.309.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
64	Maliki Sukardjo	58,00	27.657.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
65	M. Yunus	59,00	18.244.275,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
66	Zainuri	59,00	97.404.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
67	Chusnul Chotimah	6,00	1.855.200,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
68	Sri Baiti	74,00	24.605.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
69	Mufidah	75,00	106.140.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
70	Sri Hartini	773,00	832.662.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
71	Harjo Utarom	8,00	74.606.700,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
72	Alexander Adrian	80,00	301.540.000,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
73	Harjo Utarom	9,00	3.082.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
74	Khazimah	9,00	2.992.500,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
75	Nani Hidayati	9,00	34.633.250,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
76	Sutrisno dan Fauzul Azim	96,00	326.915.340,00	Tanah Bangunan Pengairan Bantaran Sungai Loji
77	Audhukah	12,00	35.328.070,00	Tanah Bangunan Pengairan
78	Sri Agustina	12,00	26.673.200,00	Tanah Bangunan Pengairan
79	Abdurrahman	15,00	9.637.500,00	Tanah Bangunan Pengairan
80	Rozid	15,00	80.864.540,00	Tanah Bangunan Pengairan
81	Mufiah	16,00	59.566.400,00	Tanah Bangunan Pengairan
82	Halimah	17,00	25.106.050,00	Tanah Bangunan Pengairan
83	Muhammad Mahrus	17,00	15.364.400,00	Tanah Bangunan Pengairan
84	Salafudin	17,00	35.412.750,00	Tanah Bangunan Pengairan
85	Suripah	17,00	47.891.320,00	Tanah Bangunan Pengairan
86	Laela Ulfa	18,00	5.985.000,00	Tanah Bangunan Pengairan
87	Purnedi	18,00	34.984.300,00	Tanah Bangunan Pengairan
88	Mutamaroh	19,00	6.317.500,00	Tanah Bangunan Pengairan
89	Muhammad Iqbal	20,00	21.830.000,00	Tanah Bangunan Pengairan
90	Mustain	23,00	60.026.480,00	Tanah Bangunan Pengairan
91	Salafudin	24,00	71.172.330,00	Tanah Bangunan Pengairan
92	Sodikin	24,00	36.004.300,00	Tanah Bangunan Pengairan
93	Nur Rifah	26,00	23.558.750,00	Tanah Bangunan Pengairan
94	Nafisah	28,00	45.842.000,00	Tanah Bangunan Pengairan
95	Abdurrahman	29,00	9.642.500,00	Tanah Bangunan Pengairan
96	Maliki Sukardjo	29,00	55.462.000,00	Tanah Bangunan Pengairan
97	Muhammad Amirudin	29,00	11.849.400,00	Tanah Bangunan Pengairan
98	Salafudin	34,00	93.184.000,00	Tanah Bangunan Pengairan
99	Chusnul Chotimah	37,00	12.302.500,00	Tanah Bangunan Pengairan

No	Nama Penjual	Luas	Harga	Ket
100	Rokhani	38,00	134.180.000,00	Tanah Bangunan Pengairan
101	Nur Mifrochah	40,00	16.677.700,00	Tanah Bangunan Pengairan
102	Abdul Ajis	43,00	81.581.500,00	Tanah Bangunan Pengairan
103	Fatkur Rohman	44,00	14.630.000,00	Tanah Bangunan Pengairan
104	Zaenal Abidin	45,00	16.333.100,00	Tanah Bangunan Pengairan
105	Sriyati	49,00	230.835.500,00	Tanah Bangunan Pengairan
106	Fitria Rahmi Z	50,00	17.125.000,00	Tanah Bangunan Pengairan
107	Lifkha	51,00	29.723.100,00	Tanah Bangunan Pengairan
108	Agus Subechi	56,00	57.076.000,00	Tanah Bangunan Pengairan
109	Erni Asih	65,00	72.570.900,00	Tanah Bangunan Pengairan
110	Adam Santoso	34,00	64.849.200,00	Tanah Bantaran Sungai Loji Thn 2020
111	Amrin	44,00	94.172.000,00	Tanah Bantaran Sungai Loji Thn 2020
112	Anis Susanah	31,00	8.060.000,00	Tanah Bantaran Sungai Loji Thn 2020
113	Anis Susanah	39,00	12.870.000,00	Tanah Bantaran Sungai Loji Thn 2020
114	Anis Susanah	39,00	10.140.000,00	Tanah Bantaran Sungai Loji Thn 2020
115	Sabilal	78,00	214.052.000,00	Tanah Bantaran Sungai Loji Thn 2020
116	Suhardi	47,00	73.004.000,00	Tanah Bantaran Sungai Loji Thn 2020
117	Sopiya	26,00	8.645.000,00	Tanah Bantaran Sungai Loji
118	Farida Agus Setiawati	17450,00	2.843.733.300,00	Tanah Kolam Retensi/Kolam Tambat Sebelah Timur Kali Mati
119	Didik Prayetno	180,00	373.210.600,00	Tanah Kolam Retensi/Kolam Tambat Sebelah Timur Kali Mati
120	Farida Agus Setiawati	2093,00	333.911.000,00	Tanah Kolam Retensi/Kolam Tambat Sebelah Timur Kali Mati
121	Kunaisih	450,00	166.007.400,00	Tanah Kolam Retensi/Kolam Tambat Sebelah Timur Kali Mati
122	Maisari	74,00	26.491.100,00	Tanah Kolam Retensi/Kolam Tambat Sebelah Timur Kali Mati
123	Eny Tri Lestari	78,00	260.144.400,00	Tanah Kolam Retensi/Kolam Tambat Sebelah Timur Kali Mati
124	Rudyanto	202,00	124.078.500,00	Tanah Rumah Pompa Kel. Panjang Baru
125	Rudyanto	250,00	153.562.500,00	Tanah Rumah Pompa Kel. Panjang Baru
126	Rudyanto	279,00	171.375.750,00	Tanah Rumah Pompa Kel. Panjang Baru
127	Solekha	195,00	238.053.000,00	Tanah Untuk Rumah Pompa Kel. Pasikratonkramat
		26.450,00	12.032.903.585,00	
	KJPP Andi Tiffani dan Rekan		49.274.500,00	
	KJPP Toto Suharto dan Rekan		49.000.000,00	
	Biaya Pengadaan		123.547.700,00	
JUMLAH			12.254.725.785,00	

LAMPIRAN 10
REALISASI PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Penyerapan	Target Output		Capaian Output	
					Volume	Satuan	Volume	Satuan
A.	Bidang Kesehatan	1.770.862.000,00	1.669.647.693,00	94%				
1	Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Covid-19	550.000.000,00	516.643.873,00	94%	3	bulan	3	bulan
2	Percepatan Penanganan Covid-19	1.220.862.000,00	1.153.003.820,00	94%	7	item	7	item
B.	Penanganan Dampak Ekonomi	1.048.500.000,00	930.500.000,00	89%				
1	Pemberian Bantuan kepada Santri, Madrasah Diniyah dan TPQ terdampak Covid-19	1.048.500.000,00	930.500.000,00	89%	3.250	orang	2.857	orang
					85	Madrasah Diniyyah	85	Madrasah Diniyyah
					270	TPQ	270	TPQ
C.	Bantuan Sosial Safety Net / Jaring Pengaman Sosial	24.615.968.000,00	24.217.913.652,00	98%				
1	Kegiatan Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	23.505.260.000,00	23.197.361.800,00	99%	37.886	kk	37.373	kk
2	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19	778.310.000,00	688.651.852,00	88%	47	item	47	item
3	Penggantian dan Peremajaan Datacenter Kota Pekalongan untuk Efektifitas Pelaporan Refocusing	332.398.000,00	331.900.000,00	100%	1	set	1	set
	Jumlah	27.435.330.000,00	26.818.061.345,00	98%				

REALISASI PENGGUNAAN DID TAMBAHAN PERIODE PERTAMA

Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Penyerapan	Target Output		Realisasi Output	
				Volume	Satuan	Volume	Satuan
PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH	7.985.102.000	7.415.253.570	100%				
1	Pembangunan Kawasan Ekonomi Rakyat Tirto	215.000.000	213.326.000	100%	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
2	Sertifikasi pertukangan	150.000.000	148.443.200	100%	2 kali	2 kali	2 kali
3	Peningkatan jalan Merak	180.000.000	173.689.000	100%	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
4	Peningkatan jalan (Jl Ahmad Dahlan)	200.000.000	192.455.000	100%	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
5	Peningkatan jalan (Jl Banyurip Ageng) MAN IC	200.000.000	188.513.000	100%	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
6	Pemeliharaan jalan se kota	750.000.000	721.966.440	100%	4 bulan	4 bulan	4 bulan
7	Pengadaan Pompa Pengendali banjir	125.500.000	122.547.500	100%	16 unit	16 unit	16 unit
8	Kajian struktur batik plaza dan Ruko Eks Grogolan Lama	150.000.000	76.630.000	100%	2 kali	2 kali	2 kali
9	Pengadaan Viar	60.000.000	54.000.450	100%	2 unit	2 unit	2 unit
10	Penataan paving lapangan sisi selatan Setda	200.000.000	196.042.000	100%	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Primer Saluran Jl. Patiunus	150.000.000	147.587.000	100%	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
12	Pengurugan Pasar Darurat Sorogenen	200.000.000	179.070.000	100%	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
13	Pengadaan MCK Komunal	400.000.000	389.028.950	100%	2 unit	2 unit	2 unit
14	Tim Gabungan Pengendalian Pengawasan Penegakan Hukum	225.000.000	221.550.750	100%	48 - 20 kali	48 - 20 kali	48 - 20 kali
15	Sound system dan instalasi Lap Mataram, Gapura	25.000.000	24.900.000	100%	2 unit	2 unit	2 unit
16	Padat karya pembersihan sungai dan saluran se Kota	385.000.000	279.721.035	100%	232 orang	232 orang	232 orang
17	Pelatihan BLK bagi pencari kerja	100.000.000	99.553.766	100%	800 orang	800 orang	800 orang
18	Pembangunan kios las di LIK dan Gedung Pengelola	1.175.000.000	952.886.854	100%	12 bangunan / ruang	12 bangunan / ruang	12 bangunan / ruang
19	Sosialisasi HKI dan pendaftaran Indikasi Geografis Pekalongan ke Kemkumham (Kerjasama dengan FHUI)	40.000.000	39.000.000	100%	10 IKM	10 IKM	10 IKM
20	Fasilitasi Sertifikasi Produk makanan	40.000.000	39.985.000	100%	50 IKM	50 IKM	50 IKM

No.	Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Penyerapan	Target Output		Capaian Output	
					Volume	Satuan	Volume	Satuan
21	Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga dan perempuan korban kekerasan	72.657.000	69.799.000	100%	90	orang	90	orang
22	Pengendalian Pemakaian Pupuk dan Pesticida	147.500.000	146.877.500	100%	415	pupuk	415	pupuk
23	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	15.000.000	15.000.000	100%	3	lokasi/kel	3	lokasi/kel
24	Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan	45.000.000	44.392.000	100%	1	paket	1	paket
25	Rehab IPAL Lindi TPA	200.000.000	196.471.000	100%	1	unit	1	unit
26	Bantuan pemeliharaan becak	66.240.000	66.240.000	100%	160	becak	160	becak
27	Peralatan Batik TV	200.000.000	199.686.800	100%	1	paket	1	paket
28	Pembuatan media Pembelajaran televisi di LPPL Batik TV	95.595.000	95.495.000	100%	1	paket	1	paket
29	Pembuatan media Pembelajaran Radio LPPL Radio Kota Batik	55.730.000	55.722.000	100%	1	paket	1	paket
30	Pelatihan Digital Marketing	50.000.000	50.000.000	100%	40	UMKM	40	UMKM
31	Pemeliharaan Pasar Grogolan (perbaikan atap dan saluran)	200.000.000	197.162.000	100%	1	pasar	1	pasar
32	Pemeliharaan Pasar Kuripan (perbaikan pintu gerbang, instalasi air khusus ayam, perbaikan cctv)	200.000.000	197.212.000	100%	1	pasar	1	pasar
33	Pemeliharaan Pasar Banyurip (perbaikan iwf dan atap, perbaikan pintu pagar, perbaikan instalasi)	100.000.000	98.015.000	100%	1	pasar	1	pasar
34	Pemeliharaan Pasar Podosugih (Keramik aula, perbaikan saluran)	100.000.000	98.168.000	100%	1	pasar	1	pasar
35	Pemeliharaan Pasar Patiunus (pemasangan lampu, perbaikan talang air)	150.000.000	146.780.000	100%	1	pasar	1	pasar
36	Pemeliharaan saluran pasar darurat sorogonen	200.000.000	194.747.000	100%	1	pasar	1	pasar
37	Padat karya kampung wisata dan Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Aman)	150.000.000	150.000.000	100%	3	lokasi	3	lokasi
38	Pelatihan sertifikasi profesi dan uji kompetensi tenaga usaha dan pemandu wisata	50.000.000	50.000.000	100%	40	orang	40	orang
39	Jasa pembuatan konten komunitas seni pendukung pariwisata	35.000.000	35.000.000	100%	4	video	4	video
40	Fasilitasi PHRI Kota Pekalongan	40.000.000	40.000.000	100%	6 / 2	kali	6 / 2	kali
41	Pengurugan Obyek Wisata Pantai Slamaran	200.000.000	198.443.700	100%	1	lokasi	1	lokasi
42	Pengembangan bibit ikan unggul	35.000.000	35.000.000	100%	175	pasang	175	pasang
43	Bantuan sarana tangkap	138.000.000	132.471.000	100%	9	buah	9	buah
44	Bantuan saprodi budidaya perikanan	150.000.000	149.374.375	100%	1.584.525/ 3.694	ekor/kg	1.584.525/ 3.694	ekor/kg
45	Premi asuransi nelayan	17.500.000	16.000.000	100%	200	orang	200	orang
46	Lomba rancang busana dan peringatan hari batik	200.000.000	177.301.250	100%	3	even	2	even
47	Pengadaan Air Purifier	40.000.000	37.620.000	100%	5	unit	5	unit
48	Pelatihan pembuatan media pembelajaran daring	61.380.000	61.380.000	100%	180	guru	180	guru
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BIDANG KESEHATAN		6.955.488.000	6.906.439.632	100%				
1	Pengadaan Thermogun untuk Sekolah PAUD, SD, SMP	155.277.000	141.137.945	100%	476	unit	476	unit
2	Pemeriksaan SWAB	1.508.400.000	1.508.352.700	100%	2620	paket	7977	paket
3	Pengadaan Hand sanitizer untuk TPS (Pilkada)	35.580.000	35.580.000	100%	1186	buah	1186	buah
4	Pengadaan APD untuk pelayanan publik	61.536.000	61.475.000	100%	4	jenis	4	jenis
5	Pengadaan Rapid Tes	42.500.000	40.950.000	100%	500	buah	500	buah
6	Desinfektan untuk Dinkes,TNI, Polri	33.650.000	33.650.000	100%	30	kali	10	kali
7	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	567.438.000	562.968.410	100%	3	paket	3	paket
8	Insentif nakes dan non nakes	286.975.000	282.445.000	100%	2	bulan	2	bulan
9	Entry dan Pemutakhiran Data Kepesertaan BPJS Kesehatan,	51.204.000	50.704.000	100%	19852	record	19852	record

No.	Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Penyerapan	Target Output		Capaian Output	
					Volume	Satuan	Volume	Satuan
10	Rehab Pustu Pabean	100.000.000	99.154.026	100%	85	hari	85	hari
11	Pengurangan Puskesmas Jenggol	130.000.000	128.839.000	100%	4	bulan	4	bulan
12	Pengadaan 130 Thermogun	39.000.000	38.775.000	100%	1	lokasi	1	lokasi
13	Supporting Jogo Tonggo Tingkat kelurahan, RW, RT	178.350.000	178.340.000	100%	1	lokasi	1	lokasi
14	Penyelenggaraan Rumah Isolasi Covid	488.375.000	482.294.141	100%	58	kali	58	kali
15	Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dan Pemberian Biaya Hidup Penderita Covid-19	100.000.000	100.000.000	100%	117	buah	117	buah
16	Pengadaan Alat Laboratorium PCR	1.736.097.400	1.734.645.542	100%	1	Unit Laboratorium	1	Unit Laboratorium
17	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi	455.020.700	454.503.655	100%	13	unit	13	unit
18	Belanja Jasa Laborat (Analisis Lab)	60.000.000	59.144.000	100%	6	orang	6	orang
19	Insentif Petugas Penanganan COVID-19	127.800.000	127.800.000	100%	2	bulan	2	bulan
20	Pengadaan mesin cuci	318.881.900	318.881.818	100%	1	unit	1	unit
21	Belanja Perlengkapan Lab dan Kesehatan	347.200.000	346.829.395	100%	2	bulan	2	bulan
22	Pengadaan APD (Percepatan Penanganan Covid-19)	120.000.000	119.970.000	100%	1500	Pcs	1500	Pcs
23	Cadangan untuk Penanganan COVID-19	12.203.000		100%	1	bulan		
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BIDANG BANTUAN SOSIAL		-	-	100%				
1	-	-	-	100%				
Jumlah		14.940.590.000	14.321.693.202	1				

REALISASI PENGGUNAAN DID TAMBAHAN PERIODE KEDUA

Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Penyerapan	Target Output		Realisasi Output	
				Volume	Satuan	Volume	Satuan
PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH	3.742.500.000	3.521.546.190	94%				
1 Normalisasi Saluran Aseminatur III (Depan Stadion Hoegoeng - Hilir Bandengan)	200.000.000	196.664.200	98%	1	lokasi	1	lokasi
2 Rehab Saluran Kandang Ayam - Panjang Wetan	100.000.000	99.255.200	99%	1	lokasi	1	lokasi
3 Normalisasi Saluran Jalan Surabaya dan Jl. Semarang	90.000.000	86.129.000	96%	1	lokasi	1	lokasi
4 Rehab Saluran Gang Umbul	160.000.000	153.652.000	96%	1	lokasi	1	lokasi
5 Normalisasi saluran Jl. Patriot Utara	100.000.000	97.208.750	97%	1	lokasi	1	lokasi
6 Normalisasi saluran Pematang Jalan Jl. Sulawesi	200.000.000	192.493.000	96%	1	lokasi	1	lokasi
7 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran Pematang Jalan se-Kota	100.000.000	96.799.600	97%	3	bulan	3	bulan
8 Rehab Pintu Air Stasiun Pompa Sepucung	80.000.000	77.925.000	97%	1	unit	1	unit
9 Normalisasi Saluran se-Kota	70.000.000	56.893.800	81%	1	saluran	1	saluran
10 Normalisasi saluran Jl. Kurinci dan Pembuatan Pintu Pengendali	200.000.000	196.455.000	98%	1	lokasi	1	lokasi
11 Normalisasi saluran Jl. Asem Binatur I	200.000.000	191.261.000	96%	1	lokasi	1	lokasi
12 Normalisasi saluran Pematang Jalan A. Yani	200.000.000	185.877.000	93%	1	lokasi	1	lokasi
13 Pengadaan Pompa Mobile & selangnya 2 unit @ Rp. 100.000.000	200.000.000	198.325.000	99%	2	unit	2	unit
14 Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	390.000.000	382.450.000	98%	3	Kegiatan	3	Kegiatan
15 Pengadaan Truk Sedot Limbah	550.000.000	541.953.640	99%	1	unit	1	unit
16 Sosialisasi Penyedotan Limbah kepada UMKM	15.000.000	15.000.000	100%	2	kali	2	kali
17 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	15.000.000	15.000.000	100%	48	titik	48	titik

No.	Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Penyerapan	Target Output		Capaian Output	
					Volume	Satuan	Volume	Satuan
18	Pembuatan Pagar Pasar Darurat Sorogenen	50.000.000	49.259.000	99%	1	pasar	1	pasar
19	Pemberdayaan UMKM Penghasil Masker	50.000.000	50.000.000	100%	11000	buah	11000	buah
20	Pembuatan Tanggul Darurat	48.000.000	48.000.000	100%	3440	buah	3440	buah
21	Pendampingan Pengisian Aplikasi Jogo Tonggo	89.500.000	89.500.000	100%	340	orang	340	orang
22	Pembuatan Pagar Obyek Wisata Pekalongan Mangrove Park	200.000.000	198.195.000	99%	1	pekerjaan	1	pekerjaan
23	Padat Karya Tanggul Tirta	35.000.000	35.000.000	100%	99	lokasi	1	lokasi
24	Pengadaan Sarpras TIK (BLC)	400.000.000	268.250.000	67%	25	buah	25	buah
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BIDANG KESEHATAN		994.107.000	953.676.811	96%				
1	Pengadaan Spanduk Disiplin Protokol Kesehatan dan Hand Sanitizer	25.000.000	25.000.000	100%	65	buah	65	buah
					400	botol	400	botol
2	Peninggian halaman dan pagar Pustu Pasirsari	65.000.000	64.683.375	100%	1	lokasi	1	lokasi
3	Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dan Pemberian Biaya Hidup Penderita Covid-19	110.000.000	108.000.000	98%	3	bulan	3	bulan
4	Penataan halaman belakang Puskesmas Klego	60.000.000	59.475.618	99%	1	lokasi	1	lokasi
5	Pengadaan Sarung Tangan untuk Petugas Pilkada	30.000.000	29.865.000	100%	75000	pasang	75000	pasang
6	Pengadaan Masker	25.000.000	17.664.200	71%	6250	masker	6250	masker
7	Peninggian eks BKPM	55.000.000	54.480.000	99%	1	lokasi	1	lokasi
8	Pengadaan Alat Kesehatan	450.000.000	447.608.618	99%	4	unit	4	unit
9	Taliah tenaga kesehatan terdampak Covid (50 orng x 1,4 jt)	70.000.000	70.000.000	100%	50	orang	50	orang
10	Penyemprotan Desinfektan	27.000.000	26.900.000	100%	280	kali	280	kali
11	penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19	50.000.000	50.000.000	100%	174	m2	174	m2
					3084	lbr	3084	lbr
					3550	lbr	3550	lbr
12	Cadangan untuk Penanganan COVID-19	27.107.000	-					
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BIDANG BANTUAN SOSIAL		7.770.000.000	7.599.287.000	98%				
1	Jaring Pengaman Sosial	7.770.000.000	7.599.287.000	98%	38350	KK	37529	KK
Jumlah		12.506.607.000	12.074.510.001	97%				

LAMPIRAN 11**SILPA TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	83.881.778.889,00
	Saldo Giro di Bank Jateng	83.881.778.889,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	701.500,00
		701.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	299.838,00
		299.838,00
4	Kas di BLUD	27.132.720.550,00
	BLUD Puskesmas Bendan	206.074.553,00
	BLUD Puskesmas Kramatsari	81.961.885,00
	BLUD Puskesmas Medono	64.309.794,00
	BLUD Puskesmas Tirto	101.807.617,00
	BLUD Puskesmas Klego	94.676.374,00
	BLUD Puskesmas Sokorejo	123.193.948,00
	BLUD Puskesmas Tondano	91.656.440,00
	BLUD Puskesmas Noyontaan	28.103.651,00
	BLUD Puskesmas Dukuh	149.114.772,00
	BLUD Puskesmas Krapyak Kidul	114.006.252,00
	BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	51.522.647,00
	BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	138.335.672,00
	BLUD Puskesmas Jenggot	89.982.309,00
	BLUD Puskesmas Buaran	155.268.506,00
	PSPJ	914.345,00
	RSUD Bendan	25.641.791.785,00
5	Kas BOS 2020	1.527.140.813,00
	Jumlah	112.542.641.590,00
	Utang PFK	340.000,00
	Jumlah	112.542.301.590,00

LAMPIRAN 12

RINCIAN KAS DI KASDA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Sisa 2019	Tahun 2020		
			Pendapatan	Belanja	Sisa Lebih/Kurang
1	DAK Fisik	1.414.751.524,00	29.388.599.718,00	29.321.833.140,00	1.481.518.102,00
	DAK Reguler Pendidikan	2.358.000	6.536.609.000,00	6.533.096.000,00	5.871.000,00
	DAK Reguler Kesehatan	34.912.000	15.964.018.200,00	15.954.987.090,00	43.943.110,00
	DAK Reguler Perumahan dan Permukiman	18.179.000	2.455.125.000,00	2.431.446.000,00	41.858.000,00
	DAK Reguler Jalan	47.428.400	-	-	47.428.400,00
	DAK Penugasan Kesehatan	996.293.150	2.502.924.511,00	2.502.924.511,00	996.293.150,00
	DAK Penugasan Air Minum	300.378.000	-	-	300.378.000,00
	DAK Penugasan Sanitasi	9.770.000	-	-	9.770.000,00
	DAK Penugasan Pasar	5.432.974	-	-	5.432.974,00
	DAK Penugasan Pariwisata	-	1.929.923.007,00	1.899.379.539,00	30.543.468,00
2	DAK Non Fisik	2.101.979.912,00	75.602.917.617,00	71.109.855.776,00	6.759.341.753,00
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	702.928.620,00	47.709.286.000,00	45.532.797.160,00	2.879.417.460,00
	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	232.050.000,00	253.950.000,00	418.250.000,00	232.050.000,00
	Bantuan Operasional Kesehatan	627.692.272,00	15.493.569.637,00	13.836.640.864,00	2.284.621.045,00
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	46.705.204,00	1.102.178.796,00	905.037.074,00	243.846.926,00
	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.273.121,00	482.736.879,00	468.760.600,00	22.249.400,00
	Pelayanan Administrasi Kependudukan	191.415.541,00	887.061.459,00	931.602.654,00	146.874.346,00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	257.062.654,00	6.542.737.346,00	6.166.452.424,00	633.347.576,00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.900.000,00	2.120.300.000,00	1.988.100.000,00	135.100.000,00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	32.952.500,00	667.047.500,00	518.480.000,00	181.520.000,00
	Dana Pelayanan Kepariwisata	-	344.050.000,00	343.735.000,00	315.000,00
3	DBH	31.761.805,00	6.883.683.000,00	6.896.564.422,00	18.880.383,00
	DBHCHT	31.761.805,00	6.883.683.000,00	6.896.564.422,00	18.880.383,00
6	Silpa Tidak Terikat				75.622.038.651,00
	Jumlah Silpa				83.881.778.889,00

LAMPIRAN 13**SISA DANA BOS PADA MASING-MASING SEKOLAH**

No	Nama Sekolah	Sisa Dana		
		Tunai	Bank	Jumlah
1	SD Negeri Kandang Panjang 02	0	7.398.852,00	7.398.852,00
2	SD Negeri Karangmalang	0	1.342.642,00	1.342.642,00
3	SD Negeri Kebulen	0	6.728.818,00	6.728.818,00
4	SD Negeri Kandang Panjang 01	0	22.185.739,00	22.185.739,00
5	SD Negeri Kandang Panjang 10	0	25.545.311,00	25.545.311,00
6	SD Negeri Degayu 01	0	30.000,00	30.000,00
7	SD Negeri Degayu 02	0	381.000,00	381.000,00
8	SD Negeri Dekoro	0	20.982,00	20.982,00
9	SD Negeri Dukuh	0	32.299,00	32.299,00
10	SD Negeri Duwet	0	194.292,00	194.292,00
11	SD Negeri Gamer 01	0	13.100.604,00	13.100.604,00
12	SD Negeri Gamer 02	0	137.604,00	137.604,00
13	SD Negeri Jenggot	0	6.034.876,00	6.034.876,00
14	SD Negeri Keputran 04	0	2.826.250,00	2.826.250,00
15	SD Negeri Krapyak Kidul 02	0	71.300,00	71.300,00
16	SD Negeri Krapyak Lor 01	0	200.074,00	200.074,00
17	SD Negeri Krapyak Lor 02	0	225.482,00	225.482,00
18	SD Negeri Krapyak Lor 04	0	5.350.000,00	5.350.000,00
19	SD Negeri Krapyak Lor 05	0	337.331,00	337.331,00
20	SD Negeri Kraton	0	8.631.316,00	8.631.316,00
21	SD Negeri Kraton Kidul	0	8.212.291,00	6.758.720,00
22	SD Negeri Kuripan Kidul 02	0	2.602.438,00	2.602.438,00
23	SD Negeri Kramatsari 01	0	813.759,00	813.759,00
24	SD Negeri Keputran 06	0	3.183.634,00	3.183.634,00
25	SD Negeri Kertoharjo 01	0	316.000,00	316.000,00
26	SD Negeri Kertoharjo 02	0	239.532,00	239.532,00
27	SD Negeri Klego 01	0	2.293.600,00	2.293.600,00
28	SD Negeri Klego 04	0	227.998,00	227.998,00
29	SD Negeri Kradenan 01	0	21.721.000,00	21.721.000,00
30	SD Negeri Kradenan 04	0	6.942.963,00	6.942.963,00
31	SD Negeri Kuripan Lor 01	0	14.933.750,00	14.933.750,00
32	SD Negeri Bandengan 01	0	540.715,00	540.715,00
33	SD Negeri Banyurip Ageng	0	1.218.156,00	1.218.156,00
34	SD Negeri Baros	0	203.346,00	203.346,00
35	SD Negeri Bendan 01	0	1.380.936,00	1.380.936,00
36	SD Negeri Bendan 03	0	2.874.498,00	2.874.498,00
37	SD Negeri Bendan 04	0	7.525.507,00	7.525.507,00
38	SD Negeri Bendan 08	0	8.475.656,00	8.475.656,00
39	SD Negeri Kuripan Lor 02	0	5.022.755,00	5.022.755,00
40	SD Negeri Bumirejo	0	689.646,00	689.646,00
41	SD Negeri Yosorejo 02	0	870.533,00	870.533,00
42	SD Negeri Landungsari 01	0	54.638.141,00	54.638.141,00
43	SD Negeri Panjang Wetan 03	0	3.900.982,00	3.900.982,00
44	SD Negeri Panjang Wetan 04	0	143.743,00	143.743,00
45	SD Negeri Pasirsari 01	0	170.678,00	170.678,00
46	SD Negeri Podosugih 01	0	2.318.905,00	2.318.905,00
47	SD Negeri Podosugih 03	0	228.156,00	228.156,00
48	SD Negeri Panjang Wetan 01	0	19.743.322,00	19.743.322,00

No	Nama Sekolah	Sisa Dana		
		Tunai	Bank	Jumlah
49	SD Negeri Pabean	0	14.145.468,00	14.145.468,00
50	SD Negeri Landungsari 04	0	11.854.076,00	11.854.076,00
51	SD Negeri Landungsari 05	0	253.471,00	253.471,00
52	SD Negeri Medono 01	0	4.261.222,00	4.261.222,00
53	SD Negeri Medono 04	0	520.070,00	520.070,00
54	SD Negeri Medono 07	0	1.483.503,00	1.483.503,00
55	SD Negeri Medono 08	0	5.344.571,00	5.344.571,00
56	SD Negeri Poncol 01	0	35.497.656,00	35.497.656,00
57	SD Negeri Poncol 02	0	30.257.278,00	30.257.278,00
58	SD Negeri Poncol 03	0	487.760,00	487.760,00
59	SD Negeri Sapuro 05	0	4.304.454,00	4.304.454,00
60	SD Negeri Soko	0	885.792,00	607.889,00
61	SD Negeri Sokorejo	0	37.280,00	37.280,00
62	SD Negeri Tegalrejo	0	3.150.184,00	3.150.184,00
63	SD Negeri Tirto 01	0	3.214.244,00	3.214.244,00
64	SD Negeri Tirto 03	0	34.241.986,00	34.241.986,00
65	SD Negeri Pringlangu	0	206.316,00	206.316,00
66	SD Negeri Sampangan 01	0	222.975,00	222.975,00
67	SD Negeri Sapuro 01	0	9.111.831,00	9.111.831,00
68	SD Negeri Yosorejo 01	0	180.000,00	180.000,00
69	SD Negeri Bandengan 02	0	5.630.682,00	5.630.682,00
70	SD Negeri Buaran	0	1.003.909,00	1.003.909,00
71	SD Negeri Pasirsari 02	0	61.800,00	61.800,00
72	SMPN 01 Pekalongan	0	55.861.122,00	55.861.122,00
73	SMPN 02 Pekalongan	0	31.308.664,00	31.308.664,00
74	SMPN 03 Pekalongan	0	5.270.771,00	5.270.771,00
75	SMPN 04 Pekalongan	0	109.749.575,00	91.324.575,00
76	SMPN 05 Pekalongan	0	103.692.599,00	103.656.054,00
77	SMPN 06 Pekalongan	0	84.984.188,00	84.984.188,00
78	SMPN 07 Pekalongan	0	104.638.987,00	104.638.987,00
79	SMPN 08 Pekalongan	0	111.398.547,00	111.389.147,00
80	SMPN 09 Pekalongan	0	21.610.195,00	21.610.195,00
81	SMPN 10 Pekalongan	0	41.660.105,00	41.660.105,00
82	SMPN 11 Pekalongan	0	23.645.741,00	23.645.741,00
83	SMPN 12 Pekalongan	0	16.956.967,00	16.956.967,00
84	SMPN 13 Pekalongan	0	102.545.118,00	102.545.118,00
85	SMPN 14 Pekalongan	0	22.829.229,00	22.818.878,00
86	SMPN 15 Pekalongan	0	18.044.584,00	18.044.584,00
87	SMPN 16 Pekalongan	0	239.748.954,00	239.748.954,00
88	SMPN 17 Pekalongan	0	14.844.297,00	14.844.297,00
	Jumlah	0	1.547.353.583,00	1.527.140.813,00
Saldo Blokgrand SMP N 4			18.425.000,00	
Kelebihan setor SMPN 14			10.351,00	
Kelebihan Setor SDN Soko			277.903,00	
Uang Pribadi Bendahara yang tersetor ke Rek BOS SDN Kraton Kidul			1.232.571,00	
Uang Pribadi Bendahara yang tersetor ke Rek BOS SMPN 05			36.545,00	
Uang Pribadi Bendahara yang tersetor ke Rek BOS SMPN 08			9.400,00	
Kekurangan Pembayaran Pajak SDN Kraton Kidul				221.000,00
Saldo BOS			1.527.361.813,00	1.527.361.813,00

LAMPIRAN 14**SALDO REKENING BTT**

NO	SKPD	NO REKENING	SALDO
1	Dinas Kesehatan	3007255437	-
2	DINSOS P2KB	3007261968	10.000,00
3	Kelurahan Kauman	3007261640	10.000,00
4	Kelurahan Sapuro Kebulen	3007261658	10.000,00
5	Kelurahan Degayu	3007261666	10.000,00
6	Kelurahan Kandang Panjang	3007261674	10.000,00
7	Kelurahan Bandengan	3007261682	10.000,00
8	Kelurahan Podosugih	3007261691	10.000,00
9	Kelurahan Padukuan Kraton	3007261721	10.000,00
10	Kelurahan Pasir Kramat Kraton	3007261739	10.000,00
11	Kelurahan Krapyak	3007261747	10.000,00
12	Kelurahan Panjang Wetan	3007261755	10.000,00
13	Kelurahan Medono	3007261763	10.000,00
14	Kelurahan Setono	3007261771	1.010.000,00
15	Kelurahan Kalibaras	3007261631	10.000,00
16	Kelurahan Noyontaansari	3007261780	10.000,00
17	Kelurahan Gamer	3007261828	10.000,00
18	Kelurahan Kuripan Yosorejo	3007261798	10.000,00
19	Kelurahan Buaran Kradenan	3007261836	10.000,00
20	Kelurahan Panjang Baru	3007261852	10.000,00
21	Kelurahan Bendan Kergon	3007261844	10.000,00
22	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	3007261861	10.000,00
23	Kelurahan Klego	3007261879	10.000,00
24	Kelurahan Banyurip	3007261887	10.000,00
25	Kelurahan Tirta	3007261895	10.000,00
26	Kelurahan Pringrejo	3007261917	10.000,00
27	Kelurahan Sokoduwet	3007261925	10.000,00
28	Kelurahan Poncol	3007261933	10.000,00
29	Kelurahan Jenggot	3007261941	10.000,00
30	Diskominfo	3007263065	-
31	Bag Umum Setda	3007265416	-
32	RSUD Bendan	3007265467	-
33	Dinperinaker	3007265491	-
34	DLH	3007265556	-
35	Dinparbudpora	3007265483	-
36	DPMPPA	3007265548	50.000,00
37	Dinperpa	3007265602	-
38	Dinas Pendidikan	3007265599	-
39	Dindagkop UKM	3007265611	-
40	Dinhub	3007265645	50.000,00
41	Satpol PP	3007265513	-
42	Dinperkim	3007265637	-
43	DPUPR	3007265629	-
44	Setda Bag.Pereko	3007265696	-
45	DKP	3007265726	-
46	Kecamatan Pekalongan Barat	3007267133	-
47	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	3007267966	50.000,00
48	Bagian Kesra Setda	3007263863	349.838,00
JUMLAH			1.779.838,00

LAMPIRAN 15
DAFTAR PERSEDIAAN YANG KADALUARSA

NO	NAMA BARANG	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	MEYLON 84 INJEKSI	2	AMPUL	6.448,20	12.896,40
2	HYTROZ 2 mg TABLET	59	TABLET	938	55.342,00
3	KETOROLAC 30 mg INJEKSI	2	AMPUL	1.089,00	2.178,00
4	MERSIBION 5000 INJEKSI	9	AMPUL	4.598,00	41.382,00
5	EPINEPHRINE 0,1 % INJEKSI	2	AMPUL	1.408,00	2.816,00
6	FOSFOMYCIN SODIUM 2 G INJEKSI	4	VIAL	142.120,00	568.480,00
7	PROC PENICILLIN CRYST INJ / PPC	3	VIAL	17.600,00	52.800,00
8	HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE INJEKSI	7	AMPUL	7.480,00	52.360,00
9	MEYLON 84 INJEKSI	2	AMPUL	6.448,20	12.896,40
10	CHLORPROMAZINE 25MG INJEKSI	9	AMPUL	1.326,00	11.934,00
11	DOXYCYCLIN 100 mg TABLET	52	TABLET	437,58	22.754,16
12	RECO T.M	2	BOTOL	7.407,68	14.815,36
13	AVODART TABLET	13	TABLET	4.699,97	61.099,61
14	AVODART TABLET	7	TABLET	4.935,00	34.545,00
15	CHLOROQUIN 150 MG TABLET	18	tablet	1.368,85	24.639,30
16	DUMIN RECTAL TUBE	1	BUAH	15.510,00	15.510,00
17	Kodein HCl tab 10 mg	1.200	Tablet	571	685.200,00
18	NOREPHINEPRINE BITARTRATE 4 MG	1	AMPUL	25.839,00	25.839,00
19	PIRACETAM 400 mg TABLET	100	TABLET	315,7	31.570,00
20	CATAFLAM FAST TABLET	7	BUNGKUS	7.661,94	53.633,58
21	DESOXIMETASONE 0,25 CREAM 15 G	1	TUBE	10.920,00	10.920,00
22	HEPTASAN TABLET	69	TABLET	275	18.975,00
23	ILIADIN SPRAY	1	FLS	34.320,00	34.320,00
24	LISINAPRIL 5 mg TABLET	29	TABLET	220	6.380,00
25	NEO GYNOXA OVULA	1	BUAH	14.058,00	14.058,00
26	AMINOPHYLLIN INJEKSI	3	AMPUL	2.789,00	8.367,00
27	DOBUTAMINE 50 MG INJEKSI	3	AMPUL	11.843,00	35.529,00
28	MINIASPI 80 mg TABLET	5	TABLET	105	525,00
29	NEURALGIN RX TABLET	27	TABLET	748	20.196,00
30	NEURALGIN RX TABLET	40	TABLET	748	29.920,00
31	RIFASTAR TABLET	84	TABLET	4.603,50	386.694,00
32	SERUM ANTI BISA ULAR INJEKSI	1	AMPUL	750.750,00	750.750,00
33	ANTI HEMOROID SUPP	8	SUPPO	3.167,00	25.336,00
34	CATAPRES INJEKSI	2	AMPUL	33.900,00	67.800,00
35	CRIPSA TABLET	36	TABLET	16.687,00	600.732,00
36	CRIPSA TABLET	2	TABLET	16.687,00	33.374,00
37	FENTANYL INJEKSI	1	AMPUL	44.390,94	44.390,94
38	VOMETA DROPS	1	BOTOL	39.105,00	39.105,00
39	CEPEZET INJEKSI	11	AMPUL	6.077,50	66.852,50
40	CETADOP INJEKSI	2	AMPUL	7.560,00	15.120,00
41	MEYLON 84 INJEKSI	14	AMPUL	6.448,20	90.274,80
42	NEO KAOLANA SIRUP 120 ml	2	FLS	12.276,00	24.552,00
43	PIRACETAM 400 mg TABLET	26	TABLET	315,72	8.208,72
44	AMPICILLIN 1 gr INJEKSI	2	AMPUL	8.236,80	16.473,60
45	CENDO EFRISSEL T.M.	2	FLS	15.097,50	30.195,00
46	MgSO4 40% INJEKSI	6	AMPUL	3.796,10	22.776,60
47	MgSO4 40% INJEKSI	3	AMPUL	3.796,11	11.388,33
48	RECO T.M	7	BOTOL	7.407,68	51.853,76
49	THYROZOL 5 mg TABLET	85	TABLET	661	56.185,00
50	AMIODARONE IV INJEKSI - AMPUL	2	AMPUL	7.909,16	15.818,32
51	D 40% INJEKSI 25 ml	1	FLS	9.509,50	9.509,50
52	MgSO4 40% INJEKSI	4	AMPUL	3.796,11	15.184,44
53	NTG 10 MG INJEKSI	4	AMPUL	50.050,00	200.200,00
JUMLAH					4.544.655,32

LAMPIRAN 16

RINCIAN SALDO PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2019

REKENING	LRA	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
01.01.07.01.01	Bahan	101.755.216,11	7.786.132.932,13	7.678.455.012,02	209.433.136,22
01.01.07.01.01.01	Bahan Bangunan dan Konstruksi	31.911.204,00	6.087.427.335,90	5.992.293.235,90	127.045.304,00
01.01.07.01.01.02	Bahan Kimia	67.765.440,17	93.445.296,11	99.027.929,06	62.182.807,22
01.01.07.01.01.04	Bahan Bakar Dan Pelumas	1.100.071,94	590.473.707,12	589.993.854,06	1.579.925,00
01.01.07.01.01.05	Bahan Baku	335.000,00	165.612.293,00	165.947.293,00	-
01.01.07.01.01.08	Bahan/Bibit Tanaman	293.500,00	772.627.000,00	755.105.400,00	17.815.100,00
01.01.07.01.01.09	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	350.000,00	21.245.000,00	21.245.000,00	350.000,00
01.01.07.01.01.10	Isi Tabung Gas	-	18.015.800,00	17.555.800,00	460.000,00
01.01.07.01.01.11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	37.286.500,00	37.286.500,00	-
01.01.07.01.02	Suku Cadang	-	112.387.695,00	111.227.695,00	1.160.000,00
01.01.07.01.02.01	Suku Cadang Alat Angkutan	-	5.439.000,00	5.439.000,00	-
01.01.07.01.02.07	Suku Cadang Alat Pertanian	-	99.863.695,00	98.703.695,00	1.160.000,00
01.01.07.01.02.11	Suku Cadang Lainnya	-	7.085.000,00	7.085.000,00	-
01.01.07.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.444.535.817,14	15.454.879.695,91	15.132.569.244,28	1.766.846.268,77
01.01.07.01.03.01	Alat Tulis Kantor	116.290.667,00	1.939.082.710,06	1.943.282.848,87	112.090.528,19
01.01.07.01.03.02	Kertas Dan Cover	37.319.850,00	1.455.329.918,00	1.388.167.632,00	104.482.136,00
01.01.07.01.03.03	Bahan Cetak	206.037.700,00	1.425.825.124,00	1.013.447.304,00	618.415.520,00
01.01.07.01.03.04	Benda Pos	622.000,00	252.044.500,00	245.574.500,00	7.092.000,00
01.01.07.01.03.05	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	684.042.478,00	3.367.513.288,00	3.510.728.628,00	540.827.138,00
01.01.07.01.03.06	Bahan Komputer	5.742.000,00	386.491.700,00	380.707.000,00	11.526.700,00
01.01.07.01.03.07	Perabot Kantor	133.421.846,12	2.837.786.030,97	2.802.725.286,51	168.482.590,58
01.01.07.01.03.08	Alat Listrik	119.805.745,00	1.153.525.135,88	1.256.478.812,88	16.852.068,00
01.01.07.01.03.09	Perlengkapan Dinas	-	8.250.000,00	5.150.000,00	3.100.000,00
01.01.07.01.03.11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	344.228.949,00	343.918.949,00	310.000,00
01.01.07.01.03.12	Suvenir/Cendera Mata	-	275.769.600,00	274.259.600,00	1.510.000,00
01.01.07.01.03.13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	141.253.531,02	2.009.032.740,00	1.968.128.683,02	182.157.588,00
01.01.07.01.04	Obat-obatan	13.955.710.958,84	64.174.172.473,00	43.526.506.082,33	34.603.377.349,50
01.01.07.01.04.01	Obat	8.426.095.858,69	33.848.413.784,68	16.706.262.963,33	25.568.246.680,04
01.01.07.01.04.02	Obat-Obatan Lainnya	5.529.615.100,15	30.325.758.688,32	26.820.243.119,00	9.035.130.669,46
01.01.07.01.05	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	52.273.400,00	153.880.100,00	51.036.925,00	155.116.575,00
01.01.07.01.05.01	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	52.273.400,00	153.880.100,00	51.036.925,00	155.116.575,00
01.01.07.01.07	Natura Dan Pakan	33.260.705,76	5.915.423.856,79	5.936.881.471,29	11.803.091,26
01.01.07.01.07.01	Natura	33.260.705,76	5.754.811.856,79	5.776.519.471,29	11.553.091,26
01.01.07.01.07.02	Pakan	-	155.862.000,00	155.612.000,00	250.000,00
01.01.07.01.07.03	Natura Dan Pakan Lainnya	-	4.750.000,00	4.750.000,00	-
01.01.07.01.08	Persediaan Penelitian	7.000.000,00	330.428.609,00	337.428.609,00	-
01.01.07.01.08.04	Persediaan Penelitian Lainnya	7.000.000,00	330.428.609,00	337.428.609,00	-
01.01.07.02.02	Pipa	-	84.298.000,00	84.298.000,00	-
01.01.07.02.02.06	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	-	84.298.000,00	84.298.000,00	-
JUMLAH		15.594.536.097,85	94.011.603.361,83	72.858.403.038,92	36.747.736.420,75

LAMPIRAN 17
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH

URAIAN	PT BKK JATENG (merger PD BKK PKL UTARA)/Unaudited	PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN/Audited	PD BPR BANK PEKALONGAN/Audited (ganti nama dr Bank Pasar)	PT. BANK JATENG	PT. PRPP JATENG/Audited	PERUMDA TIRTAYASA/Audited
Aktiva lancar						13.801.081.276,00
Aktiva Tetap						37.683.462.006,00
Aktiva lainnya						1.239.247.382,00
Total Aktiva	2.325.062.944.012,00	31.507.551.862,00	64.972.923.612,00		50.669.593.704,00	52.723.790.664,00
Kewajiban	2.049.045.971.393,00	22.132.244.189,00	52.741.625.586,00		2.740.137.620,00	4.308.992.271,00
Modal disetor	344.050.000.000,00	8.150.000.000,00	9.820.000.000,00		50.000.000.000,00	55.560.577.250,00
Dana Setoran Modal					30.536.400,00	
Donasi					262.727.000,00	
Cadangan	55.963.967.763,00	866.045.856,00	1.651.397.473,00		185.938.622,00	358.872.841,00
Laba (Rugi) Tahun lalu /Laba (Rugi) ditahan)	(164.115.165.608,00)	4.483.144,00	-		-	(5.925.707.377,00)
Laba/Rugi Tahun Berjalan	40.118.170.463,00	354.778.673,00	759.900.553,00		(2.549.745.939,00)	793.623.938,00
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja						(2.372.568.259,00)
Total ekuitas perusahaan	276.016.972.618,00	9.375.307.673,00	12.231.298.026,00		47.929.456.083,00	48.414.798.393,00
Kewajiban + Modal	2.325.062.944.011,00	31.507.551.862,00	64.972.923.612,00		50.669.593.703,00	52.723.790.664,00
Perhitungan % kepemilikan						
Modal Hibah						2.970.943.450,00
Pemerintah Pusat						992.149.950,00
KSU Dana Mandiri Sejahtera			20.000.000,00			
Pemprop Jateng		4.390.000.000,00	-			-
Pemkot Pekalongan	7.350.000.000,00	3.760.000.000,00	9.800.000.000,00	23.661.000.000,00	305.200.000,00	51.597.483.850,00
	344.050.000.000,00	8.150.000.000,00	9.820.000.000,00		50.000.000.000,00	55.560.577.250,00
Prosentase Kepemilikan	2,14	46,13	99,80		0,61	98,21
Metode SAP	Biaya	Ekuitas	Ekuitas	Biaya	Biaya	Ekuitas
Pengakuan Metode Ekuitas	7.350.000.000,00	4.325.295.319,08	12.206.387.032,06	23.661.000.000,00	305.200.000,00	47.550.251.223,36

LAMPIRAN 18

INVENTARISASI TANAH HASIL TUKAR MENUKAR DI UPB KELURAHAN BUARAN KRADENAN

No Urut	Nama Barang	Nomor		Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Lokasi	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Usaha	01.01.02.07.001	0001	700	2020	Banyurip	Hak Pakai	18-08-2020	AAW 360682	Sawah Pertanian	Tukar Menukar	344.400.000	Hak Pakai No. 10
2	Tanah Usaha	01.01.02.07.001	0002	2038	2020	Banyurip	Hak Pakai	18-08-2020	AAW 360682	Sawah Pertanian	Tukar Menukar	1.002.696.000	Hak Pakai No. 11
3	Tanah Usaha	01.01.02.07.001	0003	2562	2020	Banyurip	Hak Pakai	18-08-2020	AAW 360682	Sawah Pertanian	Tukar Menukar	770.868.000	Hak Pakai No. 12
4	Tanah Usaha	01.01.02.07.001	0004	3609	2020	Banyurip	Hak Pakai	18-08-2020	AAW 360682	Sawah Pertanian	Tukar Menukar	1.775.628.000	Hak Pakai No. 13
JUMLAH												3.893.592.000	

LAMPIRAN 19**TANAH NEGARA YANG DISEWAKAN**

No	SKPD Pencatat	Luas Tanah	Alamat	Penggunaan	Nilai Buku (Rp)	Status
1	BKD	126	JL.PEMBANGUNAN	PERUM WARGA SARIP	41.706.000,00	Tanah Negara
2	BKD	100	JL.PEMBANGUNAN	PERUM WARGA SALIYAN/M	33.100.000,00	Tanah Negara
3	BKD	240	JL.BENDAN(BENDAN BARAT)	H.AZIS	113.160.000,00	Tanah Negara
4	BKD	300	JL.MURIYA 10(BENDAN BARAT)	RIYANTO	141.450.000,00	Tanah Negara
5	BKD	400	JL.MERAPI 7(BENDAN BARAT)	LS.TAMBUAN	188.600.000,00	Tanah Negara
6	BKD	320	JL.RINJANI 3(BENDAN BARAT)	SUSMAMTO	150.880.000,00	Tanah Negara
7	BKD	360	JL.MERAPI 7(BENDAN BARAT)	AFIYAH	169.740.000,00	Tanah Negara
8	BKD	364	JL.VETERAN 23	ISWINARSO	120.484.000,00	Tanah Negara
9	BKD	176	JL.VETERAN GG. III	YAKUP CIPTO	58.256.000,00	Tanah Negara
10	BKD	160	JL.VETERAN GG.III	R.SLAMET/SRI REJEKI	52.960.000,00	Tanah Negara
11	BKD	209	JL.VETERAN 46	SURONO	69.179.000,00	Tanah Negara
12	BKD	176	JL.VETERAN 46 B	AQ MUDZAKIR	58.256.000,00	Tanah Negara
13	BKD	12	JL.VETERAN 46 C	NY.SUPARNO	3.806.500,00	Tanah Negara
14	BKD	5.500	JL.KALIBANGER	PERUMAHAN NOYONTAAN 17 ORG	130.900.000,00	Tanah Negara
15	BKD	3.000	JL.PONCOL BARU	UTK PERUMAHAN PONCOL BARU 41 ORG	826.500.000,00	Tanah Negara
16	BKD	2.984	JL.JAWA	PERUM WARGA KERGON	987.704.000,00	Tanah Negara
17	BKD	1.478	JL.KARIMUNJAWA	PERUM WARGA KERGON	489.218.000,00	Tanah Negara
18	BKD	80	Kauman	PERUM WARGA Kauman	19.040.000,00	Tanah Negara
JUMLAH					3.654.939.500,00	

LAMPIRAN 20
TANAH EKS BENGKOK YANG BERUBAH FUNGSI

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Nilai Perolehan (Rp.)	Berubah Fungsi Menjadi	Keterangan		
1	Pringrejo	Pringlangu	1985	1.750	63.000.000,00	lapangan	hp.25		
		Pringlangu	1985	2.400	86.400.000,00	lapangan	Hp.28		
		Pringlangu	1985	1.975	71.100.000,00	lapangan	HP.29		
		Pringlangu	1985	2.118	76.248.000,00	lapangan	Hp.30		
		Pringlangu	1989	2.045	73.620.000,00	lapangan	HP 27		
		Tegalrejo RW VIII	1988	6.988	482.310.000,00	Diurug untuk NUSEP	Leter C No. 4 Persil PI.59/S.III		
		Tegalrejo RW VIII	1988	2.600	768.443.200,00	Diurug untuk NUSEP	Leter C No. 6 Persil PI.64/S.III		
		Pringlangu	1989	595	50.575.000,00	Tower air dan IPAL	HP.39 ,asal Leter C No. 1 Persil No.38/SII		
2	Buaran Kradenan	Buaran rt 05 rw 02	1945	4	286.350.000,00	Puskesmas	HP.00018		
3	Banyurip	Banyurip Ageng	1945	2	36.782.000,00	Jalan Desa	Leter C No. 6 Persil No. 39/SIV , Luas 1.388 M2		
4	Kuripan Kertoharjo	RT 2 RW 6	1945	750	12.720.000,00	Lapangan	Leter No c11 Persil No. 72/d111 Luas 750 M2		
5	Setono	Karangmalang	1988	250	26.250.000,00	Ditempati Pra KS	Leter C.3 Persil No. 53/S.II		
6	Kalibaras	Baros	1990	1.050	42.000.000,00	Hutan Kota	bengkok Umum C6 Persil 89/S II		
		Sokorejo	1990	2.333	183.750.000,00	Hutan Kota	Leter C No. 4 ,Persil No. 43/S I , Luas 1.750 M2		
		Sokorejo	1990	3.188	409.500.000,00	Hutan kota	Leter C No. 5 ,Persil No. 79/S II , Luas 3.900 M2		
		Sokorejo	1990	6.497	740.250.000,00	Lapangan	Leter C No. 1 ,Persil No. 21/S III, Luas 7.050 M2		
		Sokorejo	1990	6.297	792.750.000,00	Lapangan	Leter C No. 1 ,Persil No. 71/S III , Luas 7.550 M2		
		Sokorejo	1990	3.750	101.250.000,00	Hutan kota	Leter C No. 4 ,Persil No. 40/S I, Luas 3.750 M2		
7	Klego	Klego	1960	488	31.232.000,00	Pelebaran sungai Kalibanger	C2 Persil 111 D1		
		Klego	1960	1.350	86.400.000,00	Pelebaran sungai Kalibanger	C3 Persil 53 D1		
		Klego	1960	1.138	72.832.000,00	Hutan kota	Leter C No.6 Persil No.65/SII		
		Klego	1960	7.900	1.207.800.000,00	Pustu dan PAUD	C1 Persil 48 S II		
		Klego	1960	2.683	470.920.000,00	Perumahan warga Gg (Timur)	C6 Persil 105 S II		
		Klego	1960	300	45.750.000,00	Depo Sampah	C9 Persil 72 S I		
		Klego	1960	1.125	150.311.600,00	Hutan kota	C2 Persil 67 S I		
		Klego	1960	530	70.813.400,00	Hutan kota	C2 Persil 67 S I		
		Klego	1960	2.950	188.800.000,00	Pelebaran sungai Kalibanger	C1 Persil 60 S III		
		Klego	1960	388	24.832.000,00	Hutan kota	C1 Persil 71 S 1		
		Klego	1960	175	11.200.000,00	Pelebaran sungai Kalibanger	C1 Persil 117 D1		
		Klego	1960	3.138	200.832.000,00	Pelebaran sungai Kalibanger	C2 Persil 56 D1		
		8	Degayu	Ngetrem	2000	3.565	35.650.000,00	Rencana utk makam, eksisting WC komunal	bengkok Bau II C4/3 Persil 106/S III
				Babalan	2000	5.240	73.360.000,00	Kawasan Technopark	bengkok Polisi I C 8 Persil 6a S II
JUMLAH					6.974.031.200,00				

TANAH EKS BENGKOK PONCOL DAN KLEGO YANG DIHUNI WARGA

No	SKPD	Jenis Barang	Kode Barang	No. Reg	Luas	Tahun	No. Sertifikat	Alamat	Nilai (Rp)
1	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	1	6.069	1973	BQ.547947	Poncol Gg Asparagas	1.138.580.814,00
2	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	2	5.132	1973	BQ.547945	Poncol Gg Gumuk Indah	962.793.992,00
3	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	3	2.525	1980	BJ547952	Poncol Gg Gotong Royong	730.162.939,00
4	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	4	2.148	1985	BQ.547950	Poncol Gg Dahlia	608.869.418,00
5	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	6	457	1980	BQ.547953	poncol Gg Gotong Royong	132.152.061,00
6	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	7	379	1985	BJ.547951	Poncol Gg Dahlia	107.430.582,00
7	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	8	397	1980	BJ.547955	Poncol Gg Kemangi	49.094.608,00
8	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	9	2.998	1980	BJ.547954	Poncol Gg Kemangi	370.745.392,00
9	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	10	406	1978	BJ.547949	poncol Gg Pintu Air	124.952.184,00
10	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	11	2.446	1978	BQ.547948	Poncol Gg Pintu Air	752.790.816,00
11	Kel. Klego	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	3	510	1960	AX 834271	Klego	77.775.000,00
12	Kel. Klego	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	11	2.683	1960	BJ.547956	Klego	470.920.000,00
13	Kel. Klego	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	21	530	1960	AX 834270	Klego	70.813.400,00
JUMLAH									5.597.081.206,00

LAMPIRAN 22

RINCIAN PENGADAAN TANAH PADA OPB DPU DAN PENATAAN RUANG

No	Jenis Barang	Nomor		Luas (m2)	Letak / Alamat	Nilai Perolehan (Rp)	Penggunaan
		Kode Barang	Register				
1	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.01.04.006	1	198	Pasirkratonkramat	316.151.680,00	Lahan Parkir Puskesmas Kramatsari
2	Tanah Muara	01.01.02.01.007	1	30.325	Krapyak	4.094.261.000,00	Tanah Kolam Retensi / Kolam Tambat Labuh Kapal
3	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah	01.01.03.09.002	1	731	Panjang Baru	467.587.000,00	Tanah Rumah Pompa Panjang Baru
4	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah	01.01.03.09.002	2	195	Pasirkratonkramat	255.366.000,00	Tanah Rumah Pompa Pasirkratonkramat
JUMLAH						5.133.365.680,00	

LAMPIRAN 23**TANAH EKS BENGKOK YANG TERKENA INTERCHANGE TOL**

No	SKPD	Jenis Barang	Kode Barang	Register	Luas tanah (m2)	Luas yang terkena (m2)	HP/ Letter C	Nilai (Rp)
1	Kelurahan Kali Baros	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	1	4.400	2.292	Leter C No. 2 ,Persil No. 31/S II	462.000.000,00
2	Kelurahan Kali Baros	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	10	3.188	3.188	Leter C No. 5 ,Persil No. 79/S II	409.500.000,00
3	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	96	1.736	50	HP No. 20	38.950.000,00
4	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	95	6.367	334	HP No. 19	136.325.000,00
5	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	97	1.079	7	HP No. 35	37.925.000,00
6	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	101	2.846	19	HP No. 17	32.800.000,00
7	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	92	1.520	105	HP No. 24	38.950.000,00
8	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	89	1.887	117	HP No. 25	32.800.000,00
9	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	83	4.350	378	HP No. 31	85.075.000,00
10	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	93	1.548	118	HP No. 21	36.900.000,00
11	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	90	1.570	124	HP No. 22	27.675.000,00
12	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	84	3.580	240	HP No. 23	75.850.000,00
13	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	14	7.950	532	C 1 Persil 53/S IV	127.200.000,00
14	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	13	8.975	717	C1 Persil 52 / S III	143.600.000,00
15	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	16	800	46	C1 Persil Klas 55 / S III	12.800.000,00

No	SKPD	Jenis Barang	Kode Barang	Register	Luas tanah (m2)	Luas yang terkena (m2)	HP/ Letter C	Nilai (Rp)
16	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	15	1.050	56	C1 Persil Klas 54 / S II	16.800.000,00
17	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	78	3.808	251	HP No. 37	44.075.000,00
18	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	4	625	468	C10 Persil Klas 71 / S III	10.000.000,00
19	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	4	1.913	870	C12 Persil klas 72/S III	30.608.000,00
20	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	57	935	41	HP No 14	19.200.000,00
21	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	58	680	38	HP No 13	10.400.000,00
22	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	59	3.931	105	HP No. 42	67.200.000,00
23	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	43	6.136	132	HP No. 43	100.000.000,00
24	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	5	2.473	443	HP No. 46	110.400.000,00
25	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	36	1.868	459	HP No. 50	40.800.000,00
26	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	92	1.520	1.024	HP No. 24	38.950.000,00
27	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	89	1.887	1.793	HP No. 25	32.800.000,00
28	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	81	2.848	183	HP No. 26	45.100.000,00
29	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	75	17.143	468	HP No. 28	357.725.000,00
30	Kelurahan Buaran Kradenan	Sawah Ditanami Padi	01.01.02. 01.01	3	3.060	512	-	61.200.000,00
JUMLAH								2.683.608.000,00

LAMPIRAN 24
TANAH YANG DIPINJAM PAKAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (m2)	Tahun Pengadaa n	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat			
								Tgl	Nomor		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	11	1.000	1993	Jl. Majapahit Podosugih	Hak Pakai	13/11/2013	AU230255 HP. No. 36	SEKRETARIAT KORPRI/BAZ	210.500.000,00
2	Tanah Bangunan Lainnya	01.01.11.10.01	1	5.130	2000	JL GAJAH MADA / MERDEKA NO 21, 23, Jl BAHAGIA 1,3,5	Hak Pakai	18/05/1981	5407906 Hp No 6	Rumdin Dandim, Kajari, Wakapolres, Kasdim	1.446.660.000,00
3	Tanah Bangunan Poliklinik	01.01.11.04.13	1	723	1968	JL.VETERAN	Hak Pakai	19/11/2014	BQ 547763 HP No 130	KANT POLIKLINIK POLRI	347.550.000,00
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	13	1.675	2000	JL.HOS COKROAMINOTO	Hak Pakai	09/10/2001	AR350728 Hp No. 12	POLSEK SELATAN	338.350.000,00
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	10	145	1987	JL.BANDUNG	Hak Pakai	12/09/2001	AR350780 Hp No. 37	POLSEK TIMUR	46.400.000,00
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	01.01.11.01.04	5	7.838	1950	JL BAHAGIA 13.15.17.19.21.23.25	Hak Pakai	12/05/1981	5407905 Hp No. 5	RUMAH DINAS MUSPIDA (Ketua DPRD, Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Guest House, Kapolres, PKK dan DWP)	2.210.316.000,00
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	4	435	1980	JL.TONDANO	Hak Pakai	06/04/2002	AT.300703 HP No 25	KORAMIL TIMUR	103.530.000,00
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	14	1.205	2000	JL.HOSCOKROAMINOTO	Hak Pakai	09/10/2001	AR350729 Hp No. 11	KORAMIL SELATAN	243.410.000,00
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	1	6.000	1991	Jl Kusuma Bangsa No 96	Hak Pakai	19/01/1991	AB051003 HP No 32	Sebagian dipinjampakai kan untuk Polsek Utara dan Koramil Utara	1.010.873.000,00
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	5	1.320	1983	JL.SRIWIJAYA 17	Hak Pakai	12/04/1999	AN328208 Hp. No. 26	KANTOR KPU	622.380.000,00

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (m2)	Tahun Pengadaa n	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat			
								Tgl	Nomor		
11	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	01.01.11.01.11	11	520	2002	Jl. Tondano poncol	Hak Pakai	12/03/2010	BG 473004 Hp No. 30	KUA Kec. Pkl Timur	1.078.307.000,00
12	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	01.01.11.01.11	3	297	2002	Jl. Hos Coroaminoto	Hak Pakai	10/02/2015	BJ 141978 HP No 146	KUA Kuripan Kidul	596.462.000,00
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	1	1.195	1979	JL.VETERAN NO. 27 KELURAHAN KRATON LOR	Hak Pakai	14/03/2014	BJ 492655 HP No 21	Unit Donor Darah PMI	665.972.000,00
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.25	1	998	1987	Jl. Tondano pekalongan	Hak Pakai	17/05/2000	AL 562831 HP No 21	Sebagian Dipinjampakai kan untuk BP4	274.949.000,00
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	17	411	1970	JL.PEMBANGUNAN	Hak Pakai	19/11/2014	BO 709739 HP No 24	Panwaslu	565.800.000,00
16	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	01.01.11.01.11	10	882	2002	Jl Tondano Poncol	Hak Pakai	12/03/2015	BG 473019 HP No 31	Kntr Pengadilan Agama	163.216.000,00
17	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.02	1	4.550	2003	JL. DHARMA BAKTI NO.23 PEKALONGAN	Hak Pakai	28/06/2004	AU 853680 Hp No. 20	Sebagian dipinjampakai kan untuk AKN	1.070.721.495,21
18	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	1	20.000	2014	Jl Wr. Supratman/ Hp.74	Hak Pakai	14/07/2015	BT 408639 HP No 74	Sebagian dipinjampakai kan untuk TNI AL Tegal (Posko Lanal)	13.061.084.670,00
19	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.11.04.12	1	530	1982	Jl. Dharma Bakti	Hak Pakai	06/04/2002	AT 300876 HP No 14	Pinjam Pakai untuk AKN	159.000.000,00
20	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	01.01.11.01.11	5	670	2002	Jl. Rinjani Bendan	Hak Pakai	06/02/2015	BJ 141969	Sebagian dipinjampakai kan untuk Gudang KPU	1.495.598.000,00
JUMLAH											25.711.079.165,21

LAMPIRAN 25**DATA HIBAH PERALATAN DAN MESIN**

SKPD	Jumlah	Perolehan Aset Tetap Peralatan mesin dari Hibah					Keterangan
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Dana BOS	Komite Sekolah	Pihak Ke Tiga lainnya	
Badan Keuangan Daerah	47.300.000					47.300.000	Hibah dari Bank Jateng 2 Unit TV LED 43' Rp. 15.300.000, 1 Unit Lap Top Rp. 20.0000.000, dan 2 Unit P.C unit Rp. 12.000.000
DINARPUS	468.520.000	468.520.000					Hibah dari Perpustakaan RI 1 Unit Mobil Perpustakaan Rp. 384.200.000, 1 unit Televisi Rp. 3.400.000, 1 Unit UPS Rp. 2.500.000, 1 Unit Genset Rp. 9.800.000, 4 Unit Tablet PC Rp. 67.620.000 dan 1 Unit Speaker Komputer Rp. 1.000.000
DINAS PERHUBUNGAN	9.012.659.800	9.012.659.800					Hibah dari Kementrian Perhubungan 46 Unit Peralatan Mesin Rp. 8.831.648.000 & BPPT 16 Unit Peralatan Mesin Rp. 18.011.800
RSUD BENDAN	44.689.889.182	43.879.946.000	498.100.000			311.843.182	Hibah dari BMN, Provinsi dan Pihak Ketiga (Bank Jateng, Bank Syariah Mandiri, BASNAS, Adaro, Trisula, PT Sinar Roda Utama)
SDN MEDONO 08	3.000.000				3.000.000		1 unit Lemari Kayu Jati Rp. 2.500.000 dan 1 unit Lemari Plastik Rp. 500.000
SDN BUARAN	1.700.000					1.700.000	1 unit Lemari Es Rp. 1.700.000
PUSKESMAS DUKUH	500.000					500.000	1 Unit Penyemprot Mesin (Power Sprayer) Rp. 500.000 dari pihak ketiga
Total	54.223.568.982	53.361.125.800	498.100.000	-	3.000.000	361.343.182	

LAMPIRAN 26

INVENTARISASI DARI DID DAN BTT

Sumber Dana	OPD	Nama Barang	Nilai
DAK	DINSOS	Public Address	37.512.696,00
	JUMLAH		37.512.696,00
	BAGIAN UMUM	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	37.620.000,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN	Chemical Thermometer	950.000,00
	DINPERPAN	Pisau Set	4.000.000,00
	DINPERPAN	Skinning Cradle	14.000.000,00
	DINPERPAN	Golok Belah	2.392.000,00
	DINPERPAN	Kapak	3.700.000,00
	DINPERPAN	Gerobak Daging	14.000.000,00
	DLH	Sumersible Pump	2.120.000,00
	DLH	Sumersible Pump	2.125.000,00
	DLH	Sumersible Pump	2.950.000,00
	DLH	Pompa Air	17.950.000,00
	DLH	Water Distributor	1.950.000,00
	DLH	Truck + Attachment	500.015.000,00
	DLH	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	28.500.000,00
	SATPOL PP	Sound System	24.900.000,00
	DISKOMINFO	mic	24.800.000,00
	DISKOMINFO	microphone cam	2.950.000,00
	DISKOMINFO	camera video webcam	3.025.000,00
	DISKOMINFO	handy cam	26.300.000,00
	DISKOMINFO	ups	786.800,00
	DISKOMINFO	ups	17.875.000,00
	DISKOMINFO	headphone	3.425.000,00
	DISKOMINFO	headphone	9.410.000,00
	DISKOMINFO	display amplifier	20.400.000,00
	DISKOMINFO	tripod	5.100.000,00
	DISKOMINFO	camera digital	21.700.000,00
	DISKOMINFO	camera digital	7.160.000,00
	DISKOMINFO	camera digital	5.790.000,00
	DISKOMINFO	lampu led video	9.025.000,00
	DISKOMINFO	UHF amplifier Module	51.200.000,00
	DISKOMINFO	p.c	18.325.000,00
	DISKOMINFO	p.c	250.375.000,00
	DISKOMINFO	laptop	11.400.000,00
	DISKOMINFO	laptop	22.950.000,00
	RSUD BENDAN	LEMARI ES	92.023.399,00
	RSUD BENDAN	MESIN CUCI	318.881.818,00
	RSUD BENDAN	Exhause Fan	309.000.000,00
	RSUD BENDAN	Exhause Fan	299.000.000,00
	RSUD BENDAN	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	7.000.000,00
	RSUD BENDAN	TIMBANGAN BAYI	1.100.000,00
	RSUD BENDAN	INFUSION PUMP	15.178.000,00
	RSUD BENDAN	INFUSION PUMP	17.678.655,00
	RSUD BENDAN	SYRINGE PUMP	28.461.818,00
	RSUD BENDAN	SYRINGE PUMP	68.654.545,00
	RSUD BENDAN	ALAT KEDOKTERAN UMUM LAIN-LAIM	4.000.000,00
	RSUD BENDAN	LARYNGOSCOPE	3.268.800,00
	RSUD BENDAN	LARYNGOSCOPE	5.170.455,00

Sumber Dana	OPD	Nama Barang	Nilai
DID	RSUD BENDAN	PATIENT MONOTOR	54.000.000,00
	RSUD BENDAN	Mobile X Ray Unit	352.000.000,00
	RSUD BENDAN	Cassete Film (alat kedokteran)	18.000.000,00
	RSUD BENDAN	ECG unit	45.200.000,00
	RSUD BENDAN	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain	3.500.000,00
	RSUD BENDAN	Micro Pippettes	58.080.485,00
	RSUD BENDAN	Micro Pippettes	98.434.319,00
	RSUD BENDAN	Micro Pippettes	9.709.200,00
	RSUD BENDAN	Micro Pippettes	9.709.200,00
	RSUD BENDAN	Micro Pippettes	13.861.200,00
	RSUD BENDAN	Micro Pippettes	6.472.800,00
	RSUD BENDAN	ALAT LABORATORIUM LAIN-LAIN	319.150.000,00
	RSUD BENDAN	ALAT LABORATORIUM LAIN-LAIN	209.000.000,00
	RSUD BENDAN	ALAT LABORATORIUM LAIN-LAIN	7.441.182,00
	RSUD BENDAN	ALAT LABORATORIUM LAIN-LAIN	5.746.000,00
	RSUD BENDAN	ALAT LABORATORIUM LAIN-LAIN	431.818.181,00
	RSUD BENDAN	ALAT LABORATORIUM LAIN-LAIN	42.808.182,00
	RSUD BENDAN	ALAT LABORATORIUM LAIN-LAIN	101.291.394,00
	DINPARBUDPORA	Thermogun	3.300.000,00
	DINPARBUDPORA	Alat Cuci Tangan	3.000.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	4.165.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	4.165.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	7.338.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	7.338.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	4.457.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	4.457.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	4.457.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	3.983.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	3.220.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	3.220.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	3.220.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	2.878.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	2.878.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	3.219.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	2.878.000,00
	DPUPR	Portable Water Pump	2.878.000,00
	DPUPR	Transportable Water Pump	99.162.500,00
	DPUPR	Transportable Water Pump	99.162.500,00
	DPUPR	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	27.000.225,00
	DPUPR	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	27.000.225,00
	DINKES	Televisi	9.920.000,00
	DINKES	Camera Conference	5.750.000,00
	DINKES	Audio Mixing Console	3.300.000,00
	DINKES	Kasur/Spring Bed	905.728,00
	DINKES	Kasur/Spring Bed	2.767.500,00
	DINKES	Kasur/Spring Bed	2.767.500,00
	DINKES	Tabung Oksigen	750.000,00
	JUMLAH		4.474.345.611,00
	BPBD	POMPA AIR (POMPA MOBILE)	78.742.500,00
	BPBD	PERAHU PENUMPANG (PERAHU EVAKUASI)	43.500.000,00
	BPBD	MESIN JAHIT (MESIN JAHIT KARUNG)	1.350.000,00
	BPBD	MESIN JAHIT (MESIN JAHIT KARUNG)	1.000.000,00

Sumber Dana	OPD	Nama Barang	Nilai	
BTT	DISKOMINFO	ups	24.000.000,00	
	DISKOMINFO	monitor	4.700.000,00	
	DISKOMINFO	server	142.000.000,00	
	DISKOMINFO	server	161.200.000,00	
	DINKES	Digital Thermometer	31.200.000,00	
	DINKES	Infrared Thermometer	88.200.000,00	
	DINKES	Infrared Thermometer	1.800.009,00	
	DINKES	Digital Thermometer	7.300.000,00	
	DINKES	Infrared Thermometer	3.755.876,00	
	DINKES	Infrared Thermometer	11.267.628,00	
	DINKES	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	6.000.000,00	
	DINKES	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	4.680.000,00	
	DINKES	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2.958.330,00	
	DINKES	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	591.670,00	
	DINKES	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	6.300.000,00	
	DINKES	Alat Kesehatan Kebidanan Lain-Lain	9.600.000,00	
	DINKES	Handphone	2.500.000,00	
	DINKES	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4.600.000,00	
	DINKES	Refrigerator/Freezer	3.500.000,00	
	DINKES	Kasur/Spring Bed	1.811.454,00	
	JUMLAH			642.557.467,00
	TOTAL			5.154.415.774,00

LAMPIRAN 27

TRANSFER MASUK PERALATAN DAN MESIN

No	OPD Penerima	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulai Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
1	Dinas Pendidikan	Gerobak dorong	4	14.045.200,00	7.022.600,00	7.022.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	Dinas Pendidikan	Alat Rumah Tangga Lain-lain	17	21.224.500,00	4.244.900,00	16.979.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	Dinas Pendidikan	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	7.491.000,00	1.498.200,00	5.992.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	Dinas Kesehatan	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	Badan Keuangan Daerah
5	Dinas Kesehatan	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2.497.000,00	499.400,00	1.997.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
6	RSUD	ALat Kedokteran Umum Lain Lain	1	15.137.100,00	9.082.260,00	6.054.840,00	Dinas Kesehatan
7	RSUD	Mobile X Ray Unit	1	734.424.623,00	440.654.775,00	293.769.848,00	Dinas Kesehatan
8	RSUD	Radiology Unit (Rongent)	1	1.400.000,00	1.400.000,00	-	Dinas Kesehatan
9	RSUD	ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGIC LAIN-LAIN	1	5.500.000,00	5.500.000,00	-	Dinas Kesehatan
10	RSUD	ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGIC LAIN-LAIN	1	4.400.000,00	4.400.000,00	-	Dinas Kesehatan
11	RSUD	ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGIC LAIN-LAIN	1	9.525.850,00	5.715.510,00	3.810.340,00	Dinas Kesehatan
12	DPUPR	Pompa Air	1	78.742.500,00	-	78.742.500,00	BPBD
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Sepeda motor	1	12.500.000,00	12.500.000,00	-	Badan Keuangan Daerah
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
15	SATPOL PP	Perahu Penumpang	1	43.500.000,00	-	43.500.000,00	BPBD
16	BPBD	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	Badan Keuangan Daerah
17	DINDUKCAPIL	Station Wagon	1	284.465.000,00	-	284.465.000,00	Badan Keuangan Daerah
18	DISKOMINFO	Station Wagon	1	284.465.000,00	-	284.465.000,00	Badan Keuangan Daerah
19	DINDAGKOP UKM	Lemari Kayu	1	8.300.000,00	4.980.000,00	3.320.000,00	Bag Perekonomian
20	DINDAGKOP UKM	Lemari Kayu	1	7.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	Bag Perekonomian
21	DINDAGKOP UKM	Lemari Kayu	1	7.400.000,00	4.440.000,00	2.960.000,00	Bag Perekonomian
22	DINDAGKOP UKM	Lemari Kaca	1	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	Bag Perekonomian
23	DINDAGKOP UKM	Lemari Kaca	1	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	Bag Perekonomian
24	DINDAGKOP UKM	Papan Nama Instansi	1	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	Bag Perekonomian
25	DINDAGKOP UKM	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	22.448.000,00	13.468.800,00	8.979.200,00	Bag Perekonomian
26	DINDAGKOP UKM	Kursi Tamu	1	7.000.000,00	4.200.000,00	2.800.000,00	Bag Perekonomian
27	DINDAGKOP UKM	A.C. Window	1	5.128.750,00	3.077.250,00	2.051.500,00	Bag Perekonomian
28	DINDAGKOP UKM	A.C. Window	1	5.128.750,00	3.077.250,00	2.051.500,00	Bag Perekonomian
29	DINDAGKOP UKM	Sound System	1	5.079.000,00	3.047.400,00	2.031.600,00	Bag Perekonomian
30	DINDAGKOP UKM	Alat Hiasan	1	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	Bag Perekonomian
31	DINDAGKOP UKM	Alat Hiasan	1	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	Bag Perekonomian
32	DINDAGKOP UKM	Alat Hiasan	1	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	Bag Perekonomian
33	DINDAGKOP UKM	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	Bag Perekonomian
34	DINDAGKOP UKM	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	Bag Perekonomian
35	DINDAGKOP UKM	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	Bag Perekonomian
36	DINDAGKOP UKM	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	Bag Perekonomian
37	DINPARBUDPORA	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	Badan Keuangan Daerah
38	DINPARBUDPORA	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
39	DKP	Station Wagon	1	284.465.000,00	-	284.465.000,00	Badan Keuangan Daerah
40	DKP	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
41	Badan Keuangan Daerah	Sepeda Motor	1	9.700.000,00	9.700.000,00	-	BKPPD
42	Badan Keuangan Daerah	Sepeda Motor	1	11.300.000,00	9.685.716,00	1.614.284,00	BKPPD
43	Badan Keuangan Daerah	Sepeda Motor	1	12.016.488,00	12.016.488,00	-	BAPPEDA
44	Badan Keuangan Daerah	Station Wagon	1	156.310.000,00	156.310.000,00	-	DKP
45	BAG PEMERINTAH	Lap Top	1	10.177.500,00	-	10.177.500,00	BAG UMUM
46	BAG PEMERINTAH	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.200.000,00	-	4.200.000,00	BAG UMUM
47	BAG PEMERINTAH	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.495.040,00	-	2.495.040,00	BAG UMUM
48	BAG HUKUM	Televisi	1	4.291.150,00	-	4.291.150,00	BAG UMUM
49	BAG HUKUM	P.C Unit	1	8.152.035,00	-	8.152.035,00	BAG UMUM

No	OPD Penerima	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulai Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
50	BAG HUKUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	4.990.080,00	-	4.990.080,00	BAG UMUM
51	BAG ORGANISASI	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	2.600.000,00	2.600.000,00	-	BAG UMUM
52	BAG ORGANISASI	Lighting Stand Tripod	1	1.350.900,00	-	1.350.900,00	BAG UMUM
53	BAG ORGANISASI	Lap Top	2	14.375.000,00	-	14.375.000,00	BAG UMUM
54	BAG ORGANISASI	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.200.000,00	-	4.200.000,00	BAG UMUM
55	BAG ORGANISASI	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.495.040,00	-	2.495.040,00	BAG UMUM
56	BAG ORGANISASI	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.380.800,00	-	5.380.800,00	BAG UMUM
57	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Lap Top	1	7.187.500,00	-	7.187.500,00	BAG UMUM
58	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	10.930.560,00	-	10.930.560,00	BAG UMUM
59	BAG PBJ DAN MINBANG	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.200.000,00	-	4.200.000,00	BAG UMUM
60	BAG PBJ DAN MINBANG	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	6.200.640,00	-	6.200.640,00	BAG UMUM
61	BAG KESRA	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.950.000,00	-	3.950.000,00	BAG UMUM
62	BAG UMUM	Station Wagon	1	290.560.000,00	124.525.713,00	166.034.287,00	Badan Keuangan Daerah
63	BAG UMUM	Station Wagon	1	148.310.000,00	105.935.715,00	42.374.285,00	SETWAN
64	BAG UMUM	Station Wagon	1	465.818.500,00	199.636.500,00	266.182.000,00	SETWAN
65	BAG UMUM	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	125.000.000,00	125.000.000,00	-	DINARPUS
66	BAG UMUM	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	195.688.182,00	-	195.688.182,00	RSUD
67	BAG UMUM	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	Badan Keuangan Daerah
68	BAG UMUM	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	Badan Keuangan Daerah
69	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Filing Cabinet Besi	2	5.813.200,00	5.813.200,00	-	BAG UMUM
70	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Kursi Putar	8	15.928.000,00	15.928.000,00	-	BAG UMUM
71	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Meja Komputer	1	556.000,00	556.000,00	-	BAG UMUM
72	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Televisi	1	4.291.150,00	-	4.291.150,00	BAG UMUM
73	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Lensa Kamera	1	7.800.000,00	-	7.800.000,00	BAG UMUM
74	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Camera Digital	1	16.500.000,00	-	16.500.000,00	BAG UMUM
75	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Handy Talky (HT)	4	11.500.000,00	-	11.500.000,00	BAG UMUM
76	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Handy Talky (HT)	3	12.300.000,00	-	12.300.000,00	BAG UMUM
77	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	P.C Unit	1	8.202.035,00	-	8.202.035,00	BAG UMUM
78	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Lap Top	1	7.187.500,00	-	7.187.500,00	BAG UMUM
79	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.200.000,00	-	4.200.000,00	BAG UMUM
80	BAG PROTOKOL DAN KOMPI	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.380.800,00	-	5.380.800,00	BAG UMUM
81	SETWAN	Station Wagon	1	432.664.000,00	-	432.664.000,00	Badan Keuangan Daerah
82	SETWAN	Station Wagon	1	312.664.000,00	-	312.664.000,00	Badan Keuangan Daerah
83	SETWAN	Station Wagon	1	312.664.000,00	-	312.664.000,00	Badan Keuangan Daerah
84	SETWAN	Station Wagon	1	513.466.500,00	-	513.466.500,00	Badan Keuangan Daerah
85	KEC PKL UTARA	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	Badan Keuangan Daerah
86	KANDANG PANJANG	Gerobak dorong	3	10.533.900,00	5.266.950,00	5.266.950,00	Dinas Lingkungan Hidup
87	KANDANG PANJANG	Gerobak dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
88	KANDANG PANJANG	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2.497.000,00	499.400,00	1.997.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
89	KANDANG PANJANG	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	Badan Keuangan Daerah
90	PANJANG WETAN	Gerobak dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
91	PANJANG WETAN	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	OPD Penerima	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulai Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
92	PANJANG WETAN	Sepeda motor	1	8.200.000,00	8.200.000,00	-	Badan Keuangan Daerah
93	DEGAYU	Gerobak Dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
94	DEGAYU	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
95	DEGAYU	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
96	KRAPYAK	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
97	PADUKUHAN KRATON	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
98	PADUKUHAN KRATON	Gerobak dorong	1	3.945.800,00	3.945.800,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
99	PANJANG BARU	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
100	PANJANG BARU	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
101	PANJANG BARU	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2.497.000,00	499.400,00	1.997.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
102	PANJANG BARU	Sepeda motor	1	12.500.000,00	12.500.000,00	-	Badan Keuangan Daerah
103	KEC PKL SELATAN	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
104	JENGGOT	Gerobak dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
105	JENGGOT	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
106	KURIPAN KERTO HARJO	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
107	KURIPAN YOSOREJO	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
108	KURIPAN YOSOREJO	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
109	KURIPAN YOSOREJO	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
110	SOKO DUWET	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
111	BANYURIP	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
112	KEC PKL BARAT	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	Badan Keuangan Daerah
113	MEDONO	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
114	PODOSUGIH	Gerobak dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
115	PODOSUGIH	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
116	PODOSUGIH	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
117	PODOSUGIH	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
118	TIRTO	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
119	TIRTO	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
120	SAPURO KEBULEN	Gerobak dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
121	BENDAN KERGON	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
122	PASIRKRATON KRAMAT	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
123	PRINGREJO	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
124	PRINGREJO	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
125	KAUMAN	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
126	KAUMAN	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
127	PONCOL	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
128	KLEGO	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
129	GAMER	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
130	NOYONTAANSARI	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
131	NOYONTAANSARI	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
132	SETONO	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
133	KALIBAROS	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
134	KALIBAROS	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
JUMLAH				5.275.994.773,00			

LAMPIRAN 28**PENGHAPUSAN PERALATAN DAN MESIN**

No.	Nama SKPD	Tanggal Berita Acara			Jumlah
		44112	22-Sep-20	20-Nov-20	
1	Badan Keuangan Daerah	42.127.826,00		187.000.000,00	229.127.826,00
2	Dinas Kesehatan			352.169.641,00	352.169.641,00
3	Gudang Farmasi			17.834.773,61	17.834.773,61
4	Labkesda			11.274.333,00	11.274.333,00
5	Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu			191.709.856,00	191.709.856,00
6	Puskesmas Bendan			199.635.278,12	199.635.278,12
7	Pustu Kergon			650.000,00	650.000,00
8	Puskesmas Kramatsari			65.994.868,00	65.994.868,00
9	Puskesmas Medono			8.872.650,00	8.872.650,00
10	Pustu Kebulen			354.000,00	354.000,00
11	Puskesmas Tirto			123.752.088,87	123.752.088,87
12	Puskesmas Klego			145.883.768,00	145.883.768,00
13	Puskesmas Sokorejo			26.845.450,00	26.845.450,00
14	Puskesmas Tondano			32.551.749,34	32.551.749,34
15	Puskesmas Krapyak Kidul			98.555.906,00	98.555.906,00
16	Puskesmas Pekalongan Selatan			238.004.167,77	238.004.167,77
17	Pustu Kuripan Lor 1			80.000,00	80.000,00
18	Pustu Duwet			50.000,00	50.000,00
19	Pustu Soko			500.000,00	500.000,00
20	RSUD BENDAN	7.772.518.024,00			7.772.518.024,00
21	Dinas Pendidikan			45.320.794,72	45.320.794,72
22	SDN Sapuro 05			23.000.000,00	23.000.000,00
23	SDN Medono 08			875.000,00	875.000,00
24	SDN Tirto 01			47.730.000,00	47.730.000,00
25	SDN Tirto 03			16.409.984,00	16.409.984,00
26	SDN Pasirsari 02			1.200.000,00	1.200.000,00
27	SDN Tegal Rejo			1.665.000,00	1.665.000,00
28	SDN Keputran 04			68.357.158,00	68.357.158,00
29	SDN Landungsari 01			25.768.731,25	25.768.731,25
30	SDN Landungsari 05			3.433.912,00	3.433.912,00
31	SDN Poncol 02			4.573.997,00	4.573.997,00
32	SDN Poncol 03			1.055.000,00	1.055.000,00
33	SDN Klego 01			14.629.000,00	14.629.000,00
34	SDN Klego 04			7.495.000,00	7.495.000,00
35	SDN Gamer 02			2.604.000,00	2.604.000,00
36	SDN Baros			850.000,00	850.000,00
37	SDN Panjang Wetan 01			1.464.000,00	1.464.000,00
38	SDN Kandang Panjang 02			45.741.421,00	45.741.421,00
39	SDN Dukuh 01			2.301.850,00	2.301.850,00
40	SDN Kraton			2.400.000,00	2.400.000,00
41	SDN Krapyak Lor 02			1.540.969,00	1.540.969,00
42	SDN Krapyak Lor 04			350.000,00	350.000,00
43	SDN Krapyak Lor 05			2.500.000,00	2.500.000,00
44	SDN Pabean			19.550.000,00	19.550.000,00
45	SDN Kradenan 01			550.000,00	550.000,00

No.	Nama SKPD	Tanggal Berita Acara			Jumlah
		44112	22-Sep-20	20-Nov-20	
46	SDN Buaran			4.940.062,00	4.940.062,00
47	SDN Kertoharjo 01			1.253.188,00	1.253.188,00
48	SDN Kertoharjo 02			3.203.200,00	3.203.200,00
49	SDN Kuripan Kidul 02			6.070.000,00	6.070.000,00
50	SDN Kuripan Lor 02			1.378.000,00	1.378.000,00
51	SDN Yosorejo 01			7.200.000,00	7.200.000,00
52	SDN Yosorejo 02			1.088.997,00	1.088.997,00
53	SDN Krapyak Kidul 02			12.017.425,00	12.017.425,00
54	TK Cempaka Jaya			125.000,00	125.000,00
55	TK Pembina Utara			1.900.000,00	1.900.000,00
56	TK Pembina Barat			8.100.000,00	8.100.000,00
57	SMP N 03			15.000.000,00	15.000.000,00
58	SMP N 07			4.550.000,00	4.550.000,00
59	SMP N 12			48.913.329,81	48.913.329,81
60	SMP N 14			68.338.900,00	68.338.900,00
61	SMP N 15			84.814.831,74	84.814.831,74
62	SMP N 16			20.566.873,88	20.566.873,88
63	Dinas Kelautan dan Perikanan	788.555.000,00			788.555.000,00
64	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	67.770.979,00			67.770.979,00
65	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		448.708.689,60		448.708.689,60
JUMLAH		8.670.971.829,00	448.708.689,60	2.332.544.154,11	11.452.224.672,71

LAMPIRAN 29
BELANJA MODAL TIDAK DIKAPITALISASI

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB B				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
Sekretariat DPRD/DPRD	14.500.000,00	14.500.000			Pengadaan kursi rapat dprd sebanyak 100 buah @145.000
Bag. Umum	19.937.500,00	19.937.500			Pengadaan 50 kursi rapat yang tidak memenuhi batas minimal aset
BKD	2.178.000,00	2.178.000			Pengadaan 6 akses point tidak memenuhi batas minimal aset
DINPERKIM	3.000.000,00	3.000.000			Pengadaan 1 buah meja kerja dan 6 buah kursi @450.000 yang tidak masuk batas minimal aset tetap
DINHUB	34.187.000,00	34.187.000			Pengadaan 68 Kursi rapat dan 1 laser pointer yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DINKES	10.135.457,00	7.269.582	2.865.875		Pengadaan habis pakai 50 kabel(50 meter), 2 konektor kabel, 5 antena mobile, 5 fan DC, 20 kabel DC mobil dan pengadaan 14 stetoskop dan 6 akses point yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu	6.123.801,00	6.123.801			Pengadaan 12 kursi rapat dan 3 buah kipas angin tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi.
PUSK Bendan	3.210.000,00	3.210.000			Pengadaan 7 buah ekshauss van yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
PUSK Kramatsari	6.810.000,00	1.300.000	5.510.000		Pengadaan habis pakai 29 seragam pukesmas dan pengadaan 2 buah regulator oksigen, 2 buah tensimeter yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
PUSK Medono	910.000,00	910.000			pengadaan 2 buah ventilating fan yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
PUSK Tirto	7.979.900,00	950.000	7.029.900		Pengadaan habis pakai seragam batik, gordyn, 2tensi jarum alat gigi, 1 buah kaca mulut dan pengadaan 2 tensi jarum dan 1 ekshauss fan tidak memenuhi batas minimal aset tetap
PUSK Noyontaan	8.295.000,00	870.000	7.425.000		Pengadaan habis pakai 33 seragam, 3 buah tensimeter pengadaan 2 buah ice house yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
PUSK Sokorejo	1.850.000,00	1.600.000	250.000		Pengadaan habis pakai 1 meja kayu dan pengadaan 4 ekshauss fan yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
PUSK Tondano	8.325.000,00	3.825.000	4.500.000		Pengadaan habis pakai 29 seragam batik, 2 thermometer dan pengadaan 2 thermometer, 2 buah tensimeter yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap, 5 set gordyn untuk jendela kecil @465.000, 1 buah data logger (alata laboratorium @300.000,
PUSK Dukuh	1.395.000,00	1.395.000			Pengadaan 3 buah Ekshauss Fan yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
PUSK Krapyak kidul	5.556.000,00	5.356.000	200.000		Pengadaan habis pakai 1 buah meja kecil dan pengadaan 5 buah ekshauss fan, 8 buah kursi rapat yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
PUSK Kusuma Bangsa	800.000,00	800.000			pengadaan 2 buah modem yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
PUSK Jenggot	3.266.000,00	3.266.000			Pengadaan 5 buah Ekshauss Fan, 2 microphone, yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
PUSK Buaran	800.000,00	800.000			Pengadaan 2 buah kipas angin yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
RSUD BENDAN	16.117.285,00	15.800.000		317.285	Pengadaan 2 peralatan pel dan 40 kursi rapat dan 1 telepon
DINDIK	108.462.000,00	2.722.000		105.740.000	Pengadaan 6 buah Papan Absensi @452.000 x5 dan @462.000 x 1 untuk SMP 02,05,07,11,16 dan 17(Ekstrakomp) dan portal besi halaman parkir DINDIK + 192 meja tulis siswa @198.000 dan 192 kursi kayu siswa @297.000 (BM tidak dikapitalisasi)
SDN Kramatsari 01	400.000,00	400.000			Pengadaan 1 buah stand speaker aktif tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Sapuro 01	419.000,00	419.000,00			Pengadaan 1 buah Modem tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Sapuro 05	2.800.000,00	425.000		2.375.000	Pengadaan 4 buah bola volly dan 1 pompa yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Podosugih 01	90.000,00			90.000	Pengadaan 1 cleaner tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Podosugih 03	1.860.000,00	1.860.000			5 buah kipas angin tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB B				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
SDN Medono 01	900.000,00	900.000			Pengadaan 2 buah Speaker aktif 2 buah mouse, 1 monitor komputer, 1 buah tinta hitam dan warna tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Medono 04	1.900.000,00			1.900.000	Pengadaan besi pegangan untuk tangga tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Medono 08	2.021.500,00			2.021.500	Pengadaan 3 buah bola volly tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Pasirsari 01	3.500.000,00			3.500.000	Pengadaan 1 set tralist jendela tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Landungsari 04	6.470.000,00	650.000		5.820.000	Pengadaan 2 buah microphone, 1 buah spre, 4 buah pipa pralon, 8 buah keran, 5 buah bak cuci tangan, 2 buah papan penyangga, 6 buah MMT, 25 klem pralon, 40 bingkai foto, 1 buah rak bunga, 30 buah pot bunga, 4 buah alat semprot tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Poncol 01	5.800.000,00	5.800.000			Pengadaan 10 buah kursi susun dan 4 buah thermogun tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Poncol 02	9.100.000,00			9.100.000	Pengadaan 2 tenda dan 8 gordyn tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Poncol 03	110.000,00	110.000			Pengadaan 1 buah alat peraga tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Klego 01	2.000.000,00	2.000.000			Pengadaan 5 buah kursi rapat tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Gamer 02	270.000,00			270.000	Pengadaan 1 buah power supply tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Dekoro	320.000,00			320.000	Pengadaan 1 buah harddrive 500 gb tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Karang Malang	550.000,00			550.000	Pengadaan 1 buah harddisk tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Panjang Wetan 01	6.438.000,00	4.938.000		1.500.000	Pengadaan 1 buah hardisk internal, 5 kipas angin dan 6 buah white board tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Dukuh 01	450.000,00	450.000			Pengadaan 1 buah dispenser tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Bandengan 01	1.025.000,00			1.025.000	Pengadaan 1 buah colling pad, 1 buah mouse wireless dan 1 buah flasdisk, tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Bandengan 02	350.000,00	350.000			Pengadaan 1 buah DVD, tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kradenan 01	4.520.000,00	4.520.000			Pengadaan 9 buah Kipas angin dan 2 buah pemadam kebakaran tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Kradenan 04	2.380.000,00	400.000		1.980.000	Pengadaan 203 buah timbangan dan 1 tempat cuci tangan tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Banyurip Ageng	1.738.000,00			1.738.000	Pengadaan 1 buah thermogun, 1 buah alat pramuka dan 1 buah engrang, tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kertoharjo 02	275.000,00			275.000	Pengadaan 1 buah Timbangan badan tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Kuripan Lor 02	850.000,00	450.000		400.000	Pengadaan 1 buah rak piring dan 1 buah pemadam kebakaran tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Yosorejo 02	10.635.000,00			10.635.000	Pengadaan 14 buah Kaca tralist dan 1 buah harddrive tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Duwet	390.000,00			390.000	Pengadaan 10 buah MMT, 50 buah pamflet, 50 buah formulir tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Soko	990.000,00			990.000	Pengadaan 2 buah Flasdisk, 2 buah mouse, 1 monitor komputer, 1 buah tinta hitam dan warna tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SMP N 02	1.050.000,00			1.050.000	Pengadaan 3 buah wastafel tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SMP N 04	960.000,00	960.000			Pengadaan 2 buah router wif (ekstrakomp) dan pengadaan 1 buah bola volly pantai, 4 buah bola volley, 1 nett volly, 1 buah nett tennis meja, 4 buah skipping, 4 buah bola sepak, 4 buah bed tennis meja (BM tdk kapitalisasi)
SMP N 05	700.000,00	700.000			Pengadaan 2 buah thermogun @350.000 yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap (Ekstrakomp)
SMP N 06	700.000,00	700.000			Pengadaan 2 buah infrared thermometer (ekstrakomp)
SMP N 07	10.070.880,00	4.275.680		5.795.200	Pengadaan 2 buah modem, 8 buah alat peraga IPA (ekstrakomp) dan pengadaan 92 alat peraga IPA(BM tdk kapitalisasi)
SMP N 08	200.000,00		200.000,00		Pengadaan 10 buah tong sampah uang direklas ke persediaan

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB B				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
SMP N 12	9.500.000,00	9.500.000			Pengadaan 20 buah meja dan kursi siswa (bm tdk dikapitalisasi) yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SMP N 14	4.801.500,00	2.000.000	1.260.000,00	1.541.500	Pengadaan 5 buah rak bunga (ektrakomp) dan pengadaan 2mouse, 2 hub, 3 adaptor, 1 konektor rj45, 4 borel LAN, 2 switch, 2 kabel usb, 50 kabel utp, 10 konektor, 2 klem, 1 papan nama (bm tdk dikapitalisasi) dan 5 set peralatan makan (persediaan) yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SMP N 16	15.350.000,00			15.350.000	Pengadaan 10 buah wastafel dan 1 buah cd pembelajaran (bm tdk dikapitalisasi) yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SMP N 17	450.000,00	450.000			Pengadaan 1 buah modem (ektrakomp) yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
DKP	4.470.000,00	3.950.000		520.000	Pengadaan 1 buah kipas angin , 2 buah dispenser, 4 buah meja portable dan 4 buah thermogun
DINPERPAN	7.425.000,00		3.875.000,00	3.550.000	Pembuatan Paltform potong sapi dan pengadaan peralatan wastafel dan apron sintetik
DINDAGKOP	29.900.000,00	29.900.000			Pengadaan 75 Timbangan anak bidur
DINPERINAKER	11.731.000,00	8.431.000	3.300.000,00		Pengadaan habis pakai 5 buah alat rumah tangga dan 20 kursi, 1 buah kompor dan lemari kaca , tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DPMPTSP	11.149.656,00	9.862.656	1.287.000,00		Pengadaan habis pakai 3 buah adaptor dan 3 buah memori card, pengadaan 18 kursi lipat dan 3 buah tripod tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DLH	725.000,00	450.000		275.000	Pengadaan habis pakai 30 buah komposter, pengadaan 1 buah jam dinding da 1 buah tabung gas tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DINPARBUDPORA	615.000,00	400.000	215.000,00		Pengadaan 1 mouse , flasdisk dan 1 buah timbangan orang
SALPOL PP	3.721.000,00		3.721.000,00		Pengadaan 14 senter, tidak memenuhi batas minimal aset tetap
BKPPD	1.200.000,00	1.200.000			Pengadaan 3 microphone TOA yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DINARPUS	920.000,00	920.000			Pengadaan 2 buah dispenser dan 1 buah switch yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DISKOMINFO	2.824.000,00	2.824.000			Pengadaan 2 microphone, 3 acces point dan 3 router yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Podosugih	4.774.000,00		4.774.000		Persediaan bahan habis pakai 289 masker, 25 faceshield, 12 jas hujan, 5 jerigen, 2 kacamata, 52 sarung tangan dan 2 sepatu boot yang tidak memenuhi batas minmal aset tetap
Kel. Noyontaansari	2.200.000,00	400.000	1.800.000		Pengadaan 8 buah penyemprot manual @225.000 direklas ke persediaan dan 1 buah rak buku @400.000
Kec. Pekalongan Selatan	600.000,00		600.000		Pengadaan 1 buah clinichal thermometer
	458.426.479,00	230.595.219	48.812.775	179.018.485	
JUMLAH	1.676.951.808,00	433.399.755,00	619.209.280,00	624.342.773,00	

LAMPIRAN 30

TRANSFER KELUAR PERALATAN DAN MESIN

No	OPD Pemberi	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulai Penyusutan	Nilai Buku	OPD Penerima
1	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	4	14.045.200,00	7.022.600,00	7.022.600,00	Dinas Pendidikan
2	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	17	21.224.500,00	4.244.900,00	16.979.600,00	Dinas Pendidikan
3	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	7.491.000,00	1.498.200,00	5.992.800,00	Dinas Pendidikan
4	Badan Keuangan Daerah	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	Dinas Kesehatan
5	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2.497.000,00	499.400,00	1.997.600,00	Dinas Kesehatan
6	Dinas Kesehatan	ALAT Kedokteran Umum Lain Lain	1	15.137.100,00	9.082.260,00	6.054.840,00	RSUD
7	Dinas Kesehatan	Mobile X Ray Unit	1	734.424.623,00	440.654.775,00	293.769.848,00	RSUD
8	Dinas Kesehatan	Radiology Unit (Rongent)	1	1.400.000,00	1.400.000,00	-	RSUD
9	Dinas Kesehatan	ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGIC LAIN-LAIN	1	5.500.000,00	5.500.000,00	-	RSUD
10	Dinas Kesehatan	ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGIC LAIN-LAIN	1	4.400.000,00	4.400.000,00	-	RSUD
11	Dinas Kesehatan	ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGIC LAIN-LAIN	1	9.525.850,00	5.715.510,00	3.810.340,00	RSUD
12	BPBD	Pompa Air	1	78.742.500,00	-	78.742.500,00	DPUPR
13	Badan Keuangan Daerah	Sepeda motor	1	12.500.000,00	12.500.000,00	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
14	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
15	BPBD	Perahu Penumpang	1	43.500.000,00	-	43.500.000,00	SATPOL PP
16	Badan Keuangan Daerah	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	BPBD
17	Badan Keuangan Daerah	Station Wagon	1	284.465.000,00	-	284.465.000,00	DINDUKCAPIL
18	Badan Keuangan Daerah	Station Wagon	1	284.465.000,00	-	284.465.000,00	DISKOMINFO
19	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Lemari Kayu	1	8.300.000,00	4.980.000,00	3.320.000,00	DINDAGKOP UKM
20	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Lemari Kayu	1	7.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	DINDAGKOP UKM
21	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Lemari Kayu	1	7.400.000,00	4.440.000,00	2.960.000,00	DINDAGKOP UKM
22	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Lemari Kaca	1	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	DINDAGKOP UKM
23	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Lemari Kaca	1	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	DINDAGKOP UKM
24	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Papan Nama Instansi	1	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	DINDAGKOP UKM
25	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	22.448.000,00	13.468.800,00	8.979.200,00	DINDAGKOP UKM
26	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Kursi Tamu	1	7.000.000,00	4.200.000,00	2.800.000,00	DINDAGKOP UKM
27	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	A.C. Window	1	5.128.750,00	3.077.250,00	2.051.500,00	DINDAGKOP UKM

No	OPD Pemberi	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulai Penyusutan	Nilai Buku	OPD Penerima
28	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	A.C. Window	1	5.128.750,00	3.077.250,00	2.051.500,00	DINDAGKOP UKM
29	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Sound System	1	5.079.000,00	3.047.400,00	2.031.600,00	DINDAGKOP UKM
30	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Alat Hiasan	1	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	DINDAGKOP UKM
31	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Alat Hiasan	1	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	DINDAGKOP UKM
32	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Alat Hiasan	1	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	DINDAGKOP UKM
33	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	DINDAGKOP UKM
34	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	DINDAGKOP UKM
35	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	DINDAGKOP UKM
36	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	DINDAGKOP UKM
37	Badan Keuangan Daerah	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	DINPARBUDPORA
38	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	DINPARBUDPORA
39	Badan Keuangan Daerah	Station Wagon	1	284.465.000,00	-	284.465.000,00	DKP
40	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	DKP
41	BKPPD	Sepeda Motor	1	9.700.000,00	9.700.000,00	-	Badan Keuangan Daerah
42	BKPPD	Sepeda Motor	1	11.300.000,00	9.685.716,00	1.614.284,00	Badan Keuangan Daerah
43	BAPPEDA	Sepeda Motor	1	12.016.488,00	12.016.488,00	-	Badan Keuangan Daerah
44	DKP	Station Wagon	1	156.310.000,00	156.310.000,00	-	Badan Keuangan Daerah
45	BAG UMUM	Lap Top	1	10.177.500,00	-	10.177.500,00	BAG PEMERINTAH
46	BAG UMUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.200.000,00	-	4.200.000,00	BAG PEMERINTAH
47	BAG UMUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.495.040,00	-	2.495.040,00	BAG PEMERINTAH
48	BAG UMUM	Televisi	1	4.291.150,00	-	4.291.150,00	BAG HUKUM
49	BAG UMUM	P.C Unit	1	8.152.035,00	-	8.152.035,00	BAG HUKUM
50	BAG UMUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	4.990.080,00	-	4.990.080,00	BAG HUKUM
51	BAG UMUM	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	2.600.000,00	2.600.000,00	-	BAG ORGANISASI
52	BAG UMUM	Lighting Stand Tripod	1	1.350.900,00	-	1.350.900,00	BAG ORGANISASI
53	BAG UMUM	Lap Top	2	14.375.000,00	-	14.375.000,00	BAG ORGANISASI
54	BAG UMUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.200.000,00	-	4.200.000,00	BAG ORGANISASI
55	BAG UMUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.495.040,00	-	2.495.040,00	BAG ORGANISASI
56	BAG UMUM	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.380.800,00	-	5.380.800,00	BAG ORGANISASI
57	BAG UMUM	Lap Top	1	7.187.500,00	-	7.187.500,00	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA
58	BAG UMUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	10.930.560,00	-	10.930.560,00	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA
59	BAG UMUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.200.000,00	-	4.200.000,00	BAG PBJ DAN MINBANG

No	OPD Pemberi	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulai Penyusutan	Nilai Buku	OPD Penerima
60	BAG UMUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	6.200.640,00	-	6.200.640,00	BAG PBJ DAN MINBANG
61	BAG UMUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.950.000,00	-	3.950.000,00	BAG KESRA
62	Badan Keuangan Daerah	Station Wagon	1	290.560.000,00	124.525.713,00	166.034.287,00	BAG UMUM
63	SETWAN	Station Wagon	1	148.310.000,00	105.935.715,00	42.374.285,00	BAG UMUM
64	SETWAN	Station Wagon	1	465.818.500,00	199.636.500,00	266.182.000,00	BAG UMUM
65	DINARPUS	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	125.000.000,00	125.000.000,00	-	BAG UMUM
66	RSUD	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	195.688.182,00	-	195.688.182,00	BAG UMUM
67	Badan Keuangan Daerah	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	BAG UMUM
68	Badan Keuangan Daerah	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	BAG UMUM
69	BAG UMUM	Filing Cabinet Besi	2	5.813.200,00	5.813.200,00	-	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
70	BAG UMUM	Kursi Putar	8	15.928.000,00	15.928.000,00	-	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
71	BAG UMUM	Meja Komputer	1	556.000,00	556.000,00	-	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
72	BAG UMUM	Televisi	1	4.291.150,00	-	4.291.150,00	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
73	BAG UMUM	Lensa Kamera	1	7.800.000,00	-	7.800.000,00	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
74	BAG UMUM	Camera Digital	1	16.500.000,00	-	16.500.000,00	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
75	BAG UMUM	Handy Talky (HT)	4	11.500.000,00	-	11.500.000,00	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
76	BAG UMUM	Handy Talky (HT)	3	12.300.000,00	-	12.300.000,00	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
77	BAG UMUM	P.C Unit	1	8.202.035,00	-	8.202.035,00	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
78	BAG UMUM	Lap Top	1	7.187.500,00	-	7.187.500,00	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
79	BAG UMUM	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.200.000,00	-	4.200.000,00	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
80	BAG UMUM	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.380.800,00	-	5.380.800,00	BAG PROTOKOL DAN KOMPI
81	Badan Keuangan Daerah	Station Wagon	1	432.664.000,00	-	432.664.000,00	SETWAN
82	Badan Keuangan Daerah	Station Wagon	1	312.664.000,00	-	312.664.000,00	SETWAN
83	Badan Keuangan Daerah	Station Wagon	1	312.664.000,00	-	312.664.000,00	SETWAN
84	Badan Keuangan Daerah	Station Wagon	1	513.466.500,00	-	513.466.500,00	SETWAN
85	Badan Keuangan Daerah	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	KEC PKL UTARA
86	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	3	10.533.900,00	5.266.950,00	5.266.950,00	KANDANG PANJANG
87	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	KANDANG PANJANG
88	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2.497.000,00	499.400,00	1.997.600,00	KANDANG PANJANG
89	Badan Keuangan Daerah	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	KANDANG PANJANG
90	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	PANJANG WETAN
91	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	PANJANG WETAN
92	Badan Keuangan Daerah	Sepeda motor	1	8.200.000,00	8.200.000,00	-	PANJANG WETAN

No	OPD Pemberi	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulai Penyusutan	Nilai Buku	OPD Penerima
93	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak Dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	DEGAYU
94	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	DEGAYU
95	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	DEGAYU
96	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	KRAPYAK
97	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	PADUKUHAN KRATON
98	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.945.800,00	3.945.800,00	-	PADUKUHAN KRATON
99	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	PANJANG BARU
100	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	PANJANG BARU
101	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2.497.000,00	499.400,00	1.997.600,00	PANJANG BARU
102	Badan Keuangan Daerah	Sepeda motor	1	12.500.000,00	12.500.000,00	-	PANJANG BARU
103	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	KEC PKL SELATAN
104	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	JENGGOT
105	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	JENGGOT
106	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	KURIPAN KERTO HARJO
107	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	KURIPAN YOSOREJO
108	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	KURIPAN YOSOREJO
109	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	KURIPAN YOSOREJO
110	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	SOKO DUWET
111	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	BANYURIP
112	Badan Keuangan Daerah	Mesin Absensi	1	2.100.500,00	420.100,00	1.680.400,00	KEC PKL BARAT
113	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	MEDONO
114	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	PODOSUGIH
115	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	PODOSUGIH
116	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	PODOSUGIH
117	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	PODOSUGIH
118	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	TIRTO
119	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	TIRTO
120	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.945.900,00	3.945.900,00	-	SAPURO KEBULEN
121	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	BENDAN KERGON
122	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	PASIRKRATONKRAMAT
123	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	2	7.022.600,00	3.511.300,00	3.511.300,00	PRINGREJO
124	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	PRINGREJO

No	OPD Pemberi	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulai Penyusutan	Nilai Buku	OPD Penerima
125	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	KAUMAN
126	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	KAUMAN
127	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	PONCOL
128	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	KLEGO
129	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	GAMER
130	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	NOYONTAANSARI
131	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	NOYONTAANSARI
132	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	SETONO
133	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak dorong	1	3.511.300,00	1.755.650,00	1.755.650,00	KALIBAROS
134	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.248.500,00	249.700,00	998.800,00	KALIBAROS
JUMLAH				5.275.994.773,00			

LAMPIRAN 31

TRANSFER MASUK JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DINPERKIM	Jalan Desa	36.031.000	-	36.031.000	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Jalan Desa	22.089.000	-	22.089.000	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Jalan Desa	10.828.000	-	10.828.000	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Jalan Desa	10.575.000	-	10.575.000	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Jalan Desa	11.475.000	-	11.475.000	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Jalan Desa	15.281.000	-	15.281.000	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Jalan Desa	103.827.173	70.682.717	33.144.456	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Jalan Desa	167.320.883	160.051.354	7.269.529	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Jalan Desa	147.400.000	147.400.000	-	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Saluran Drainage	8.375.000	-	8.375.000	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Saluran Drainage	40.461.920	4.046.192	36.415.728	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Saluran Drainage	22.417.210	2.241.721	20.175.489	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Jalan Desa	5.000.000	5.000.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa	4.500.000	4.500.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa	54.000.000	54.000.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa	144.143.000	144.143.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	2.000.000	2.000.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	1.000.000	1.000.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	52.700.000	13.490.000	39.210.000	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	95.268.446	95.268.446	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	191.370.000	191.370.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	6.000.000	6.000.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	2.500.000	2.500.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	1.000.000	1.000.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	16.476.700	1.500.000	14.976.700	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	2.500.000	2.500.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	2.500.000	2.500.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	4.500.000	4.500.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	1.500.000	1.500.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	147.460.000	59.746.000	87.714.000	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	20.269.000	4.000.000	16.269.000	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	49.983.000	2.000.000	47.983.000	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	144.024.821	144.024.821	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	100.496.268	10.949.627	89.546.641	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	1.000.000	1.000.000	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa	546.810.696	270.262.682	276.548.014	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Khusus Kompleks	1.116.597.593	359.896.535	756.701.058	BANYURIP
DINPERKIM	Saluran Drainage	115.764.000	11.576.400	104.187.600	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Desa	38.099.000	25.531.400	12.567.600	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	225.420.250	148.220.446	77.199.804	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	5.600.000	5.600.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	188.442.085	188.442.085	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	19.816.000	19.816.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	8.482.500	8.482.500	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	25.687.500	25.687.500	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	16.875.000	16.875.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	2.585.000	2.585.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	93.907.559	19.347.401	74.560.158	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	187.850.000	44.530.000	143.320.000	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	20.625.000	20.625.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	18.870.000	18.870.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	164.136.250	164.136.250	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	53.625.000	53.625.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	312.957.000	312.957.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	23.100.000	23.100.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	11.000.000	11.000.000	-	BENDAN KERGON

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DINPERKIM	Jalan Desa	24.750.000	24.750.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	17.325.000	17.325.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	17.000.000	17.000.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	3.517.500	3.517.500	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	6.320.000	6.320.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	2.835.000	2.835.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	167.053.477	167.053.477	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	114.524.000	22.760.900	91.763.100	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	6.187.500	6.187.500	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	127.208.575	22.620.858	104.587.717	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	112.639.580	83.263.058	29.376.522	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	131.300.000	131.300.000	-	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	186.076.000	186.076.000	-	BUARAN KRADENAN
DINPERKIM	Jalan Desa	48.000.000	48.000.000	-	BUARAN KRADENAN
DINPERKIM	Jalan Desa	105.135.000	105.135.000	-	BUARAN KRADENAN
DINPERKIM	Jalan Desa	15.165.000	15.165.000	-	BUARAN KRADENAN
DINPERKIM	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	138.366.406	10.852.328	127.514.078	BUARAN KRADENAN
DINPERKIM	Jalan Desa	36.192.000	-	36.192.000	DEGAYU
DINPERKIM	Jalan Desa	20.459.500	-	20.459.500	DEGAYU
DINPERKIM	Jalan Desa	46.250.000	46.250.000	-	DEGAYU
DINPERKIM	Jalan Desa	286.175.000	225.605.000	60.570.000	DEGAYU
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	50.188.000	-	50.188.000	DEGAYU
DINPERKIM	Jalan Desa	165.485.000	165.485.000	-	GAMER
DINPERKIM	Saluran Drainage	143.241.000	14.324.100	128.916.900	GAMER
DINPERKIM	Jalan Desa	350.665.646	239.101.965	111.563.681	JENGGOT
DINPERKIM	Saluran Drainage	10.000.000	1.000.000	9.000.000	JENGGOT
DINPERKIM	Jalan Desa	138.011.000	67.451.000	70.560.000	KALIBAROS
DINPERKIM	Jalan Desa	162.588.000	162.588.000	-	KALIBAROS
DINPERKIM	Jalan Desa	49.850.000	49.850.000	-	KALIBAROS
DINPERKIM	Saluran Drainage	30.810.000	3.081.000	27.729.000	KALIBAROS
DINPERKIM	Saluran Drainage	21.553.000	2.155.300	19.397.700	KALIBAROS
DINPERKIM	Jalan Desa	182.653.000	182.653.000	-	KANDANG PANJANG
DINPERKIM	Jalan Desa	210.290.000	210.290.000	-	KANDANG PANJANG
DINPERKIM	Jalan Desa	406.220.986	235.490.986	170.730.000	KANDANG PANJANG
DINPERKIM	Jalan Desa	44.352.397	44.352.397	-	KANDANG PANJANG
DINPERKIM	Jalan Desa	280.462.645	144.700.485	135.762.160	KAUMAN
DINPERKIM	Jalan Desa	76.730.000	76.730.000	-	KAUMAN
DINPERKIM	Jalan Desa	112.806.000	112.806.000	-	KAUMAN
DINPERKIM	Jalan Desa	63.590.000	-	63.590.000	KLEGO
DINPERKIM	Jalan Desa	20.550.000	-	20.550.000	KLEGO
DINPERKIM	Jalan Desa	494.038.013	430.317.290	63.720.723	KLEGO
DINPERKIM	Jalan Desa	91.648.661	71.489.866	20.158.795	KLEGO
DINPERKIM	Jalan Desa	242.144.007	111.404.165	130.739.842	KLEGO
DINPERKIM	Bangunan Pembawa Air Kotor	34.534.000	863.350	33.670.650	KLEGO
DINPERKIM	Bangunan Pembawa Air Kotor	38.931.000	973.275	37.957.725	KLEGO
DINPERKIM	Bangunan Pembawa Air Kotor	9.707.000	242.675	9.464.325	KLEGO
DINPERKIM	Jalan Desa	270.200.000	270.200.000	-	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	289.676.157	266.220.831	23.455.326	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	125.000.000	125.000.000	-	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	437.265.561	414.906.224	22.359.337	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	180.000.000	180.000.000	-	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	140.000.000	140.000.000	-	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	368.559.868	198.855.987	169.703.881	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	318.300.000	318.300.000	-	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	308.279.076	308.279.076	-	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	355.496.268	197.549.627	157.946.641	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	147.739.268	102.883.927	44.855.341	KRAPYAK

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DINPERKIM	Jalan Desa	231.083.323	52.988.332	178.094.991	KURIPAN YOSOREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	15.440.000	15.440.000	-	KURIPAN YOSOREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	8.000.000	8.000.000	-	KURIPAN YOSOREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	7.360.000	7.360.000	-	KURIPAN YOSOREJO
DINPERKIM	Saluran Drainage	57.182.000	5.718.200	51.463.800	KURIPAN YOSOREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	386.811.690	365.503.538	21.308.152	MEDONO
DINPERKIM	Jalan Desa	141.463.000	137.823.000	3.640.000	MEDONO
DINPERKIM	Jalan Desa	123.570.000	80.774.100	42.795.900	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	88.898.824	54.859.764	34.039.060	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	22.500.000	22.500.000	-	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	250.000.000	250.000.000	-	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	250.000.000	250.000.000	-	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	233.884.645	158.388.465	75.496.180	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	112.500.000	112.500.000	-	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	471.968.855	362.196.886	109.771.969	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	249.809.000	199.961.800	49.847.200	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	115.237.645	44.887.305	70.350.340	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	646.460.000	379.292.000	267.168.000	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	400.000.000	400.000.000	-	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	560.909.635	512.181.927	48.727.708	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	225.000.000	225.000.000	-	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	125.000.000	125.000.000	-	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	435.689.000	399.275.600	36.413.400	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	702.862.000	640.572.400	62.289.600	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	375.000.000	375.000.000	-	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	243.089.300	218.617.860	24.471.440	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	375.000.000	375.000.000	-	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	143.650.000	143.650.000	-	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	168.065.397	57.362.531	110.702.866	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	15.000.000	15.000.000	-	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	151.270.000	151.270.000	-	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	60.000.000	60.000.000	-	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	302.388.000	119.941.800	182.446.200	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	84.249.517	84.249.517	-	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	274.191.536	110.307.354	163.884.182	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	324.846.268	176.484.627	148.361.641	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	175.962.000	175.962.000	-	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	115.510.000	55.270.000	60.240.000	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	99.587.000	99.587.000	-	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	40.500.000	40.500.000	-	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	48.750.000	48.750.000	-	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	40.000.000	40.000.000	-	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	151.795.000	51.179.500	100.615.500	PADUKUHAN KRATON

LAMPIRAN 32**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

OPD	Jumlah	Hibah	Di Lelang	Hilang/dimusnahkan
			032/749/2020	030/800/2020
			22-Sep-20	20-nov-20
Pustu Pabean	1.100.000,00			1.100.000,00
Dinas Pendidikan	11.225.000,00			11.225.000,00
SDN Kramatsari 01	5.900.000,00			5.900.000,00
SDN Bendan 01	1.250.000,00			1.250.000,00
SDN Bendan 03	3.000.000,00			3.000.000,00
SDN Bendan 04	1.200.000,00			1.200.000,00
SDN Bendan 08	1.000.000,00			1.000.000,00
SDN Sapuro 01	6.750.000,00			6.750.000,00
SDN Sapuro 05	6.350.000,00			6.350.000,00
SDN Podosugih 01	2.525.000,00			2.525.000,00
SDN Podosugih 03	2.650.000,00			2.650.000,00
SDN Medono 01	4.365.000,00			4.365.000,00
SDN Medono 04	1.675.000,00			1.675.000,00
SDN Medono 07	5.000.000,00			5.000.000,00
SDN Medono 08	6.000.000,00			6.000.000,00
SDN Tirto 01	3.650.000,00			3.650.000,00
SDN Tirto 03	6.079.000,00			6.079.000,00
SDN Pasirsari 01	1.400.000,00			1.400.000,00
SDN Pasirsari 02	500.000,00			500.000,00
SDN Tegal Rejo	870.000,00			870.000,00
SDN Pringlangu	950.000,00			950.000,00
SDN Keputran 04	1.600.000,00			1.600.000,00
SDN Keputran 06	2.325.000,00			2.325.000,00
SDN Landungsari 01	3.500.000,00			3.500.000,00
SDN Landungsari 04	1.025.000,00			1.025.000,00
SDN Landungsari 05	980.000,00			980.000,00
SDN Poncol 01	4.400.000,00			4.400.000,00
SDN Poncol 02	7.500.000,00			7.500.000,00
SDN Poncol 03	3.202.000,00			3.202.000,00
SDN Sampangan 01	2.550.000,00			2.550.000,00
SDN Klego 01	20.500.000,00			20.500.000,00
SDN Klego 04	2.050.225,00			2.050.225,00
SDN Gamer 01	2.300.000,00			2.300.000,00
SDN Sokorejo	1.050.000,00			1.050.000,00
SDN Baros	2.257.000,00			2.257.000,00
SDN Dekoro	2.200.000,00			2.200.000,00
SDN Karang malang	800.000,00			800.000,00
SDN Panjang Wetan 01	6.992.000,00			6.992.000,00
SDN Panjang Wetan 03	425.000,00			425.000,00
SDN Panjang Wetan 04	5.425.000,00			5.425.000,00
SDN Kandang Panjang 01	4.325.500,00			4.325.500,00
SDN Kandang Panjang 02	5.950.000,00			5.950.000,00

OPD	Jumlah	Hibah	Di Lelang	Hilang/dimusnahkan
			032/749/2020	030/800/2020
			22-Sep-20	20-nov-20
SDN Kandang Panjang 10	2.450.900,00			2.450.900,00
SDN Dukuh 01	1.000.000,00			1.000.000,00
SDN Kraton	650.000,00			650.000,00
SDN Krapyak Lor 01	2.650.000,00			2.650.000,00
SDN Krapyak Lor 02	200.000,00			200.000,00
SDN Krapyak Lor 04	550.000,00			550.000,00
SDN Krapyak Lor 05	1.675.000,00			1.675.000,00
SDN Pabean	1.500.000,00			1.500.000,00
SDN Degayu 01	1.750.000,00			1.750.000,00
SDN Degayu 02	2.250.000,00			2.250.000,00
SDN Kradenan 01	3.450.000,00			3.450.000,00
SDN Kradenan 04	1.950.000,00			1.950.000,00
SDN Buaran	1.750.000,00			1.750.000,00
SDN Banyurip Ageng	1.000.000,00			1.000.000,00
SDN Jenggot	570.000,00			570.000,00
SDN Kertoharjo 01	2.500.000,00			2.500.000,00
SDN Kertoharjo 02	5.199.000,00			5.199.000,00
SDN Kuripan Kidul 02	4.500.000,00			4.500.000,00
SDN Kuripan Lor 01	2.400.000,00			2.400.000,00
SDN Kuripan Lor 02	700.000,00			700.000,00
SDN Yosorejo 01	850.000,00			850.000,00
SDN Yosorejo 02	2.450.000,00			2.450.000,00
SDN Duwet	1.900.000,00			1.900.000,00
SDN Soko	650.000,00			650.000,00
SDN Krapyak Kidul 02	850.000,00			850.000,00
TK Pembina Utara	3.000.000,00			3.000.000,00
TK Pembina Barat	2.390.000,00			2.390.000,00
SMP N 01	3.000.000,00			3.000.000,00
SMP N 03	2.200.000,00			2.200.000,00
SMP N 04	7.000.000,00			7.000.000,00
SMP N 05	12.000.000,00			12.000.000,00
SMP N 06	1.000.000,00			1.000.000,00
SMP N 07	3.575.000,00			3.575.000,00
SMP N 08	4.500.000,00			4.500.000,00
SMP N 09	4.500.000,00			4.500.000,00
SMP N 10	650.550,00			650.550,00
SMP N 11	3.800.000,00			3.800.000,00
SMP N 12	3.000.000,00			3.000.000,00
SMP N 13	2.000.000,00			2.000.000,00
SMP N 14	31.300.000,00			31.300.000,00
SMP N 15	6.300.000,00			6.300.000,00
SMP N 16	4.500.000,00			4.500.000,00
DINPARBUDPORA	3.211.330.653,00		3.211.330.653,00	
JUMLAH	3.506.236.828,00	-	3.211.330.653,00	294.906.175,00

LAMPIRAN 33

TRANSFER KELUAR JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DINPERKIM	Saluran Drainage	183.680.060	18.368.006	165.312.054	PASIRKRATONKRAMAT
DINPERKIM	Saluran Drainage	10.398.110	1.039.811	9.358.299	PASIRKRATONKRAMAT
DINPERKIM	Saluran Drainage	49.700.130	4.970.013	44.730.117	PASIRKRATONKRAMAT
DINPERKIM	Saluran Drainage	71.118.090	7.111.809	64.006.281	PASIRKRATONKRAMAT
DINPERKIM	Saluran Drainage	287.027.000	57.405.400	229.621.600	PASIRKRATONKRAMAT
DINPERKIM	Saluran Drainage	88.404.790	8.840.479	79.564.311	SETONO
DINPERKIM	Saluran Drainage	48.466.709	4.846.671	43.620.038	SETONO
DINPERKIM	Saluran Drainage	35.319.655	3.531.966	31.787.689	SETONO
DINPERKIM	Saluran Drainage	15.902.723	1.590.272	14.312.451	SOKO DUWET
DINPERKIM	Saluran Drainage	10.033.343	1.003.334	9.030.009	SOKO DUWET
DINPERKIM	Saluran Drainage	73.076.250	7.307.625	65.768.625	BUARAN KRADENAN
DINPERKIM	Saluran Drainage	57.040.156	5.704.016	51.336.140	BUARAN KRADENAN
KANDANG PANJANG	Jalan Desa	182.653.000	182.653.000	-	DINPERKIM
KANDANG PANJANG	Jalan Desa	210.290.000	210.290.000	-	DINPERKIM
KANDANG PANJANG	Jalan Desa	406.220.986	235.490.986	170.730.000	DINPERKIM
KANDANG PANJANG	Jalan Desa	44.352.397	44.352.397	-	DINPERKIM
PANJANG WETAN	Jalan Desa	16.141.200	-	16.141.200	DINPERKIM
PANJANG WETAN	Jalan Desa	337.556.268	187.565.627	149.990.641	DINPERKIM
PANJANG WETAN	Jalan Desa	176.320.041	135.712.004	40.608.037	DINPERKIM
DEGAYU	Jalan Desa	36.192.000	-	36.192.000	DINPERKIM
DEGAYU	Jalan Desa	20.459.500	-	20.459.500	DINPERKIM
DEGAYU	Jalan Khusus Perorangan	50.188.000	-	50.188.000	DINPERKIM
DEGAYU	Jalan Desa	46.250.000	46.250.000	-	DINPERKIM
DEGAYU	Jalan Desa	286.175.000	225.605.000	60.570.000	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa	5.000.000	5.000.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa	4.500.000	4.500.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa	54.000.000	54.000.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa	144.143.000	144.143.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	2.000.000	2.000.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	1.000.000	1.000.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	52.700.000	13.490.000	39.210.000	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	95.268.446	95.268.446	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	191.370.000	191.370.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	6.000.000	6.000.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	2.500.000	2.500.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	1.000.000	1.000.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	16.476.700	1.500.000	14.976.700	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	2.500.000	2.500.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	2.500.000	2.500.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	4.500.000	4.500.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	1.500.000	1.500.000	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	147.460.000	59.746.000	87.714.000	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	20.269.000	4.000.000	16.269.000	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	49.983.000	2.000.000	47.983.000	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	144.024.821	144.024.821	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	100.496.268	10.949.627	89.546.641	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	1.000.000	1.000.000	-	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	270.200.000	270.200.000	-	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	289.676.157	266.220.831	23.455.326	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	125.000.000	125.000.000	-	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	437.265.561	414.906.224	22.359.337	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	180.000.000	180.000.000	-	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	140.000.000	140.000.000	-	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	368.559.868	198.855.987	169.703.881	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	318.300.000	318.300.000	-	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	308.279.076	308.279.076	-	DINPERKIM

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
KRAPYAK	Jalan Desa	355.496.268	197.549.627	157.946.641	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	147.739.268	102.883.927	44.855.341	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	168.065.397	57.362.531	110.702.866	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	15.000.000	15.000.000	-	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	151.270.000	151.270.000	-	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	60.000.000	60.000.000	-	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	302.388.000	119.941.800	182.446.200	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	84.249.517	84.249.517	-	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	274.191.536	110.307.354	163.884.182	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	324.846.268	176.484.627	148.361.641	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	175.962.000	175.962.000	-	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	115.510.000	55.270.000	60.240.000	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	99.587.000	99.587.000	-	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	40.500.000	40.500.000	-	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	48.750.000	48.750.000	-	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	40.000.000	40.000.000	-	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	151.795.000	51.179.500	100.615.500	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	18.500.000	18.500.000	-	DINPERKIM
PANJANG BARU	Saluran Drainage	129.710.000	12.971.000	116.739.000	DINPERKIM
JENGGOT	Saluran Drainage	10.000.000	1.000.000	9.000.000	DINPERKIM
JENGGOT	Jalan Desa	350.665.646	239.101.965	111.563.681	DINPERKIM
BUARAN KRADENAN	Jalan Desa	186.076.000	186.076.000	-	DINPERKIM
BUARAN KRADENAN	Jalan Desa	48.000.000	48.000.000	-	DINPERKIM
BUARAN KRADENAN	Jalan Desa	105.135.000	105.135.000	-	DINPERKIM
BUARAN KRADENAN	Jalan Desa	15.165.000	15.165.000	-	DINPERKIM
BUARAN KRADENAN	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	138.366.406	10.852.328	127.514.078	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Jalan Desa	36.031.000	-	36.031.000	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Jalan Desa	22.089.000	-	22.089.000	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Jalan Desa	10.828.000	-	10.828.000	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Jalan Desa	10.575.000	-	10.575.000	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Jalan Desa	11.475.000	-	11.475.000	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Jalan Desa	15.281.000	-	15.281.000	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Jalan Desa	103.827.173	70.682.717	33.144.456	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Jalan Desa	167.320.883	160.051.354	7.269.529	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Jalan Desa	147.400.000	147.400.000	-	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Saluran Drainage	8.375.000	-	8.375.000	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Saluran Drainage	40.461.920	4.046.192	36.415.728	DINPERKIM
KURIPAN KERTO HARJO	Saluran Drainage	22.417.210	2.241.721	20.175.489	DINPERKIM
KURIPAN YOSOREJO	Saluran Drainage	57.182.000	5.718.200	51.463.800	DINPERKIM
KURIPAN YOSOREJO	Jalan Desa	231.083.323	52.988.332	178.094.991	DINPERKIM
KURIPAN YOSOREJO	Jalan Desa	15.440.000	15.440.000	-	DINPERKIM
KURIPAN YOSOREJO	Jalan Desa	8.000.000	8.000.000	-	DINPERKIM
KURIPAN YOSOREJO	Jalan Desa	7.360.000	7.360.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	35.000.000	35.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	124.783.303	42.178.330	82.604.973	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	10.000.000	10.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	154.953.323	66.345.332	88.607.991	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	12.250.000	12.250.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	293.879.393	145.660.739	148.218.654	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	91.567.000	91.567.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	9.000.000	9.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	10.200.000	10.200.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	76.067.323	22.906.732	53.160.591	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	10.800.000	10.800.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	15.300.000	15.300.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	21.000.000	21.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	15.000.000	15.000.000	-	DINPERKIM

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
SOKO DUWET	Jalan Desa	40.000.000	40.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	11.325.000	11.325.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	103.441.106	19.524.111	83.916.995	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	16.000.000	16.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	5.000.000	5.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	225.543.626	78.084.363	147.459.263	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	9.500.000	9.500.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	48.250.000	48.250.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	166.261.875	90.524.742	75.737.133	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	102.950.000	69.245.000	33.705.000	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	44.900.000	6.290.000	38.610.000	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	46.000.000	46.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	80.063.146	42.026.315	38.036.831	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	18.750.000	18.750.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	77.250.000	77.250.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	57.560.367	57.560.367	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	22.000.000	22.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	19.000.000	19.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	182.810.323	88.503.532	94.306.791	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	134.383.323	110.841.465	23.541.858	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	6.000.000	6.000.000	-	DINPERKIM
SOKO DUWET	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	750.886.066	750.886.066	-	DINPERKIM
BANYURIP	Saluran Drainage	115.764.000	11.576.400	104.187.600	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Desa	546.810.696	270.262.682	276.548.014	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Khusus Kompleks	1.116.597.593	359.896.535	756.701.058	DINPERKIM
MEDONO	Jalan Desa	386.811.690	365.503.538	21.308.152	DINPERKIM
MEDONO	Jalan Desa	141.463.000	137.823.000	3.640.000	DINPERKIM
PODOSUGIH	Jalan Desa	267.105.000	267.105.000	-	DINPERKIM
PODOSUGIH	Jalan Desa	231.482.000	107.596.400	123.885.600	DINPERKIM
PODOSUGIH	Jalan Desa	45.630.000	45.630.000	-	DINPERKIM
PODOSUGIH	Saluran Drainage	8.494.000	849.400	7.644.600	DINPERKIM
PODOSUGIH	Saluran Drainage	45.860.000	4.586.000	41.274.000	DINPERKIM
PODOSUGIH	Saluran Drainage	26.064.000	2.606.400	23.457.600	DINPERKIM
PODOSUGIH	Saluran Drainage	17.581.000	1.758.100	15.822.900	DINPERKIM
TIRTO	Jalan Desa	468.223.250	468.223.250	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	16.087.000	16.087.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	74.642.000	74.642.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	12.650.000	12.650.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	4.807.000	4.807.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	127.926.250	41.264.125	86.662.125	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	6.957.000	6.957.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	86.370.170	25.715.417	60.654.753	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	6.225.000	6.225.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	21.650.000	21.650.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	49.355.000	49.355.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	56.381.410	17.023.141	39.358.269	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	98.650.000	98.650.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	3.795.000	3.795.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	6.325.000	6.325.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	10.000.000	10.000.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	181.935.000	181.935.000	-	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	65.719.650	16.696.965	49.022.685	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	438.761.215	121.540.947	317.220.268	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	38.099.000	25.531.400	12.567.600	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	225.420.250	148.220.446	77.199.804	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	5.600.000	5.600.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	188.442.085	188.442.085	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	19.816.000	19.816.000	-	DINPERKIM

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
BENDAN KERGON	Jalan Desa	8.482.500	8.482.500	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	25.687.500	25.687.500	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	16.875.000	16.875.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	2.585.000	2.585.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	93.907.559	19.347.401	74.560.158	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	187.850.000	44.530.000	143.320.000	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	20.625.000	20.625.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	18.870.000	18.870.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	164.136.250	164.136.250	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	53.625.000	53.625.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	312.957.000	312.957.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	23.100.000	23.100.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	11.000.000	11.000.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	24.750.000	24.750.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	17.325.000	17.325.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	17.000.000	17.000.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	3.517.500	3.517.500	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	6.320.000	6.320.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	2.835.000	2.835.000	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	167.053.477	167.053.477	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	114.524.000	22.760.900	91.763.100	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	6.187.500	6.187.500	-	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	127.208.575	22.620.858	104.587.717	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	112.639.580	83.263.058	29.376.522	DINPERKIM
BENDAN KERGON	Jalan Desa	131.300.000	131.300.000	-	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	6.000.000	6.000.000	-	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	7.000.000	7.000.000	-	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	7.000.000	7.000.000	-	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	6.000.000	6.000.000	-	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	6.500.000	6.500.000	-	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	7.500.000	7.500.000	-	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	8.500.000	8.500.000	-	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	7.000.000	7.000.000	-	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	150.116.250	150.116.250	-	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	187.852.030	117.719.503	70.132.527	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	100.141.075	45.274.870	54.866.205	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Jalan Desa	51.315.000	11.431.500	39.883.500	DINPERKIM
PASIRKRATONKRAMAT	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	622.923.390	28.279.008	594.644.382	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	20.000.000	12.800.000	7.200.000	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	60.428.220	17.202.822	43.225.398	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	16.485.000	16.485.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	30.765.000	30.765.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	38.825.000	38.825.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	42.000.000	42.000.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	79.380.000	79.380.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	81.278.875	51.944.576	29.334.299	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	96.000.000	96.000.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	129.922.000	129.922.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	188.805.000	188.805.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	200.122.430	119.856.623	80.265.807	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	460.002.595	284.065.020	175.937.575	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	500.731.430	449.999.886	50.731.544	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	592.640.030	453.301.103	139.338.927	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	611.075.030	451.195.583	159.879.447	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	3.750.000	3.750.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	10.500.000	10.500.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	14.625.000	14.625.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	55.000.000	55.000.000	-	DINPERKIM

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
PRINGREJO	Jalan Desa	75.000.000	75.000.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	75.000.000	75.000.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	115.786.541	74.578.654	41.207.887	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	120.937.500	120.937.500	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	195.549.472	69.644.447	125.905.025	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	196.070.030	66.857.003	129.213.027	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	364.185.030	205.168.503	159.016.527	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	10.000.000	3.400.000	6.600.000	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	25.600.000	25.600.000	-	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	250.827.060	162.355.206	88.471.854	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	399.438.028	151.852.503	247.585.525	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	238.973.485	156.700.001	82.273.484	DINPERKIM
PRINGREJO	Saluran Drainage	104.000.000	20.800.000	83.200.000	DINPERKIM
KAUMAN	Jalan Desa	280.462.645	144.700.485	135.762.160	DINPERKIM
KAUMAN	Jalan Desa	76.730.000	76.730.000	-	DINPERKIM
KAUMAN	Jalan Desa	112.806.000	112.806.000	-	DINPERKIM
PONCOL	Jalan Desa	30.490.300	30.490.300	-	DINPERKIM
PONCOL	Saluran Drainage	44.558.000	4.455.800	40.102.200	DINPERKIM
PONCOL	Saluran Drainage	74.860.000	7.486.000	67.374.000	DINPERKIM
PONCOL	Saluran Drainage	31.122.000	3.112.200	28.009.800	DINPERKIM
KLEGO	Jalan Desa	63.590.000		63.590.000	DINPERKIM
KLEGO	Jalan Desa	20.550.000		20.550.000	DINPERKIM
KLEGO	Jalan Desa	494.038.013	430.317.290	63.720.723	DINPERKIM
KLEGO	Jalan Desa	91.648.661	71.489.866	20.158.795	DINPERKIM
KLEGO	Jalan Desa	242.144.007	111.404.165	130.739.842	DINPERKIM
KLEGO	Bangunan Pembawa Air Kotor	34.534.000	863.350	33.670.650	DINPERKIM
KLEGO	Bangunan Pembawa Air Kotor	38.931.000	973.275	37.957.725	DINPERKIM
KLEGO	Bangunan Pembawa Air Kotor	9.707.000	242.675	9.464.325	DINPERKIM
GAMER	Saluran Drainage	143.241.000	14.324.100	128.916.900	DINPERKIM
GAMER	Jalan Desa	165.485.000	165.485.000	-	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	123.570.000	80.774.100	42.795.900	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	88.898.824	54.859.764	34.039.060	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	22.500.000	22.500.000	-	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	250.000.000	250.000.000	-	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	250.000.000	250.000.000	-	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	233.884.645	158.388.465	75.496.180	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	112.500.000	112.500.000	-	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	471.968.855	362.196.886	109.771.969	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	249.809.000	199.961.800	49.847.200	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	115.237.645	44.887.305	70.350.340	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	646.460.000	379.292.000	267.168.000	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	400.000.000	400.000.000	-	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	560.909.635	512.181.927	48.727.708	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	225.000.000	225.000.000	-	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	125.000.000	125.000.000	-	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	435.689.000	399.275.600	36.413.400	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	702.862.000	640.572.400	62.289.600	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	375.000.000	375.000.000	-	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	243.089.300	218.617.860	24.471.440	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	375.000.000	375.000.000	-	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	143.650.000	143.650.000	-	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	84.305.300	58.307.700	25.997.600	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	50.000.000	50.000.000	-	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	6.000.000	6.000.000	-	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	90.000.000	90.000.000	-	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	275.440.306	206.989.906	68.450.400	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	15.000.000	15.000.000	-	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	60.000.000	60.000.000	-	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	247.832.730	92.283.273	155.549.457	DINPERKIM

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
SETONO	Jalan Desa	64.856.000	38.885.600	25.970.400	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	48.000.000	48.000.000	-	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	80.000.000	80.000.000	-	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	90.258.000	54.025.800	36.232.200	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	30.000.000	30.000.000	-	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	229.510.407	27.001.041	202.509.366	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	62.500.000	62.500.000	-	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	12.000.000	12.000.000	-	DINPERKIM
SETONO	Saluran Drainage	372.191.154	57.219.116	314.972.038	DINPERKIM
KALIBAROS	Jalan Desa	138.011.000	67.451.000	70.560.000	DINPERKIM
KALIBAROS	Jalan Desa	162.588.000	162.588.000	-	DINPERKIM
KALIBAROS	Jalan Desa	49.850.000	49.850.000	-	DINPERKIM
KALIBAROS	Saluran Drainage	30.810.000	3.081.000	27.729.000	DINPERKIM
KALIBAROS	Saluran Drainage	21.553.000	2.155.300	19.397.700	DINPERKIM
JUMLAH		37.482.271.922	25.516.302.299	11.965.969.623	

LAMPIRAN 34
BELANJA TIDAK DIKAPITALISASI ASET TETAP LAINNYA

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB E				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
SDN Bendan 03	1.020.000			1.020.000	Pengadaan 6 bola pimpong, 1 buah bola volley,sepak dan takraw
SDN Podosugih 03	300.000	300.000			1 buah ring basket tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Kebulen	1.287.000	1.287.000			Pengadaan 13 buku ilmu matematika yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Landungsari 04	4.197.000	4.197.000			Pengadaan 47 buku ilmu pengetahuan umum yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kandang Panjang 02	1.000.000	1.000.000			Pengadaan 12 buku ilmu pengetahuan umum yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kandang Panjang 10	1.400.000			1.400.000	Pengadaan 1 buah aplikasi CD pembelajaran yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Duwet	8.837.400	8.837.400			Pengadaan 467 buku ilmu pengetahuan umum yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMP N 01	1.600.000	1.600.000			Pengadaan 30 buku pengetahuan umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMP N 04	5.350.000			5.350.000	pengadaan 1 buah bola volly pantai, 4 buah bola volley, 1 nett volly, 1 buah nett tennis meja, 4 buah skipping, 4 buah bola sepak, 4 buah bed tennis meja (BM tdk kapitalisasi)
SMP N 07	327.000	327.000			Pengadaan 4 buku pengetahuan umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMP N 10	1.705.540			1.705.540	Pengadaan 2 buah bola volly, 1buah bola basket, 3 buah bola kaki(BM tdk kapitalisasi)
Kel. Medono	175.000	175.000			Pengadaan 2 buah Buku Hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Klego	1.784.750	1.784.750			Pengadaan 39 Buku umum lain lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Gamer	1.680.000	1.680.000			Pengadaan 26 buah Buku Ilmu Pengetahuan Umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
kec. Pekalongan Utara	996.500	996.500			Pengadaan 12 buah Buku Ilmu Pengetahuan Umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Krapyak	3.000.000	3.000.000			Pengadaan 48 buah Buku Umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Kandang Panjang	1.800.000	1.800.000			Pengadaan 27 Buku umum lain lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Panjang Wetan	980.000	980.000			Pengadaan 19 buah Buku Ilmu Pengetahuan Umum, 2 buah buku Hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Degayu	1.005.850	1.005.850			Pengadaan 12 buah Buku Ilmu Pengetahuan Umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Panjang Baru	257.000	257.000			Pengadaan 1 buah Buku Agama Islam, 2 buah buku Hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kec. Pekalongan Selatan	235.000	235.000			Pengadaan 8 buah buku hukum yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Buaran Kradenan	1.698.000	1.698.000			Pengadaan 18 buku Agama islam, 13 buku ilmu pengetahuan umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Jenggot	260.000	260.000			Pengadaan 3 buku Hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Kuripan Yosorejo	2.350.000	2.350.000			Pengadaan 16 buku Hukumvdan 20 buku ilmu pengetahuan praktis lain-lain yang tidak memenuhi batas minimal aset tetap
JUMLAH	43.246.040	33.770.500	-	9.475.540	

LAMPIRAN 35
TANAH EKS BENGKOK YANG TERKENA ROB

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Penggunaan	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Bandengan	Bandengan	30/12/1955	3.488	Bengkok Lurah	229.336.000	Leter C No. 1 Persil 11/II Luas 3.488 M2
		Bandengan	31/12/1955	6.725	Bengkok sekretaris	442.168.750	Leter C No. 2 Persil 15 / II Luas 6.725 M2
		Bandengan	31/12/1955	3.388	Bengkok Kesra	222.524.586	Leter C No. 9 Persil 16 / II Luas 3.388 M2
		Bandengan	31/12/1955	8.400	Bengkok K Umum	552.300.000	Leter C No. 9 Persil 26 / III Luas 4.150 M2
		Bandengan	31/12/1955	4.650	Bengkok Kasi Pemerintahan	305.737.500	Leter C No. 7 Persil 20 / II Luas 8.400 M2
		Bandengan	31/12/1955	4.650	Bengkok kasi Pembangunan	305.737.500	Leter C No. 5 Persil 35 / I Luas 4.650 M2
		Bandengan	31/12/1955	4.613	Bengkok Keuangan	303.304.750	Leter C No. 6 Persil 25 / III Luas 4.613 M2
		Bandengan	31/12/1955	5.000	Bengkok Umum	328.750.000	Leter C No. 10 Persil 33 / I Luas 5.000 M2
		Bandengan	31/12/1955	8.600	Bengkok Kadus I	565.450.000	Leter C No. 3 Persil 19 / II Luas 8.600 M2
		Bandengan	31/12/1955	5.900	Bengkok Kadus II	387.925.000	Leter C No. 4 Persil 24 / III Luas 5.900 M2
		Bandengan	31/12/1955	13.100	Bengkok Lurah	861.325.000	Leter C No. 1 Persil 23 / II Luas 13.100 M2
		Bandengan	31/12/1955	16.350	Bengkok Lurah	1.075.012.500	Leter C No. 1 Persil 18 / II Luas 16.350 M2
		Bandengan	31/12/1955	10.000	Bengkok Lurah	657.500.000	Leter C No. 1 Persil 14 / II Luas 10.000 M2
		Bandengan	31/12/1955	16.013	Bengkok Lurah	1.052.854.750	Leter C No. 1 Persil 34 / II Luas 16.013 M2
		Bandengan	31/12/1955	5.150	Bengkok Lurah	362.282.500	Leter C No. 1 Persil 6 / V Luas 5.150 M2
		Bandengan	31/12/1955	5.000	Pertanian	50.000.000	Leter C No. 12 Persil 33 / I Luas 5.000 M2
		Bandengan	31/12/1955	4.150	Pertanian	272.572.914	Leter C No. 9 Persil No. 26/III luas 4.150 M2
2	Podosugih	Bandengan	04/06/1905	3.740	Pertanian	245.905.000	
		Bandengan	04/06/1905	4.800	Pertanian	315.600.000	
		Bandengan	04/06/1905	3.120	Pertanian	205.140.000	
		Bandengan	04/06/1905	3.500	Pertanian	256.425.000	
		Bandengan	14/06/1905	2.680	Pertanian	176.210.000	
3	Medono	Kd. Panjang	23/05/1905	2.745	Sawah	347.242.500	
		Kd. Panjang	23/05/1905	3.255	Sawah	411.757.500	
		Kd. Panjang	23/05/1905	5.871	Sawah	742.681.500	
		Kd. Panjang	23/05/1905	5.724	Sawah	724.086.000	
		Kd. Panjang	23/05/1905	4.277	Sawah	541.040.500	
		Kd. Panjang	23/05/1905	5.299	Sawah	670.323.500	
		Kd. Panjang	23/05/1905	3.915	Sawah	495.247.500	
		Kd. Panjang	23/05/1905	569	Sawah	71.978.500	
		Medono	23/05/1905	4.121	Eks Bengkok	521.306.500	
4	Pasirkatonkramat	Pasirsari	22/06/1905	345	bengkok Carik	474.743.750	C92 SP Luas : 3.450 m2
		Pasirsari	22/06/1905	752	bengkok Carik	1.098.484.000	C41 SP Luas : 7.520 m2
		Pasirsari	22/06/1905	575	bengkok Kabayan 1	839.931.250	C70 SP Luas : 5.750 m2
		Pasirsari	22/06/1905	1.844	bengkok Carik	269.362.300	C74 SP Luas : 1.844 m2
		Pasirsari	22/06/1905	155	bengkok Kabayan 2	226.416.250	C121 SP Luas : 1.550 m2
		Pasirsari	22/06/1905	975	bengkok Kabayan	142.423.125	C25 SP Luas : 975 m2
		Pasirsari	22/06/1905	1.125	bengkok Kabayan	164.334.375	C22 SP Luas : 1.125 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.316	bengkok Kabayan	338.309.700	C20 SP III Luas : 2.316 m2
		Pasirsari	22/06/1905	12	bengkok Lebe	175.290.000	C21 SP Luas : 1.200 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.326	bengkok Lurah	338.894.000	C61 SK Luas : 2.326 m2
		Pasirsari	22/06/1905	8413	bengkok Lurah	1.228.928.975	C18 SK III Luas : 8.413 m2
		Pasirsari	22/06/1905	522	bengkok Carik	76.251.150	C 50 SP Luas : 522 m2
		Pasirsari	22/06/1905	7.550	bengkok Lurah	1.102.866.250	C95 SP Luas : 7.550 m2
		Pasirsari	22/06/1905	3.500	bengkok Lurah	511.262.500	C42 SK Luas : 3.500 m2

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Penggunaan	Nilai Perolehan	Keterangan
		Pasirsari	22/06/1905	2763	bengkok Kabayan 2	403.605.225	C45 SP Luas : 2.763 m2
		Pasirsari	22/06/1905	828	bengkok Lebe	134.535.075	C24 SP Luas : 828 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.169	bengkok Lebe	316.836.675	C39 SP 2.169 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.550	bengkok Polisi 2	372.491.250	C35 SP Luas : 2.550 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.450	bengkok Polisi 2	357.883.750	C 34 SP Luas : 2.450 m2
		Pasirsari	22/06/1905	1.450	bengkok Kabayan 3	211.808.750	C43 SP Luas : 1.450 m2
		Pasirsari	22/06/1905	9400	bengkok Lurah	1.373.105.000	C36 SK III Luas : 9.400 m2
		Pasirsari	22/06/1905	988	bengkok Polisi 2	144.322.100	C46 SP Luas : 988 m2
		Pasirsari	22/06/1905	7.050	bengkok Lebe	1.029.828.750	C15 SP Luas : 7.050 m2
		Pasirsari	22/06/1905	6.194	bengkok Kabayan	904.788.550	C69 SP Luas : 6.194 m2
		Pasirsari	22/06/1905	8.120		1.186.129.000	C72 SP Luas : 8.120 m2
		Pasirsari	22/06/1905	3.900	bengkok Bau	569.692.500	C73 SP Luas : 3.900 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.556	bengkok Lebe	372.491.250	C75 SP Luas : 2.556 m2
		Pasirsari	22/06/1905	8.712	bengkok BAU	1.272.605.400	C62 SP Luas : 8.712 m2
		Pasirsari	22/06/1905	4400	bengkok Kabayan I	636.302.700	C91 SP Luas : 4400 m2
		Pasirsari	22/06/1905	7750	bengkok Polisi	1.132.081.250	C17 SP II Luas : 7.750 m2
		Pasirsari	22/06/1905	18900	bengkok Lurah	2.760.817.500	C12 SK 2 Luas : 18.900 m2
		Pasirsari	22/06/1905	7300	bengkok Carik	1.066.347.500	C14 SP Luas : 7.300 m2
		Pasirsari	22/06/1905	4585	bengkok Kabayan 2	636.302.700	C94 SP Luas : 4585 m2
		Pasirsari	22/06/1905	450	bengkok Polisi 2	9.000.000	C47 SP Luas 450 m2
		Pasirsari	22/06/1905	403	bengkok Kabayan 3	8.060.000	C93 SP Luas : 4.175 m2
		Pasirsari	22/06/1905	400	bengkok Lebe	8.000.000	C49 SP Luas : 400 m2
		Pasirsari	22/06/1905	4.175	Benkok Polisi 1	83.500.000	Leter C 93 Persil SP Luas 4.175M2
		Jeruk Sari	07/06/1905	6.488	Sawah	819.272.016	leter C No. 1 Persil No. PS SK. 5/II Luas 6.488 M2
		Jeruk Sari	23/06/1905	4.800	Sawah	606.119.864	Leter C No. 3 Persil No. PS Sp.4/II Luas 4.800
		Sabuk Janur	30/06/1905	3.750	Sawah	473.531.144	Leter C No. 6 Persil No. PS Sp.2/II Luas 3.750 M2
		Sabuk Janur	30/06/1905	3.513	Sawah	443.603.976	Leter C No. 5 persil No. PS Sp.3/II Luas 3.513 M2
		Pasirsari	23/06/1905	1.300	Pertanian	189.897.500	HP No.9
		Pasirsari	23/06/1905	1.475	Pertanian	215.460.625	HP No. 10
		Pasirsari	13/06/1905	1055	Pertanian	204.505.000	HP No.11
		Pasirsari	23/06/1905	730	Pertanian	106.634.750	HP No. 7
		Pasirsari	23/06/1905	755	Pertanian	110.286.625	HP No. 8
		Kandang Panjang	25/06/1905	2.088	Pertanian	90.000.000	Leter C No 41 persil No. 25b/ S IV Luas 2.088 M2
		Kandang Panjang	25/06/1905	1.931	Pertanian	90.000.000	Leter C 82 Persil Ps 25 b / S IV Luas 1.931 M2
		Kandang Panjang	25/06/1905	3.094	Pertanian	100.000.000	Leter C49 Persil 25 b /S III Luas 3.094 M2
		Kandang Panjang	25/06/1905	2.831	Pertanian	90.000.000	Leter C 111 Persil 25a /S III Luas 2.831 M2
		Jln AMD Kramatsari	13/06/1905	2.450	Pertanian	191.489.362	Leter C486 Persil 24/SII Luas 2.450 M2
		Jln AMD Kramatsari	26/06/1905	2.250	Pertanian	175.857.577	Leter C487 Persil 24/SII Luas 2.250 M2
		Jln AMD Kramatsari	26/06/1905	1.515	Pertanian	118.410.768	Leter C491 persil 14/S II Luas 2.050 M2
		Pasirsari	22/06/1905	1.785	Bengkok Kepala Kelurahan Kramatsari	260.743.875	
5	Degayu	Segendong	22/06/1905	6.500	Pertanian	91.000.000	bengkok kepala desa GS C1 Persil 56 /S1
		Sepondang	22/06/1905	5.580	Pertanian	78.120.000	bengkok kepala desa GS C1 Persil 57/S I
		Layatan	22/06/1905	10.545	Pertanian	105.450.000	bengkok kepala desa GS C1 Persil 28/S1
		Gili Gayu	22/06/1905	4.590	Pertanian	45.900.000	bengkok kepala desa GS C 1 Persil 53/SI
		Selele	22/06/1905	5.300	Pertanian	53.000.000	bengkok kepala desa GS C1 Persil 89/S II
		Sebayu	22/06/1905	2.885	Pertanian	40.390.000	bengkok kepala desa GS C 1 Persil 38/S 1

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Penggunaan	Nilai Perolehan	Keterangan
		Seresik	22/06/1905	3.780	Pertanian	37.800.000	bengkok kepala desa GS C1 Persil 69/S II
		Wongan Sumur	22/06/1905	1.500	Pertanian	15.000.000	bengkok sekretaris C 2/1 Persil 11/S II
		Wangan	22/06/1905	3.410	Pertanian	34.100.000	bengkok sekretaris G S C 2 Persil 12/S III
		Krowo	22/06/1905	1.800	Pertanian	25.200.000	bengkok sekretaris C 2/9 Persil 33/ S II
		Gili Kayu	22/06/1905	4.410	Pertanian	61.740.000	bengkok sekretaris C 2/4 Persil 56/ S I
		Bulan	22/06/1905	5.650	Pertanian	56.500.000	bengkok sekretaris C 2/5 Persil 94/ S II
		Selele	22/06/1905	1.650	Pertanian	16.500.000	bengkok sekretaris GS C2 Persil 96/ S II
		Selele	22/06/1905	1.815	Pertanian	18.150.000	bengkok Bau I C 3/1 Persil 37/S II
		Bulak	22/06/1905	1.350	Pertanian	13.500.000	bengkok Bau I C 3/3 Persil 97/S II
		Segedik	22/06/1905	3.800	Pertanian	38.000.000	bengkok Bau II C 4/1 Persil 20/S III
		Gesbel	22/06/1905	4.150	Pertanian	41.500.000	bengkok Bau II C 5/1 Persil 34/S II
		Degayu	22/06/1905	6.500	Pertanian	91.000.000	bengkok Bau III C 5/2 Persil 83/ S II
		rw. Bund	22/06/1905	3.660	Pertanian	36.600.000	bengkok Bau III C 5/3 Persil 93/S II
		Gempol	22/06/1905	3.490	Pertanian	48.860.000	bengkok Bau II C 6/1 Persil 13/ S III
		Tugus	22/06/1905	2.665	Pertanian	26.650.000	bengkok Bau III GS C 6 Persil 61/ S II
		Gili Gayu	22/06/1905	7.000	Pertanian	70.000.000	bengkok Bau IV GS C 7 Persil 31b/S II
		Congkeng	22/06/1905	1.270	Pertanian	17.780.000	bengkok Polisi I C 8/1 Persil 8/S I
		Wangan Sumur	22/06/1905	2.045	Pertanian	28.630.000	bengkok Polisi I C 8/2 Persil 10/S II
		Ketapang	22/06/1905	1.680	Pertanian	16.800.000	bengkok Polisi I C 8 Persil 62a S II
		Rowo	22/06/1905	1.770	Pertanian	17.700.000	bengkok Poldes II GS C 9 Persil 25/ S IV
		Selele	22/06/1905	5.740	Pertanian	57.400.000	bengkok Poldes II C 9/3 Persil 101/S II
		Degayu	22/06/1905	2.700	Pertanian	27.000.000	bengkok Poldes II C 9/4 Persil 38/S II
		Bulak	22/06/1905	2.530	Pertanian	25.300.000	bengkok Poldes III C 10/1 Persil 52/S II
		Gepol	22/06/1905	4.065	Pertanian	56.910.000	bengkok Poldes III GS C 10 Persil 58/S II
		Goyangan	22/06/1905	1.010	Pertanian	14.140.000	bengkok Poldes III C 10/3 Persil 92/ S I
		bengk. Gr	22/06/1905	2.490	Pertanian	34.860.000	bengkok Poldes IV C 11/1 Persil 9/ S II
		Kebon	22/06/1905	2680	Pertanian	37.520.000	bengkok Poldes IV C 11/2 Persil 29/ S I
		Degayu	22/06/1905	815	Pertanian	11.410.000	bengkok Poldes IV GS C 11 Persil 36/ S I
		Degayu	22/06/1905	1.110	Pertanian	11.100.000	bengkok Poldes IV C11/4 Persil 78 / S II
		Ngetrem	22/06/1905	1.455	Pertanian	20.370.000	bengkok Poldes IV C 11/5 Persil 82/S II
		Ngetrem	22/06/1905	1.810	Pertanian	18.100.000	bengkok Poldes IV C 11/6 Persil 103/S II
		Krandu	22/06/1905	2.430	Pertanian	155.520.000	bengkok Kabayan I C 12/1 Persil 56/S I
		Kebon	22/06/1905	2770	Pertanian	38.780.000	bengkok Kabayan I C 12/2 Persil 63/ S I
		Kebon	22/06/1905	305	Pertanian	4.270.000	bengkok Kabayan I C 12/4 Persil 66/ S I
		Segendong	22/06/1905	770	Pertanian	7.700.000	bengkok Kabayan I C 12/ Persil 77/ S I
		Segendong	22/06/1905	1580	Pertanian	15.800.000	bengkok Kabayan I C 12/4 Persil 88 / S I
		Dadap	22/06/1905	175	Pertanian	1.750.000	bengkok Kabayan II C 12/1 Persil 89 / S II
		Serandong	22/06/1905	1200	Pertanian	12.000.000	bengkok Kabayan II C 13/ 1 Persil 41/ S I
		Sebaya	22/06/1905	915	Pertanian	9.150.000	bengkok kabayan II C 13/2 Persil 52/ S I
		Kebon	22/06/1905	3.700	Pertanian	51.800.000	bengkok kabayan II C 13/4 Persil 60 / S II
		Selele	22/06/1905	6.400	Pertanian	64.000.000	bengkok Lebe II C 14 /1 Persil 95/S III
		Gili Gayu	22/06/1905	3.250	Pertanian	45.500.000	bengkok Lebe II C 15/1 Persil 55/S I
		Bendo	22/06/1905	2.500	Pertanian	25.000.000	bondo Deso C 1/16/1 Persil 1/D III
		Bendo	22/06/1905	59.450	Pertanian	594.500.000	bondo deso C 1/17/2 Persil 1 /D III
		Bk. Guru	22/06/1905	2.050	Pertanian	20.500.000	Bengkok D.H.D C 1/17/3 Persil 39/ S 1
		Bk. Guru	22/06/1905	8.300	Pertanian	83.000.000	Bengkok D.H.D C 1/17/2 Persil 31a/S I
		Bk. Guru	22/06/1905	3.150	Pertanian	31.500.000	bengkok D.H.D C1/17/3 Persil 31b / S II
		Sekedung	22/06/1905	10.000	Pertanian	100.000.000	bengkok Pemb Desa C 1/16/1 Persil 19/ D IV
6	Kandang Panjang	Kandang Panjang	08/06/1905	7.488	Pertanian	947.232.000	Persil/klas SP 86 Luas 7.488 M2
		Kandang Panjang	08/06/1905	7.963	Pertanian	1.007.319.500	Persil / Klas SP 85 Luas 7.963 M2

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Penggunaan	Nilai Perolehan	Keterangan
		Kandang Panjang	08/06/1905	5.188	Pertanian	656.282.000	Persil/ kalas SP.53 Luas 5.188 M2
		Kandang Panjang	08/06/1905	3.100	Pertanian	380.765.000	Persil/ Klas tanah SP 121 Luas 3.100 M2
		Kandang Panjang	08/06/1905	3800	Pertanian	480.700.000	Persil / Klas Tanah SP.52 Luas 3.800 M2
7	Panjang Wetan	Bandengan	26/06/1905	8350	Pertanian	679.387.500	HP No. 5 asal Leter C 360 Persil 22/III Luas 8.235 M2
		Bandengan	26/06/1905	3780	Pertanian	75.600.000	HP No. 04
		Bandengan	26/06/1905	2970	Pertanian	245.025.000	
		Bandengan	26/06/1905	2.665	Pertanian	218.625.000	HP No. 6
8	Padukuhan Kraton	Pabean	23/04/1905	2.725	Sawah	116.493.750	Leter C No. 2 ,Persil No. 8 / S.IV ,Luas 2.725 M2
		Pabean	23/04/1905	1750	Sawah	74.812.500	Leter C No. 4 ,Persil No. 5 / D.IV ,Luas 1.750 M2
		Pabean	23/04/1905	538	Sawah	22.999.500	Leter C No. 4 ,Persil No. 23 / S.II ,Luas 538 M2
		Pabean	23/04/1905	1.533	Sawah	65.535.750	Leter C No. 4 ,Persil No. 25 / S.II ,Luas 1.533 M2
		Pabean	23/04/1905	1.600	Sawah	68.400.000	Leter C No. 4 ,Persil No. 32 / S.II ,Luas 1.600 M2
		Pabean	23/04/1905	1.600	Sawah	68.400.000	Leter C No. 5 ,Persil No. 11 / S.IV ,Luas 1.600 M2
		Pabean	23/04/1905	1.444	Sawah	61.731.000	Leter C No. 7 ,Persil No.10 / S.IV ,Luas 1.444 M2
		Pabean	23/04/1905	1.419	Sawah	60.662.250	Leter C No. 8 ,Persil No. 12 / S.IV ,Luas 1.419 M2
		Pabean	23/04/1905	1.594	Sawah	68.143.500	Leter C No. 8 ,Persil No. 26 / S.II ,Luas 1.594 M2
		Pabean	23/04/1905	2.125	Sawah	90.843.750	Leter C No. 8 ,Persil No. 31 / S.II ,Luas 2.125 M2
		Pabean	23/04/1905	1.457	Sawah	10.417.550	Leter C No. 6 ,Persil No. 9 / S.IV ,Luas 1.457 M2
		Pabean	23/04/1905	1.800	Sawah	709.200.000	Leter C No. 9 ,Persil No. 49 / D.II ,Luas 1.800 M2 sisa (tukar guling)
		Pabean	23/04/1905	12.570	Sawah	5.348.843.000	Leter C No. 9 ,Persil No. 50 / S.II ,Luas 12.570 (sisa tukar guling)
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.300	Pertanian	408.200.000	HP. 08
		Kraton Kidul	26/06/1905	1360	Pertanian	427.040.000	HP No. 9
		Kraton Kidul	26/06/1905	99	Pertanian	31.086.000	HP. No 10
		Kraton Kidul	26/06/1905	99	Pertanian	31.086.000	HP No. 11
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.580	Pertanian	496.120.000	HP No.14
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.580	Pertanian	496.120.000	HP No. 5
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.575	Pertanian	494.550.000	HP No. 16
		Kraton Kidul	26/06/1905	2365	Pertanian	742.610.000	HP No.17
		Kraton Kidul	26/06/1905	865	Pertanian	271.610.000	HP No. 19
		Kraton Kidul	26/06/1905	920	Pertanian	288.880.000	HP No. 20
		Kraton Kidul	26/06/1905	900	Pertanian	282.600.000	HP No. 21
		Kraton Kidul	26/06/1905	1000	Pertanian	314.000.000	HP No. 22
		Kraton Kidul	26/06/1905	900	Pertanian	282.600.000	HP No.23
		Kraton Kidul	26/06/1905	960	Pertanian	301.440.000	HP No. 24
		Kraton Kidul	26/06/1905	1285	Pertanian	403.490.000	HP No.25
		Kraton Kidul	26/06/1905	235	Pertanian	73.790.000	HP No. 29
		Kd. Panjang	03/06/1905	1380	Sawah Padi	174.570.000	
		Kd. Panjang	03/06/1905	970	Sawah Padi	122.705.000	
		Kd. Panjang	03/06/1905	2520	Sawah Padi	318.780.000	
		Kd. Panjang	03/06/1905	450	Sawah Padi	56.925.000	
		Kd. Panjang	03/06/1905	113	Sawah Padi	14.294.500	
		Kd. Panjang	03/06/1905	925	Sawah Padi	117.012.500	
		Kd. Panjang	03/06/1905	1.965	Sawah Padi	248.572.500	

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Penggunaan	Nilai Perolehan	Keterangan
		Kd. Panjang	03/06/1905	4.060	Sawah Padi	513.590.000	
		Pabean	23/04/1905	445	Sawah	190.238.000	Leter C No. 1 Persil No. 34
		Pabean	23/04/1905	725	Sawah	30.993.750	Leter C No. 1 Persil No. 35
		Pabean	23/04/1905	52	Sawah	222.300.000	Leter C No. 1 Persil No. 36
		Pabean	23/04/1905	4.369	Sawah	186.774.750	Leter C No. 2 Persil No. 37
		Pabean	23/04/1905	235	Sawah	100.035.000	Leter C No. 3 Persil No. 4
		Pabean	23/04/1905	4.344	Sawah	185.706.000	Leter C No. 3 Persil No. 38
		Pabean	23/04/1905	17	Sawah	72.675.000	Leter C No. 5 Persil No. 27
		Pabean	23/04/1905	18	Sawah	76.950.000	Leter C No. 5 Persil No. 30
		Pabean	23/04/1905	1.625	Sawah	69.468.750	Leter C No. 6 Persil No. 28
		Pabean	23/04/1905	165	Sawah	70.537.500	Leter C No. 6 Persil No. 29
		Pabean	23/04/1905	750	Sawah	32.062.500	Leter C No. 7 Persil No. 22
		Pabean	23/04/1905	1.682	Sawah	71.905.500	Leter C No. 7 Persil No. 24
		Pabean	23/04/1905	1.782	Sawah	76.180.500	Leter C No. 7 Persil No. 33
		Pabean	23/04/1905	4.413	Sawah	188.656.000	Leter C No. 1 Persil No. 7
		Kd. Panjang	07/06/1905	31	Pertanian	392.150.000	Leter C No. 297 Persil 5b./S.III
		Kd. Panjang	07/06/1905	7.195	Eks Bengkok	910.167.500	Leter C 68 Persil 28/S.III
		Panjang Wetan	07/06/1905	3.715	Pertanian	555.392.500	Leter C.65 Persil C.2 S.III
		Kraton Kidul	26/06/1905	135	Persawahan	423.900.000	HP No. 12
		Kraton Kidul	26/06/1905	1315	Pertanian	412.910.000	HP No. 13
		Kraton Kidul	26/06/1905	195	Pertanian	61.230.000	HP No. 18
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.305	Pertanian	409.770.000	HP No.26
		Kraton Kidul	26/06/1905	112	Pertanian	351.680.000	HP No. 27
		Kraton Kidul	26/06/1905	145	Pertanian	45.530.000	HP No. 28
	Kalibaros	Degayu	12/06/1905	8020	Tanah Sawah	176.440.000	bengkok Kakel
	Krapyak	Krapyak lor	13/05/1905	2900	Sawah	133.400.000	bengkok Bau II Leter C 4 Persil SP 48/S II luas 2.900 M2
		Krapyak lor	13/05/1905	5950	Sawah	2.757.700.000	bengkok Polisi IV Leter 8 Pesil SP 54/S III Luas 5.950 M2
	JUMLAH					69.238.164.682	